



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2022





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022**



H MUHAMMAD ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH MH
WALIKOTA BANJARBARU



WARTONO
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas masing-masing dalam membangun daerah bersama masyarakat, termasuk salah satunya dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

LPPD tersebut merupakan salah satu kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Laporan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banjarbaru Tahun 2022 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang sempurna dan laporan ini akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan evaluasi pula terhadap penyelenggaraan pemerintahan kami.

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjarbaru dan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua serta guna penyempurnaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, Maret 2023



WALIKOTA BANJARBARU

M. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., MH



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

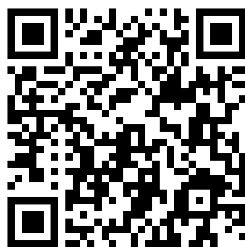
Jl. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/fax: (0511) 4780069 Banjarbaru
Website: <https://Inspektorat.banjarbaru.go.id> / Email : inspektorat@banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 29 Maret 2023

Nomor	: 700/231/2023/INSPEKTORAT	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Sekretaris Daerah
Perihal	: Penyampaian Pernyataan Telah	Kota Banjarbaru
	Direviu Laporan Penyelenggaraan	Cq. Bagian Tata Pemerintahan
	Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru	di –
	Tahun 2022	Banjarbaru

Berdasar Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Nomor : 700/073-ST/2023/INSPEKTORAT tanggal 28 Februari 2023, Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah melakukan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Laporan Hasil Reviu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor : 700/075-LHR/Inspektorat/2023 tanggal 29 Maret 2023. Bersama surat ini kami sampaikan Surat Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur Kota Banjarbaru

Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700615 199003 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Jln. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax: (0511) 4780069 Banjarbaru
Website: <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/> E-mail: Inspektorat@banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Banjarbaru.

Reviu bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Banjarbaru, 29 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Inspektur Kota Banjarbaru

Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700615 199003 1 006

KATA PENGANTAR**DAFTAR ISI**

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.1.1 Penjelasan Umum	2
1.1.2 Perencanaan Pembangunan daerah	13
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	13
b. Visi dan Misi	50
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD.....	59
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD.....	71
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	271
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	272
2.1 Capaian Kinerja Makro	273
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	273
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	273
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	392
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	433
2.3.1 Analis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru 2022.....	433
BAB III TUGAS PEMBANTUAN	618
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	619
4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	619
4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	622
4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM	630
4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	634
4.5 BIDANG URUSAN SOSIAL.....	637
4.6 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	641
BAB V PENUTUP	646



BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 69 ayat 1 dan 2 bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Pasal 70 ayat 3 dan 4 menyatakan Bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Bab I. Pendahuluan, Bab II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab III. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab IV. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Bab V. Penutup.

Sistematika penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

Kota Banjarbaru dulunya merupakan kota administratif yang berada dalam wilayah Kabupaten Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Kemudian setelah melakukan pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3822) pada tanggal 20 April 1999, Kota Banjarbaru dibentuk dan berdiri menjadi wilayah otonom sendiri yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68), pada Pasal 4 bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.

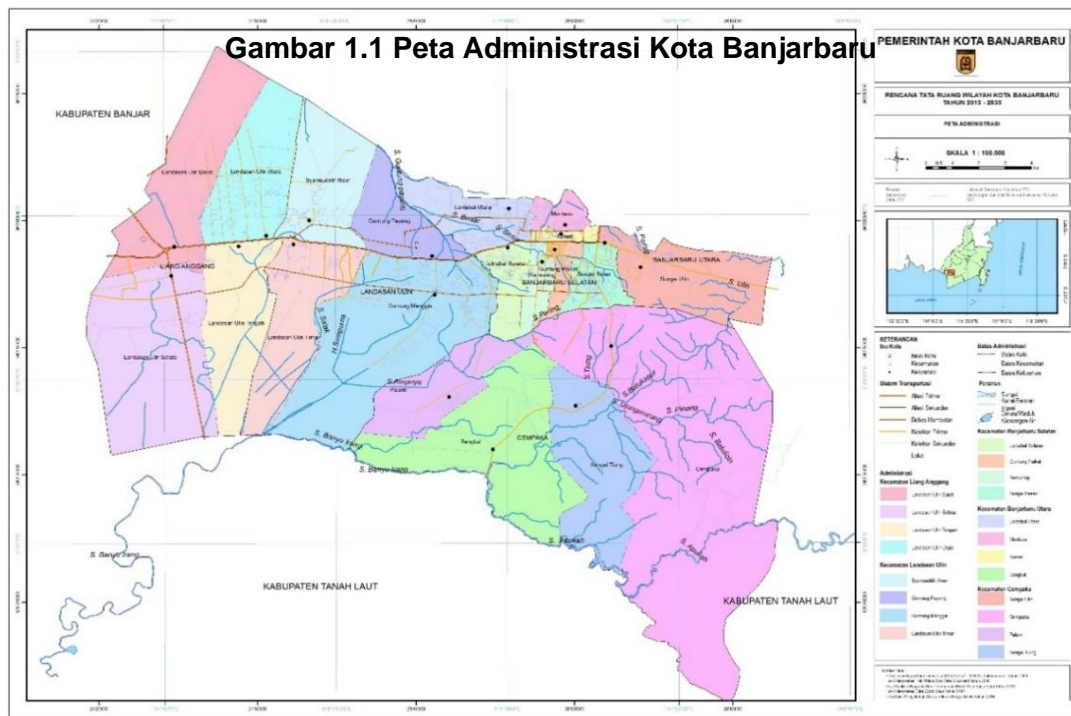
Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur dengan batas wilayah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten banjar
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dari sisi ketinggian Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m sebanyak 33,49%, 7-25 m sebanyak 48,46%, 25-100 m sebanyak 15,15%, 100-250 m sebanyak 2,55% dan 250-500 m sebanyak 0,35%.

Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78

persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.



Dilihat dari posisi geografisnya, Kota Banjarbaru berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian regional, karena terletak pada pertemuan poros jalan utama di Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Barat-Timur, pada posisi ini Kota Banjarbaru menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Banjar dan 6 kabupaten lainnya.
2. Utara-Selatan, menjadi penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
3. Menjadi perlintasan jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru Semester II tahun 2022 berjumlah **268.292** jiwa yang terdiri dari **134.690** jiwa penduduk laki-laki dan **133.602** jiwa penduduk perempuan, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk

sebesar **79.671** jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar **37.070** jiwa.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 menurut jenis kelamin dan kepala keluarga dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis dan Kepala Keluarga Kota Banjarbaru
Tahun 2022

KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH	KEPALA KELUARGA
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
LANDASAN ULIN	40.163	39.508	79.671	25.495
Landasan Ulin Timur	9.313	9.227	18.540	6.059
Guntung Payung	4.249	4.137	8.386	2.684
Guntung Manggis	17.487	17.191	34.678	11.027
Syamsuddin Noor	9.114	8.953	18.067	5.725
CEMPAKA	18.728	18.342	37.070	12.078
Palam	2.896	2.822	5.718	1.843
Bangkal	2.567	2.534	5.101	1.634
Sungai Tiung	4.774	4.523	9.297	3.060
Cempaka	8.491	8.463	16.954	5.541
LIANG ANGGANG	23.974	23.424	47.398	14.872
Landasan Ulin Barat	3.557	3.469	7.026	2.279
Landasan Ulin Tengah	4.573	4.490	9.063	2.863
Landasan Ulin Utara	12.426	12.162	24.588	7.623
Landasan Ulin Selatan	3.418	3.303	6.721	2.107
BANJARBARU UTARA	27.982	28.466	56.448	18.055
Loktabat Utara	12.389	12.631	25.020	7.903
Mentaos	5.053	5.080	10.133	3.227
Komet	1.672	1.735	3.407	1.229



Sungai Ulin	8.868	9.020	17.888	5.696
BANJARBARU SELATAN	23.843	23.862	47.705	15.387
Loktabat Selatan	5.023	4.937	9.960	3.184
Kemuning	5.121	5.159	10.280	3.354
Guntung Paikat	4.441	4.452	8.893	2.831
Sungai Besar	9.258	9.314	18.572	6.018
JUMLAH	134.690	133.602	268.292	85.887
KEPADATAN PENDUDUK	723			
SEX RATIO	100.81			

Sumber : Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Data semester II Tahun 2022

Luas wilayah Kota Banjarbaru mencapai 305,242 km² yang secara administrasi Wilayah terdiri atas 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Adapun pembagian luas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS (KM ²)
1	Landasan Ulin	Landasan Ulin Timur	74,054
2	Liang Anggang	Landasan Ulin Barat	74,773
3	Cempaka	Sungai Tiung	114,543
4	Banjarbaru Utara	Komet	26,855
5	Banjarbaru Selatan	Loktabat Selatan	15,017
6	KOTA BANJARBARU	Mentaos	305,242

Sumber : BPS Kota Banjarbaru Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas otonomi daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Pada akhir tahun 2016 telah disahkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarbaru terakhir dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 7 (tujuh) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 5 (lima) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan dan 1 (satu) Rumah Sakit Daerah. Berikut adalah nama-nama perangkat daerah di Pemerintah Kota Banjarbaru :

Tabel 1.3

Nama - Nama Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

No.	Nama Perangkat Daerah
	Sekretariat
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
	Badan
1.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
4.	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Satuan Polisi Pamong Praja
1.	Rumah Sakit Daerah
2.	Rumah Sakit Daerah Idaman

	DINAS
1.	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata
2.	Dinas Pendidikan
3.	Dinas Kesehatan
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan Dan Permukiman
6.	Dinas Sosial
7.	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Dinas Perhubungan
9.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Disdukcapil
10.	Dinas Ketahanan Pangan , Pertanian Dan Perikanan
11.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika
14.	Dinas Koperasi Umkm Dan Tenaga Kerja
15.	Dinas Perdagangan
16.	Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Selain pembentukan perangkat daerah sebagai unit kerja, diperlukan juga sumber daya manusia untuk menjalankan roda pemerintahan tersebut. Adapun jumlah pegawai Negeri Sipil pada tahun 2022 adalah sebanyak 3.656 orang pegawai yang telah tersebar pada unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Berikut adalah data sebaran Pegawai Negeri sipil yang bertugas di Pemerintah Kota Banjarbaru.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1.	STAF AHLI WALIKOTA	3
2.	SEKRETARIAT DAERAH	113
3.	SEKRETARIAT DPRD	36
4.	INSPEKTORAT	69

5.	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN DAERAH	0
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	36
7.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	53
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26
9.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34
10.	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	52
11.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15
12.	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	31
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35
14.	DINAS SOSIAL	21
15.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	42
16.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	57
17.	DINAS PERHUBUNGAN	41
18.	DINAS PERDAGANGAN	51
19.	DINAS PENDIDIKAN	92
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	39
21.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62
22.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	41
23.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33
24.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	88
25.	DINAS KESEHATAN	85
26.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	31
27.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	41
28.	SATPOL PP	86
29.	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	22
30.	KELURAHAN SUNGAI ULIN	7
31.	KELURAHAN KOMET	9
32.	KELURAHAN MENTAOS	11
33.	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	8
34.	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	17
35.	KELURAHAN KEMUNING	10



36.	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	7
37.	KELURAHAN SUNGAI BESAR	11
38.	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	8
39.	KECAMATAN CEMPAKA	14
40.	KELURAHAN CEMPAKA	10
41.	KELURAHAN SUNGAI TIUNG	7
42.	KELURAHAN BANGKAL	8
43.	KELURAHAN PALAM	10
44.	KECAMATAN LANDASAN ULIN	19
45.	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	11
46.	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	9
47.	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	7
48.	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	8
49.	KECAMATAN LIANG ANGGANG	16
50.	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	10
51.	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	10
52.	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	10
53.	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	11
54.	RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN	484
55.	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	49
56.	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	49
57.	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	46
58.	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	51
59.	PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR	29
60.	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	48
61.	PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS	49
62.	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	48
63.	PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN	53
64.	PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA	57
65.	TUGAS BELAJAR	0
66.	TK NEGERI IDAMAN	18
67.	TK NEGERI PEMBINA BANJARBARU	52
68.	TK NEGERI PEMBINA CEMPAKA	12
69.	TK NEGERI PEMBINA LANDASAN ULIN	20
70.	TK NEGERI PEMBINA LIANG ANGGANG	16
71.	SDN 1 MENTAOS	14
72.	SDN 2 MENTAOS	4
73.	SDN 1 KOMET	17
74.	SDN 2 KOMET	13
75.	SDN 3 KOMET	8
76.	SDN 4 KOMET	9
77.	SDN 5 KOMET	7



78.	SDN 1 LOKTABAT UTARA	27
79.	SDN 2 LOKTABAT UTARA	10
80.	SDN 3 LOKTABAT UTARA	6
81.	SDN 4 LOKTABAT UTARA	9
82.	SDN 5 LOKTABAT UTARA	9
83.	SDN 1 SUNGAI ULIN	13
84.	SDN 2 SUNGAI ULIN	8
85.	SDN 3 SUNGAI ULIN	11
86.	SDN 4 SUNGAI ULIN	5
87.	SDN 5 SUNGAI ULIN	10
88.	SDN 1 SUNGAI BESAR	11
89.	SDN 2 SUNGAI BESAR	8
90.	SDN 3 SUNGAI BESAR	12
91.	SDN 4 SUNGAI BESAR	10
92.	SDN 5 SUNGAI BESAR	13
93.	SDN 1 GUNTUNG PAIKAT	26
94.	SDN 2 GUNTUNG PAIKAT	5
95.	SDN 1 KEMUNING	7
96.	SDN 2 KEMUNING	10
97.	SDN 3 KEMUNING	13
98.	SDN 1 LOKTABAT SELATAN	9
99.	SDN 2 LOKTABAT SELATAN	19
100.	SDN 1 SYAMSUDIN NOOR	10
101.	SDN 2 SYAMSUDIN NOOR	15
102.	SDN 3 SYAMSUDIN NOOR	15
103.	SDN 4 SYAMSUDIN NOOR	11
104.	SDN 5 SYAMSUDIN NOOR	11
105.	SDN 1 GUNTUNG PAYUNG	13
106.	SDN 2 GUNTUNG PAYUNG	10
107.	SDN 3 GUNTUNG PAYUNG	6
108.	SDN 1 GUNTUNG MANGGIS	13
109.	SDN 2 GUNTUNG MANGGIS	10
110.	SDN 3 GUNTUNG MANGGIS	15
111.	SDN 4 GUNTUNG MANGGIS	12
112.	SDN 5 GUNTUNG MANGGIS	12
113.	SDN 1 LANDASAN ULIN TIMUR	19
114.	SDN 2 LANDASAN ULIN TIMUR	16
115.	SDN 3 LANDASAN ULIN TIMUR	18
116.	SDN 1 LANDASAN ULIN UTARA	27
117.	SDN 2 LANDASAN ULIN UTARA	11
118.	SDN 3 LANDASAN ULIN UTARA	4
119.	SDN 1 LANDASAN ULIN TENGAH	12



120.	SDN 1 LANDASAN ULIN SELATAN	9
121.	SDN 1 LANDASAN ULIN BARAT	24
122.	SDN 2 LANDASAN ULIN BARAT	14
123.	SDN 3 LANDASAN ULIN BARAT	4
124.	SDN 1 CEMPAKA	6
125.	SDN 2 CEMPAKA	6
126.	SDN 3 CEMPAKA	7
127.	SDN 4 CEMPAKA	6
128.	SDN 5 CEMPAKA	8
129.	SDN 6 CEMPAKA	6
130.	SDN 1 PALAM	9
131.	SDN 2 PALAM	6
132.	SDN 3 PALAM	5
133.	SDN 1 SUNGAI TIUNG	9
134.	SDN 2 SUNGAI TIUNG	6
135.	SDN 3 SUNGAI TIUNG	8
136.	SDN 1 BANGKAL	5
137.	SDN 2 BANGKAL	4
138.	SDN 3 BANGKAL	8
139.	SMP NEGERI 1 BANJARBARU	46
140.	SMP NEGERI 2 BANJARBARU	37
141.	SMP NEGERI 3 BANJARBARU	35
142.	SMP NEGERI 4 BANJARBARU	46
143.	SMP NEGERI 5 BANJARBARU	45
144.	SMP NEGERI 6 BANJARBARU	16
145.	SMP NEGERI 8 BANJARBARU	27
146.	SMP NEGERI 9 BANJARBARU	31
147.	SMP NEGERI 10 BANJARBARU	26
148.	SMP NEGERI 11 BANJARBARU	27
149.	SMP NEGERI 12 BANJARBARU	8
150.	SMP NEGERI 13 BANJARBARU	12
151.	SMP NEGERI 14 BANJARBARU	19
152.	SMP NEGERI 15 BANJARBARU	16
	TOTAL	3781

Sumber : Data SIMPEG per 01 Februari 2022 dari BKPP Kota Banjarbaru

Disampaikan pula mengenai realisasi APBD Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022. Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Berikut target dan realisasi laporan keuangan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

Tabel 1.5 Target dan Realisasi Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
4	PENDAPATAN	1.129.863.588.235	1.293.592.041.266	114,49%	163.728.453.031
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	251.128.912.750	268.246.540.227	106,82%	17.117.627.477
4.1.1	Pajak Daerah	150.888.146.000	149.560.162.249	99,12%	1.327.983.752
4.1.2	Retribusi Daerah	9.815.925.000	11.034.740.958	112,42%	1.218.815.958
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.596.000.000	7.679.371.595	101,10%	83.371.595
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	82.828.841.750	99.972.265.425	120,70%	17.143.423.675
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	878.734.675.485	1.025.345.501.039	116,68%	146.610.825.554
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	762.812.801.640	865.997.824.431	113,53%	103.185.022.791
4.2.1.1	Dana Perimbangan	762.812.801.640	865.997.824.431	113,53%	103.185.022.791
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.921.873.845	159.347.676.608	137,46%	43.425.802.763
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	115.921.873.845	159.347.676.608	137,46%	43.425.802.763
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang	-	-	-	-
5	BELANJA	1.240.271.871.115	1.147.112.710.817	92,49%	93.159.160.298
5.1	BELANJA OPERASI	999.879.711.004	929.037.554.680	92,91%	70.842.156.324
5.1.01	Belanja Pegawai	495.464.290.987	468.252.236.125	94,51%	27.212.054.862
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.593.669.817	429.580.924.514	91,67%	39.012.745.303
5.1.03	Belanja Bunga	2.102.469.200	2.030.723.674	96,59%	71.745.526
5.1.04	Belanja Subsidi	54.500.000	54.500.000	100,00%	-
5.1.05	Belanja Hibah	24.790.176.000	20.859.600.167	84,14%	3.930.575.833
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.874.605.000	8.259.570.200	93,07%	615.034.800
5.2	BELANJA MODAL	236.764.551.056	216.921.670.322	91,62%	19.842.880.734
5.2.01	Belanja Modal Tanah	18.740.042.864	13.560.646.431	72,36%	5.179.396.433
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.735.397.975	42.397.180.513	94,77%	2.338.217.462
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.325.353.764	30.324.012.705	93,81%	2.001.341.059
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.339.817.160	118.468.404.387	93,03%	8.871.412.773
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.623.939.293	12.171.426.286	89,34%	1.452.513.007
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.627.609.055	1.153.485.815	31,80%	2.474.123.240
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.627.609.055	1.153.485.815	31,80%	2.474.123.240
	Total Surplus/(Defisit)	- 110.408.282.880	146.479.330.449	22,00%	70.569.292.733
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.472.837.880	165.472.837.880	100,00%	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	165.472.837.880	165.472.837.880	100,00%	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	165.472.837.880	165.472.837.880	100,00%	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.064.555.000	55.064.555.000	100,00%	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.608.500.000	7.608.500.000		
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	47.456.055.000	47.456.055.000	100,00%	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	55.064.555.000	55.064.555.000	100,00%	-
	Pembiayaan Netto	110.408.282.880	110.408.282.880		
	SILPA(SIKPA)	-	256.887.613.329		



Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada TA 2022 Anggaran Pendapatan adalah sebesar 1.129.863.588.235 sedangkan realisasinya adalah sebesar 1.293.592.041.266 atau sebesar 114.49%. Hal ini menjadikan suatu pencapaian Kota Banjarbaru sebagai Kota dengan pendapatan daerah tertinggi se-Indonesia tahun 2022.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan Pembangunan secara umum, yaitu : **Pertama, Terbatasnya anggaran pembangunan daerah**. Dalam konteks pembangunan daerah di Kota Banjarbaru, APBD menduduki posisi yang sangat strategis guna menstimulasi perekonomian di Kota Banjarbaru. APBD Kota Banjarbaru diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat, nilai belanja pegawai sudah ideal dengan persentase sebesar 38% dari keseluruhan belanja. Dalam kondisi ideal, persentase belanja pegawai harus lebih kecil dibandingkan dengan belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan akan terpenuhi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan memiliki kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Untuk itu harus

diimbangi oleh strategi yang tepat sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kota Banjarbaru. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efisien, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing (kurang) atau overfinancing (berlebih).

APBD Kota Banjarbaru masih ditopang dari sebagian besar dana transfer, untuk itu tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat keterpaduan, saling mendukung dan saling memperkuat dalam rangka mencapai sinergi melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemangku kepentingan terkait sampai pada level pemerintah pusat dan provinsi, dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan. Mengingat kondisi anggaran yang terbatas, maka harus dipastikan bahwa setiap Satuan Perangkat Daerah melaksanakan pembangunan di setiap bidang dengan memiliki komitmen yang kuat pada pencapaian sasaran dan visi misi pembangunan daerah.

Kedua, Ketersediaan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang sangat strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perwujudan Banjarbaru sebagai kota Jasa tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai. Melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat ditingkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta diangkat harkat dan daya saing Indonesia dalam tatanan global. Dalam pembangunan infrastruktur ini, tantangan yang dihadapi di satu sisi terletak pada bagaimana infrastruktur membantu pengurangan kemiskinan ditengah tingginya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pelayanan umum, sementara di sisi lain kemampuan dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau terkendala oleh keterbatasan anggaran.

Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih produktif lagi dalam melakukan kegiatannya. Pembangunan infrastruktur perlu diorientasikan kepada penanggulangan kemiskinan di daerah, yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerjasama melalui kemitraan secara adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Untuk itu, kapasitas



masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus disejajarkan sehingga dalam memroses pembangunan infrastruktur fungsi dan peran masing-masing dapat saling melengkapi. Pemerintah, pada khususnya, akan terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, dengan program dan kebijakanyang berpihak kepada masyarakat miskin.

Ketiga, Keterbatasan kapasitas dan kualitas birokrasi. Keberhasilan proses pembangunan tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi dan meningkatkan kinerja dan citra pelayanan publik. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga saat ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa dalam meningkatkan daya saing daerah.

❖ **Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Meskipun capaian pembangunan di Kota Banjarbaru sebagian besar relatif baik pada tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, namun masih adanya pengaruh pandemi Covid-19 membuat perencanaan di tahun 2022 disusun masih tetap berfokus pada penanganan dampak Covid-19 terutama terhadap penurunan capaian pembangunan pada bidang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka **permasalahan pembangunan daerah** Kota Banjarbaru yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut :



Tabel 1.6
Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Daerah	Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	<p>Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas, dengan memperhatikan dampak Covid-19.</p> <p>Beberapa akar permasalahan dari kondisi tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi serta pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh, masih adanya sarana prasarana pendidikan yang belum standar. - Masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan, masih adanya SPM bidang kesehatan yang belum mencapai sasaran, masih terdapat prevalensi stunting, masih cukup tingginya angka terkonfirmasi positif Covid-19.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa, Perdagangan, Industri, Pengolahan, dan Pariwisata	<p>Perlunya pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat</p> <p>Beberapa akar permasalahan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif - Peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM - Masih minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; - Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata. - Peningkatan investasi



Memperkuat Integrasi Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	<p>Ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih belum memadai, masih terdapatnya titik rawan banjir dan kawasan kumuh</p> <p>Akar permasalahan yang masih muncul yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; - kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan - Drainase kota yang tidak berfungsi sesuai fungsinya - Kurangnya kesadaran masyarakat mencegah berkembangnya kawasan kumuh
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	<p>Indeks kualitas lingkungan hidup masih rendah dan adanya potensi bencana karhutla</p> <p>Akar masalah yang muncul adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pengolah dan pengelolaan sampah bagi masyarakat - Masih tingginya pencemaran air akibat limbah dan udara akibat kebakaran lahan. - Belum optimalnya koordinasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) yang masih terus di tingkatkan</p> <p>Akar permasalahan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik - Masih kurangnya peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

Sumber : RKPD Tahun 2022

❖ Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi maslaah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan

- a. Banyaknya data suspect Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peserta Didik Miskin (PDM) yang harus diverifikasi.
- b. Banyaknya tahapan-tahapan dilalui yang memerlukan waktu yang lama serta tenaga yang memadai untuk melaksanakannya.

Solusi

Berdasarkan permasalahan diatas, bahwa dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendidikan, solusi yang dilakukan yaitu upaya maksimal dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Agama, Dinas Pengendalian Penduduk, dan Dinas Sosial serta Bappeda).

2) Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)

Permasalahan

- a. Sebagian ibu hamil melakukan pemeriksaan pada triwulan akhir di luar wilayah Kota Banjarbaru sehingga pencatatan dan pelaporan ibu hamil tidak tercatat.
- b. Ibu hamil saat pemeriksaan kehamilan terakhir pada praktik swasta dan Ibu hamil yang melahirkan di luar wilayah Kota Banjarbaru tidak tercatat pada beberapa pelaporan pelayanan ibu hamil.
- c. Beberapa pencatatan pelaporan pelayanan ibu bersalin di praktik swasta ada yang belum melaporkan.
- d. Pencatatan dan pelaporan pelayanan bayi baru lahir pada persalinan di luar wilayah Kota Banjarbaru tidak tercatat.
- e. Partisipasi kunjungan ibu membawa balita ke fasyankes.
- f. Pada saat setelah *drop out* imunisasi dasar pada umumnya tidak membawa lagi untuk ditimbang.
- g. Balita yang datang ke dokter praktik swasta tidak terekap dalam pencatatannya. Dilaksanakannya hanya terbatas kegiatan skrining penjangkaran pada kelas 1, 7 dan 10.
- h. Kegiatan pemeriksaan berkala belum terjadwalkan.

- i. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan antar lintas program.
- j. Koordinasi lintas program belum optimal.
- k. Kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan.
- l. Tidak adanya dukungan keluarga.
- m. Investigasi kontak belum maksimal di laksanakan.
- n. Peran kader Tuberculosis di masyarakat belum sesuai harapan.
- o. Pengelola Tuberculosis rangkap tugas.
- p. Terbatasnya anggaran Tuberculosis untuk penerapan kegiatan.
- q. Populasi kunci sulit di akses dan sulit diajak rutin berobat terutama WPS (Wanita Penjaja Seks), Penasun (Pengguna Napza suntik), Kelompok LSV & Waria.
- r. Pengobatan ARV(Anti-retroviral) untuk para pengidap HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) hanya beberapa orang yang melakukan pengobatan, dan terdapat kesulitan yang menyebabkan mereka rutin pengobatan ARV (*Anti-retroviral*)

Solusi

- a. Masih ada pelayanan dalam ANC (*Antenatal Care*) bagi ibu hamil yang belum saatnya dilaporkan sebagai kunjungan K4 (Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan).
- b. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam ANC (*Antenatal Care*)
- c. Meningkatkan pencatatan dan pelaporan dengan jejaringnya.
- d. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam Postnatal Care (PNC).
- e. Meningkatkan Pencatatan dan pelaporan ibu bersalin di praktik swasta ada yang belum dilaporkan.
- f. Menekankan agar Puskesmas dalam pemantauan untuk memastikan semua failitas kesehatan swasta/ pemerintah dan PMB/ dokter praktik swasta untuk melaporkan hasil pelayanan KIA ke Puskesmas wilayahnya.

- g. Penelusuran data layanan dengan mempunyai kontak bagi ibu hamil, bayi baru lahir untuk memastikan sudah mendapat pelayanan dan dimasukkan dalam pencacatan dan pelaporan
- h. Mengoptimalkan sistem rujukan
- i. Melakukan kunjungan neonatal sesuai standar dapat dilakukan dengan kunjungan rumah.
- j. Melakukan pemantauan kunjungan rumah atau media daring Operasi Timbang dilaksanakan setiap bulan Februari dan Agustus.
- k. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di PAUD/TK/RA.
- l. Melakukan pemantauan dalam skrining kesehatan anak sekolah maksimalkan dengan lintas program.
- m. Melaksanakan penjadwalan pemeriksaan kesehatan berkala.
- n. Mengusulkan anggaran.
- o. Koordinasi dan kerjasama dengan Tim *Homecare* Puskesmas dan kader posyandu lansia sehingga jika ada keluhan dari lansia cepat diberi layanan.
- p. Melakukan integrasi dengan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) dan memaksimalkan Posyandu lansia.
- q. Melakukan kunjungan rumah ke rumah.
- r. Maksimalkan kegiatan Investigasi Kontak (IK) Pembinaan kader atau pemberdayaan
- s. Pengelola TB (*Tuberculosis*) tidak rangkap tugas
- t. Melakukan pemetaan WPS (Wanita Penjaja Seks), Penasun (Pengguna Napza suntik), Kelompok LSV & Waria untuk populasi kunci
- u. Perlu adanya pendampingan kursus untuk mereka yang melakukan pengobatan ARV (*Anti-retroviral*)

3) Urusan Kesehatan (RSD Idaman Kota Banjarbaru)

Permasalahan

- a. Masih adanya indikator-indikator dalam Standar Pelayanan Minimal yang belum tercapai 100%
- b. Kompetensi SDM belum memenuhi standar

Solusi

- a. Rapat Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh dan Kepatuhan Identifikasi.
- b. Peningkatan Kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan.

4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum

Akses air minum aman (*safely managed*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan amanat *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di luar rumah (*on-premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. SPM Bidang Air Minum belum mencapai target karena dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru hanya 50.881 KK atau sebesar 78.66% yang memperoleh akses air minum aman, dalam hal ini adalah masyarakat yang terlayani oleh jaringan pipa PDAM.

Berdasarkan data BPS, terdapat 12.788 KK atau sebesar 19,76% dari total jumlah KK yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dilayani oleh akses air minum berupa akses layak terbatas dan akses layak dasar.

Akses layak terbatas (*limited access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah ≥ 30 menit (termasuk waktu antri).

Sedangkan akses layak dasar adalah (*basic access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan

waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah ≤ 30 menit (termasuk waktu antri).

Total capaian SPM Bidang Air Minum sampai dengan semester II Tahun 2022 adalah sebesar 98,42%, yang artinya terdapat 1.022 KK atau sebesar 1,58% se Kota Banjarbaru (yang belum memiliki akses layak. Berdasarkan data BPS, masyarakat ini menggunakan mata air tak terlindung dan air permukaan seperti sungai, kolam, danau/waduk dan irigasi.

Adapun total persentase jumlah KK yang harus terlayani akses air minum aman sampai tahun 2024 adalah sebesar 21,34% dari 5 (lima) kecamatan, dengan target prosentase terbesar berada di Kecamatan Cempaka sebesar 48,87%.

Target SPM Bidang Air Minum dengan akses aman 100% dan akses layak 0% merupakan target yang harus dicapai oleh Kota Banjarbaru, berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pencapaian Target SPM yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Salah satu kendala dalam pencapaian target akses air minum 100% adalah tidak semua masyarakat Kota Banjarbaru bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM yang merupakan salah satu akses aman terhadap air minum. Beberapa penyebabnya antara lain masih tercemarnya air sumur dangkal yang digunakan sebagai air minum, selain itu air tanah cenderung lebih mudah didapatkan melalui sumur gali dan pada saat musim kering, tidak semua sumur gali mengalami kekeringan, sehingga jaringan PDAM hanya dijadikan opsi cadangan dalam memperoleh air minum.

Pada beberapa tempat di Kota Banjarbaru, seperti pada Kecamatan Cempaka, menurut data sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 4 (empat) kelurahan pada Kecamatan dimaksud, ada kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sumur gali sebagai sumber air minum utama dan untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini dikarenakan pada ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya berlangganan PDAM setiap bulannya, padahal air sumur yang digunakan cukup tercemar ketika musim kering, air cenderung keruh dan berbau.

Solusi

Dalam rangka terciptanya akses air minum aman dapat tercapai 100% pada tahun 2024 mendatang, salah satu solusinya adalah melalui pencapaian akses air minum aman baik dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat maupun penyediaan akses air minum aman berupa sumur bor dalam atau sumur dangkal tertutup yang dialirkan dari sumur bor berspesifikasi khusus dan sesuai dengan Permenkes No.49/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Aliran air sumur-sumur ini diharapkan dapat kurang dari 30 menit sampai ke Sambungan Rumah (SR) warga pemanfaat, sehingga *eligibility* akses air minum aman dapat tercapai di lokasi tersebut.

Urusan Tata Ruang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada tidak terlalu berpengaruh pada target capaian kinerja, sehingga realisasi capaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Untuk kedepannya akan lebih mengoptimalkan lagi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih meningkat dan bermanfaat.

5) Urusan Perumahan

Permasalahan

Presentase capaian Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani pada tahun 2022 sebesar 100% walaupun kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota tidak terealisasi, dikarenakan sampai dengan triwulan IV tidak terjadi bencana yang memerlukan relokasi rumah, akan tetapi tetap dianggarkan untuk antisipasi apabila terjadi bencana alam yang tidak terprediksi. Adapun target relokasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang ditangani adalah sebanyak 10 rumah yang telah dianggarkan pada APBD di Tahun Anggaran 2022.



Solusi

Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru (jika terjadi bencana), pada kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota merupakan kegiatan SPM dan wajib dianggarkan menurut Permen PUPR No. 29 Tahun 2018. Namun pada Tahun 2022, Kota Banjarbaru tidak terjadi bencana yang mengakibatkan relokasi, sehingga Dinas PUPR menindaklanjuti dengan pembuatan surat pernyataan tidak terjadi bencana.

6) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru)

PERMASALAHAN

- a. Minimnya informasi pementeknis.
- b. Perencanaan SPM dengan indikator jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada hanya bisa dilakukan secara estimasi atau prediktif, yang tidak familiar dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan tibum dan penegakan perda.
- c. Kendala pada tingkat koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi SPM adalah belum ada arahan untuk mengintegrasikan SPM kedalam Renstra dan Renja mengingat pengintergrasian harus dilakukan secara menyeluruh pada tingkat pemerintah daerah.
- d. Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada SPM belum dialokasikan.

SOLUSI

- a. *Updating* peraturan yang mengatur tentang SPM.
- b. Perencanaan dilakukan secara estimasi.
- c. Membuat konsep perencanaan renstra dan renja dan yang terintegrasi dengan SPM untuk disampaikan kepada perangkat daerah terkait pada rapat-rapat pembahasan SPM.
- d. Membuat konsep penganggaran (RKA) yang terintegrasi dengan SPM

7) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarbaru)

Permasalahan :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pendidikan politik tentang rencana pemerintah pusat melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024.
- b. Sulitnya menemukan keberadaan sekretariat ormas baik dalam rangka mengundang sebagai peserta sosialisasi maupun dalam rangka monitoring keaktifan ormas tersebut.
- c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekandensi moral dan budaya di masyarakat.
- d. Masih kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
- e. Kurangnya rasa nasionalisme dan krisis kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa Ideologi bangsa yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila
- f. Masyarakat Banjarbaru yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga rawan berpotensi konflik, khususnya konflik yang berlatar belakang SARA seperti pendirian rumah ibadah, pendirian warung remang-remang, sengketa lahan, dan Pilkada.

Solusi

- a. Melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, utamanya adalah kaum wanita dan pemilih pemula
- b. Melakukan monitoring tentang perkembangan politik di kota banjarbaru
- c. Membentuk forum komunikasi organisasi masyarakat (FKOK) agar bisa membantu di dalam penelusuran sekretariat ormas berdasarkan wilayah kecamatan berdasarkan pokja yang terbentuk.

- d. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di Kota Banjarbaru
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba khususnya bagi pelajar dan generasi muda
- f. Melakukan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan
- g. Meningkatkan Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat melalui pelaksanaan peringatan hari besar nasional.
- h. Melakukan pembinaan pada veteran dan janda veteran
- i. Meningkatkan Kewaspadaan dini masyarakat melalui kegiatan Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).
- j. Melakukan rapat internal Tim terpadu penanganan konflik sosial yang membahas langkah deteksi dini, cegah dini dan antisipasi dini dalam menjaring, menampung, menganalisis pelaporan informasi masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

8) Urusan Sosial

Permasalahan

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- b. Belum adanya Penentuan target penyandang disabilitas, lansia setiap tahunnya
- c. Belum tersedianya Baffer Stock Kota Banjarbaru
- d. Kurangnya sarana dan prasarana operasional lapangan
- e. Kurangnya Pelatihan bagi anggota Tagana

Solusi

- a. Mengusulkan SDM Profesional yang bisa menangani Disabilitas Intelektual pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru melalui pengadaan CPNS.
- b. Mengusulkan Diklat, workshop, bimbingan teknis bagi petugas yang menangani Disabilitas dan Lansia.

- c. Mengusulkan dana untuk kegiatan Penanganan Pelayanan Disabilitas Intelektual, dalam bentuk dana pelatihan, alat peraga dan alat bantu lainnya.
- d. Melakukan koordinasi/konsultasi pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terkait penentuan target SPM.
- e. Perlu adanya penambahan Buffer Stock seperti Perbekalan makanan untuk dapur umum lapangan (Dapur Umum TAGANA)
- f. Peningkatan pelatihan bagi anggota Tagana dalam penanganan kebencanaan.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR :

1) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan

- a. Pekerja dan pengusaha masih banyak yang belum melaporkan penempatan tenaga kerja kepada petugas penempatan tenaga kerja.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
- c. Pengusaha dan pekerja terjadi keluhan kesah tentang penerapan ketentuan ketenagakerjaan dalam hubungan kerja.
- d. Pengusaha belum sepenuhnya mengikutkan para pekerja menjadi peserta BPJS.
- e. Perusahaan belum membuat/memperpanjang peraturan perusahaan yang menjadi pedoman hubungan industrial antara pengusaha dan kerja.
- f. Penerapan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
- g. Pengusaha yang memiliki jumlah pekerja 50 orang lebih belum sepenuhnya membuat lembaga kerjasama LKS (Lembaga Keuangan Syariah) Bipartit.
- h. Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarbaru belum maksimal menyikapi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Banjarbaru.

Solusi

- a. Melakukan sosialisasi ke perusahaan untuk data penempatan tenaga kerja.
- b. Perlu diadakan kendaraan operasional untuk kegiatan pelatihan dan monitoring ke lapangan.
- c. Melakukan pendekatan persuasif adanya keluhan kesah para pihak terkait adanya perselisihan hubungan industrial dan melalui mediasi.
- d. Melakukan monitoring dan pembinaan kepatuhan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ke perusahaan dan melakukan sosialisasi.
- e. Melakukan pembinaan kepatuhan untuk membuat peraturan perusahaan melalui surat edaran dan mengadakan kegiatan sosialisasi untuk ketaatan membuat peraturan perusahaan.
- f. Melakukan pembinaan kepada stakeholder.
- g. Melakukan pembinaan kepatuhan untuk membentuk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) Bipartit tingkat perusahaan.
- h. Memaksimalkan kegiatan rapat sidang pleno LKS (Lembaga Keuangan Syariah) Tripartit terkait agenda pemasalahan ketenagakerjaan.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arti kata gender.
- b. Kota Banjarbaru belum memiliki Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang ada sertifikat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaporkan atau ikut mengatasi, menyelesaikan, kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, bahkan cenderung untuk menutupi karena dianggap suatu aib keluarga.
- d. Perempuan yang mengalami kekerasan enggan untuk melaporkan karena takut disudutkan.
- e. Masih ada korban kekerasan memiliki ketergantungan ekonomi pada pelaku kekerasan, bahkan masih ada intervensi atau pengaruh dari keluarga.

Solusi

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Gender, Bimtek PUG (Pengarustamaan Gender) dan Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- b. Rencana pembentukan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kota Banjarbaru
- c. Melaksanakan sosialisasi tentang dampak yang terjadi akibat kekerasan pada perempuan dan anak, serta cara mengatasi apabila melihat, mengalami, atau mendengar bahwa telah terjadi kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan sekitarnya.

3) Urusan Pangan (DKP3)

Permasalahan

- a. Kurangnya kapasitas kemampuan petugas dalam melaksanakan pengawas keamanan pangan maupun pengambil contoh (yaitu belum ada petugas pengawas pangan segar yang bersertifikat dan kurangnya petugas pengambil contoh yang bersertifikat)
- b. Belum adanya laboratorium hasil pertanian yang bersertifikat di Kalimantan Selatan
- c. Belum adanya data untuk pelaku usaha PSAT-PDUK di Kota Banjarbaru
- d. Kurangnya jumlah beras CPP untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kerawanan pangan
- e. Tidak adanya Armada khusus untuk mengangkut beras CPP
- f. Kurangnya tenaga pengambil data ketersediaan dan distribusi pangan

Solusi

- a. Mengikuti pelatihan / bimtek dan penambahan personil pengawas keamanan pangan segar
- b. Sampel yang akan di uji akan di kirim ke laboratorium di daerah luar yang bersertifikat (surabaya)
- c. Menambah jumlah volume beras CPP

- d. Meminjam armada dari bidang lain dalam pengangkutan
- e. Menambah tenaga enumerator ketersediaan dan distribusi pangan
- f. Melakukan Koordinasi yang intensif

4) Urusan Pertanahan (DISPERKIM)

Permasalahan

- a. Pada Kegiatan Penyelesaian permasalahan tanah, Dokumen sertifikat masih nama pemilik asal sehingga ketika akan dilakukan perubahan sertifikat diperlukan KTP sesuai nama disertifikat.
- b. Pada Kegiatan Penyelesaian permasalahan tanah, bahwa dokumen sertifikat yang dimiliki warga adalah dokumen sertifikat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjar sehingga perlu dilakukan perubahan wilayah terlebih dahulu dan perubahan ini memerlukan dokumen asli sebagai lampiran yang oleh pemilik tanah tidak mau menyerahkan.
- c. Dokumen sertifikat dijadikan agunan di Bank sehingga sertifikat tidak bisa dilakukan perubahan.
- d. Sebagai besar warga tidak mau menyerahkan sertifikat asli dengan alasan takut hilang.
- e. Pemilik tanah terlalu lama mengembalikan dokumen hasil pengukuran yang harus ditanda tangani pihak yang berbatasan.
- f. Pada Kegiatan Penataan dan Penegasan Tata Batas Wilayah dan Pembakuan Nama Rupabumi, Batas daerah kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar telah disepakati antar Pemerintah Daerah. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan dilaksanakan di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan.
- g. Pembakuan nama rupabumi meliputi kurang lebih 20 unsur buatan dan didalamnya ada beberapa item mencapai ratusan dari satu unsur. Pada tahun 2019 kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi yang dilaksanakan 3 unsur buatan yaitu : Unsur Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan.

Solusi

- a. Meminta pemilik tanah untuk mencari KTP pemilik asal.
- b. Memberikan pemahaman kepada pemilik lahan agar dilakukan NIB/Perubahan wilayah terlebih dahulu.
- c. Warga diminta memohon ke Bank untuk pinjam pakai sertifikat yang di agunan.
- d. Memberikan pemahaman jaminan sertifikat tidak hilang.
- e. Diminta kepada pemilik tanah untuk segera mengembalikan dokumen hasil pengukuran.
- f. Proses draf Permendagri menjadi Permendagri perlu dimonitor dan dikonsultasikan ke Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri.
- g. Perlu adanya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi.

5) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan

- a. Apabila musim penghujan dengan intensitas tinggi, sering terjadi genangan sampai masuk pemukiman warga.
- b. Dalam permasalahan pengelolaan persampahan, terdapatnya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) liar yang terdapat di permukiman warga.
- c. Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada di Kota Banjarbaru semakin sedikit, dan status kepemilikan tanah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) tersebut hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarbaru.
- d. Ada sebagian kendaraan roda 3 (tiga) pengangkut sampah yang dihibahkan kepada masyarakat disalahfungsikan.

SOLUSI

Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas. maka perlu upaya-upaya yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan peningkatan cakupan pelayanan persampahan di Kota Banjarbaru.

- c. Meningkatkan kepemilikan lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada di kota Banjarbaru.
- d. Melakukan reboisasi terhadap lahan yang digunakan untuk pengurugan yang sering mengakibatkan banjir.
- e. Jumlah sarana prasarana di tambah agar semua sampah dapat terangkut, karena jumlah penduduk yang semakin banyak dan menghasilkan sampah yang semakin banyak pula.
- f. Selektif dalam pemberian hibah kepada masyarakat khususnya kendaraan roda tiga pengangkut sampah.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan

- a. Sebagian masyarakat belum bisa menggunakan sendiri sistem aplikasi Dukcapil Banjarbaru *mobile* untuk pelayanan secara *online*.
- b. Adanya keluhan pelayanan dari masyarakat terhadap petugas pelayanan yang terkesan menyulitkan padahal peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk semakin memudahkan proses pelayanan publik.
- c. Adanya gangguan jaringan yang menyebabkan pelayanan terhenti, seperti dalam pelayanan perekaman KTP-EL.
- d. Beberapa peralatan yang terdiri dari komputer, alat pencetak, dan printer kondisinya tidak memungkinkan untuk digunakan terlalu lama, sehingga pekerjaan tidak berjalan secara optimal oleh karena itu perlu peremajaan peralatan khususnya peralatan rekam KTP-EL.
- e. Adanya kekosongan blangko KTP-EL dari Direktorat Jenderal Administrasi kependudukan di Jakarta.
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memberikan data agregat kependudukan, sehubungan dengan pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana, dan pengguna data kependudukan.

SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

- a. Untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Dukcapil *mobile* pelayanan secara *online*, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru membuka *stand* pelayanan di Mal Pelayanan Publik Banjarbaru.
- b. Jika terjadi gangguan jaringan berasal dari Kementerian, maka segera dilakukan koordinasi dengan Kementerian untuk selanjutnya dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat, baik melalui media sosial dan *website* Disdukcapil.
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Untuk tahun 2022 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil melakukan peremajaan terhadap peralatan komputer sebanyak 10 buah.
- d. Untuk mengatasi kekosongan blangko KTP-EL di Dirjen Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil di Jakarta, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru mengeluarkan Surat Keterangan (SUKET) apabila masyarakat memerlukan Data kependudukannya. Selain itu, pemanfaatan Digital ID menjadi solusi untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
- e. Terkoneksinya jaringan ke beberapa SKPD sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan data kependudukan yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan

- a. Adanya pasangan usia subur (PUS) yang masih enggan untuk menjadi peserta KB aktif.
- b. Masih ditemui perkawinan usia anak.
- c. Masih terdapat pasangan usia subur (PUS) karena faktor kesehatan mengalami ketidakcocokan dengan alat kontrasepsi yang tersedia.

Solusi

- a. Menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat agar memberikan pengertian/menghimbau pasangan usia subur (PUS) lingkungan sekitarnya, agar bersedia untuk menjadi peserta program KB aktif.
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat anggota pasangan usia subur (PUS) di Kota Banjarbaru, tentang manfaat dan kegunaan untuk menjadi peserta program KB aktif.
- c. Melaksanakan pelayanan KB gratis kepada masyarakat di Kota Banjarbaru, khususnya pada kegiatan tertentu di Kota Banjarbaru untuk menyisipkan pelayanan KB gratis.
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dan resiko apabila terjadi perkawinan usia anak untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di lingkungannya.
- e. Koordinasi dan berkerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Banjarbaru tidak terjadi perkawinan usia anak.

8) Urusan Perhubungan

Permasalahan

- a. Permasalahan penyediaan rambu-rambu keselamatan disepanjang jalan Nasional dan Jalan Provinsi, untuk jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Jalan Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- b. Tidak adanya angkutan kota yang melalui jalan kota, sehingga tidak tersedianya angkutan publik bagi masyarakat yang ada di ruas-ruas jalan kota, yang ada hanya melalui jalan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
- c. Belum terdatanya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dengan baik sehingga menyulitkan dalam penyediaan data rambu-rambu.

Solusi

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Jalan Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mengatasi permasalahan penyediaan rambu-rambu keselamatan disepanjang

jalan tersebut, agar apa yang dirasakan dan menjadi keluhan masyarakat selama ini dapat teratasi, seperti kerusakan lampu mengatur lalu lintas tidak adanya rambu-rambu keselamatan yang melalui Pemerintah Pusat dan Jalan Provinsi tersebut.

- b. Melakukan kajian terhadap kebutuhan angkutan publik bagi masyarakat Kota Banjarbaru, agar kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan angkutan yang aman, nyaman dan murah dapat dirasakan oleh masyarakat.
- c. Melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dengan berbasis TIK.

9) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan

- a. Beberapa laporan ada yang belum tuntas dalam penyelesaiannya.
- b. Kurangnya perangkat pendukung dalam pengolahan media konten baik untuk photography atau videography oleh tim multimedia.
- c. Masih ada unit kerja yang adminnya belum mengunggah informasi hingga akhir Desember 2021.
- d. Belum meratanya pemahaman admin terhadap klasifikasi informasi.
- e. Sebagian besar dokumen informasi yang diunggah belum berpedoman pada PERKI 1 Tahun 2021.
- f. Sebagian besar unit kerja belum mendokumentasikan permintaan informasi yang diterima (belum ada petugas, buku register, formulir permohonan dan perlengkapan lainnya sesuai peraturan).
- g. Pemahaman PPID Pelaksana yang minim tentang urgensi undang-undang keterbukaan informasi publik.
- h. Kurangnya komitmen pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam konsistensi penyebaran informasi publik yang dikelola.
- i. Belum adanya analisis jumlah sebaran publikasi dan isu publik yang terkelola oleh media *pers* yang bekerjasama di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- j. Masih ada beberapa *website* SKPD yang belum dikelola dengan baik sehingga informasi SKPD berupa struktur organisasi dan berita kegiatan

yang disampaikan tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan admin *website* SKPD yang ditugaskan oleh SKPD dalam mengelola websitenya.

- k. Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banjarbaru yang mengakibatkan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banjarbaru terhambat.
- l. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan sistem informasi atau aplikasi baik dari segi kuantitas dan kompetensinya sehingga proses pengembangan aplikasi terhambat.
- m. Perlunya penentuan program kegiatan Smartcity untuk tahun berikutnya mengingat program Smartcity sudah berakhir pada tahun 2021 yang bersesuaian dengan RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru periode 2021-2026.
- n. Monitoring/identifikasi kebutuhan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tertunda, dikarenakan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Walikota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik tertunda.

Solusi

- a. Pimpinan terus mengingatkan unit kerja dalam rapat–rapat koordinasi yang dihadiri agar merespon laporan yang masuk secara cepat dan tuntas. Hal ini penting untuk membangun kesadaran publik dan meningkatkan citra positif SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional).
- b. Perlu diusulkan perencanaan anggaran belanja modal terkait perangkat pendukung pengolahan konten.
- c. Unit kerja sebaiknya menunjuk admin yang kompeten dan menganggarkan honor untuk admin sebagai stimulasi.
- d. Bimbingan teknis dilaksanakan secara berkelanjutan dan rutin untuk admin.
- e. Materi bimbingan teknis dapat lebih ditekankan pada hal-hal yang masih kurang dipahami dengan narasumber dari kementerian.
- f. Monitoring dan evaluasi ke PPID Pelaksana serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

- g. Pelaksanaan studi tiru ke PPID lain yang lebih baik untuk menambah wawasan dan kompetensi PPID Pelaksana.
- h. Perlu diadakan pertemuan rutin pengurus dan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sehingga teridentifikasi kendala yang dihadapi.
- i. Perlu perangkat lunak atau sejenisnya yang mendukung analisis media.
- j. Harus dilakukan peningkatan kemampuan admin *website* secara rutin dan berkala untuk petugas admin *website* SKPD sehingga pengetahuan dan wawasannya dalam mengelola *website* SKPD dapat ditingkatkan.
- k. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- l. Menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengembangan sistem informasi/aplikasi.
- m. Berkoordinasi dengan Bappeda untuk penyusunan roadmap smartcity pemerintah kota banjarbaru sesuai dengan RPJMD periode tahun 2021-2026 untuk penentuan program kegiatan dan quickwin smartcity tahun berjalan.
- n. Pelaksanaan giat monitoring/identifikasi dilaksanakan setelah pelaksanaan sosialisasi peraturan walikota tentang penggunaan sertifikat elektronik.

10) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan

- a. Keberadaan sejumlah koperasi yang memiliki tingkat kepatuhan sangat rendah terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian, peraturan-peraturan terkait lainnya dan bahkan bertentangan dengan jati diri, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
- b. Masih rendahnya kompetensi SDM (Pengawas, Pengurus dan Pengelola) Koperasi.
- c. Masih lemahnya sistem administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi.
- d. Kemampuan pemupukan modal usaha yang bersumber dari anggota dan hasil usaha koperasi, walaupun cukup memadai perkembangannya namun ternyata masih sangat terbatas.
- e. Masih belum dilakukan pemutakhiran data UMKM dan ter-aplikasi dengan benar.

- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembinaan, pemberdayaan dan promosi UMKM.
- g. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki perijinan yang sesuai.
- h. Terbatasnya jangkauan pemasaran dan promosi usaha baik ditingkat regional maupun nasional.
- i. Kurangnya inovasi dan kreasi baik di level produk maupun service sesuai dengan preferensi dan perilaku konsumen.

Solusi

- a. Pengawasan baik secara internal maupun eksternal harus berjalan secara periodik, preventif dan penerapan sanksi atas kepatuhan.
- b. Diklat, Bimtek dan sejenisnya untuk meningkatkan kompetensi SDM Koperasi berorientasi pada pengaplikasian di lapangan tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang ada dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif.
- c. Administrasi kelembagaan, usaha dan keuangan sebaiknya terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Kapasitas usaha dan keuangan koperasi harus lebih ditingkatkan lagi dengan peningkatan peran Pemerintah sebagai fasilitator.
- e. Melakukan pemutakhiran data UMKM dan melakukan integrasi data dengan dinas terkait.
- f. Perlu direalisasikannya anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung seperti mobil operasional dan sarana lainnya.
- g. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi kepada UMKM dalam memperoleh dan memiliki perijinan.
- h. Mengalokasikan anggaran promosi produk UMKM untuk dapat mengikuti berbagai event pameran dan promosi berskala nasional.
- i. Melakukan pelatihan dan workshop untuk penumbuhan inovasi dan kreasi produk dalam peningkatan pemasaran produk.

11) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan

- a. Masih ada pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Perubahan atau *update* fitur-fitur aplikasi Pelaporan pada OSS (*One Single Signature*) menyebabkan pelaku usaha tidak memahami cara pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang terbaru.

Solusi

- a. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- b. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Melaksanakan sosialisasi/bimtek terkait tata cara pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan

- a. Kurangnya sosialisasi organisasi kepemudaan
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan organisasi Kepemudaan
- c. Anggaran yang terbatas
- d. Kurangnya minat pemuda yang ikut serta dalam Organisasi kepemudaan
- e. Pemotongan anggaran untuk kegiatan olahraga rekreasi sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Solusi

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Perda kepemudaan untuk meningkatkan minat pemuda dalam berorganisasi
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Organisasi Kepemudaan
- c. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan olahraga rekreasi di tahun berikutnya.

13) Urusan Statistik

Permasalahan

- a. Penyampaian data sektoral oleh SKPD ke Walidata/Diskominfo lambat sehingga proses verifikasi dan pengolahan data sektoral pun menjadi terlambat.
- b. Belum ada regulasi yang mengatur tentang data sektoral.
- c. Belum adanya petugas khusus yang menangani data sektoral pada masing-masing SKPD.
- d. Masih perlu SDM ASN yang berkompeten di bidang Statistik dan Teknologi dan Informatika.
- e. Sebagian besar SKPD belum membuat metadata kegiatan statistiknya meskipun telah dilakukan pembinaan baik berupa sosialisasi atau pembekalan teknis.
- f. Beberapa SKPD belum membukukan kegiatan statistiknya dalam sebuah publikasi sehingga secara otomatis tidak dapat mengisi/membuat metadatanya.
- g. Sebagian besar SKPD yang melakukan kegiatan statistik dan dipublikasikan belum mengajukan rekomendasi kegiatan statistiknya ke BPS.

Solusi

- a. Mengaktifkan *group WhatsApp* yang beranggotakan seluruh pengelola data SKPD untuk dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif melalui *group WhatsApp* untuk mempercepat dalam pemenuhan data yang dibutuhkan.
- b. Menyediakan portal data sektoral sehingga SKPD dapat menginput data secara langsung dan cepat.
- c. Penyusunan regulasi data sektoral dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- d. Rencana pembentukan Tim Lintas Sektoral Pengelola Data Sektoral SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dan instansi vertikal (BPS).
- e. Merekrut tenaga Non ASN yang kompeten di bidang statistik atau memiliki bidang keilmuan yang selinier (TI) dan mengusulkan formasi CPNS kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

- f. Secara berkelanjutan bersama-sama dengan BPS Kota Banjarbaru selaku pembina data melakukan edukasi/pembinaan kegiatan metadata statistik sektoral terhadap SKPD baik berupa sosialisasi, pembekalan teknis maupun *Focus Group Discussion* (FGD).
- g. Melakukan pendataan metadata statistik sektoral ke SKPD Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
- h. Pendampingan pembuatan metadata statistik sektoral sekaligus membantu proses pengajuan rekomendasi kegiatan statistik SKPD.

14) Urusan Kebudayaan

Permasalahan

- a. Belum adanya pamong budaya kategori keterampilan.
- b. Kurangnya dokumen analisis pelestarian kebudayaan sebagai penunjang efektifitas pelestarian.
- c. Belum adanya Perda Cagar Budaya.
- d. Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya.

Solusi

- a. Mengusulkan penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi wirausaha muda.
- b. Meningkatkan keterampilan pegawai pada bidang kebudayaan melalui bimbingan teknik.
- c. Merumuskan Perda Cagar Budaya.
- d. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- e. Mengoptimalkan pelaporan kegiatan sebagai dokumen analisis.

15. Urusan Perpustakaan

Permasalahan

- a. Masih lemahnya koordinasi kebijakan dengan stakeholder yang lain.
- b. Koleksi bahan pustaka yang belum lengkap dan mutakhir.
- c. Belum meratanya layanan perpustakaan.
- d. Masih kurangnya pengelola perpustakaan sekolah yang berstatus PNS (Jabatan Pustakawan).

- e. Masih rendahnya perpustakaan sekolah yang ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
- f. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam peningkatan budaya baca masyarakat.

Solusi

- a. Penguatan koordinasi kebijakan dengan stakeholder yang terkait dengan perpustakaan dan literasi.
- b. Melakukan seleksi dalam pengadaan bahan pustaka, baik buku konvensional maupun buku digital dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
- c. Mengoptimalkan semua layanan.
- d. Memberdayakan tenaga kontrak yang kompeten dengan latar belakang pendidikan perpustakaan.
- e. Membentuk tim pembinaan perpustakaan ke sekolah pendidikan dasar.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; Lurah dan Camat untuk gerakan literasi masyarakat.

16. Urusan Kearsipan

Permasalahan

- a. Belum optimalnya penerapan kebijakan kearsipan dalam mendukung kinerja kearsipan (SKPD).
- b. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan.
- c. Arsip Kota Banjarbaru belum dimasukkan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) berdasarkan data Pemerintah Provinsi belum ada/belum diketahui.
- d. Belum optimalnya pemahaman dan apresiasi terhadap kearsipan dalam penyelamatan dan pelestarian arsip

Solusi

- a. Peningkatan koordinasi dalam penerapan kearsipan dalam mendukung kinerja organisasi (SKPD).

- b. Peningkatan pembinaan pengelolaan arsip ke SKPD lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Melakukan pengalihan aplikasi menjadi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- d. Peningkatan koordinasi sehingga tercipta pemahaman dan apresiasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

17. Urusan Pelayanan Perijinan Terpadu

Permasalahan

- a. Belum terintegrasinya aplikasi daerah dengan aplikasi kementerian.
- b. Masih banyak masyarakat yang belum sadar teknologi, sedangkan seluruh pelayanan di DPMPTSP Kota Banjarbaru sudah dilakukan secara *online*.
- c. Masih banyak pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi belum memenuhi komitmen atas NIB yang dimiliki.

Solusi

- a. Melakukan koordinasi bersama Diskominfo Kota Banjarbaru dengan BKPM RI untuk mengintegrasikan aplikasi daerah (IntanBJB) dengan aplikasi kementerian yaitu *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).
- b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Banjarbaru tentang Pelayanan secara *online*.
- c. Mengadakan pendampingan proses pelayanan perizinan secara tatap muka (Loket pendampingan di GPPT dan MPP) dan melalui *Call Center* DPMPTSP Kota Banjarbaru.
- d. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang kewajiban yang harus di penuhi setelah memiliki NIB dengan cara :
 - Mengadakan sosialisasi pemenuhan komitmen pelaku usaha di seluruh sektor perizinan.

- Mengadakan pemantauan pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha di Kota Banjarbaru dengan tingkat resiko menengah tinggi dan resiko rendah yang terbit secara otomatis.

18. Urusan Persandian

Permasalahan

- Kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota tertunda karena penyesuaian waktu dengan narasumber pusat terhambat bersamaan dengan giat lain.

Solusi

- Pelaksanaan giat sosialisasi disesuaikan dengan jadwal narasumber.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan

- a. Penanganan *Illegal Fishing* belum optimal.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan
- c. Terbatasnya alokasi dana untuk peningkatan sarana dan prasarana perikanan
- d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) para pelaku usaha budidaya (Potdakan)
- e. Terbatasnya jumlah peserta pelatihan
- f. Rendahnya tingkat kesadaran UMKM dalam hal Cara Pengolahan Ikan Yang Baik (CPIB)

Solusi

- a. Melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan No. 45 tentang Perikanan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan monev pada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- c. Mengalokasikan dana APBN, APBD maupun CSR.
- d. Melaksanakan pembinaan dan monev.
- e. Melaksanakan bimbingan teknologi.
- f. Meningkatkan bimbingan teknis untuk usaha perikanan.

- g. Meningkatkan pembinaan dan money bagi kelompok, kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar).

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan

- a. Kesulitan dalam pemilihan pihak ke tiga (EO) untuk melaksanakan event dan kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait.
- b. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan objek wisata karena masyarakat memiliki peran ganda, yakni sebagai subyek dan obyek. Sebagai obyek masyarakat harus dapat menikmati hasil pengelolaan secara adil dan merata, dan sebagai subyek masyarakat perlu terus meningkatkan dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat menjadi pengelola yang baik.
- c. Belum terpetakannya Perda tentang Ekonomi Kreatif.

Solusi

- a. Penunjukan juri dalam pemilihan pihak ketiga (EO) pelaksana event.
- b. Melibatkan Masyarakat dan memperhatikan persepsinya dalam pengelolaan objek wisata sebab masyarakat memiliki peran ganda, yakni sebagai subyek dan obyek.
- c. Menginventarisasi pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru
- d. Dengan disahkannya Perda tentang Ekonomi Kreatif tahun 2022 diharapkan ada tindak lanjut dengan dibentuknya forum/komite ekraf bersama dengan komunitas/SKPD terkait untuk pemetaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

3. Urusan Pertanian dan Peternakan

Permasalahan

- a. Terjadinya gagal Panen disebabkan yang disebabkan oleh adanya:
 - Adanya serangan tungro.
 - Adanya serangan hama tikus.

- Adanya perubahan iklim yang terjadi pada wilayah Indonesia sehingga memberikan dampak pada sektor pertanian. Perubahan iklim ini menyebabkan terjadinya kekacauan pola musim tanam.
 - Akibat cuaca ekstrim mengakibatkan tanaman hortikultura terserang hama dan penyakit mengakibatkan panen berkurang atau tidak maksimal sehingga menyebabkan harga meningkat/inflasi harga produk hortikultura seperti cabe dan bawang merah.
 - Untuk perkebunan tanaman karet banyak yang sudah tua perlu peremajaan dan harga karet menurun karena kualitas karet kurang bagus disebabkan tanaman karet kurang nutrisi/ pupuk dan peralatan pasca panen yang tidak memadai seperti mangkos sadap, pisau sadap dll.
- b. Adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menyebabkan jalur lalu lintas ternak ditutup sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan ternak di Kota Banjarbaru yang jumlahnya sangat berkurang. Untuk itu perlu pemenuhan kebutuhan ternak secara cepat

Solusi

- a. Untuk mengatasi kegagalan panen, Bidang Pertanian dan Perkebunan melakukan:
- Pemberian bimbingan teknis penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman;
 - Pemberian bantuan Sarana Produksi Padi dan Cabe;
 - Pemberian Bantuan Alsintan;
 - Pemberian Bantuan Solar Dryer;
 - Pemberian Bantuan Berupa Tandon;
 - Pemberian Demplot Pertanian Organik.
 - Mengadakan pasar murah produksi hasil pertanian.

- Bantuan Bibit Karet, Pupuk dan Peralatan Pasca panen perkebunan
 - Lahan untuk usaha pertanian agar dibeli Pemerintah.
- b. Dalam pemenuhan ketersediaan bibit ternak Bidang Peternakan melakukan:
- Pemberian bibit ternak sapi sebanyak 103 ekor.
 - Pemberian bibit ternak kambing sebanyak 50 ekor.
 - Pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan ternak dan sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan penyakit penyakit mulut dan kuku (PMK).

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan

- a. Belum terakomodirnya seluruh usulan pembangunan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran akibat keterbatasan keuangan daerah, provinsi dan nasional.
- b. Masih kurangnya pemahaman terhadap aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mendukung tahapan perencanaan.
- c. Adanya keterlambatan keluarnya peraturan tata cara atau informasi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan dari pusat.
- d. Adanya keterlambatan pengumpulan data pendukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- e. Adanya ketidaksesuaian pengumpulan data pendukung Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan format yang diberikan.
- f. Kurangnya dokumentasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang mendukung keakuratan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Solusi

- a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat berkenaan prioritas pembangunan yang ada di daerah sehingga dapat dibiayai melalui pendanaan pemerintah pusat (DAK, dan APBN)
- b. Melakukan pelatihan aplikasi SIPD bagi ASN Pemerintah Kota Banjarbaru di daerah.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar informasi yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dapat diketahui lebih awal.
- d. Percepatan pengumpulan data pendukung laporan MONEV pembangunan daerah dengan dukungan kepala daerah.
- e. Membuat aplikasi MONEV yang memuat format-format yang sesuai dengan PMDN 86 Tahun 2017 yang diintegrasikan dengan SIPD keuangan daerah.
- f. Menghimbau kepada SKPD agar mendokumentasikan dengan baik terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan

- a. Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok, hal ini terjadi pada Tahun 2022 dikarenakan kondisi masa transisi pandemi Covid 19 dan perayaan hari besar keagamaan.
- b. Pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal
- c. Distribusi barang komoditas bahan pokok masih cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat pedagang pasar, sehingga berdampak terhadap harga produk yang mahal ditingkat konsumen.
- d. Mindset/pola pikir dan perilaku pedagang pasar baik dalam hal manajemen, layanan dan kebersihan lingkungan pasar yang belum maju.
- e. Dari beberapa pasar rakyat yang dibangun agar sesuai dengan indikator utama SKPD adalah persentase pasar rakyat yang dikelola secara moderen di 5 (lima) kecamatan.

- f. Masih adanya tunggakan retribusi pasar.

Solusi

- a. Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar, meskipun anggaran kegiatan terkait operasi pasar dan pemantauan harga yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Tahun 2022 tidak ada/ adanya pemangkasan anggaran, tetapi dinas Perdagangan tetap melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas gejolak harga jenis bahan pokok yang terjadi dipasar, selanjutnya kegiatan ini akan tetap dilaksanakan di tahun 2023.
- b. Kegiatan Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu. Pengawasan ini belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan kondisi masa transisi pandemi Covid 19, sehingga pada Tahun 2022 petugas pengawasan kualitas barang beredar tidak dapat kelapangan/kepasar. Selanjutnya kegiatan pengawasan pemantauan kualitas barang tetap akan dilaksanakan pada Tahun 2023
- c. Terkait dengan distribusi komoditas bahan pokok , langkah yang diambil Dinas Perdagangan Tahun 2022 adalah memutus jalur distribusi barang agar lebih cepat dan efisien, seperti pemasokan harga gas elpiji dan harga gula yang meningkat pada Tahun 2022 yang juga dipengaruhi adanya masa transisi Pandemi Covid-19.
- d. Adapun langkah yang akan diambil oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru adalah melakukan pelatihan manajemen, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kebersihan akan menambah armada truk sampah.
- e. Meningkatkan sarana prasarana pasar agar sesuai dengan pasar modern standar SNI 8152:2015 dan mendorong pasar rakyat berdaya saing dan maju bersama dengan pusat pembelian toko modern. Maka Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru terus melengkapi sarana dan prasarana pasar di Kota Banjarbaru.

- f. Sesuai dengan tupoksi Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 pembuatan dan menerapkan aplikasi database dalam pengelolaan keuangan retribusi, dengan meningkatkan koordinasi dengan semua elemen yang berhubungan dengan pungutan retribusi pasar

6. Urusan Perindustrian

Permasalahan

Distribusi barang komoditas bahan pokok masih cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat pedagang pasar, sehingga berdampak terhadap harga produk yang mahal ditingkat konsumen.

Solusi

Langkah yang diambil oleh Dinas Perdagangan adalah pemanfaatan teknologi informasi, promosi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi IKM agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri, tetapi pada Tahun 2022 kegiatan industri terkait peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan promosi / pameran tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pemangkasan anggaran yang terjadi diakibatkan adanya masa transisi pandemi Covid-19 pada Tahun 2022, tetapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana kinerja Dinas Perdagangan tetap terlihat dengan tetap mengambil langkah dalam rangka meningkatkan berkembangnya pelaku usaha industri yang terdampak dengan cara memberikan bantuan barang untuk produk Industri seperti mesin jahit, dll serta Dinas Perdagangan kota Banjarbaru :

- Melakukan promosi yang lebih intensif.
- Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk para pelaku usaha IKM dan selanjutnya kegiatan dalam rangka

b. Visi dan Misi

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Visi pembangunan Kota Banjarbaru yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu:



**“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA”
(BANJARBARU JUARA)**

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang ingin ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Penjabaran dari misi yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

Diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kinerja pembangunan Pendidikan, peningkatan kinerja pembangunan kesehatan dan pembangunan gender. Masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi maupun pribadi masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Dengan mewujudkan dengan kondisi masyarakat Kota Banjarbaru yang lebih maju dan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi, termasuk dalam hal pemulihan ekonomi di tengah pandemik COVID-19, diantaranya adalah dengan pengembangan RT Mandiri, pertanian, dan pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana publik (*Banjarbaru Corner*), serta pengembangan kepemudaan dan olahraga. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup.

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Diwujudkan dengan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih.

Dalam periode 2021-2026 mendatang tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart government*, dimana pelayanan dilaksanakan memanfaatkan TIK dan Pelayanan Publik yang partisipatif dengan pelibatan masyarakat dalam

perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagi media serta pelayanan publik yang inovatif melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara professional.



Tabel 1.7 Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi	Tahun						Kondisi
				Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir RPJMD
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia											
Tujuan :											
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	79,10	79,20	79,30	79,40	79,50	79,60	79,70	79,70
Sasaran 1 :											
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,95	10,96	10,97	10,98	10,99	11,00	11,01	11,01
Sasaran 2 :											
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	2.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,99	72,10	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60	72,60
	3.	Angka Prevalensi Stunting	Angka	17,34	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,50
Sasaran 3 :											



Meningkatnya Kesenjangan gender	4.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,55	92,60	92,65	92,70	92,75	92,80	92,85	92,85
Sasaran 4 :											
Terjaganya Daya Beli Masyarakat	5.	Angka Inflasi	%	2,25	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Sasaran 5 :											
Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	6.	Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	7.	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup											



Tujuan :											
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi		%	-1,88	2 - 3	4	4 - 5	5	5 - 6	6,93	6,93
	Indeks Gini		Indeks	0,380	0,375	0,370	0,365	0,360	0,355	0,350	0,350
Sasaran 1 :											
Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	8.	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	-7.22	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	4,50
	9.	Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil, dan ekonomi kreatif	%	-0,67	3,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	6,50
Sasaran 2 :											
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	10.	Peningkatan PAD (Milyar)	Rp	-	238,7	246,6	254,5	264,3	273,2	300,7	300,7
	11.	Persentase Peningkatan Investasi	%	-	4	4	4	4	4	4	4
Sasaran 3 :											



Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	12.	Angka Kemiskinan	%	4,01	4,50	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	4,00
	13.	Angka Pengangguran	%	5,54	5,39	5,24	5,09	4,94	4,79	4,64	4,64
Sasaran 4 :											
Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	14.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	Skor	80,11	80,21	80,45	80,90	81,71	82,10	82,51	82,51
Sasaran 5 :											
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	15.	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	78,69	74,28	75,99	77,56	79,26	80,81	82,37	82,37
Sasaran 6 :											
Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	62,17	62,67	63,17	63,67	64,17	64,67	64,67
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah											
Tujuan :											



Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi		Kategori	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Sasaran 1 :											
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	17.	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
	18.	Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	19.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	20.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	21.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71.67	72	73	74	75	76	77	77
Sasaran 2 :											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



			Nilai	89,23	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
Sasaran 3 :											
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	23.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,62	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67	2,67

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD

pencapaian tujuan perencanaan pembangunan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun tersebut, maka ditentukan lah Program kerja yang akan dilakukan. Berikut adalah program kerja pembangunan daerah berdasarkan dokumen RPJMD Kota Banjarbaru.

Tabel 1.8 Program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru

Misi,Tujuan,Sasaran, Program Pembangunan Daerah
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
Tujuan :



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Pembinaan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (BLUD)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengendalian Penduduk
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesenjangan gender
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program Perlindungan Khusus Anak
Sasaran 4 : Terjaganya Daya Beli Masyarakat
Program Perekonomian Dan Pembangunan
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



Sasaran 5 :
Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Program Penanggulangan Bencana
Program Penanganan Bencana
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan :
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan



Sasaran 1 :**Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota**

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pengembangan Kebudayaan

Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Daya Saing Kepemudaan

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
(UMKM)

Program Pengembangan UMKM

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan



Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Perencanaan dan Pengembangan Industri
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran 3 :

Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran

Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja



Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial
Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sasaran 4 :
Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



Program Penyuluhan Pertanian
Sasaran 5 : Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas
Program Pengembangan Perumahan
Program Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Penatagunaan Tanah
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Pengembangan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)



Sasaran 6 :
Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
Tujuan :
Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN
Sasaran 1 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Program Pengelolaan Arsip
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program Perijinan Penggunaan Arsip
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Program Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Program Pelayanan Penanaman Modal



Program Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sasaran 3 :
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD

Perancaaan pembangunan daerah direncanakan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Setelah menentukan perencanaan pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka selanjutnya ditentukan lah pencapaian perencanaan pembangunan tersebut agar tercapai secara bertahap setiap tahunnya. Berikut adalah kegiatan pembangunan daerah berdasarkan RKPD :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								263,354,825,722	270,615,176,781				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								183,605,030,524	183,796,133,280				
					Predikat akuntabilitas kinerja			B										
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								58,956,000	0				
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD			100%										
					Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender													
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan kinerja SKPD yang tersedia Jumlah monitoring dan evaluasi kinerja SKPD Jumlah rencana kerja anggaran SKPD yang tersedia Jumlah rencana kinerja SKPD yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokomen 12 Kali 2 Dokumen 2 Dokumen	58,956,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								181,863,219,065	181,863,219,065				
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan			100%										
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							181,741,301,065	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				181,741,301,065	
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							121,918,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				121,918,000	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								852,121,459	1,016,800,000				
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			100%										
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun	42,244,459	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,000,000	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		penyediaan alat tulis kantor penyediaan makan minum kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun 1 Tahun	212,248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				230,000,000	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun	30,829,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		566,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				708,800,000
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								190,020,000					200,000,000
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan							100%						

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Pengadaan Mebel		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		103,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,000,000
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		51,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								361,695,000				375,000,000
					Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi												
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		121,695,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								279,019,000				341,114,215
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik												
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		34,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,000,000
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan,pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional lapangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		66,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			76,000,000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		12,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			195,114,215

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

1	01	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana da Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								66,691,361,785					73,107,688,418
						Persentase capaian SPM bidang PAUD (%)													
						APK PAUD (%)													
						Persentase sarana dan prasarana PAUD sesuai SNP (%)													
						Persentase PAUD berakreditasi B (%)													
						Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi													
1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								36,519,859,937					41,237,888,393
						Persentase capaian SPM bidang Pendidikan Dasar (7-12 Th) (%)													
						APK SD (%)													
						APM SD (%)													
						Angka putus sekolah SD (%)													
						Angka kelulusan SD (%)													
						Persentase sarana dan prasarana SD sesuai SNP (%)													
						Persentase SD berakreditasi A (%)													
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	01	02	2.01	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah ruang guru/kepalaSekolah/TU		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Ruang		897,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,036,350,000
1	01	02	2.01	06		Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Luas/Panjang Batapress Yang dipasang Jumlah Luas/Panjang Drainase yang dibangun Jumlah Luas/Panjang Pagaryang dibangun Jumlah Ruang Ibadah yangdibangun Jumlah Ruang Kelas yang dibangun Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun Jumlah Ruang UKS Yangdibangun Jumlah Sarana Air Bersihdan Sanitary yang dibangun (WC)		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15500 M2 625 Meter 1375 Meter 2 Ruang 4 Ruang 3 Ruang 2 Ruang 4 Paket		4,815,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,898,250,000
1	01	02	2.01	08		Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas		Jumlah Ruang Kelas Yang diperbaiki		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Ruang		2,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,205,000,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINASPENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TUyang diperbaiki Jumlah Ruang Perpustakaan yang diperbaiki Jumlah Ruang Pertemuan/Aula yang diperbaiki Jumlah Ruang UKS Yang diperbaiki Jumlah Rumah Dinas Yang diperbaiki Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary(WC) yang diperbaiki		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 2 Ruang 10 Ruang 18 Paket		3,412,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			4,186,875,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Meja dan Kursi Siswa Yang diadakan/disalurkan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		196 Set		102,900,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			108,045,000
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan/disalurkan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		462,000,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD			485,100,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah sekolah yang dibiayai Operasionalnya (Bosda) Jumlah sekolah yang dibiayai Operasionalnya (Bosreg)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103 Sekolah 68 Sekolah		22,334,132,952	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPAT AN DAERAH YANG SAH			25,684,252,894
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Siswa SD yang mengikuti Penilaian Ujian/Asisment		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4071 siswa		469,260,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			539,650,000
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Sekolah yang tersosialisasi Pemenuhan SPM SD		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85 Sekolah		108,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			124,900,000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Peserta/Siswa yang mengikuti lomba minat bakat dan kreatifitas siswa		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		730 Siswa/jenis lomba		459,856,650	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			540,335,147
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								1,332,600,335	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			1,399,230,352

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah yang mengikuti pelatihan/bimtek akreditasi sekolah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Sekolah		26,010,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				29,900,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							19,258,373,683					20,075,888,635	
					Persentase capaian SPM bidang Pendidikan Dasar (13-15 Th) (%)		92%											
					APK SMP (%)		104%											
					APM SMP (%)		91,50%											
					Angka putus sekolah SMP (%)		0%											
					Angka kelulusan SMP (%)		100%											
					Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)		100%											
					Persentase sarana dan prasarana SMP sesuai SNP (%)		85,60%											
					Persentase SMP berakreditasi A (%)		75%											
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Luas/Panjang Batapress yang dipasang Jumlah Luas/Panjang Pagar yang dibangun Jumlah parkir sekolah yang dibangun Jumlah sanitasi sekolah yang dibangun Jumlah wastafel/sarana air bersih yang dibangun				1950 M2 200 Meter 1 Paket 4 Paket 1 Paket		1,970,920,900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				1,398,371,345
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								1,072,182,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				1,608,273,000
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah								1,085,321,160	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				1,139,587,718
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								689,173,420	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				723,632,091
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah								500,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				525,000,000
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								100,035,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				205,071,750
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								10,097,823,938	LAIN-LAIN PENDAPAT AN DAERAH YANG SAH				10,602,715,135
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								2,000,700,000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP				2,000,700,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik								672,348,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				705,966,030
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								144,692,100	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				151,926,705
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								393,158,640	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				412,816,572
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								432,094,675	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				496,908,876
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								99,923,250	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				104,919,413
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								7,707,778,165					8,428,294,890
					Persentase capaian SPM bidang PAUD (%)							88%						
					APK PAUD (%)							88%						
					Persentase sarana dan prasarana PAUD sesuai SNP (%)							100%						
					Persentase PAUD berakreditasi B (%)							75%						
					Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi							25%						
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Ruang Kelas yang dibangun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ruang		200,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Area Parkir yang dibangun Jumlah luas Paving Blok yang dipasang		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 area parkir 300 M2		190,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				199,500,000

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Ruang Kelas PAUD yang diperbaiki/direhab		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Ruang		120,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			126,000,000	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Sekolah yang mendapatkan BOP PAUD Jumlah Sekolah yang mendapatkan BOP PAUD		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Sekolah Negeri 165 Sekolah Swasta		5,760,000,000	DAK Non Fisik - BOP PAUD			6,300,000,000	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								666,778,165	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			766,794,890	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		JUmlah Sekolah yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Sekolah Negeri		771,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			836,000,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							3,205,350,000	3,365,616,500					
					Persentase capaian SPM bidang Kesetaraan (%)			100%										
					Persentase penduduk berusia >15 tahun yang melek huruf (%)			99,10%										
					Persentase kelulusan Paket A			100%										
					Persentase kelulusan Paket B			100%										
					Persentase kelulusan Paket C			100%										
					Persentase pendidikan nonformal yang terakreditasi			71%										
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2,830,047,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan			2,971,549,000	

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN

1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah WB yang mengikuti Paket A Jumlah WB yang Mengikuti Paket B Jumlah WB yang Mengikuti Paket C		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		173 WB 524 WB 906 WB		314,719,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				330,455,000
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah PKBM yang dimonitoring Jumlah TBM yang dimonitoring		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 PKBM 18 TBM		22,254,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				23,366,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Kursus yang diselenggarakan/dilaksana kan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kursus		38,330,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				40,246,500
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								13,058,433,413					13,711,355,083
					Persentase pendidik yang bersertifikasi													
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								13,058,433,413					13,711,355,083
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya :													
					Persentase guru dan tenaga kependidikan PAUD berkualifikasi minimal S1 (%)							77,98 %						
					Persentase guru dan tenaga kependidikan SD berkualifikasi minimal S1 (%)							88,74 %						
					Persentase guru dan tenaga kependidikan SMP berkualifikasi minimal S1 (%)							87,79 %						
					Persentase guru dan tenaga kependidikan PAUD bersertifikat pendidik (%)							33,40292276 %						
					Persentase guru dan tenaga kependidikan SD bersertifikat pendidik (%)							41,9205298 %						
					Persentase guru dan tenaga kependidikan SMP bersertifikat pendidik (%)							57,46388443 %						
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								13,058,433,413	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				13,711,355,083
TOTAL													263,354,825,722					270,615,176,781

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								2,013,624,125				2,120,285,250			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								848,135,950				891,841,300			
					Predikat akuntabilitas kinerja				B											
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								43,135,950				46,571,300			
					Cakupan administrasi perkantoran				100%											
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 Tahun		5,300,850	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				6,616,000		
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Makan Minum Kantor		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 Tahun 1 Tahun		29,102,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				30,557,100		
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 Tahun		4,312,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				4,755,000		
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 Tahun		2,350,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				2,468,200		
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 Tahun		2,070,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				2,175,000		
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								41,400,000				43,470,000			
					Cakupan ketersediaan sarana prasarana				100%											
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		4 Unit		41,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				43,470,000		
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%				69,000,000				72,450,000			
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		48,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				50,715,000		

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 Tahun		20,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				21,735,000
---	----	----	------	----	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	------------

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0001 UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				694,600,000								729,350,000		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 Jenis		4,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			4,850,000		
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Bangunan		690,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			724,500,000		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								1,165,488,175					1,228,443,950	
					Predikat akreditasi pengelolaan SKB							A							
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								49,000,000					51,450,000	
					Persentase capaian SPM bidang PAUD (%)							88%							
					APK PAUD (%)							88%							
					Persentase sarana dan prasarana PAUD sesuai SNP (%)							100%							
					Persentase PAUD berakreditasi B (%)							75%							
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah Sekolah yang mendapat Biaya Operasional Sekolah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lembaga		49,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			51,450,000		
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1,116,488,175					1,176,993,950	
					Persentase capaian SPM bidang Kesetaraan (%)							100%							
					Persentase penduduk berusia >15 tahun yang melek huruf (%)							99,10%							
					Persentase kelulusan Paket A							100%							
					Persentase kelulusan Paket B							100%							
					Persentase kelulusan Paket C							100%							
					Persentase pendidikan nonformal yang terakreditasi							71%							
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah SKB/TBM/KF yang mendapatkan Biaya Operasional		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lembaga		662,938,250	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			696,085,150		
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Paket A Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Paket B Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Paket C		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88 Warga Belajar 90 Warga Belajar 220 Warga Belajar		364,380,375	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			382,599,400		
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Kursus yang diselenggarakan/dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kursus		89,169,550	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			98,309,400		
TOTAL												2,013,624,125					2,120,285,250		

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								48,813,685,562				51,256,037,145	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,423,295,537				2,271,730,350	
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal			100%										
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								140,000,000				154,000,000	
					Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%										
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 Dokumen		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		6 laporan		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,000,000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								180,000,000				198,000,000	
					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%										
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Laporan		67,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			73,700,000	
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		12 laporan		113,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			124,300,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,053,446,269				869,881,082	
					Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%										
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 jenis		183,748,936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			183,749	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 jenis		242,621,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			242,621,200	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 jenis		87,609,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87,609,500	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		24 eks		2,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,880,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3 laporan		536,586,633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			536,586,633	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								496,300,000				496,300,000	
					Persentasea Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%										

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		33 buah		88,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				88,200,000
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		62 buah		408,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				408,100,000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								367,919,268					367,919,268
					Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100%						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 jenis		300,719,268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,719,268
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa pelayanan umum kantor lainnya		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		8 orang		67,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67,200,000
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								185,630,000					185,630,000
					Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara							100%						
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 unit		37,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,600,000
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan terpelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		35 unit		98,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				98,030,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		45 unit		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 paket		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,000,000
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 bangunan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								43,726,312,025					46,156,761,395
					Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik							100%						
					Angka Kematian Bayi							3,4 AKB						
					Angka Kematian Ibu							90						
					Angka Kesakitan							27%						
					Prevalensi Gizi Kurang							8						
					Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik							100%						
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								21,145,939,325					22,203,236,292

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

					Persentase Fasilitas Puskesmas dalam keadaan baik	100%			
--	--	--	--	--	---	------	--	--	--

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

					Persentase sarana Fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan baik	100%											
					persentase alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam keadaan baik	100%											
					Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%											
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas			DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				0
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Puskesmas		14,304,540,000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				15,019,767,000
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang diadakan sarana fasilitas pelayanan kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		226,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				237,300,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas disediakan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		1,366,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,434,300,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang disediakan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		1,606,998,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				1,687,347,900
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Puskesmas yang terlayani pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan				10 Puskesmas		88,873,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				93,316,650
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan obat dan vaksin		Semua Kabupaten/Kota, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan		10 Puskesmas		2,180,930,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar				2,289,977,500

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Puskesmas yang tersedia bahan medis habis pakai		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		1,372,597,373	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Pengendalian Penyakit			1,441,227,242
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								21,661,532,700				22,988,743,103
					Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100%										
					Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai Standar		100%										
					Persentase Ibu bersalin Mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar		100%										
					Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase orang usia Produktif (15-59 th) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase orang usia lanjut (≥60 th) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					PersentasePenderita hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					PersentasePenderita Diabetes melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase Orang terduga TBC Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase KLB yang ditanggulangi		100%										
					Persentase meningkatnya Penurunan kasus PD3i		20%										
					Persentase Puskesmas Pelayanan Kesehatan jiwa & NAPZA		100%										
					Persentase keberhasilan pengendalian penyakit menular dan tidak menular		87.5%										
					Persentase Promosi kesehatan		60%										
					Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 (satu) puskesmas yang tersertifikasi akreditasi		100%										
					Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		100%										
					Persentase Penurunan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)		11%										
					Persentase Gizi Kurang		8%										
					Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stop Buang Air Besar Sembarangan)		100%										
					Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%										
					Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100%										
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah Ibu Hamil Yang Terlayani Sesuai Standar Jumlah sdm kesehatan unyruk pelayanan kesehatan sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5473 buah 5473 orang 30 orang		120,691,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			126,726,075

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4808 buah 4808 orang 30 orang		622,855,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan			653,997,908	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah bayi baru lahir yang dilayani sesuai standar Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4788 orang 14364 buah 30 orang		80,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,105,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah balita yang dilayani sesuai standar Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah sdm kesehatan unyruk pelayanan kesehatan sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		23269000 orang 46538 buah 40 orang		7,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106,380,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah sdm kesehatan unyruk pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah usia pendidikan dasar yang dilayani sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		41996 buah 50 orang 41996 orang		70,600,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			95,300,250	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah sdm kesehatan unyruk pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		32 kit 50 Orang 189723 orang		397,393,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			417,262,650	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Lansia yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah logistik kesehatan yang tersedia Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		23098 lansia 23098 buah 50 orang		58,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61,845,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah sdm kesehatan unytuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		32 kit 66953 orang 50 orang		57,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,375,000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55800 buah 4650 orang 50 orang		57,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,375,000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 kit 383 orang 30 orang		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah sdm kesehatan unytuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5713 buah 5713 orang 41 orang		66,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,300,000	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah sdm kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		7161 buah 7161 orang 50 orang		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			121,000,000	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah puskesmas Yang Melaksanakan Penanggulangan KLB < 24 jam Jumlah puskesmas yang melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam (PE)		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas 10 Puskesmas		661,899,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			694,994,200	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah organisasi PMI yang di sediakan biaya operasionalnya		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 buah		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,000,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah balita kurang Jumlah Ibu hamil KEK		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		898 orang 528 orang		262,550,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			275,091,600	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		241,471,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			253,545,400	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stop Buang Air Besar Sembarangan) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		20 kelurahan 10 Puskesmas		386,454,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			405,776,700	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		77 kali		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			367,500,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			135,000,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Jumlah Kelurahan yang mencapai UCI Jumlah Penemuan Kasus Non AFP ≥3 kasus Jumlah penurunan kasus penyakit PD3I Jumlah Puskesmas yang capaian biasanya lebih atau sama dengan 95%		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4506 orang 20 kelurahan 3 kasus 40 kasus 10 Puskesmas		203,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			223,855,500	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan jiwa (ODMK)		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan ODMK		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,000,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan UBM Jumlah sekolah yang meimplementasikan KTR		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas 10 Puskesmas 44 Sekolah		220,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			231,000,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Puskesmas Yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan haji		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		72,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,420,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Angka penemuan kasus baru kusta (CDR) per 100000 penduduk Jumlah Faskes yang menangani kasus gigitan Hewan Penular Rabies yang sesuai standar Jumlah kegiatan prioritas nasional yang didanai Jumlah Kelurahan dengan API < 1 per 1000 penduduk Jumlah Kelurahan dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk Jumlah penemuan penderita diare balita Jumlah penemuan pneumonia balita yang ditangani sesuai standar Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan deteksi dini gangguan indera penglihatan dan gangguan indera pendengaran Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Deteksi Dini gangguan indera penglihatan dan gangguan indera pendengaran Prevalensi HIV per 1000 penduduk Puskesmas yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B pada kelompok berisiko (Bumil)		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 rate 16 Faskes 9 kegiatan 20 kelurahan 16 kelurahan 4598 balita 2094 balita 10 Puskesmas 10 Puskesmas 5 angka 10 Puskesmas		484,392,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			508,611,915	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kelas 3		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		33561 jiwa		15,223,269,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,984,433,080	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan skrining/ deteksi dini penyalahgunaan NAPZA		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Puskesmas		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			192,500,000	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan kawasan sehat		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 Kecamatan		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		491,800,000				516,390,000	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Puskesmas Yang melaksanakan penanggulangan KIPI		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kewaspadaan dini> 85 %		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		23,170,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,487,825	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Penanganan Kegawat Daruratan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		550 kasus		761,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			799,470,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							230,000,000				241,500,000		
					Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi			100%										
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi manajemen dan informasi kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			241,500,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							688,840,000				723,282,000		
					Persentase Puskemas BLUD			100%										
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pemenuhan pelayanan UKP dan UKM		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Puskesmas		688,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			723,282,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,460,260,000				1,541,173,000		
					Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan			100%										
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							42,000,000				52,000,000		
					Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kota Banjarbaru yang dikeluarkan			100%										
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Perijinan praktek Tenaga Kesehatan yang ditindak lanjuti		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		100 Nakes		21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,000,000	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Perijinan tenaga kesehatan yang dievaluasi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		100 orang		21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,000,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	707,000,000		742,350,000
---	----	----	------	--	--	-------------	--	-------------

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

					Persentase Tenaga Kesehatan memenuhi uji kompetensi			100%										
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Perencanaan SDM Kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 dokumen		78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,900,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah dokumen SDM kesehatan sesuai standar		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 dokumen		297,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				311,850,000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti lomba pemilihan tenaga kesehatan teladan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		90 orang 43 orang		332,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				348,600,000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							711,260,000				746,823,000		
					Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan			100%										
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokter yang mengikuti PIDJ Jumlah tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang mengikuti bimbingan teknis Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 orang 150 Nakes 30 Nakes		711,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				746,823,000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							501,088,000				526,142,400		
					Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan			98%										
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							294,402,000				309,122,100		
					Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin serta dilakukan pembinaan dan pengawasan			100%										
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Pengawasan apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		60 buah		238,572,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				250,500,600
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah data perizinan dan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 dokumen		20,830,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				21,871,500

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan survey kelayakan perizinan dan praktik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		250 sarana		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36,750,000	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							84,760,000				88,998,000		
					Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang dilakukan pengawasan							95%						
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah rekomendasi sertifikat sarana pangan industri rumah tangga		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1150 rekomendasi		84,760,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			88,998,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							30,130,000				31,636,500		
					Persentase TPM Yang memenuhi syarat Kesehatan							95%						
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah TPM Yang memenuhi syarat kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1371 buah		30,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,636,500	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							91,796,000				96,385,800		
					Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri rumah Tangga							100%						
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah produk makanan-minuman industri rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan post market		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		25 sampel		91,796,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			96,385,800	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							702,730,000				760,230,000		
					Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan							100%						
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							327,730,000				352,730,000		
					Prosentase promosi /advokasi pada organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor yang mendukung kesehatan							100%						

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah promosi /advokasi pada organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor yang mendukung kesehatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		34 buah		327,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				352,730,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	---------	--	-------------	--	--	--	--	-------------

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000					157,500,000
					Persentase Rumah Tangga Ber PHBS Di Kota Banjarbaru			50%									
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah rumah tangga yang disurvei/dibina dalam implementasi perilaku hidup bersih dan sehat		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1050 rumah tangga		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			157,500,000
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							225,000,000					250,000,000
					Persentase UKBM yang Aktif			100%									
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah UKBM yang aktif		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		196 buah		225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000
TOTAL												48,813,685,562					51,256,037,145

Unit Organisasi: 1.0200000003.0000 RSD IDAMAN KOTA BANJARBARU (BLUD)
sub Unit Organisasi: 1.02.0000000.03.0000 RSD IDAMAN KOTA BANJARBARU (BLUD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							113,155,713,300				0		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							113,155,713,300				0		
					IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		83											
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							113,155,713,300				0		
					Persentase Peningkatan Kunjungan pada Layanan Kesehatan untuk UKP di RSD Idaman		90											
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Pelayanan Medis Yang Terlaksana		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90 Persen		113,155,713,300	Pendapatan dari BLUD			0	
TOTAL											113,155,713,300				0			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan		Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
											Program	Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								239,858,052,755					261,209,873,855			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,202,863,995					7,202,863,995			
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah						BB										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi						100%										
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73,016,000					73,016,000					
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD						100%										
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		41,842,750	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				41,842,750			
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		31,173,250	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				31,173,250			
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,096,886,185					5,096,886,185			
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan						100%										
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48 Orang		5,018,049,185	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				5,018,049,185			
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		62,837,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				62,837,000			
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		16,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				16,000,000			
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								520,373,810					520,373,810			
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi						bAIK										
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Buah		68,445,310	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				68,445,310			
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Buah		167,528,500	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				167,528,500			

1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Buku 12 Lembar		26,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				26,000,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target		
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan		Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Buah		8,400,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				8,400,000	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		250,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				250,000,000	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							311,120,000				311,120,000		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan					100%								
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Buah		78,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				78,000,000	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		TJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Unit		148,600,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				148,600,000	
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Buah		84,520,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				84,520,000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							216,600,000				216,600,000		
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi					100%								
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Jenis		183,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				183,000,000	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa pelayanan umum kantor lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Orang		33,600,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				33,600,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							984,868,000				984,868,000		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik					100%								

1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		36,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					36,000,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Unit		316,868,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					316,868,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah alat besar yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit		160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					160,000,000	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Unit		16,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					16,000,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		440,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					440,000,000	
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara				2 unit		16,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					16,000,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								85,901,336,500					93,433,228,000		
					Persentase peningkatan perlindungan banjir							35,24%								
					Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi							69,35%								
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								64,759,726,000					72,291,617,500		
					Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun							35,24%								
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung yang Terpelihara		Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka		2 Buah		20,314,979,000	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil					20,314,979,000	
1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul/Tebing Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya yang Tertangani		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5427 M		37,474,476,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					40,039,306,000	
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung yang Terpelihara				3 Buah		0						0	

1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Persentase panjang tanggul dan tebing yang terpelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8386 M		6,970,271,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					11,937,332,500
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								21,141,610,500					21,141,610,500	
					Persentase Kinerja Sistem Irigasi			69,35%											
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan				4900 meter		17,183,964,500	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik					17,183,964,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja						
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur					Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi				300 Ha		2,675,856,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					2,675,856,000
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Luas Daerah Irigasi yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Ha		1,281,790,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum					1,281,790,000
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								11,550,000,000					12,705,000,000	
					Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota			97,70%											
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								11,550,000,000					12,705,000,000	
					Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman			97,70%											
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		97.70 %		11,550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik – Bidang Air Minum – Penugasan					12,705,000,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								7,317,000,000					7,887,000,000	
					Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota			100%											
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								7,317,000,000					7,887,000,000	
					Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai			100%											
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan IPLT				100 %		1,617,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,617,000,000

1	03	05	2.01	06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Dibangun		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		270 KK		5,700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik – Bidang Sanitasi – Penugasan				6,270,000,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								34,957,064,660				37,002,464,660		
					Persentase saluran drainase yang berfungsi baik							59,85%							
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								34,957,064,660				37,002,464,660		
					Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik							53,23%							
					Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik							66,46%							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
											Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Panjang saluran drainase kota yang dibangun			Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar Kota		2500 Meter		3,613,480,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum			3,613,480,000	

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

									Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan		Panjang drainase yang berfungsi dengan baik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1162 m		4,251,827,900	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				4,251,827,900	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Panjang saluran drainase kota yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4507 M		6,637,756,760	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				6,637,756,760	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Target	
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan		Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang direhabilitasi				3424 meter		5,007,969,000	Dana Insentif Daerah				6,445,514,000	
1	03	06	2.01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan		Panjang saluran drainase jalan lingkungan yang ditingkatkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11038 meter		15,446,031,000	Dana Insentif Daerah				16,053,886,000	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN								24,270,678,000				24,270,678,000		
					Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategiskota dalam kondisi baik						87,06%								
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								24,270,678,000				24,270,678,000		
					Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang						87,06%								
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Panjang peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Panjang perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.286 m 4.800 m		24,270,678,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,270,678,000	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								7,317,780,000				15,637,000,000		
					Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik						100%								
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								7,317,780,000				15,637,000,000		
					Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik						100%								
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik Dalam Kondisi Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		6,680,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,000,000,000	
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota								637,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				637,000,000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								868,000,000				1,000,000,000		
					Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik						100%								
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								868,000,000				1,000,000,000		
					Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik						100%								

1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Presentase Sarana Publik Dalam Kondisi Baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		868,000,000					1,000,000,000		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							58,468,340,100				60,165,649,700			
					Tingkat kemantapan jalan kota						81,32%								
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							58,468,340,100				60,165,649,700			
					Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang						82,11%								
					Persentase jalan kota yang terbangun						5,08%								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
											Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan			Panjang jalan kota yang dibangun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam		2570 m		15,000,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum			15,000,000,000	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan			Panjang jalan kota yang ditingkatkan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4595 m		24,115,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik			24,115,000,000	

1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan Kota dan Jembatan yang dipelihara	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		4922 m		12,926,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,926,999,900
---	----	----	------	----	--------------------	--	---	--	--	--------	--	----------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan Kota dan Jembatan yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar		2330 m		2,402,640,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				2,402,640,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan Kota dan Jembatan yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat		2564 m		3,133,647,950	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			4,830,957,550	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan		Panjang jalan kota yang ditingkatkan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah		0 m		0	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				0

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1		03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jalan Kota dan Jembatan yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 m		890,052,250	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				890,052,250				
	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
														Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
1		03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								235,382,500			136,382,500						
						Persentase Layanan Informasi dan Rekomendasi Teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi				100%													
1		03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								23,265,000			23,265,000						
						Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU				100%													
1		03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi Jasa Konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Layanan		23,265,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,265,000					
1		03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)								33,399,500			33,399,500						
						Persentase rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP				100%													
1		03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang terselesaikan sesuai dengan SOP				40 Rekomendasi		33,399,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,399,500					
1		03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								178,718,000			79,718,000						
						Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi				100%													
1		03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Paket Pekerjaan		178,718,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79,718,000					
1		03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1,769,607,000			1,769,607,000						
						Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)				70%													
1		03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								1,094,227,500			1,094,227,500						
						Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang				25%													
1		03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah di Perdakan				1 Dokumen		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000					
1		03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen teknis Rencana Tata Ruang yang disusun				1 Dokumen		744,227,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			744,227,500					
1		03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								473,849,500			473,849,500						
						Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang				100%													
1		03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang				100 Persen		473,849,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			473,849,500					

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1		03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	201,530,000		201,530,000
---	--	----	----	------	--	--	-------------	--	-------------

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.11.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

					Persentase penertiban pemanfaatan ruang				100%													
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah lokasi yang di evaluasi kesesuaian peruntukannya					50 Lokasi		201,530,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				201,530,000			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													4,321,997,500				4,321,997,500
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													4,321,997,500				4,321,997,500
					Persentase luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun							0,044%										
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													4,321,997,500				4,321,997,500
					Luasan RTH lingkungan perumahan/fasilitas umum yang terbangun							79824 m²										
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Jumlah Lokasi RTH Lingkungan Perumahan/Fasilitas Umum yang Terbangun					6 Lokasi		4,321,997,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,321,997,500			
TOTAL														244,180,050,255					265,531,871,355			

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								10,886,089,889				10,886,089,889	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,860,256,214				7,860,256,214	
					Indeks kepuasan pelayanan internal			80%										
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								24,666,888				24,666,888	
					Nilai Evaluasi AKIP			BB										
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender				1 dokumen 1 dokumen		5,326,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,326,475	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan				3 dokumen		19,340,413	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19,340,413	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,831,989,725				6,831,989,725	
					Indeks kepuasan pelayanan internal			100%										
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89 Orang		6,801,911,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,801,911,600	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuanganan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan				2 laporan		14,929,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,929,200	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan				9 laporan		15,148,925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,148,925	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								285,550,000				285,550,000	
					Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah			100%										
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas pegawai				172 Steel		154,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			154,000,000	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah personil Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar, bimtek, dan diklat				7 peserta		117,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			117,750,000	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek PPNS				2 peserta		13,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,800,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								216,715,884				216,715,884	
					Indeks kepuasan pelayanan internal			100%										

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia				19 jenis		10,444,159	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,444,159
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				16 Jenis		178,996,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				178,996,950
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah barang penggandaan yang tersedia				9 eks 6150 lembar		10,818,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,818,775
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia				4 eks		3,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,960,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan				16 laporan		12,496,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,496,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								13,800,000				13,800,000	
					Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik							100%						
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		tersediannya penggunaan peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik				8 jenis		13,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,800,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								113,644,080				113,644,080	
					Indeks kepuasan pelayanan internal							100%						
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah langganan rekening telpon, air, listrik, faxsimile dan internet terbayar				12 Bulan		95,164,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				95,164,080
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terlaksanannya kegiatan kebersihan kantor				2 orang		18,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,480,000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								373,889,637				373,889,637	
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik							100%						
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		36,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,800,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara				19 unit		239,106,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				239,106,850
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				6 buah		14,929,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,929,200

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dalam kondisi baik				100 %		69,891,087	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69,891,087
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								13,162,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,162,500
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2,454,948,050				2,454,948,050	
					Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas							80%						
					Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda Dan Perkada							70%						
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								1,948,976,000				1,948,976,000	
					Persentase Gangguan Tibum dan Tranmas yang ditindaklanjuti							100%						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah aset yang diamankan Jumlah patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Jumlah pengamanan dan pengawasan pejabat		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 tempat 75 kali 60 kali		1,402,284,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,402,284,000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah petugas jaga malam yang mengikuti pelatihan pengendalian swakarsa				360 kegiatan		39,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39,780,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta yang dilantik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang 20 orang		115,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				115,560,000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		jumlah personil yang mengikuti bimtek Terlaksananya diklat dan bimtek		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44 orang 20 orang		125,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				125,840,000
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah pembentukan TIM terpadu penyelenggaraan tibum dan tranmas		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tim		265,512,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				265,512,000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								462,356,000				462,356,000	
					Persentase pelanggaran perda dan perkara yang ditindaklanjuti							100%						
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah perda yang disosialisasikan				4 perda		12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,500,000

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		198 Kegiatan		132,768,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				132,768,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah penindakanterhadap pelanggaran Perda dan Perkada		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Tindakan		317,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				317,088,000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							43,616,050				43,616,050		
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan PPNS						100%							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PPNS yang mengikuti / melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan karier PPNS		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 orang		43,616,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,616,050
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							570,885,625				570,885,625		
					Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Yang terselesaikan						80%							
					Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran Yang terselesaikan						100%							
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							570,885,625				570,885,625		
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tanggap respon time dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		365 kali		570,885,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				570,885,625
TOTAL												10,886,089,889						10,886,089,889

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								7,781,364,468			7,899,277,277		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,924,687,849			3,965,467,126		
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			BB										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100%										
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								36,750,000			37,485,000		
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD			100%										
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		2 Dokumen		15,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16,065,000		
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		2 Dokumen		21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21,420,000		
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,996,907,849			3,056,846,006		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan			100%										
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		25 Orang		2,929,927,849	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,988,526,406		
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		1 Laporan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,100,000		
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		18 Laporan		61,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63,219,600		
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								264,956,000			270,255,120		
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			100%										
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		20 Jenis		4,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,692,000		
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		1188 buah		105,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		108,115,920		
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		60.331 Buku/Lembar 26560 Lembar		15,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,810,000		

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		1133 Eksemplar		5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,202,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		27 Laporan		133,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				136,435,200
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	KeluaranSub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							434,324,000				323,000,000		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			100%										
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		1 Unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250,000,000
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		4 buah		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,000,000
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		8 Unit		68,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				59,000,000
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		2 Paket		356,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		1 Paket		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							44,400,000				127,584,000		
					Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			100%										
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		1 Jenis		25,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				108,000,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa pelayanan umum kantor lainnya		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		2 Orang		19,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19,584,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							147,350,000				150,297,000		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik			100%										

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		44,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44,880,000
---	----	----	------	----	--	--	---	--	---	--	--------	--	------------	------------------------------	--	--	--	------------

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			81,600,000
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,550,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		20,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,267,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								581,000,000				592,620,000
					Persentase Potensi Paham Radikal yang diselesaikan							100%					
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								581,000,000				592,620,000
					Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang MemahamiIdeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							100%					
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		3 Dokumen		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,900,000
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kali		105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			107,100,000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah koordinasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Revolusi mental		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		12 Kali		341,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			347,820,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah monitoring dan evaluasi Wawasan Kebangsaan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		60 Kali		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,800,000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYAPOLITIK								1,650,916,619				1,683,934,951

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

					Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan EtikaSerta Budaya Politik	100%			
--	--	--	--	--	---	------	--	--	--

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								1,650,916,619					1,683,934,951	
					Persentase Peran Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik denganAnggaran Melebihi 50% dari Bantuan Hibah yang diberikan Pemerintah						100%								
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan hibah Jumlah sosialisasi pendidikan politik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		9 Parpol 7 Kali		1,471,156,619	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,579,751	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah koordinasi pendidikan politik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		8 Kali		104,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				106,610,400	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Monitoring dan evaluasi situasi politik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		6 Kali		75,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				76,744,800	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								171,680,000					175,113,600	
					Persentase Ormas yang Aktif						85%								
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								171,680,000					175,113,600	
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan						85%								
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah sosialisasi keormasan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		3 Kali		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				91,800,000	

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah monitoring dan evaluasi keormasan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		40 Kali		81,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			83,313,600	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							433,080,000				441,741,600		
					Persentase Pasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							100%						
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							433,080,000				441,741,600		
					Persentase Instansi yang bekerjasama bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya							100%						
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah sosialisasi P4GN		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		4 Kali		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,800,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		15 Kali		343,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			349,941,600	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							1,020,000,000				1,040,400,000		
					Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani							100%						
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							1,020,000,000				1,040,400,000		
					Persentase Pontensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikasi							100%						
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah sosialisasi/ bimtek kewaspadaan dini		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		1 Kali		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,700,000	

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah koordinasi kewaspadaan dini		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		18 Kali		920,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			938,400,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah monitoring dan evaluasi kewaspadaan dini		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		12 Kali		65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,300,000
TOTAL													7,781,364,468				7,899,277,277

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000DINASSOSIALSubUnit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000DINASSOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								6,593,163,223				7,236,478,745	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,691,947,340				5,145,141,274	
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				100%									
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100%									
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								40,980,500				45,078,550	
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD				4 Dok									
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		22,264,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,490,400	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		18,716,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,588,150	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,605,850,070				3,966,435,077	
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan				100%									
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Orang		3,602,550,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,962,805,077	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,630,000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60,000,000				50,000,000	
					Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya				6 Orang									
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat				6 peserta		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								281,596,370				309,756,007	
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi				100%									
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Jenis		5,499,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,049,637	

Unit Organisasi : 1.06.0.000.0.0001.0000 DINASSOSIAL Sub Unit Organisasi : 1.06.0.000.0.0001.0000 DINASSOSIAL

1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31 Jenis		103,662,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				114,029,190
---	----	----	------	----	----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--	-------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------

1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10021 lembar 5852 lembar		8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,680,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1008 eks		4,989,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5,488,560
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44 Laporan		158,644,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			174,508,620
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								106,110,400				116,721,440
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			100%									
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Perlengkapan Mebel Dapat Terpenuhi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Buah		61,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,716,440
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 buah		44,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			49,005,000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								138,270,000				152,097,000
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			100%									
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		117,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128,865,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		21,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23,232,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								459,140,000				505,053,200
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik			100%									
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		43,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,674,000

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0.000DINASSOSIAL SubUnit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0.000DINASSOSIAL

1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit		86,548,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95,202,800	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Buah		22,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,296,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Gedung		301,664,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			331,830,400	
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket		5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,050,000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							434,111,350				477,522,485		
					Persentase Pekerja Sosial ,tenaga kesejahteraan sosial tenaga sumber kesejahteraansosial , kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan			100%										
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							38,764,000				42,640,400		
					Persentase undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang direkomendasikan			15 izin										
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang Diterbitkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 izin		38,764,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			42,640,400	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							395,347,350				434,882,085		
					Persentase PSKS yang ditingkatkan kemampuannya			100%										
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit		29,038,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			31,942,185	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah TKSK yang Ditingkatkan Kemampuannya				5 Orang		36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,600,000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang Ditingkatkan Kemampuannya				3 SLRT		310,949,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			342,043,900	

1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sumber Daya Manusia LK3 yang ditingkatkan kemampuannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit		19,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				21,296,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						733,377,283				806,715,011		
					Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti			100%									
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						689,377,283				758,315,011		
					Persentase bantuan pemenuhan perbekalan makanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti sosial			100%									
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Menerima Paket Perbekalan Makanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Orang		274,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				302,016,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar yang Memanfaatkan Alat Bantu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang		57,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,895,800	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah PPKS yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial di Rumah Singgah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Orang		30,086,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,094,710	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatJumlah Keluarga PPKS yang Diberikan Bimbingan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		231,385,683	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				254,524,251	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Diberi Layanan Kedaruratan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang		81,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,024,000	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Orang		14,327,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,760,250	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						44,000,000				48,400,000		
					Persentase PPKS yang menerima paket permakanan di rumah singgah			100%									

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0.000DINASSOSIAL SubUnit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0.000DINASSOSIAL

1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Rumah Singgah yang Menerima Paket Permakanan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Orang		44,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48,400,000	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							537,699,250					591,469,175		
					Persentase Anak Terlantar yang dipelihara							100%							
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							110,547,250					121,601,975		
					Persentase Anak Terlantar yang dipelihara							100%							
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar Yang Dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Orang		110,547,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				121,601,975	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							427,152,000					469,867,200		
					Persentase data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola							100%							
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Banjarbaru		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.953 Orang		427,152,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				469,867,200	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							196,028,000					215,630,800		
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota							100%							
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							52,500,000					57,750,000		
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya							100%							
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan		Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3500 orang		27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,250,000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Sandang				50 Paket		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,500,000	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							143,528,000					157,880,800		
					Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosia							100%							
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau Relawan Sosial		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 orang		143,528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				157,880,800	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH										654,060,000				719,466,000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										654,060,000				719,466,000
					Persentase pelaksanaan kebijakan, evaluasi kesejahteraan rakyat							100%							
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							654,060,000				719,466,000			
					Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat							100%							

Unit Organisasi : 1.06.0.000.000.01.0000 DINASSOSIAL SubUnit Organisasi : 1.06.0.000.000.01.0000 DINASSOSIAL

4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kali		88,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				96,800,000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Terlaksananya Pembinaan pada Veteran dan Janda Veteran Terlaksananya Santunan Tali Asih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101 Orang 3500 Orang		566,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				622,666,000
TOTAL												7,247,223,223					7,955,944,745

Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2,107,552,900				2,213,819,115		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							101,440,500				101,440,500		
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			100%										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100%										
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							101,440,500				101,440,500		
					Meningkatnya sarana prasarana aparatur			100%										
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 jenis		78,708,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78,708,000	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya mebeleur aparatur				2 jenis		5,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,250,000	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor				2 jenis		7,402,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,402,500	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasrana pendukung gedung kantor				1 jenis		10,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,080,000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							2,006,112,400				2,112,378,615		
					Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat			100%										
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							147,467,100				162,213,810		
					Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat			100%										
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	Jumlah Apel Siaga Bencana Yang terlaksana Jumlah Sosialisasi yang terlaksana		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persen 100	3 Kali 3 Kali		147,467,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	persen 100	162,213,810
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							462,017,050				508,218,755		
					Persentase tertanganinya korban bencana			100%										
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah pelatihan pencegahan bencana yang dilaksanakan Jumlah simulasi mitigasi bencana yang dilaksanakan				1 kali 1 kali		50,017,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,018,700
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah jenis sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang tersedia jumlah posko bencana yang didukung pada setiap kelurahan				1 jenis 12 bulan		346,456,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				381,101,600
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		jumlah bangunan dampak bencana yang ditangani				12 bulan		65,544,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,098,455
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							943,450,250				943,450,250		
					Persentase korban bencana yang terselamatkan			100%										

Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah jenis logistik yang tersedia Jumlah posko bencana yang tersedia				10 jenis 1 unit		943,450,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				943,450,250
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								453,178,000					498,495,800
					Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata			100%										
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		jumlah lembaga dan kemitraan yang menjalin kerjasama				2 kelompok		453,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				498,495,800
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								1,734,975,418					1,764,362,738
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,734,975,418					1,764,362,738
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			BB										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100 %										
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,074,915,843					1,077,115,843
					Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah			100%										
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan tunjangan				12 bulan		1,052,915,843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,052,915,843
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,150,000
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Tersedianya dokumen laporan keuangan pertriwulan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 dokumen		5,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,050,000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								28,385,500					31,224,050
					Cakupan disiplin aparatur			100%										
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian kerja lapangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 stel		28,385,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				31,224,050
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								228,573,275					242,813,875
					Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja			100%										
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya alat listrik,alat kebersihan dan bahan pembersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,150,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor dan makan minum		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		82,567,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				82,567,275

1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan pengadaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,150,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,600,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		109,406,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				120,346,600
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48,315,000						48,463,500
					Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
					100%													
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah dokumen bermaterai				260 lembar		1,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,633,500
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber iar dan listrik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		21,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,630,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa kebersihan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		25,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,200,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							354,785,800						364,745,470
					Meningkatnya sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik													
					100%													
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		38,496,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,346,370
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharanya kendarann dinas/operasional dalam kondisi baik				12 bulan		220,491,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,491,600
1	06	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		terpeliharanya mebeleur gedung kantor				12 bulan		1,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,210,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpenuhinya petugas penjaga malam		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		21,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,600,000

Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		60,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,550,000
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		12,547,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,547,500
TOTAL												3,842,528,318					3,978,181,853

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								956,182,500				1,095,107,750	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								15,000,000				16,500,000	
					Persentase informasi kebijakan strategis rencana tenaga kerja 5 tahunan						100%							
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								15,000,000				16,500,000	
					Persentase cakupan data perkiraan kebutuhan tenaga kerja						100%							
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Rencana Tenaga Kerja yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,500,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								601,883,000				662,071,300	
					Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi						0,60 %							
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								481,883,000				530,071,300	
					Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi						2,7 %							
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pelatihan berbasis kompetensi dan TTG yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Paket		481,883,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			530,071,300	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000				132,000,000	
					Persentase hasil pelatihan peningkatan produktivitas yang diterapkan dalamusahanya						10%							
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah pelatihan peningkatan produktivitas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			132,000,000	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								152,000,000				167,200,000	
					Persentase tenaga kerja yang ditempatkan						3,21%							
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								12,000,000				13,200,000	
					Persentase LPKTS yang diberikan rekomendasi perizinan						100%							
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah monitoring LPTKS		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,200,000	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								140,000,000				154,000,000	
					Jumlah data lowongan kerja yang terverifikasi						156 Lowongan							
					Jumlah pencari kerja yang terdaftar di job fair						50 Orang							
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah informasi bursa tenaga kerja yang disediakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Buku		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,000,000	

2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Job Fair/Bursa Kerja yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								187,299,500					249,336,450
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan (PP/PKB, LKS (LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH) bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan)							4,2 %						
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								49,150,500					54,065,550
					Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan							28,05 %						
					Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan							57 %						
					Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS sesuai ketentuan							42,63 %						
					Persentase perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah							19,54 %o						
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah sosialisasi tentang Peraturan Perusahaan yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		17,554,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19,309,400
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	KeluaranSub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Jumlah sosialisasi tentang Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		9,772,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10,749,750
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah sosialisasi tentang Jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		21,824,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,006,400
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								138,149,000					195,270,900
					Persentase Kasus HI yang ditindak lanjuti							100%						
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sosialisasi tentang Pencegahan Perselisihan / penyelesaian kasus yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		22,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,634,500

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Yang difasillitasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		54,174,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				59,591,950
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah pembinaan kelembagaan sarana Hubungan Industrial yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Perusahaan		14,804,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				59,591,950
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Jumlah sidang pleno LKS (LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH) Tripartit yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Kali 3 Kali		46,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				51,452,500
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							8,143,110,080					8,957,421,088	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,894,684,080					6,484,152,488	
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			BB										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100										
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							60,480,000					66,528,000	
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)			100 %										
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen 2 Dokumen		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		50,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,528,000
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,992,304,080					5,491,534,488	
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)			100 %										
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41 Orang		4,921,984,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,414,182,488

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		48,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53,152,000
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,200,000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								294,800,000					324,280,000
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			100 %										
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37 Paket		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22,000,000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57 Paket		137,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,700,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Paket 30974 Lembar		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,000,000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Eks		7,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,580,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Laporan		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000					110,000,000
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			100 %										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								225,600,000					248,160,000
					Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			100 %										

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		162,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				178,200,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Orang		63,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69,960,000
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								221,500,000					243,650,000
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik							100 %						
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				38,500,000
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Unit		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				77,000,000
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Unit		1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,650,000
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,700,000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Gedung		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				110,000,000
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 Paket		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8,800,000
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								103,000,000					113,300,000
					Persentase koperasi berkualitas							19,61 %						

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							103,000,000				113,300,000		
					Persentase koperasi aktif			77,45 %										
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan, pemeriksaan, mediasi dan pemeringkatan koperasi yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Kegiatan		103,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			113,300,000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							60,000,000				66,000,000		
					Jumlah koperasi yang sehat			4 KOPERASI										
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000				66,000,000		
					Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT			30 KOPERASI										
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang dinilai		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 Koperasi		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,000,000	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi koperasi sehat yang menerima penghargaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Koperasi		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,000,000	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							99,916,000				109,907,600		
					Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya			19,5 %										
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							99,916,000				109,907,600		
					Jumlah pengurus dan pengawas yang telah mengikuti pelatihan			450 ORANG										
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perkoperasian		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Orang		99,916,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,907,600	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							138,000,000				151,800,000		
					Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n			6 %										
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							138,000,000				151,800,000		
					Persentase koperasi yang difasilitasi yang telah melakukan MoU dengan mitra koperasi			100 %										

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas kemitraan koperasi Jumlah pra koperasi yang mendapatkan pendampingan/pembinaan perkoperasian		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Koperasi 4 Koperasi		138,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				151,800,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							1,147,510,000				1,262,261,000		
					Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitas program pemberdayaan							28,54 %						
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							1,147,510,000				1,262,261,000		
					Jumlah usaha mikro yang telah masuk ke dalam sistem informasi berbasis elektronik							7000 Usaha Mikro						
					Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi yang melakukan MoU dengan mitra usaha							70 Usaha Mikro						
					Jumlah usaha mikro yang mendapatkan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha							234 Usaha Mikro						
					Jumlah usaha mikro yang mendapatkan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan							760 Usaha Mikro						
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah usaha mikro yang melakukan registrasi ke dalam sistem informasi berbasis elektronik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		330 UMKM		121,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				133,650,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas perluasan akses pasar Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi produk		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 UMKM 30 UMKM		800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				880,000,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Produk UMK (makanan/minuman) yang bersertifikat halal / HAKI		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Usaha mikro		141,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				155,111,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pembinaan kelembagaan usaha mikro yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 UMKM		55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,500,000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,000,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							700,000,000				770,000,000		
					Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil							20 Usaha Mikro						

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							700,000,000					770,000,000
					Persentase usaha mikro yang memberdayakan hasil pelatihan			50 %									
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah usaha mikro yang dilatih		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 UMKM		700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			770,000,000
TOTAL												9,099,292,580					10,052,528,838

Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								1,107,098,000				0	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								464,000,000				0	
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						70%							
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								119,500,000				0	
					Persentase SKPD yang membuat ARG						100%							
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah SKPD yang dilakukan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 SKPD		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah sosialisasi PUG		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 sosialisasi		44,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								344,500,000				0	
					Persentase Organisasi Perempuan Yang aktif						100%							
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina				3 organisasi		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi perempuan yang diberikan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 organisasi		44,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								181,868,000				0	
					Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan						100%							
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								26,700,000				0	
					Persentase pencegahan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan						100%							
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 sosialisasi		26,700,000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								155,168,000				0	
					Persentase layanan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti						100%							
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Rujukan lanjutan kasus kekerasan terhadap perempuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 kasus		155,168,000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	

Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	150,000,000		0
					Jumlah Sekolah inspirasi perempuan tekun (SI PURUN) di Kota Banjarbaru	2		
					Jumlah kelompok Industri Rumahan Perempuan yang terbentuk di Kota Banjarbaru	4		

Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								150,000,000					0
					Jumlah Pelaksanaan kelas SI PURUN					2								
					Jumlah terbentuknya kelompok industri rumahan perempuan					2								
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta kelas SI PURUN		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 orang		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase jumlah KK yang terdata untuk gambaran indeks kualitas keluarga		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 %		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								129,400,000					0
					Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak					100%								
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								129,400,000					0
					Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak					3 Lembaga								
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan lembaga pemenuhan hak anak yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		129,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								181,830,000					0
					Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terselesaikan					100%								
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								26,830,000					0
					Persentase pencegahan kasus Kekerasan terhadap anak					100%								
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sosialisasi pencegahan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 sosialisasi		26,830,000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								155,000,000					0
					Persentase layanan kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti					100%								
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18 kasus		155,000,000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								1,665,500,000					0
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								102,000,000					0
					Persentase kelurahan cepat berkembang					100%								
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								102,000,000					0
					Jumlah kelurahan yang menginput dalam aplikasi Prodeskel dan Evdeskel					20 Kelurahan								

2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Fasilitasi evaluasi yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Kelurahan		102,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,563,500,000					0	
					Persentase LPM, TP-PKK, Posyandu yang aktif dan sosialisasi TTG							100%							
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,563,500,000					0	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif							201 Posyandu & 26 LPM							
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Anggota LPM yang dibina Jumlah Posyandu yang dibina		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 LPM 201 Posyandu		850,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Penggunaan Teknologi Tepat Guna yang difasilitasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 sosialisasi		90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah cakupan fasilitasi TP-PKK yang disediakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 TP-PKK		623,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								6,976,197,340					0	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,087,562,340					0	
					Indeks Kepuasan Internal							100%							
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								41,000,000					0	
					Jumlah laporan perencanaan yang tersedia							1 Tahun							
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,390,104,340					0	
					Jumlah laporan keuangan yang tersedia							1 Tahun							
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								3,350,104,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0	

2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								251,384,400					0
					Terkelolanya Administrasi SKPD			1 Tahun										
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		84,884,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
Kode						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah penggandaan yang tersedia	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun	1 tahun	8,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,000,000					0
					Tersedianya Barang kebutuhan SKPD			1 Tahun										
2	14	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (lahan parkir, pagar) yang terbangunan				1 paket		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								147,825,600					0
					Tersedianya jasa pelayanan umum kantor			1 Tahun										
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis		55,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 orang		92,205,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							222,248,000					0	
					Terpeliharanya BMD							1 Tahun						
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 unit		155,248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							150,000,000			0			
					Persentase perkawinan usia anak menurun			100%										
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							75,000,000			0			
					Jumlah mitra formal dan non formal yang menerapkan pendidikan kependudukan			27 Mitra										
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Jumlah sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal, non formal dan informal yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27 mitra		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	02	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							75,000,000			0			
					Jumlah dokumen statistik rutin, sistem informasi data keluarga (SIGA) yang UpTo date			12 Dokumen										

2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Jumlah Data Kependudukan dan KB yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 dokumen		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							2,069,135,000					0	
					Persentase PUS yang ber KB							100%						
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							500,215,000					0	
					Persentase akseptor KB yang aktif							100%						
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Jumlah balai yang menerima sarana KIE yang didistribusikan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 balai		131,995,000	DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB				0
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mengelola sarana KB		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 balai		368,220,000	DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB				0
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							96,000,000					0	
					Jumlah PPKBD dan SUB PPKBD aktif							20 PLKB						
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 PLKB		96,000,000	DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB				0
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							1,218,320,000					0	
					Jumlah Sarana dan Prasarana KB yang terdistribusi dengan baik							100%						
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Faskes yang menerima Alkon		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 faskes		44,821,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0

Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 2.14.2.13.2.08.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah akseptor KB MKJP, MOP dan MOW		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2900 orang		330,225,000	DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB			0	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah sarana dan prasarana penunjang KB		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 tahun		783,274,000	DAK Fisik – Bidang Kesehatan – Reguler – KB			0	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Faskes yang dibina		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 faskes		60,000,000	DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB			0	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							254,600,000				0		
					Jumlah Kampung KB yang aktif			5 kampung KB										
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang melaksanakanan program KKBPK		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Kampung KB		254,600,000	DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB			0	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							669,500,000				0		
					Persentase Kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL dan PIK-R dalam pembangunan keluarga dan Penurunan Angka Stunting			14,17%										
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							669,500,000				0		
					Jumlah Kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL dan PIK-R yang dibina			100%										
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK–R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kelompok PIK–R, Tribina, UPPKA yang dilatih		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kelompok		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK–R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125 kali		609,500,000	DAK Non Fisik – BOKKB – BOKB			0	
TOTAL													9,748,795,340				0	

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								12,875,672,700				14,004,621,200			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,602,690,125				12,604,340,367			
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			B												
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100 %												
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								69,600,000				78,000,000			
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD			5 %												
					Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender			100 %												
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	20,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100 % 100 %	23,000,000		
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	2 dokumen	100 %	49,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	100 % 100 %	55,000,000		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,560,666,025				10,357,373,850			
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan			100%												
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	98 orang	100 %	9,372,724,325	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	10,143,749,650		
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 laporan	100 %	50,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	55,000,000		
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	137,941,700	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 %	158,624,200		
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30,000,000				33,000,000			
					Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya			100%												
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan				98 orang		30,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah				33,000,000		
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								666,292,100				732,921,310			
					Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah			1 Tahun												

2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 paket	100 %	16,415,100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	18,056,610
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 paket	100 %	209,427,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	230,369,700
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 eksp	100 %	16,750,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	18,425,000
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	450 eksp	100 %	27,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	29,700,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 laporan	100 %	396,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100 %	436,370,000
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								242,500,000	266,750,000				
					Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan			100%										
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 buah	100 %	45,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	49,500,000
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (perontok padi) yang dibeli	Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 unit	100 %	102,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	112,750,000
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 paket	100 %	95,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100 %	104,500,000
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								293,400,000	322,740,000				
					Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			100 %										

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan	Peningkatan fasilitas penggunaan jasa pihak ketiga	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	100 %	259,800,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	285,780,000
---	----	----	------	----	---	---	--	--	---	-------	---------	-------	-------------	--------------------------------------	--	---	-------	-------------

2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	Peningkatan fasilitas penggunaan jasa pihak ketiga	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 orang	100 %	33,600,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100 %	36,960,000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								740,232,000				813,555,207	
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik							100%						
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	31,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	34,870,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	65 unit	100 %	377,532,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	415,285,200
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 unit	100 %	24,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	26,400,000
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 paket	100 %	300,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	330,000,000
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	7,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100 %	7,000,007
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1,158,608,750				1,274,469,625	
					Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi							90,25 %						
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								358,484,000				394,332,400	
					Angka Pasokan/Ketersediaan kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.							80,5 %						
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Jumlah informasi kelompok pangan di Kota Banjarbaru (kali) Tersusunnya informasi kelompok pangan di kota Banjarbaru	tersusunnya informasi kelompok pangan di kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.25 perkapita/hari	12 kali	12 dokumen	48,450,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	90.25 perkapita/hari	53,295,000
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Jumlah Beras yang disediakan Terlaksananya Penyediaan Beras	tersusunnya informasi kelompok pangan di kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.25 perkapita/hari	4 kali	12 dokumen	267,784,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	90.25 perkapita/hari	294,562,400

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Jumlah Laporan hasil pemantauan pasokan dan harga bahan pokok di Kota Banjarbaru (kali) Terlaksananya monitoring stok , pasokan dan harga pangan	tersusunnya informasi kelompok pangan di kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.25 perkapita/hari	12 kali 12 kali	12 dokumen	42,250,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	90.25 perkapita/hari	46,475,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								348,500,000					383,350,000
					Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah (%)							0,033 %						
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal yang tersusun Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal	Terlaksananya Penyediaan Beras	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.25 perkapita/hari	1 dokumen 1 dokumen	6 ton	150,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	90.25 perkapita/hari	165,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	KeluaranSub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia (ton) Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah	Terlaksananya Penyediaan Beras	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.25 perkapita/hari	22 ton 22 ton	6 ton	198,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	90.25 perkapita/hari	218,350,000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								451,624,750					496,787,225
					1. Angka Konsumsi Pangan (Kkal/perkapita/hari)							1.788 Kkal/ perkapita/ hari						
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Jumlah Dokumen target konsumsi pangan yang tersusun Tersusunnya target konsumsi pangan perkapita per tahun	tersusunnya informasi kelompok pangan di kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.20 perkapita/hari	1 dokumen 1 dokumen	12 dokumen	60,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	90.20 perkapita/hari	66,000,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	Jumlah pembinaan kelompok P2I yang dilaksanakan Terlaksananya bantuan bibit tanaman, sayuran, toga dan pupuk kandang Terlaksananya lomba B2SA dan Lomba Kelompok P2L Terlaksananya pembinaan kelompok P2I dan UMKM	tersusunnya informasi kelompok pangan di kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.20 perkapita/hari	12 kelompok 12 kelompok 12 kelompok 12 kelompok	12 dokumen	391,624,750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (perkapita/hari)	90.20 perkapita/hari	430,787,225
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								114,373,825					125,811,208
					Persentase PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman							70 %						
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								114,373,825					125,811,208
					Persentase Rekomendasi PSAT (Pangan Segar asal Tumbuhan) yang diterbitkan (%)							100						
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang aman (%)	Persentase PSAT yang diuji Terselenggaranya legalisasi PSAT	Terselenggaranya legalisasi PSAT	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	100 %	11,500,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang aman (%)	100 %	12,650,000

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang aman (%)	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang tersedia Terlaksananya penyediaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Terselenggaranya legalisasi PSAT	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 sampel 60 sampel	100 %	102,873,825	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang aman (%)	100 %	113,161,208
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								502,113,000					539,191,300
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								256,210,000					268,698,000
					Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)							399,55 ton						
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								256,210,000					268,698,000
					Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuanfasilitasi usaha dari pemerintah							10 RTP						
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Jumlah Pokdakan/UPR yang telah menerapkan CPIB, CBIB Terlaksananya Bimtek, Pembinaan dan movev	Terlaksananya Bimtek, Pembinaan dan movev	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	380,52 ton	5 kelompok 5 kelompok	5 kali	256,210,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	380,52 ton	268,698,000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								23,190,000					25,509,000
					Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)							35,05 Ton						
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								23,190,000					25,509,000
					Jumlah Sumberdaya Perikanan yang dapat diusahakan							1 Kawasan						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum	Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 ton	12 bulan 12 bulan	12 bulan	23,190,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	5 ton	25,509,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								222,713,000					244,984,300
					Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan							2 %						
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								52,045,500					57,250,050
					Jumlah produksi usaha poklaksar yang dinyatakan berkualitas dan aman							116,28 Ton						
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	Jumlah poklaksar yg telah melaksanakan pengolhan ikan yg baik berdasarkan CPIB Terselenggaranya bimtek bagi poklaksar	Terselenggaranya bimtek bagi poklaksar	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	1 kelompok 1 kali	1 kali	52,045,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	2 %	57,250,050
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								170,667,500					187,734,250
					Jumlah Angka Konsumsi (kg/kapita/tahun)							50,5 kg/kapita/ tahun						
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	Jumlah poklaksar baru Terlaksananya pembinaan calon poklaksar	Jumlah angka konsumsi (kg/kapita/tahun)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	1 kelompok 1 kelompok	50 kg	85,072,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	2 %	93,579,750

3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	Jumlah poklahsar yang mendapatkan fasilitas Terlaksananya pemberian fasilitas usaha pengolahan ikan bagi poklahsar	Jumlah angka konsumsi (kg/kapita/tahun)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 kelompok 2 kelompok	50 kg	85,595,000	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan		persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan (%)	2 %	94,154,500
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								3,542,569,700					3,808,826,670
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1,519,880,000					1,593,868,000
					Luas lahan pertanian yang berproduksi (ha)							1.598 ha						
					Jumlah Populasi ternak							2.851.000 ekor						
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								413,000,000					454,300,000
					Luas lahan yang digarap (ha)							30 ha						
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Meningkatnya luas tanam hortikultura (ha) Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%) Tersedianya prasarana pertanian tanaman hortikultura (unit)	Jumlah sarana pertanian yang yang dapat digunakan/kondisi baik Terlaksananya kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Meningkatnya luas tanam perkebunan (ha)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun 1 tahun 1 unit	12 kali 12 kali	1 Ha	173,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatnya luas tanam hortikultura (ha) Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%) Tersedianya prasarana pertanian tanaman hortikultura (unit)	1 tahun 1 tahun 1 unit	190,300,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya luas tanam hortikultura (ha) Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%) Tersedianya prasarana pertanian tanaman hortikultura (unit)	Jumlah laporan pendampingan/pelatihan penggunaan sarana pendukung pertanian yang dilaksanakan Terlaksananya pendampingan/pe;atihan penggunaan sarana pendukung pertanian	Meningkatnya luas tanam perkebunan (ha)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 tahun 1 tahun 1 unit	12 kali 12 kali	1 Ha	240,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatnya luas tanam hortikultura (ha) Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%) Tersedianya prasarana pertanian tanaman hortikultura (unit)	1 tahun 1 tahun 1 unit	264,000,000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								150,000,000					165,000,000
					Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG tanaman (%)							51 %						
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya produksi tanaman varietas unggul (%)	Persentase Sumber Daya Genetik tanaman yang dimanfaatkan penangkar (%) Terlaksananya peningkatan kualitas SDG tanaman	Persentase Cakupan pemanfaatan SDG tanaman (%)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.1 %	100 % 100 tah%un	51 %	150,000,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Meningkatnya produksi tanaman varietas unggul (%)	6.1 %	165,000,000

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								152,230,000				164,453,000	
					Jumlah kelahiran ternak yang berkualitas (%)			30%										
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase kenaikan populasi ternak	Jumlah ternak yang di IB (ekor) Terlaksananya IB Ternak	Jumlah Ternak yangt di IB	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	50 ekor 50 ekor	35 ekor	152,230,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase kenaikan populasi ternak	1 %	164,453,000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								804,650,000				810,115,000	
					Prosentase ternak bantuan yang berproduksi (%)			60 %										
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Persentase kenaikan populasi ternak	Jumlah ternak yang didistribusikan ke masyarakat (ekor) Terlaksananya distribusi bantuan ternak	Persentase ternak bantuan yang berproduksi (%)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	40 ekor 40 ekor	65 %	804,650,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase kenaikan populasi ternak	1 %	810,115,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								305,576,000				336,133,600	
					Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan			100%										
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								305,576,000				336,133,600	
					Meningkatnya prasarana pertanian dan indeks pertanaman (IP) (ha)			1 ha										
					Meningkatnya prasarana pertanian dan luas tanam hortikultura (ha)			2 ha										
					Meningkatnya Prasarana pertanian dan luas tanam perkebunan (ha)			1 ha										
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%)	Jumlah koordinasi yg dilaksanakan (kali) Terlaksananya koordinasi	Luas lahan yang di garap (Ha)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	3 kali 3 kali	2 ha	195,288,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%)	1 %	214,816,800
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%)	Jumlah dokumen masterplan yang tersusun Tersusunnya masterplan pengembangan perkebunan	Luas lahan yang di garap (Ha)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 dokumen 1 dokumen	2 ha	110,288,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase cakupan prasarana pertanian yang disediakan (%)	1 %	121,316,800
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								124,188,500				136,607,350	
					Jumlah hewan yang tertangani			260 ekor										
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								92,488,500				101,737,350	
					Jumlah kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani			75 ekor										
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan (%)	Jumlah HPR yang di vaksin rabies Terlaksananan vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies	Persentase penanggulangan wabah penyakit hewan menular (%)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	824 ekor 824 dosis	100 %	44,430,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan (%)	100 %	48,873,000
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan (%)	Jumlah hewan/ternak yang diobati Terlaksananya pengobatan pada hewan/ternak	Persentase penanggulangan wabah penyakit hewan menular (%)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	400 ekor 400 ekor	100 %	48,058,500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan (%)	100 %	52,864,350
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								31,700,000				34,870,000	
					Jumlah Tempat Pemotongan Hewan yang dibina			10 buah										

Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.3.25.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan (%)	Persentase rekomendasi NKV dan sertifikat halal yang diterbitkan Terselenggaranya legalisasi NKV dan sertifikat halal	Prosentase unit usaha produk peternakan yang melakukan registrasi NKV dan sertifikat halal	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	1 tahun	31,700,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan (%)	100 %	34,870,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								1,592,925,200				1,742,217,720	
					Jumlah poktan yang naik kelas/score			10 buah										
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								1,592,925,200				1,742,217,720	
					Jumlah poktan yang naik kelas/score			67 %										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah poktan yang naik kelas	Jumlah kompetensi penyuluh dan petani (orang) Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani (unit)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 %	52 orang 52 orang	4 unit	601,925,400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah poktan yang naik kelas	67 %	662,117,940
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah poktan yang naik kelas	Jumlah pembinaan kelompok tani yang dilaksanakan (kelompok) Terlaksanya pembinaan kelompok tani	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani (unit)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 %	4 kelompok 4 kelompok	4 unit	370,895,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah poktan yang naik kelas	67 %	407,985,490
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah poktan yang naik kelas	Jumlah media infromasi (buah) terlaksananya penyediaan sarpras media informasi penyuluhan	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani (unit)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 %	5 bulan 5 buah	4 unit	349,899,900	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah poktan yang naik kelas	67 %	384,889,890
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah poktan yang naik kelas	Jumlah kelompok tani yang berbadan hukum(kelompok) Terlaksananya fasilitasi pembentukan badan hukum milik kelompok tani	Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani (unit)	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 %	2 kelonpok 2 kelonpok	4 unit	270,204,000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Jumlah poktan yang naik kelas	67 %	287,224,400
TOTAL													16,920,355,400				18,352,639,170	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,020,000,000				1,122,000,000		
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							600,000,000				660,000,000		
					persentase pengeloan dan pengembangan sistem air limbah				100%									
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							600,000,000				660,000,000		
					persentase pengeloan dan pengembangan sistem air limbah domestik di kotaBanjarbaru				100%									
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Terbangunnya Fasilitas Pengelolaan Sampah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		600,000,000	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik			660,000,000	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							420,000,000				462,000,000		
					persentase pengeloan dan pengembangan sistem air limbah				100%									
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							420,000,000				462,000,000		
					persentase pengeloan dan pengembangan sistem air limbah domestik di kotaBanjarbaru				100%									
1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		Jumlah limbah domestik dan lumpur tinja yang diolah di IPLT		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		900 m3		420,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			462,000,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							39,785,629,647				30,598,403,212		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,456,275,647				6,970,403,212		
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah Cakupan pelayananinternal yang difasilitasi				A									
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100%									
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							145,000,000				50,000,000		
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporanevaluasi kinerja SKPD dan Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender				100%									
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 video profil 5 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			0	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen		45,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			50,000,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,298,775,647				5,828,653,212		
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan				100%									
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,270,025,647	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum			5,797,028,212	

2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		28,750,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				31,625,000
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								20,000,000				0	
2	11	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		tersedianya laporan per triwulan				4 Laporan		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								451,500,000				496,650,000	
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			bAIK										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		15,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				16,500,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		120,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				132,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah pengandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun 1 Tahun		14,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				15,400,000
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan		Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		2,500,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				2,750,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		300,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				330,000,000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000				66,000,000	
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			baik										
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang dibeli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Jenis		20,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				22,000,000
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		25,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				27,500,000

2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		15,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				16,500,000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								127,500,000					140,250,000
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			baik										
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		100,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				110,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		27,500,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				30,250,000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								353,500,000					388,850,000
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik			100%										
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		35,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				38,500,000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113 Unit		265,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				291,500,000
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis		25,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				27,500,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		16,500,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				18,150,000
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		12,000,000	Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum				13,200,000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								365,000,000					401,500,000
					Indeks Kualitas air, Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu			IKA 57,67	IKU 87.91									
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								250,000,000					275,000,000
					Indeks Kualitas air, Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu			IKA 57,67	IKU 87.91									

2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Data kualitas air dan udara Jumlah data hasil verifikasi dokumen lingkungan Jumlah pelaksanaan kegiatan kota bersih hijau dan sehat		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 200 dokumen 10 kali		175,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				192,500,000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		75,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				82,500,000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								115,000,000					126,500,000
					Indeks Kualitas air, Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu			IKA 58,17	IKU 88,41									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Bimtek Untuk Masyarakat Jumlah Papan Informasi Bagi Masyarakat		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14 Lokasi 12 Buah		35,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				38,500,000
2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Tersedianya Data/Dokumen IKPLH Kota Banjarbaru Tersedianya Data Sampel Tanah Disungai		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 4 Sampel		80,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				88,000,000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								325,000,000					137,500,000
					Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH,dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik			100%										
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								325,000,000					137,500,000
					Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik			100%										
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Jumlah taman yang dikelola		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lokasi		125,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				137,500,000
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah taman yang dikelola		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lokasi		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								70,000,000					77,000,000
					persentase peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbabahan berbahaya dan beracun (limbah B3)			100%										
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3								70,000,000					77,000,000
					persentase pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan limbah B3 dan airlimbah			94%										

Unit Organisasi : 2.11.1.03.1.04.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.1.04.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Limbah B3 dan Air Limbah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115 Perusahaan		70,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				77,000,000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								170,000,000					187,000,000
					Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota (%)							94%						
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								170,000,000					187,000,000
					persentase pembinaan dan pengawasan kegiatan/usaha yang izin lingkungandan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/Kota							100%						
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Pelaku Usaha Makro dan Mikro yang di awasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		400 Perusahaan		170,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				187,000,000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								165,000,000					181,500,000
					persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup							100%						
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								165,000,000					181,500,000
					persentase penyelenggaraan sekolah yang berwawasan lingkungan							100%						
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Sekolah yang dibina		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		122 Sekolah		165,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				181,500,000
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								155,000,000					170,500,000
					persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat							100%						
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								155,000,000					170,500,000
					persentase masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							100%						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah even penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Jenis		155,000,000	Dana Transfer Umum– Dana Alokasi Umum				170,500,000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								25,000,000					0
					Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah kota, lokasi usaha dan dampaknya dikota yang ditangani (%)							100%						
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								25,000,000					0
					jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Banjarbaru							10 pengaduan						

Unit Organisasi : 2.11.1.03.1.04.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2.11.1.03.1.04.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup (kasus) yang ditinjau lanjuti				10 Pengaduan		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								32,054,354,000					22,473,000,000
					persentase pengelolaan persampahan							100%						

2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								28,014,354,000						18,073,000,000		
					Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota (%)							100%									
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengelolaan sampah yang dilaporkan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum				55,000,000			
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara		24 %		850,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum				935,000,000			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Persentase penanganan sampah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76 %		8,904,354,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum				0			
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		30,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum				33,000,000			
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		15,500,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum				17,050,000,000			
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Persentase sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten kota				100 %		2,680,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum				0			
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta								4,040,000,000						4,400,000,000		
					jumlah pihak swasta yang pengelola sampah							16									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah		Jumlah pengelola sampah dari pihak swasta yang dibina				16 Orang		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0			
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah		Terjaga kebersihan kota Banjarbaru		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76 %		4,000,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum				4,400,000,000			
TOTAL													40,805,629,647						31,720,403,212		

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								9,402,291,000			11,609,154,500		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,842,816,500			9,651,085,000		
					- Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah						BB							
					- Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi						100 %							
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								382,216,000			482,000,000		
					Persentase Capaian perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100 %							
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Dokumen	5,576,000	DAK Non Fisik – Dana Yanminduk			7,000,000		
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja SKPD		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Dokumen	376,640,000	DAK Non Fisik – Dana Yanminduk			475,000,000		
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,935,000,000			6,160,000,000		
					Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100 %							
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		36 Orang	4,875,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,095,000,000		
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Laporan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000		
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000		
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								56,150,000			70,200,000		
					Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100 %							
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksana Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Kali	50,000,000	DAK Non Fisik – Dana Yanminduk			62,500,000		
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		30 Peserta	6,150,000	DAK Non Fisik – Dana Yanminduk			7,700,000		
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,196,904,000			1,475,455,500		
					Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah						100 %							
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		31 Buah	758,545,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik – Dana Yanminduk			948,182,000		
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		42 Buah	167,439,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			192,600,000		

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		7 Buku 21080 Lembar		34,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39,675,000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		24 Eksemplar		5,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,083,500
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		65 Laporan		231,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik – Dana Yanminduk				288,915,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								526,747,500				605,760,000	
					Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %									
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 Buah		100,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				115,575,000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Unit		287,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				330,625,000
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Paket		138,747,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				159,560,000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								349,724,000				402,182,000	
					Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %									
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Macam		188,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				216,890,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Orang		161,124,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,292,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								396,075,000				455,487,500	
					Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %									
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Unit		40,825,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46,950,000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Unit		103,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				119,025,000

2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35 Unit		34,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39,675,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Bangunan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				230,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Bangunan		17,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				19,837,500
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								393,450,000					460,795,000
					Persentase data Kependudukan yang valid dan update			100%										
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								393,450,000					460,795,000
					Persentase Perekaman KTP Elektronik pada penduduk 17 Tahun ke atas			100%										
					Persentase Anak Usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			40%										
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Penduduk Non Permanen Jumlah Penduduk Rentan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		205 Orang 25 Orang		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah KIA yang di terbitkan Jumlah KTP yang di terbitkan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		14784 Keping 33792 Keping		350,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				385,990,000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		Jumlah Laporan Pelaporan Peristiwa Kependuduk		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Laporan		22,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,805,000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								535,000,000					715,000,000
					Persentase data pencatatan sipil yang valid dan update			100%										
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								275,000,000					375,000,000
					Persentase Kepemilikan akta Kelahiran usia 0-18 Tahun			98%										
					Persentase Kepemilikan akta Kematian			100%										
					Persentase Kepemilikan akta Perkawinan			100%										
					Persentase Kepemilikan akta Perceraian			100%										
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran 0–18 Tahun Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		6500 lembar 1200 lembar 7 lembar 55 lembar		225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000

2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		9500 lembar		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								150,000,000					195,000,000
					Cakupan data penyelenggaraan pencatatan sipil							100%						
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Jumlah Pasangan yang Cerai Jumlah Pasangan yang Menikah		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		120 pasang 150 pasang		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Kelurahan yang di laksanakan Sosialisasi Pencatatan Sipil		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 Kelurahan		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen terkait Pencatatan Sipil		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 Buku		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,000,000
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								110,000,000					145,000,000
					% kelurahan yang dibina terkait penyelenggaraan Pencatatan Sipil							100%						
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Kelurahan yang di bina terkait Pencatatan Sipil		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		20 Kelurahan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				70,000,000
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		Jumlah Aparatur Kelurahan yang mengikuti Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		20 Orang		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75,000,000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								606,650,000					756,650,000
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							83%						
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								25,000,000					25,000,000
					Cakupan Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan							50%						
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan perjanjian kerjasama		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		7 SKPD		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								581,650,000					731,650,000
					Cakupan Informasi Data Kependudukan yang disajikan							100%						
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		100 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 PKS		66,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,250,000	
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Jumlah media Informasi Administrasi Kependudukan yang di kelola		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 buah		290,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				290,400,000	
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		Jumlah penyajian data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 buku		225,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				225,000,000	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								24,374,500					25,624,500	
					Cakupan data profil Kependudukan yang sesuai ketentuan							100%							
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								24,374,500					25,624,500	
					% data kependudukan yang tersedia							100%							
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Data Kependudukan yang tersusun		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 buku		24,374,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,624,500	
TOTAL													9,402,291,000					11,609,154,500	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								12,974,406,154					14,080,708,000
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,055,111,154					6,469,967,000
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			BB										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100%										
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50,000,000					55,000,000
					Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan			70										
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,500,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,500,000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,447,273,154					4,701,345,000
					Mewujudkan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset yang lebih transparan dan akuntabel			95%										
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang		4,381,208,154	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,628,193,000
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				56,452,000
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		16,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,700,000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								170,000,000					187,000,000
					Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.			79%										
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas pegawai		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84 Buah		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				187,000,000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								510,510,000					561,561,000
					Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan			70%										

2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,880,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis 12 bulan		141,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			155,705,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah macam barang cetakan dan penggunaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 jenis		22,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,750,000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		14,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,840,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		321,260,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			353,386,000
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							130,800,000					143,880,000
					Menyediakan sarana dan prasarana dalam untuk pelaksanaan tugas kedinasan												
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah macam peralatan dan mesin		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		130,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			143,880,000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150,370,000					165,407,000
					Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan												
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		PJumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		121,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133,529,000
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		28,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31,878,000
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							596,158,000					655,774,000
					Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien												

2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas jabatan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		38,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,350,000
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		285,958,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				314,554,000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		27,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,525,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		213,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				235,345,000
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,000,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								6,919,295,000				7,610,741,000	
					Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi							34%						
					Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi							47%						
					Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan							86%						
					Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ							83%						
					Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi							100%						
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								1,171,293,000				1,288,420,000	
					Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ							50 buah						
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah rambu-rambu lalu lintas		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 buah		262,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				288,750,000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah waktu pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalulintas		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		908,793,000					999,670,000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								285,892,000				314,000,000	
					Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C							100%						

2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		PJumlah sarana prasarana terminla yang dikembangkan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 buah		127,427,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				140,000,000
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		jumlah terminal yang direhabilitasi dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 buah		158,465,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				174,000,000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							278,460,000					306,306,000	
					Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota							100%						
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		jumlah pengawasan dan pengendalian pada titik penyebab kemacetan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		278,460,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				306,306,000
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							5,183,650,000					5,702,015,000	
					Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat							100%						
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan pelajar yang dipelihara Jumlah angkutan umum yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34 unit 6 unit		5,023,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				5,525,300,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 kali		160,650,000					176,715,000
TOTAL													12,974,406,154					14,080,708,000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								1,898,884,000				2,088,774,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								234,394,000				257,834,000	
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100%										
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								54,600,000				60,060,000	
					Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.			79%										
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas pegawai		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 buah		54,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,060,000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								61,394,000				67,534,000	
					Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan			70%										
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah macam alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		3,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,663,000	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor Jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis 12 Bulan		35,607,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,168,000	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 jenis		20,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,396,000	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,097,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,307,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								110,400,000				121,440,000	
					Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan			70%										
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		102,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			112,200,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,240,000	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,000,000		8,800,000
					Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien	70%		

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR

2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,500,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,300,000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								1,664,490,000				1,830,940,000	
					Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas			25%										
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1,664,490,000				1,830,940,000	
					Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR			100%										
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		1,189,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,308,560,000
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		55,945,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				61,540,000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah kartu bukti lulus uji		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6000 lembar		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				275,000,000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		99,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				109,516,000
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		63,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				69,564,000
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		6,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,760,000
TOTAL													1,898,884,000				2,088,774,000	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								1,987,247,436					2,030,988,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								141,467,236					149,688,000	
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi					100%									
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								103,538,200					110,200,000	
					Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan					70%									
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah alat tulis kantor jumlah waktu penyediaan makanan pegawai, rapat dan tamu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis 12 bulan		40,528,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,000,000	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah macam barang cetakan dan penggandaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 jenis		13,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,200,000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pelaksanaan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				55,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								21,609,036					22,844,000	
					Menyediakan sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan tugas kedinasan					70%									
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,344,000	
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah waktu pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		4,329,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,500,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		10,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,000,000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,320,000					16,644,000	
					Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien					70%									
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		9,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,300,000	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 buah		7,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,344,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							1,845,780,200	1,881,300,000					
					Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			100%										
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							1,845,780,200	1,881,300,000					
					Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan			100%										
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		jumlah waktu pelaksanaan penyediaan saran dan prasarana perparkiran		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,347,956,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,381,300,000	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah titik parkir yang memiliki izin		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		116 titik		497,823,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
TOTAL													1,987,247,436	2,030,988,000				

Unit Organisasi : 2.16.2.202.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.202.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								12,273,660,546				13,501,026,601	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,878,947,246				2,066,841,971	
					Prediksi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					BB								
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								90,910,600				100,001,660	
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD					100%								
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen		59,693,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65,663,070	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		31,216,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,338,590	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								56,155,000				61,770,500	
					Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan					1 tahun								
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan		12,018,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,220,460	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 laporan		44,136,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,550,040	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,892,000				38,381,200	
					Persentase ASN yang Mengimplementasikan Hasil Bimtek dan Diklatnya					100%								
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang–Undangan		Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 peserta		34,892,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,381,200	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								309,644,346				340,608,781	
					Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi					100%								
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 paket		21,991,596	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,190,756	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 paket		131,739,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			144,913,835	

2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak yang tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150 Rim 60000 lembar		51,654,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,820,390	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		730 eksemplar		8,811,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,692,100	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Laporan		95,447,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			104,991,700	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							339,926,400				373,919,040		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan			100%										
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang di beli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		35,805,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			39,385,500	
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangunan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 paket		304,121,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			334,533,540	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							613,800,000				675,180,000		
					Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi			100%										
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		552,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			607,662,000	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Pegawai Administrasi Kantor non ASN aktif		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 orang		61,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,518,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							433,618,900				476,980,790		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik			100%										
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		38,491,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,340,320	

2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit		87,978,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96,775,800
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		44,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				48,400,000
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Gedung		197,149,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				216,864,670
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Gedung		66,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				72,600,000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							624,415,550						686,857,105
					Prosentase layanan informasi publik yang dikelola dengan baik													
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							624,415,550						686,857,105
					Persentase pengelolaan layanan informasi publik													
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah sosialisasi LAPOR yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		95,449,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				104,994,120
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah informasi yang disampaikan melalui media		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali		174,876,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				192,364,590
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah bimtek PPID yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		57,341,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				63,076,090
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah anggota KIM yang dibina		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 orang		159,569,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				175,526,230
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi secara mobile		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 kali		137,178,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,896,075

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000DINASKOMUNIKASIDANINFORMATIKA
SubUnit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000DINASKOMUNIKASIDANINFORMATIKA

2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		9,770,297,750		10,747,327,525
					Nilai Aspek SPBE	2			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4,111,248,900		4,522,373,790
					Persentase SKPD yang memperbaharui data dan informasi ke dalam domain dansub domain	80%			

2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah monitoring dan evaluasi domain dan sub domain banjarbaru.go.id		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		73,038,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80,342,790
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah unit kerja yang terhubung dengan jaringan intranet		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 unit kerja		4,038,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,442,031,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							5,659,048,850				6,224,953,735		
					Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan E-Government			80%										
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah evaluasi SPBE		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		58,620,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,482,110
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Nilai SLA		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 %		5,009,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,509,900,000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah aplikasi yang dikelola		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 aplikasi		348,964,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				383,861,005
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah evaluasi smart city		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali		168,692,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				185,561,970
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan TIK		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64 orang		73,771,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,148,650
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							146,029,650				165,132,615		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							146,029,650				165,132,615		
					Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			70%										
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							146,029,650				165,132,615		
					Prosentase data statistik sektoral yang terupdate dan terverifikasi			100%										
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah jenis data statistik sektoral yang terupdate		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 jenis data		25,476,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				28,024,205

2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kali		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,500,000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah dokumen metadata statistik yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		90,553,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				99,608,410
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								417,365,050					459,101,555
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								417,365,050					459,101,555
					Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah							30%						
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								417,365,050					459,101,555
					Persentase SKPD yang menerima layanan keamanan informasi							21,86%						
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kebijakan		34,142,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				37,556,585
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SKPD yang menjadi entitas analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 SKPD		165,361,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				181,897,485
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 SKPD		165,361,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				181,897,485
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan keamanan informasi pemerintah daerah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 literasi		52,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				57,750,000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								132,132,000					145,345,200
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								132,132,000					145,345,200
					Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti							100%						
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								132,132,000					145,345,200
					Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan							100%						
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah layanan pengadaan secara elektronik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		132,132,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				145,345,200
TOTAL													12,969,187,246					14,270,605,971

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									9,654,655,384					0
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									7,271,317,359					0
					Predikat akuntabilitas perangkat daerah							77 / BB							
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi							100%							
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									110,000,000					0
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD							100%							
					Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender							100%							
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan capaian Ikhtisar		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4,077,297,359					0
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan							100%							
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tempat waktu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 Orang		3,987,297,359	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									936,140,000					0
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi							100%							
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23 Unit		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Unit		175,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
---	----	----	------	----	----------------------------------	--	--	--	---	--	---------	--	-------------	------------------------------	--	--	--	---

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak yang Tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen 15000 lembar		51,750,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Program	Target Capaian Kinerja					Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bacaan yang Tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		17,250,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan				1 Tahun		291,640,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		250,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								275,000,000				0	
					Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan			100%										
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebeleur yang Diadakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 jenis		75,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin yang diadakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 jenis		100,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 jenis		100,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								947,130,000				0	
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah			100%										
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Tahun		287,500,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)				0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Gedung kantor yang Terpelihara Kebersihan dan Keamanannya Jumlah Tenaga Non ASN yang Terbayar		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 bangunan 35 Orang		659,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								925,750,000				0	

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

					Presentasi Investor yang Melaksanakan Investasi sesuai Ketentuan			77 %										
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							335,173,000					0	
					Persentase yang menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan			77 %										
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pemantauan Penanaman Modal		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 Kali		49,800,000	DAK Non Fisik - BOS Kinerja				0
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		BIMTEK Sosialisasi Penanaman Modal		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Kegiatan		185,773,000	DAK Non Fisik - BOS Kinerja				0
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Perusahaan		99,600,000	DAK Non Fisik - BOS Kinerja				0
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							215,000,000					0	
					Persentase Data Terbaru (Up To Date)			100%										
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							215,000,000					0	
					Persentase Data yang Terverifikasi			100 %										
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Persentase Data yang diolah Sesuai Dengan ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
TOTAL												9,654,655,384					0	

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									11,143,237,062				10,868,237,062	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									5,128,552,739				5,128,552,739	
					Predikat Akuntabilitas Kinerja SKPD						BB								
					Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi						WTP								
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									39,856,755				39,856,755	
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD						100%								
					Persentase perencanaan penganggaran responsif gender						100%								
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencaan Pembangunan SKPD yang tersusun dengan Ketentuan Jumlah Dokumen Perencanaan yang menggunakan analisis gender		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen 1 Dokumen	23,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23,460,000		
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen	16,396,755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,396,755		
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,785,195,999				3,785,195,999	
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan						100%								
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlsh ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33 Orang	3,746,970,734	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,746,970,734		
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	24,474,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,474,390		
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	13,750,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13,750,875		
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									676,189,625				676,189,625	
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi						100%								
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat digunakan		Semua Kabupaten/K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Buah	15,299,225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,299,225		

2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		143,173,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				143,173,000
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan yang tersedia Jumlah Penggandaan Yang Tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Buku 1000 Lembar		14,045,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14,045,400
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		900 Eks		3,672,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,672,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		447 Laporan		500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				500,000,000
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							344,000,000				344,000,000		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			100%										
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Buah		65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				65,000,000
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		234,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				234,000,000
2	19	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya yang terbangun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,000,000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							92,091,000				92,091,000		
					Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			100%										
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis		66,555,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				66,555,000

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		25,536,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,536,000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								191,219,360				191,219,360	
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik			100%										
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		52,723,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,723,800	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 unit		66,746,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,746,760	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel Yang Dibeli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 unit		15,748,800				15,748,800	
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara				1 Paket		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2	19	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,000,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,069,834,125				1,069,834,125	
					Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif													
					Persentase Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan			10%										
					Persentase Partisipasi Pemuda Kegiatan ekonomi mandiri (Wirausaha)			2%										
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								823,499,000				823,499,000	

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang terlaksana Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan, kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 kali 25 Orang		823,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			823,499,000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								246,335,125				246,335,125
					Persentase organisasi kepemudaan yang dibina												
					Persentase Wirausaha yang dibina												
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah pembinaan kewirausahaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan wirausaha Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali 5 Kali 100 % 40 Orang		246,335,125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			246,335,125
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								4,944,850,198				4,669,850,198
					Jumlah cabang olah raga yang dibina												
					Persentase cabang olahraga yang berprestasi							51%					
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1,981,846,000				1,706,846,000
					Presentase sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar/memadai							50 %					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah sarana prasarana olah raga yang dipelihara dan dibangun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Buah		1,981,846,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,706,846,000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								2,856,470,400				2,856,470,400
					presentase cabang olah raga prestasi yang dibina							100%					
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah cabang olah raga yang dibina		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39 Cabor		2,856,470,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,856,470,400
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								106,533,798				106,533,798
					presentase cabang olah raga rekreasi yang bina dan kembangkan							60%					

Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 2.19.2.22.3.26.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah event olah raga tradisional masyarakat yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Event		106,533,798	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				106,533,798
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,112,210,100					1,112,210,100	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							791,259,750					791,259,750	
					Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya													
					Presentase pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya							37%						
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							261,615,200					261,615,200	
					Presentase pelaku kebudayaan dan lembaga kebudayaan yang dibina							37 %						
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Kali		261,615,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				261,615,200
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							529,644,550					529,644,550	
					Persentase event dan fasilitasi/aktivasi seni dan budaya yang dilaksanakan							54 %						
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Event Budaya Yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13 Event		290,098,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				290,098,600
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Seni dan Budaya Yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24 Kali		239,545,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				239,545,950
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							320,950,350					320,950,350	
					persentase terlestarikannya cagar budaya							91,6 %						
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							320,950,350					320,950,350	
					Persentase cagar budaya yang dikelola dengan baik							91,6 %						
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Kegiatan Cagar Budaya yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Buah		320,950,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				320,950,350
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1,099,235,200					1,099,235,200	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							167,080,200					167,080,200	
					persentase peningkatan destinasi wisata unggulan							33 %						
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							167,080,200					167,080,200	
					persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai							33 %						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah amenitas destinasi pariwisata yang dikembangkan dan dibangun Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per sub jenis usaha		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Buah 625 Buah		1 67,080,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 67,080,200	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							715,000,000	715,000,000					
					Tingkat hunian akomodasi			30 %										
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							715,000,000	715,000,000					
					Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan			100%										
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah destinasi pariwisata yang bermitra dengan pemerintah daerah Jumlah event promosi wisata yang dilaksanakan Jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Mitra 2 Event 3768 wisatawan		715,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			715,000,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							217,155,000	217,155,000					
					Persentase destinasi wisata yang memiliki pokdarwis													
					persentase kelompok sadar wisata yang dibina			69%										
					persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina			2%										
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							217,155,000	217,155,000					
					persentase masyarakat disekitar destinasi wisata yang ditingkatkan kompetensinya			20%										
					persentase pelaku ekonomi kreatif yang ditingkatkan kompetensinya			6,7%										
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kali		1 42,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 42,155,000	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Jumlah Fasilitasi Kreasi,Produksi,Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000	
TOTAL													13,354,682,362	13,079,682,362				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									2,852,652,350				2,718,276,000
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,866,494,000				1,666,776,000
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				BB									
					Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah				WTP									
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									64,291,000				70,025,000
					Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)				100%									
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		16,537,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,325,000	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		47,754,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52,700,000	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									43,563,000				46,440,000
					Cakupan fasilitasi administrasi keuangan pada perangkat daerah (%)				100%									
					Ketersediaan dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan (Ada/Tidak)				ada									
					Ketersediaan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah (Ada/Tidak)				ada									
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS Pengadministrasi Pertanggungjawaban Keuangan/Penata Keuangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Orang		16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,640,000	
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan Tepat Waktu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		11,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,500,000	
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan Tepat Waktu Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan		16,538,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,300,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									337,764,000				218,600,000
					Cakupan fasilitasi administrasi kepegawaian pada perangkat daerah (%)				100%									
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		41,599,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,800,000	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		183,065,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,100,000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		22,926,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,200,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		90,174,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			99,500,000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								260,000,000				210,000,000
					Cakupan fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah padaperangkat daerah (%)			8 Unit									
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit		210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			155,000,000
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,000,000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								405,779,000				446,980,000
					Cakupan fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah padaperangkat daerah (%)			100%									
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat/Jasa Tenaga Non PNS		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		29,736,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,700,000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		192,465,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			212,000,000
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa Non PNS		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		32,000,000				35,280,000

2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Keamanan, Kebersihan dan Tenaga Non PNS		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Orang		151,578,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				167,000,000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							755,097,000					674,731,000	
					Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)			12 Bulan										
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan dalam Kondisi Baik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		38,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,100,000
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		91,722,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				96,308,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18,000,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeiliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Pemeliharaan Jaringan Air, Jaringan Listrik,Rehabilitasi Pagar dan Pos Keamanan Depot Arsip, Rehabilitasi Pagar dan Pos Keamanan Perpustakaan,Rehabilitasi Sekat Ruangan Kantor,Rehabilitasi Ruang Pelayanan)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Paket		600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				508,400,000
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		9,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,923,000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							986,158,350					1,051,500,000	
					Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat			52										
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			13,5										
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							780,000,000					835,750,000	
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (rasio)			1:13										
					Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat (%)			1,75										
					Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk (rasio)			1:17.000										
					Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (%)			22,39										

2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Jenis Layanan Digital Perpustakaan Elektronik	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis Layanan		65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,250,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Layanan dan Pengembangan Perpustakaan Daerah	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Layanan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			262,500,000	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Jumlah Perpustakaan yang berakreditasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perpustakaan		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang terlatih	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Orang		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka		- - - Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Majalah 48 Surat Kabar 1049 Buku Digital 500 Buku		230,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		--- --- --- Jumlah Bahan Pustaka yang diolah dan dikelola Jumlah Penyiangan Koleksi Bahan Pustaka	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52 Jilid 200 Buku (Cetak) 250 Buku Rusak 200 Buku Hibah 300 Buku		115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Profil Perpustakaan Terkelolanya Aplikasi Data dan Informasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 12 Bulan		45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							206,158,350	215,750,000				
					Cakupan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			15 Kali									
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Naskah		175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			183,750,000	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah Lokasi Penggerak Literasi yang mendapatkan penghargaan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Lokasi		11,158,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,000,000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Komunitas/Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Komunitas		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							4,675,029,823					5,190,382,619	
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,392,405,823					4,842,627,419	
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,392,405,823					4,842,627,419	
					Cakupan fasilitasi administrasi keuangan pada perangkat daerah (%)							100%						
					Ketersediaan dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan (Ada/Tidak)							ada						
					Ketersediaan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah (Ada/Tidak)							ada						
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu Penyelesaian Surat Perintah Membayar yang dinyatakan Lengkap dan Sah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		4,392,405,823	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,842,627,419
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							237,624,000					300,505,200	
					Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggung jawaban Nasional Sesuai Undang-undang Kearsipan (%)							59%						
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							117,624,000					160,505,200	
					Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (%)							3 SKPD, 310 Box						
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Dokumen Daftar Arsip Aktif Perangkat Daerah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Arsip In Aktif yang terpelihara Jumlah Arsip yang disusutkan berdasarkan daftar arsip		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		12 Bulan 1 Daftar Arsip		57,624,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				60,505,200
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							80,000,000					90,000,000	
					Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (%)							70						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah Khazanah Arsip Statis		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Arsip		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,000,000
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							40,000,000					50,000,000	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

					Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (%)	32 SKPD			
--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Kearsipan (Perangkat Daerah) yang di audit Jumlah Unit Kearsipan (Perangkat Daerah) yang dibina oleh lembaga kearsipan daerah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 SKPD 8 SKPD		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							45,000,000					47,250,000	
					Tingkat Keberadaan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)			90										
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun							25,000,000					26,250,000	
					Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK (%)			1 SKPD										
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah SKPD yang Terasilitasi Pemusnahan Arsip		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 SKPD		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,250,000
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan							20,000,000					21,000,000	
					Persentase Arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang tersselamatkan sesuai NSPK (%)			3 Kecamatan dan 12 Kelurahan										
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Arsip yang terselamatkan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				21,000,000
TOTAL													7,527,682,173					7,908,658,619

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								11,983,121,995				13,181,478,416	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,582,747,050				7,241,021,756	
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			3										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100%										
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								156,344,650				171,979,115	
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD			9										
					Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender			-										
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								124,038,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			136,442,625	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								32,305,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,536,490	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,271,951,605				5,799,146,766	
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan			1										
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								5,074,332,855	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,581,766,141	
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								53,152,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58,467,200	
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								144,466,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			158,913,425	
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								453,319,295				498,651,225	
					CAkupan layanan umum yang difasilitasi			12 Bulan										
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								15,735,170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,308,687	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								150,191,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,210,375	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								41,284,375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,412,813	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								3,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,920,400	

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								242,544,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				266,798,950
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------------------	--	--	--	-------------

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								26,400,000					29,040,000
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan				12 Bulan									
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								4,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,840,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								22,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24,200,000
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								183,922,200					202,314,420
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi				12 Bulan									
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								6,910,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,601,220
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								138,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				152,460,000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								38,412,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42,253,200
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								490,809,300					539,890,230
					Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik				1									
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				33,085,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				36,394,380
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								48,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53,845,000
3	30	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel								15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,500,000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								7,144,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,858,950
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								377,939,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				415,732,900

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								8,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,559,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------------------------	--	--	--	-----------

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					113,300,000						124,630,000		
					Persentase Pelaku Usaha Yang Berizin					10								
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					35,200,000						38,720,000		
					Jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko					10								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							35,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,720,000		
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang					23,100,000						25,410,000		
					Jumlah Rekomendasi tanda daftar gudang yang diberikan					10								
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang							23,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,410,000		
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri					40,000,000						44,000,000		
					Jumlah rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri					10								
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik							21,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,100,000		
3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri							19,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,900,000		
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					15,000,000						16,500,000		
					persentase pengendalian pengawasan pelabelan bahan berbahaya					10								
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)							15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,500,000		
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4,661,854,045						5,128,039,450		
					Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu					720								
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					4,336,767,545						4,770,444,300		
					Jumlah Sarana Pasar rakyat yang sesuai standart					1								
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							2,484,975,515				2,733,473,067		

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								1,851,792,030					2,036,971,233
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								325,086,500					357,595,150
					Persentase penanganan pengaduan konsumen yang ditindak lanjuti													
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								158,086,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				173,895,150
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								167,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				183,700,000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								285,984,000					314,626,620
					Persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting													
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								129,360,000					142,296,000
					Jumlah Ketersediaan Bapokting di kota banjarbaru													
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat								129,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				142,296,000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								156,624,000					172,330,620
					Jumlah kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan													
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								11,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,584,000
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								11,264,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12,390,400
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								133,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				147,356,220
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								170,036,900					187,040,590
					Persentase alat UTTP metrologi legal tertib ukur													
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								170,036,900					187,040,590
					Jumlah alat UTTP metrologi legal yang telah ditera ulang													
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								170,036,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				187,040,590
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								169,200,000					186,120,000
					Persentase alat UTTP metrologi legal tertib ukur													
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								169,200,000					186,120,000
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								146,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				160,930,000

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								22,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,190,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------------------------	--	--	--	------------

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN

3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								1,269,010,876					2,239,659,844	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								1,056,115,501					2,005,475,231	
					Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang					12									
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								1,056,115,501					2,005,475,231	
					jumlah IKM yang dibina					15 IKM									
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								162,255,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				178,481,050	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								1	DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Reguler				843,748,180	
3	31	02	2.01		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								893,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								83,056,875					91,362,263	
					Persentase legalitas IKM sesuai ketentuan					7									
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								83,056,875					91,362,263	
					Jumlah rekomendasi perijinan yang diterbitkan					10									
3	31	03	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota								83,056,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				91,362,263	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								129,838,500					142,822,350	
					Persentase Industri Kecil dan Menengah yang terupdate dalam aplikasi SIINAS\					10									
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								129,838,500					142,822,350	
					Jumlah Data Industri Kecil Menengah yang terverifikasi					20									
3	31	04	2.01		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas								129,838,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				142,822,350	
					13,252,132,871			15,421,138,260											

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0001 UPT PENGELOLA PASAR BANJARBARU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1,612,073,783				1,773,281,161	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,574,079,783				1,731,487,761	
					Predikat akuntabilitas			BB										
					kinerja perangkat daerah			BB										
					Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah			WTP										
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								16,975,200				18,672,720	
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								14,670,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,137,770	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								1,116,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,228,150	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								1,188,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,306,800	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								137,957,183				151,752,901	
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			12										
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								137,407,183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			151,147,901	
3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			605,000	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,409,100,000				1,550,010,000	
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			726,000	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								1,399,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,539,120,000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								9,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,164,000	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10,047,400				11,052,140	
					Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)			100%										
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								9,321,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,253,540	

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0001 UPT PENGELOLA PASAR BANJARBARU

3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								726,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				798,600
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								37,994,000				41,793,400	
					Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu					1072								
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								37,994,000				41,793,400	
					Jumlah Sarana Pasar rakyat yang sesuai standart					1072								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								37,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41,793,400
TOTAL													1,612,073,783				1,773,281,161	

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0002 UPT PENGELOLA PASAR ULIN RAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							84,048,598				92,453,457		
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							46,054,598				50,660,057		
					Predikat akuntabilitas			B										
					kinerja perangkat daerah			B										
					WTP			WTP										
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							18,154,198				19,969,617		
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								2,281,198	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,509,317	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								12,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,299,780	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								1,685,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,853,720	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								1,188,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,306,800	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13,602,600				14,962,860		
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								402,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			442,860	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								3,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,356,000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								9,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,164,000	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14,297,800				15,727,580		
					Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)			100%										
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								13,076,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,384,480	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								1,221,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,343,100	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							37,994,000				41,793,400		
					Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu			208										

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0002 UPT PENGELOLA PASAR ULIN RAYA

3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	37,994,000		41,793,400
					Jumlah Sarana Pasar rakyat yang sesuai standart	208		

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0002 UPT PENGELOLA PASAR ULIN RAYA

3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								37,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				41,793,400
TOTAL													84,048,598					92,453,457

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0003 UPT PENGELOLA GUDANG TRANSITO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								94,251,300				103,675,490	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								55,129,800				60,641,840	
					Predikat akuntabilitas			B										
					kinerja perangkat daerah			B										
					Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah			WTP										
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								16,063,300				17,669,630	
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								5,295,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,824,940	
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								8,507,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,358,745	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								1,071,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,179,145	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								1,188,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,306,800	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33,075,900				36,382,550	
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								280,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			308,550	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,780,000	
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								5,295,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,824,000	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								7,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,470,000	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,990,600				6,589,660	
					Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)			100%										
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								5,011,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,512,760	

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0003 UPT PENGELOLA GUDANG TRANSITO

3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								979,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,076,900
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------------------------------	--	--	--	-----------

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0003 UPT PENGELOLA GUDANG TRANSITO

3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								39,121,500					43,033,650
					Jumlah Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu				15									
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								39,121,500					43,033,650
					Persentase penanganan pengaduan konsumen yang ditindak lanjuti				15									
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								39,121,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				43,033,650
TOTAL													94,251,300					103,675,490

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0004 UPT METROLOGI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							240,767,276				264,855,954		
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							122,633,575				134,908,883		
					Predikat akuntabilitas			B										
					kinerja perangkat daerah			B										
					Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah			WTP										
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							13,396,975				14,736,673		
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,900,000	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								3,208,975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,529,873	
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								1,188,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,306,800	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							74,966,100				82,474,660		
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			12										
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								280,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			320,500	
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								52,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58,080,000	
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								3,405,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,746,160	
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								18,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,328,000	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							34,270,500				37,697,550		
					Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)													
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								8,734,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,607,400	
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								24,381,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,819,650	

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0004 UPT METROLOGI

3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,270,500
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								118,133,701					129,947,071
					Persentase alat UTTP metrologi legal tertib ukur						10							
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								118,133,701					129,947,071
					Jumlah alat UTTP metrologi legal yang telah ditera ulang						1							
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								118,133,701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				129,947,071
TOTAL													240,767,276					264,855,954

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								894,906,285				939,651,599	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								894,906,285				939,651,599	
					Nilai LPPD			Sangat Tinggi										
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								894,906,285				939,651,599	
					Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi			100%										
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah pertemuan dalam rangka dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial kemasyarakatan Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		4 Kali 1 Kali		348,550,860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			365,978,403	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Kecamatan dan kelurahan yang terbina administrasinya		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		5 Kecamata		207,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			217,743,750	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional dan Daerah		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		2 kali		338,980,425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			355,929,446	
TOTAL													894,906,285				939,651,599	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN ORGANISASI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									819,239,400	860,201,370			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									819,239,400	860,201,370			
					Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesaiditindak lanjuti			100%										
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi									819,239,400	860,201,370			
					Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi			100%										
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen analisa jabatan dan evaluasi jabatan Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		10 Dokumen 10 Laporan 1 Dokumen		317,253,825	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			333,116,516	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos				296,987,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			311,837,164	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah LKJ IP yang tersusun Jumlah pembinaan penyelenggaraan RB SKPD Jumlah pembinaan penyelenggaraan SAKIP SKPD Jumlah penilaian budaya kerja		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara		1 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 1 Laporan		204,997,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			215,247,690	
TOTAL													819,239,400				860,201,370	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 SEKRETARIAT DAERA-BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2,350,640,775	2,468,789,706					
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							2,350,640,775	2,468,789,706					
					Prosentase layanan informasi publik yang dikelola dengan baik				100%									
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2,350,640,775	2,468,789,706					
					Persentase pengelolaan layanan informasi publik				100%									
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media		Cakupan layanan hubungan kerjasama dengan media		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		12 Bulan		2,350,640,775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,468,789,706		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,364,561,625	1,432,789,707					
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,364,561,625	1,432,789,707					
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik				100%									
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							1,364,561,625	1,432,789,707					
					Persentase kualitas kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi				100%									
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		100 %		285,242,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		299,504,599		
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Cakupan pelaksanaan fasilitasi komunikasi pimpinan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		12 Bulan		579,182,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		608,141,205		
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah acara kedinasan yang diinput dan didokumentasikan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		12 Bulan		500,137,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		525,143,903		
TOTAL													3,715,202,400	3,901,579,413				

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								3,093,306,550			3,247,971,878		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								3,093,306,550			3,247,971,878		
					Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti			100%										
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								3,093,306,550			3,247,971,878		
					Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi			100%										
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bantuan dana hibah masjid di Banjarbaru Selatan Bantuan dana hibah masjid di Banjarbaru Utara Bantuan dana hibah masjid di Cempaka Bantuan dana hibah masjid di Landasan Ulin Bantuan dana hibah masjid di Liang Anggang Hibah Kelompok Masyarakat Hibah organisasi kelompok Pelaksanaan Ibadah Haji Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan pribadatan keagamaan Pelaksanaan Safari/ Silaturahmi Ramadhan Pelaksanaan Takmi Ramadhan Pelaksanaan tali asih petugas kebersihan rumah ibadah Petugas Masjid Agung Al Munawwarah		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 Kali 1 Kegiatan 1 Tahun 6 Kali 10 Kali 2 Kali 1 Tahun	2,127,607,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,233,988,295			

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Bansos PERTUNI PDC Kota Banjarbaru Bansos santunan kematian Hibah kelompok masyarakat Jumlah pembinaan dan pengembangan UKS di TK/SD/SMP/SMA/ Sederajat Jumlah silaturahmi dan pengembangan sosial budaya Jumlah sosialisasi peraturan, monitoring evaluasi bantuan sosial dan hibah Jumlah sosialisasi peraturan walikota tentang rukun kematian & bimtek penyelenggaraan pelatihan pengurusan jenazah Pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas netra		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 Kali 2 Kali 3 Kegiatan 3 Kegiatan 54 Kali		609,207,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		639,668,295
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------------------------	--	-------------

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Bansos kelompok masyarakat Jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan terhadap keberadaan anak yatim non lembaga di Kota Banjarbaru Jumlah evaluasi pelaksanaan koodinasi dan sosialisasi Jumlah silaturahmi pemberdayaan masyarakat		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		1 Tahun 1 kali 1 Kali 3 Kali		356,490,750	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			374,315,288	
TOTAL													3,093,306,550			3,247,971,878		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								664,362,300	697,580,415				
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								664,362,300	697,580,415				
					Nilai LPPD			Sangat Tinggi										
					Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti			100%										
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								438,900,000	460,845,000				
					Persentase cakupan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah danspm yang terverifikasi			100%										
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah dokumen perubahan sertifikat tanah masyarakat yang menghibahkan tanah Jumlah rapat penyelesaian permasalahan tanah pemko Pembuatan papan nama pengamanan tanah Pembuatan patok pengamanan tanah Persentase penegasan tapal batas antar kabupaten Persentase penyusunan peta nama rupa bumi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		10 Sertifikat 20 Kali 6 Buah 10 Buah 2 Kabupaten 100 %	438,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			460,845,000		
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah								225,462,300	236,735,415				
					Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi			100%										
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Persentase rencana kerja sama yang ditindaklanjuti		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos		100 %	225,462,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			236,735,415		
TOTAL												664,362,300	697,580,415					

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								12,468,712,979			13,704,852,227		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,152,854,829			10,057,426,262		
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah			BB										
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi			100%										
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								83,557,100			91,912,810		
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD			100%										
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		4 dokumen 1 dokumen		51,162,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,278,310	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		4 dokumen		32,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,634,500	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,055,671,484			8,861,191,333		
					Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%										
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		59 orang		8,021,833,734				8,824,017,108	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 dokumen		2,953,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,201,055	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		12 Laporan		30,884,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,973,170	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								305,831,245			336,395,619		
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi			100%										
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia				20 unit		13,052,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,339,165	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		26 unit		142,327,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			156,559,722	

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		50 dokumen 26633 lembar		12,219,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,440,982
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 buku		9,504,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,454,400
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		12 Laporan		128,728,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			141,601,350
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								127,600,000				140,360,000
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			100%									
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli				8 buah		127,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140,360,000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								106,480,000				106,480,000
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi			100%									
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah petugas / perusahaan Jasa Surat-Menyurat		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		2 orang		40,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,920,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		3 jenis		37,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,840,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		3 orang		27,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,720,000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								473,715,000				521,086,500
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik			100%									
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 buah		34,826,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,308,600

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		13 buah		177,254,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				194,979,400
---	----	----	------	----	--	--	--	--	---	--	---------	--	-------------	------------------------------	--	--	--	-------------

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		5 jenis		11,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12,402,500	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		1 paket		250,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,396,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								2,350,355,150	2,585,390,665				
					Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)							Level 3						
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1,154,225,600	1,269,648,160				
					Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal B							60%						
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan							90%						
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan							85%						
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen audit kinerja yang disusun Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemko dan SKPD yang disusun Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi SAKIP yang disusun Jumlah dokumen pengawasan kinerja yang disusun Jumlah dokumen Pengawasan Pengendalian Kepegawaian yang disusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 dokumen 33 dokumen 42 dokumen 8 dokumen		531,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			584,309,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen Laporan Audit Keuangan yang disusun Jumlah dokumen Laporan Pemeriksaan Dana BOS yang disusun Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Pajak Pusat dan PNPB yang disusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 dokumen 12 dokumen 13 dokumen		201,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			221,188,000	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah dokumen Laporan Tindak Lanjut APIP BPK RI yang disusun Jumlah dokumen Laporan Tindak Lanjut APIP Kota yang disusun Jumlah dokumen Laporan Tindak Lanjut APIP Propinsi yang disusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen 12 dokumen 1 dokumen		421,955,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			464,151,160	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								1,196,129,550	1,315,742,505				
					Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang DitindaklanjutiSKPD Sesuai Ketentuan							4 kali						

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah kegiatan pengawasan Penanganan Penyelesaian kerugian		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 kali		67,844,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,629,170	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah dokumen Laporan Audit Investigasi Atas Pengaduan Masyarakat yang disusun Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemko dan SKPD Jumlah dokumen Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran yang disusun Jumlah dokumen Laporan PA Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Barang Dan Jasa yang disusun Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Pengurustamaan Gender yang disusun Jumlah dokumen Laporan Pengawasan serentak kas opname yang disusun Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemko dan SKPD Jumlah dokumen Laporan Renja SKPD yang di telaah Jumlah dokumen Laporan Reviu KUA/PPAS 2022 dan perubahan 2021 Jumlah dokumen Laporan Reviu RKA SKPD 2022 dan Perubahan 2021 yang ditelaah		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 dokumen 33 dokumen 2 dokumen 5 dokumen 2 dokumen 32 Laporan 33 dokumen 32 dokumen 2 dokumen 32 dokumen		1,128,284,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,241,113,335	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								965,503,000				1,062,035,300	
					Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)			Level 3										
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								200,179,100				220,179,010	
					Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan			ADA										
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah APIP yg melaksanakan Diklat profesi/subtantif Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun Jumlah Kegiatan PKS		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat		7 orang 1 dokumen 4 kali		200,179,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220,179,010	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								765,323,900				841,856,290	
					Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan			100%										
					Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi			70%										

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun Jumlah laporan SPIP yang disusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen 1 dokumen		191,231,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,354,870
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Dokumen Laporan UPG yang disusun Jumlah Kegiatan Sosialisasi Saberpungli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 dokumen 2 kali		366,493,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			403,142,960
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah kegiatan pendampingan MCP Jumlah Kegiatan ZI		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kali 1 kali		207,598,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228,358,460
TOTAL													12,468,712,979				13,704,852,227

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01				PERENCANAAN								8,072,857,784				8,712,004,492	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,654,182,784				6,145,090,242	
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				B									
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100%									
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								45,150,000				47,407,501	
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD				100%									
					Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender				100%									
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Dokumen		23,493,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24,668,438	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3 Laporan		21,656,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22,739,063	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,261,125,784				4,684,045,391	
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan				100%									
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		39 Orang		4,197,266,359	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,616,992,995	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Dokumen		56,341,425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59,158,496	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD		Jumlah laporan keuangan skpd yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Laporan		7,518,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,893,900	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60,000,000				60,000,000	
					Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya				100%									
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		15 Orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								560,055,000				587,757,750	
					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi				100%									

5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3 Jenis		91,079,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95,633,475	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		7 Jenis		183,631,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			192,812,550	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		50 Buku 61 Lembar		43,619,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,800,475	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		12 Eksemplar		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		16 Laporan		235,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			247,511,250	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							33,300,000				36,600,000		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan			100%										
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Jenis		23,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,600,000	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Jenis		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							268,600,000				282,030,000		
					Cakupan jasa pihak ketiga yang difasilitasi			100%										
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Macam		230,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			241,710,000	

5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Lainnya		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Orang		38,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,320,000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							425,952,000				447,249,600		
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik							100%						
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Unit		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,750,000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		16 Unit		161,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				169,341,900
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		jumlah mebel yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3 Unit		15,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16,537,500
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 Unit		70,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				74,533,200
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		5 Paket		142,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,087,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							915,737,000				973,079,350		
					Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu							100%						
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							448,090,000				457,050,000		
					Persentase tahapan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan							100%						
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		18,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,440,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Forum SKPD/Lintas SKPD yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Kali		61,324,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,550,000

5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Kali		47,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48,275,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang disusun		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Dokumen		321,356,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				327,785,000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								175,000,000					195,000,000
					Persentase Pemenuhan Data Informasi dan Indikator Kinerja PembangunanDaerah Sesuai Ketentuan			100%										
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Analisis Data dan Informasi yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85,000,000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang disusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen/ Media Visual		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110,000,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								292,647,000					321,029,350
					Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			100%										
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Dokumen		167,647,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				176,029,350
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Laporan		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				145,000,000
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1,502,938,000					1,593,834,900
					a. Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD			100%										
					b. Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD			100%										
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								318,840,000					334,782,000
					Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang pemerintahan dengan Sasaran dan Program di RPJMD			100%										
					Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Pemerintahan dengan APBD			100%										
					Persentase Tingkat keselarasan Renstra SKPD Bidang Pembangunan Manusia dengan Sasaran dan Program di RPJMD			100%										

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

					Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan APBD	100%			
--	--	--	--	--	---	------	--	--	--

5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun Jumlah Sasaran dan Program di Renja SKPD Bidang Pemerintahan yang selaras dengan Sasaran dan Program di RKPD yang dilaksanakan Jumlah Sasaran dan Program di Renstra SKPD Bidang Pemerintahan yang selaras dengan Sasaran dan Program di RPJMD yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen		115,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				121,002,000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang disusun Jumlah Sasaran dan Program di Renja SKPD Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan Sasaran dan Program di RKPD yang dilaksanakan Jumlah Sasaran dan Program di Renstra SKPD Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan Sasaran dan Program di RPJMD yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen		203,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				213,780,000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							190,000,000				199,500,000		
					Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Sasaran dan Program di RPJMD							100%						
					Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan APBD							100%						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun Jumlah Sasaran dan Program di Renja SKPD Bidang Perekonomian yang selaras dengan Sasaran dan Program di RKPD yang dilaksanakan Jumlah Sasaran dan Program di Renstra SKPD Bidang Perekonomian yang selaras dengan Sasaran dan Program di RPJMD yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen		190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				199,500,000

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	994,098,000		1,059,552,900
					Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang Infrastruktur dengan Sasaran dan Program di	100%		

					RPJMD											
					Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Infrastruktur dengan APBD			100%								
					Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang Kewilayahan dengan Sasaran dan Program di RPJMD			100%								
					Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Kewilayahan dengan APBD			100%								
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun Jumlah Sasaran dan Program di Renja SKPD Bidang Infrastruktur yang selaras dengan Sasaran dan Program di RKPD yang dilaksanakan Jumlah Sasaran dan Program di Renstra SKPD Bidang Infrastruktur yang selaras dengan Sasaran dan Program di RPJMD yang dilaksanakan						679,098,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			713,052,900
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun Jumlah Sasaran dan Program di Renja SKPD Bidang Kewilayahan yang selaras dengan Sasaran dan Program di RKPD yang dilaksanakan Jumlah Sasaran dan Program di Renstra SKPD Bidang Kewilayahan yang selaras dengan Sasaran dan Program di RPJMD yang dilaksanakan						315,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			346,500,000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							426,482,250				447,055,733
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							426,482,250				447,055,733
					1. Persentase Penerapan Kebijakan Hasil Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			100%								
					2. Persentase Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan menjadi Kebijakan Daerah			100%								
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							15,000,000				15,000,000
					Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah			100%								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Hasil-hasil Kebijakan Kelitbangan yang difasilitasi, Dilaksanakan dan di evaluasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kajian		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15,000,000
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							155,909,250				163,704,713

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

					Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan pembangunan	100%			
--	--	--	--	--	---	------	--	--	--

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah kajian/penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang terlaksana		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Dokumen		155,909,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				163,704,713
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							161,317,000					169,382,430	
					Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah			100%										
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Jumlah Kajian/penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		80,658,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				84,691,215
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Jumlah Kajian/penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		80,658,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				84,691,215
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							94,256,000					98,968,590	
					Persentase Inovasi dan Teknologi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan daerah dan didesiminasikan			100%										
					Prosentase Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD			100%										
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Jumlah Kajian/Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi dan inovasi yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10 Inovasi 1 Dokumen		80,658,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				84,691,215
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Kajian/Penelitian yang didiseminasi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Kajian		13,597,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,277,375
TOTAL													8,499,340,034					9,159,060,225

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Banjarbaru

Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								38,358,548,840		38,358,548,840			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								18,859,267,340		18,859,267,340			
					Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah				BB									
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi				100%									
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								18,150,000		18,150,000			
					Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD				100%									
					Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender				100%									
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen 6 Dokumen	7,085,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			7,085,000		
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen	11,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,065,000		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,085,339,630		17,085,339,630			
					Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan				100%									
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan		12 Dokumen	17,038,545,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,038,545,630		
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	16,794,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			16,794,000		
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30,000,000		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								51,000,000		51,000,000			
					Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya				100%									
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Orang	51,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			51,000,000		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								699,301,710		699,301,710			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

					Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%			
--	--	--	--	--	---	------	--	--	--

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Banjarbaru

Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		97,532,960	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			97,532,960
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		160,161,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			160,161,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan 12 Bulan		17,159,750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			17,159,750
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,800,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		419,648,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			419,648,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								201,855,000				201,855,000
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan												
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		137,915,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			137,915,000
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		63,940,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			63,940,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								253,298,000				253,298,000
					Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi												
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah petugas Jasa Surat-Menyurat		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		36,870,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			36,870,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		144,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				144,800,000
---	----	----	------	----	--	--	--	--	---	--	----------	--	-------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Banjarbaru

Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jasa pelayanan umum kantor lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		71,628,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			71,628,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								550,323,000				550,323,000	
					Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik			100%										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		34,990,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			34,990,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		151,863,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			151,863,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		102,740,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			102,740,000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 gedung		252,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			252,080,000	
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		8,650,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			8,650,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								16,403,219,500				16,403,219,500	
					WAKTU PENYELESAIAN RANCANGAN PERDA APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DITETAPKAN			100%										
					PERSENTASE JUMLAH SP2D YANG TERBIT TEPAT WAKTU			100%										
					PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU			100%										
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								3,182,963,500				3,182,963,500	
					Persentase rekomendasi KUA dan PPAS yang telah ditindak lanjuti			100%										
					Persentase rekomendasi Perubahan KUA dan PPAS yang telah ditindaklanjuti			100%										
					Persentase Rekomendasi Perda tentang APBD dan Perwali tentang penjabaran APBD yang telah di tindak lanjuti			100%										
					Persentase Rekomendasi Perubahan APBD Kota Banjarbaru dan Perwali tentang Penjabaran APBD Perubahan yang ditindak lanjuti			100%										
					Persentase rekomendasi pengelolaan dana hibah dan bansos yang telah di tindak lanjuti			100%										

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		326,477,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				326,477,500
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-------------	--	--	--	--	-------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen KUA perubahan dan PPAS Perubahan yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		33,132,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,132,500
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		2,302,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,302,791,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		229,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				229,890,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen naskah perjanjian hibah daerah yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Dokumen		290,672,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				290,672,500
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								674,330,000				674,330,000	
					Persentase rekomendasi pengelolaan kas daerah yang telah ditindak lanjuti							100%						
					Persentase dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang direalisasikan							100%						
					Persentase waktu penerbitan SP2D SKPD sesuai standar							100%						
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Kas yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana perimbangan dan dana bagi hasil yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		167,734,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				167,734,000
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Pengelolaan Penatausahaan yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan		6 Kali		456,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				456,596,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								1,213,177,300				1,213,177,300	
					Persentase realisasi serapan anggaran belanja daerah							100%						
					Persentase rekomendasi Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tindak lanjuti sesuai SAP							100%						
					Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan							100%						
					Persentase penerimaan tuntutan ganti rugi (TGR)							100%						

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Banjarbaru

Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah dokumen laporan realisasi APBD triwulan dan semesteran yang tersusun		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan		5 Dokumen		141,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				141,280,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terferivikasi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan		2 Dokumen		345,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				345,908,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwali penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		116,024,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				116,024,500
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah surat keputusan penetapan pelunasan tuntutan ganti rugi daerah yang diterbitkan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 SK		559,889,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				559,889,800
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
										Program	KeluaranSub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan Akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		50,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,075,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							10,713,237,200				10,713,237,200		
					Jumlah kewajinab pembayaran atas pinjaman daerah sesuai ketentuan			5.713.237.200										
					Persentase dana darurat dan mendesak yang terealisasi			100										
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah jenis pinjaman pemerintah daerah yang jatuh tempo		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		5,713,237,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,713,237,200
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah dana darurat dan mendesak yang terealisasi		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Jenis		5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000,000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							619,511,500				619,511,500		
					Persentase SKPD yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah untukpengelolaan data keuangan			100%										

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah pemeliharaan Aplikasi dan Server SIMDA Keuangan yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Kali		619,511,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				619,511,500
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								3,096,062,000					3,096,062,000
					PERSENTASE KESESUAIAN NILAI NERACA BMD SAMA DENGAN NILAI BMDDALAM NERACA KEUANGAN							100%						
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								3,096,062,000					3,096,062,000
					Persentase usulan standar satuan harga/barang jasa yang terverifikasi							100%						
					Persentase perencanaan kebutuhan barang dan pemeliharaan BMD SKPD yang terverifikasi							100%						
					Persentase pengelola barang SKPD yang diawasi							100%						
					Persentase barang persediaan BMD SKPD yang direkonsiliasi							100%						
					Persentase laporan BMD SKPD yang terverifikasi							100%						
					Persentase rekomendasi BMD yang ditindak lanjuti SKPD							100%						
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				175,000,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan BMD yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		180,458,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				180,458,500
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kali		1,161,224,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1,161,224,000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang Persediaan yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 Dokumen		384,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				384,894,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		797,927,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				797,927,500
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan BMD yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Kali		396,558,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				396,558,000
TOTAL													38,358,548,840					38,358,548,840

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN									18,629,199,461			19,517,502,146	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14,489,187,011			15,271,499,936	
					PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			A										
					OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			WTP										
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									64,591,020			69,758,222	
					Nilai hasil evaluasi AKIP													
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3 Dokumen		31,381,020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33,891,422	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Dokumen		33,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,866,800	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10,935,174,341			11,810,377,899	
					Persentase Temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjuti			100%										
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		40 Orang		10,893,323,801	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,764,789,705	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		7 Laporan		19,480,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,428,550	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Laporan		22,370,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,159,644	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									35,000,000			35,000,000	
					Persentasi keluhan pengaduan layanan Internal yang ditindak lanjuti			100%										
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Jenis		35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,000,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									1,024,028,650			1,129,931,515	
					Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			100%										
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Paket		83,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,713,600	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Paket		377,497,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			415,247,195	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		10000 Lembar 150000 Lembar		82,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,871,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3360 Eksemplar		15,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16,632,000
---	----	----	------	----	--	--	---	--	--	--	----------------	--	------------	------------------------------	--	--	--	------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		12 Laporan		465,425,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			515,467,720	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								870,000,000				510,000,000	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Unit		400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3 Jenis		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		3 Jenis		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam kondisi baik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		40 Jenis		70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,000,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								825,400,000				907,940,000	
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal													
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		12 Bulan		40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,000,000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		12 Bulan		785,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			863,940,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								734,993,000				808,492,300	
					Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			100%										
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Unit		34,993,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,492,300	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		16 Unit		320,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			352,000,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		50 Unit		80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			88,000,000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Gedung		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Paket		100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110,000,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								4,140,012,450				4,246,002,210
					-PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH												
					-PERTUMBUHAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH												
					RASIO PAD												
					DEVIASI REALISASI PAD TERHADAP ANGGARAN APBD												
					MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2												
					MENINGKATKAN PENERIMAAN BPHTB												
					MENURUNNYA TUNGGAKAN PBB-P2												
					- MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH (NON-PBB DAN BPHTB)												
					- MENINGKATKAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH												
					- MENURUNNYA TUNGGAKAN PAJAK DAERAH (NON-PBB DAN BPHTB)												
					PROSENTASE MENINGKATNYA JUMLAH OBJEK PAJAK DAERAH												
					PROSENTASE MENINGKATNYA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH												
					PROSENTASE MENURUNNYA JUMLAH PENUNGGAK PAJAK DAERAH												
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah								4,140,012,450				4,246,002,210
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah survey yang dilaksanakan kepada masyarakat Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan/sosialisasi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		2 Laporan 4 Laporan		411,197,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			452,317,360
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah data BPHTB yang tervalidasi dan terverifikasi Jumlah data PBB-P2 yang tervalidasi dan terverifikasi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		12 Laporan 12 Laporan		1,118,255,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,118,255,500
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Potensi wajib Pajak dan retribusi yang berhasil divalidasi Jumlah Potensi wajib Pajak dan retribusi yang berhasil diverifikasi		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		1 Laporan 1 Laporan		431,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			481,000,000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Laporan BPHTB yang tervalidasi dan terverifikasi Jumlah Laporan PBB-P2 yang tervalidasi dan terverifikasi Jumlah Penurunan Tunggakan PBB-P2		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		20 Laporan 12 Laporan 1 Laporan		1,357,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,357,010,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah laporan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) yang tervalidasi dan terverifikasi Jumlah laporan retribusi daerah yang tervalidasi dan terverifikasi Jumlah Penurunan Tunggakan Objek Pajak dan Retribusi Daerah		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		9 Laporan 1 Laporan 1 Laporan		372,630,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			387,500,000
---	----	----	------	----	------------------------	--	---	--	--	--	-------------------------------------	--	-------------	------------------------------	--	--	-------------

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana Jumlah rekonsiliasi yang terlaksana		Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		4 Laporan 12 Laporan		449,919,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				449,919,350
TOTAL													18,629,199,461					19,517,502,146

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Banjarbaru

Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKANDAN PELATIHAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN								14,568,398,892			14,886,390,965		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7,410,813,542			8,759,647,660		
					PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH				BB									
					CAKUPAN PELAYANAN INTERNAL YANG DIFASILITASI				100%									
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								75,000,000			90,000,000		
					PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD				100%									
					PERSENTASE PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER				100%									
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen 3 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000		
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,000,000		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,336,505,305			4,348,505,305		
					PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN SESUAI KETENTUAN				100%									
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32 Orang	4,276,505,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,276,505,305		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24,000,000		
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000		
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,735,668,237			2,603,502,355		
					CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM YANG DIFASILITASI				100%									
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		234 Buah	53,735,862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,603,793		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Paket		735,686,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,103,529,375	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9347 Eksemplar 181195 Lembar		318,320,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			477,480,937	
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4138 Eksemplar		27,931,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,897,250	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		219 Laporan		599,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			899,991,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								518,000,000	603,000,000				
					CAKUPAN BARANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANGDAPAT DIGUNAKAN			100%										
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu dst) yang dibeli		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			255,000,000	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		198,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			198,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								189,840,000	256,440,000				
					CAKUPAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH YANGTERSEDIA			100%										
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		JuJumlah petugas/ perusahaan jasa surat menyurat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		30,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,480,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Jenis		133,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				199,800,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pegawai administrasi kantor non PNS aktif		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Orang		26,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26,160,000
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								555,800,000					858,200,000
					CAKUPAN BARANG PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DALAMKONDISI BAIK			100%										
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		78,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				117,900,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang terfasilitasi dan dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 Unit		170,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				255,600,000
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara				5 Set		5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		186 Unit		140,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				211,050,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		143,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				241,650,000
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		181195 Paket		18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				27,000,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								7,157,585,350					6,126,743,305
					INDEKS SISTEM MERIT			300										
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								2,134,517,550					2,347,969,305
					% DATA TERUPDATE PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASISELEKTRONIK			100%										

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan ASN yang tersusun		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		86,544,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			95,198,840
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Persentase persetujuan teknis CASN yang telah ditetapkan BKN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1,409,607,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,550,568,415
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah SK Pensiun dengan BUP yang ditetapkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		147 SK		61,053,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,158,850
5	03	02	2.01	08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN		Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani Anggota Korpri		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		286,448,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			315,092,800
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Persentase Data ASN yang telah diupdate berdasarkan hasil verifikasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		290,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			319,950,400
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							1,000,519,800					905,557,000
					% JABATAN LOWONG YANG TERISI SESUAI KETENTUAN												
					% PANGKAT DALAM JABATAN YANG TERISI SESUAI KETENTUAN												
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang ditetapkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500 SK		226,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140,557,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN		Persentase Pelaksanaan Promosi ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		773,819,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			765,000,000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							1,898,800,000					483,900,000
					% APARATUR YANG SESUAI KOMPETENSINYA												
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah PNS yang mengikuti Tubel dan Ijin Belajar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55 Orang		1,564,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,600,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Kegiatan		195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				195,000,000
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah PNS jabatan fungsional pasca pengangkatan ke dalam jabatan yang ditindak lanjuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174 Orang		54,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				64,500,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		286 Orang		85,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74,800,000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							2,123,748,000					2,389,317,000	
					% APARATUR YANG BERKINERJA BAIK							100%						
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Aparatur yang telah dinilai oleh atasannya		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		368,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				468,540,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah pegawai yang menerima penghargaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Orang		78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				81,500,000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Jumlah Aparatur yang menerima penghargaan tanda jasa Jumlah surat kenaikan gaji berkala yang diproses Persentase usul cuti yang setuju		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		331 Orang 1640 SKGB 100 %		1,508,172,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,658,989,000
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah Dokumen pelaksanaan pembinaan disiplin ASN		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		71,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				73,000,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan tepat waktu Persentase penyelesaian kasus-kasus peanggaran disiplin yang ditindaklanjuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		238 WL 100 %		82,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				90,288,000
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Persentase rekomendasi izin perceraian yang ditindaklanjuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		15,456,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru
Tahun 2022

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10,471,018,000		2,977,527,800
---	----	--	--	--	--------------------------	----------------	--	---------------

5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							10,471,018,000					2,977,527,800
					% SDM APARATUR YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI												
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis							7,052,018,000					812,170,800
					% APARATUR YANG SESUAI KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL												
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah PNS yang memiliki sertifikat Diklat Teknis dan Fungsional, Uji Kompetensi JFT dan Ujian Dinas serta UKPPI		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		359 Orang		7,052,018,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			812,170,800
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							3,419,000,000					2,165,357,000
					% APARATUR YANG SESUAI KOMPETENSI MANAJERIAL												
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah PNS yang memiliki sertifikat PKN TK.II, PKA, PKP dan Latsar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		677 Orang		3,419,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,165,357,000
TOTAL												25,039,416,892					17,863,918,765

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal**, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ditambah pula dengan peraturan terkait masing – masing kementerian, maka pemerintahan daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa Pemerintah daerah memenuhi pelayanan dasar setiap warga negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas :

- 1.1.3.1.1 Pendidikan;
- 1.1.3.1.2 Kesehatan;
- 1.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 1.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 1.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 1.1.3.1.6 Sosial.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan tersebut dijadikan sebagai Pemerintah daerah Kota Banjarbaru baru sebagai pedoman pelaksanaan penerapan SPM.

Arahan dari Pemerintah pusat menegaskan bahwa Kebijakan mengenai Penerapan SPM di daerah dapat diintegrasikan kedalam Dokumen Perencanaan, mulai dari RPJMD, RKPD dan Renja SKPD. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, namun dalam Dokumen RPJMD belum dilakukan penyesuaian mengenai Indikator SPM yang baru dikarenakan revisi RPJMD sudah pernah dilakukan.

Penyesuaian indikator SPM yang baru akan dilakukan kedalam Dokumen perencanaan tahunan yaitu seperti RKPD dan Renja SKPD, sehingga perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dapat melaksanakan penerapan SPM. kemudian akan dilaporkan mengenai dasar terjadinya perubahan dan pelaksanaan penerapan SPM yang baru. Selanjutnya Kebijakan tentang SPM yang baru akan diintegrasikan kedalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya.





BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut disajikan tabel Capaian Kinerja Makro Tahun 2021 dan 2022 serta angka perubahannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	79,26	79,68	0,53
2	Angka Kemiskinan	4,40	4,17	-5,227
3	Angka Pengangguran	5,70	5,47	-4,035
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,33*	7,93**	138,138
5	Pendapatan Per kapita	38.659	44.387	5.728
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,36	0,34	-5,556

Sumber : BPS Kota Banjarbaru Tahun 2022

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

***) Angka Perkiraan



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran keberhasilan dari daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data atau informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			URUSAN PELAYANAN DASAR			
1.	Urusan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah Satuan PAUD (Negeri/swasta) Terakreditasi	192	Bidang PAUD	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima	Jumlah Peserta Didik PAUD (Negeri/swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah,	0	Bidang PAUD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah Peserta didik PAUD (Negeri/swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan,	69	Bidang PAUD	
		Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri/swasta),	503	Bidang PAUD	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada PAUD (Negeri/swasta)	670	Bidang PAUD	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana	214	Bidang PAUD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	(S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikasi profesi guru PAUD			
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah PAUD formal atau Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Satuan PAUD Non Formal dari lembaga Pemerintah,	83	Bidang PAUD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat Pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah				
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	104	DISDIK (Bidang PSD & PSMP)	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar SD (Negeri dan Swasta) yang	Jumlah Peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Bidang PSD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah				
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DISDIK (Bidang SMP)	
		Jumlah peserta didik pada Jenjang sekolah dasar SD (Negeri dan	Jumlah Peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	20.773	DISDIK (Bidang SD)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan				
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima Pembebasan biaya pendidikan	Jumlah Peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta)	8.043	DISDIK (Bidang SMP)	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar SD (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta)	1.415	DISDIK (Bidang P2TK)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama SMP (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta)	590	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah Peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DISDIK (Bidang SMP)	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar SD	Jumlah Pendidik pada Sekolah Dasar (Negeri/swasta),	1.588	DISDIK (Bidang P2TK)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		(Negeri dan Swasta)				
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama SMP (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta),	634	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar SD (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta),	445	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta),	192	DISDIK (Bidang P2TK)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Pertama SMP (Negeri dan Swasta)				
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar SD (Negeri dan Swasta)	Jumlah Tenaga Kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta)	357	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah tenaga Kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Jumlah Tenaga Kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta)	166	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	Jumlah Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	349	DISDIK (Bidang P2TK)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik				
		Jumlah Pendidik pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik,	Jumlah Pendidik pada jenjang Sekolah Menengah (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik,	496	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta) yang memiliki	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	65	DISDIK (Bidang P2TK)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah				
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah,	13	DISDIK (Bidang P2TK)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada jenjang Sekolah Dasar (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederaja	142	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah Tenaga Penunjang Lainnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah SMA/Sederajat	132	DISDIK (Bidang P2TK)	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri/swasta) Terakreditasi,	8	DISDIK (Bidang PAUD DIKMAS)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		(Negeri dan Swasta)				
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Didik pendidikan kesetaraan (Negeri/swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	0	DISDIK (Bidang PAUD DIKMAS)	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah Peserta Didik pendidikan kesetaraan (Negeri/swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.327	DISDIK (Bidang PAUD DIKMAS)	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri/swasta)	190	DISDIK	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			(Bidang PAUD DIKMAS)	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri/swasta)	183	DISDIK (Bidang PAUD DIKMAS)	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	167	DISDIK (Bidang PAUD DIKMAS)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah kepala sekolah pada satuan Pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan (Negeri/swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	6	DISDIK (Bidang PAUD DIKMAS)	
2.	Urusan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		9 buah Rumah Sakit	Seksi Pelayanan Kesehatan	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		9 buah Rumah Sakit	Seksi Pelayanan Kesehatan	
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan		a. Alat Kesehatan : 6.053 buah b. Bidan : 151 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		untuk pelayanan antenatal				
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Bidan : 151 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Bidan : 151 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Bidan : 151 orang Gizi : 34 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Tenaga Kesehatan : 602 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Tenaga Kesehatan : 602 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Tenaga Kesehatan : 602 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		b.Tenaga Kesehatan : 602 orang		
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Tenaga Kesehatan : 602 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Tenaga Kesehatan : 602 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kesehatan sesuai standar				
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Tenaga Kesehatan : 602 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	
		a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia b. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		a.Alat Kesehatan : 6.053 buah b.Tenaga Kesehatan : 602 orang	Seksi SDMK dan Seksi Pelayanan Kesehatan	
3.	Urusan Pekerjaan	Luas kawasan permukiman rawan		48,76 Ha	Data Permukima	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Umum dan Penataan Ruang	banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			n Rawan Banjir/ Genangan	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		90.922 m	Data Permukiman Rawan Banjir/Genangan	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Kota Banjarbaru tidak memiliki garis pantai		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Kota Banjarbaru tidak memiliki garis pantai		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air		Tidak Ada		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		WS Kewenangan kabupaten/kota				
		Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Tidak ada		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		59.013 m		
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer (m)}} \times 100\%$	71%	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Tahun 2021	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder (m)}} \times 100\%$	55%	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Tahun 2021	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier (m)}} \times 100\%$	72%	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Tahun 2021	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota		Tidak ada	Surat Pernyataan Komitmen	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota		Tidak ada	-	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaranSPAM		Ada	PDAM Banjar	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Tidak Ada		
		Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		Tidak Ada		
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar		56.305 rumah	Jumlah KK Tercapai (Akses Layak)	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		menggunakan SPALD S				
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		8.383 rumah	Jumlah KK Tercapai (Akses Aman)	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		56.305 rumah	Data Capaian Standar SPM Air Limbah Tahun 2021 yaitu Data Jumlah KK Per Kecamatan	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		51 Buah		
		Jumlah rumah yang sudah		51 Buah		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja				
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		8.383 rumah	Jumlah KK Tercapai (Akses Aman)	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk/Tangki Septik}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALD dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun <25 Jiwa/Ha}} \times 100\%$	87,04%	Data Capaian Standar SPM Air Limbah Tahun 2021	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang Lumpur Tinjanta telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS dengan Kepadatan Penduduk pada Wilayah Terbangun >25 Jiwa/Ha}}$	12,96 %	Data Capaian Standar SPM Air Limbah Tahun 2022	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDT}} \times 100\%$	12,96 %	Data Capaian Standar SPM Air Limbah Tahun 2022	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat} \times 100\%}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}}$	87,04%		
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia} \times 100\%}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kota}}$	66,67%		
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia} \times 100\%}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kota}}$	20%		
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD} \times 100\%}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kota}}$	1,81%		
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot} \times 100\%}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}}$	0,08 %		
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah		6,19%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku} \times 100\%}{\sum \text{jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana}}$			
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		296 Buah		
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada	PERDA Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada	SK Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/127/KUM/2021 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarbaru	
		Jumlah bangunan gedung yang		Tidak Ada		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan				
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Provinsi		Tidak ada		
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		64 buah	Inventarisasi Gedung Negara Milik Pemerintah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		64 buah	Inventarisasi Gedung Negara Milik Pemerintah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan	
		Panjang jalan berdasarkan yang		1.123,434 km	Berdasarkan SK	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota			Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/470/KUM/ 2016 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan dan Kelas Jalan Kota Di Kota Banjarbaru dan SK Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/287/KUM/2018 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Lingkungan di Kota Banjarbaru	
		Panjang jalan yang dibangun		1.636 m	Panjang Jalan yg dibangun	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
					Sub Keg. Pembangunan Jalan (yang dibangun sampai dengan pengaspalan baru)	
		Panjang jembatan yg dibangun		0 m	-	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		34.585,64 m	Panjang Jalan yg ditingkatkan Sub Kegiatan Rekonstruksi jalan dan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan (paket pekerjaan Peningkatan Jalan) dan Jumlah Peningkatan Jalan Lingkungan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0 m	-	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		3.163 m	Panjang Jalan Direhabilitasi (sub kegiatan Rehabilitasi Jalan) dan Jumlah Perbaikan Jalan Lingkungan	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi		6 m	panjang Jembatan yg direhabilitasi sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	
		Panjang jalan yang dipelihara		3.708 m		
		Panjang jembatan yang dipelihara		6 buah		
		Jumlah Pelatihan Tenaga Operator/Teknisi/ Analis di wilayah kabupaten/kota		Tidak Ada Data		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah /kota		276 orang		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kota		276 orang		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		100%		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota		100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		100%		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Tidak Ada Data		
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang		Tidak Ada		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota		100%		
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		Tidak Ada		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah		100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis				
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kota		100%		
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota		100%		
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		100%		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat,		Tidak Ada		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Tidak Ada		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Tidak ada		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		171 Perusahaan		
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota		Tidak Ada		
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota		Tidak Ada		
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kota		52 Perusahaan		
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		171 Perusahaan		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan		Tidak Ada		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.				
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada Data		
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Tidak Ada		
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan	Jumlah rumah yang berada pada Kawasan rawan		0	Bidang Perumahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kawasan Permukiman	bencana dan rencana penanganannya				
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0 Unit	SK Wali Kota dari BPBD	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0 RT	SK Wali Kota dari BPBD	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0 KK	SK Wali Kota dari BPBD	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun Kembali sesuai dengan rencana aksi		0	Bidang Perumahan	
		Jumlah unit korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	Bidang Perumahan	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal		0	Bidang Perumahan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		sementara korban bencana				
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	Bidang Perumahan	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		0	Bidang Perumahan	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0 Unit	SK Wali Kota Nomor : 188.45/250/KUM/2021	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan		10 Unit	RKA DISPERKI M Tahun 2022	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		rencana pemenuhan SPM				
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		80 unit	Bidang Permukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		23	Bidang Permukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	Bidang Permukiman	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		310 Ha	Bidang Permukiman	
		Jumlah luasan (Ha) Kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		16.86 Ha	SK Wali Kota Nomor : 188.45/464/KUM/2022	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		192 Unit	Bidang Permukiman	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur Kawasan kumuh		15,18 Ha	Bidang Permukiman	
		Jumlah rumah di kab/kota		68.992 Unit	Bidang Permukiman	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		192 Unit	Bidang Permukiman	
		Jumlah rumah tidak layak huni		633 Unit	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni		7.033 Unit	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Rasio rumah dan KK		90,74%	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	
		Jumlah rumah pembangunan baru		3.186rumah	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		209 Perumahan	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		68.992 Unit	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		68.992 Unit	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		68.992 Unit	Laporan RP3KP Bidang Permukiman	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		97 perumahan	Bidang Perumahan	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		68.978 Unit	Data Statistik Tahun 2020	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi		76 Pengembang	Data dari REI	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi		76 Pengembang	Data dari REI	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		62 Pengembang	Data dari REI	
5.	Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	1.920	Seksi Trantibumtr anmas	
		Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan dikukuhkan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	40 Orang terlatih	Seksi Satlinmas	
		Jumlah Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	25	Seksi Lidik Sidik	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		yang ditegakan				
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	8 PPNS	Seksi Lidik Sidik	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	40	Seksi Lidik Sidik	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	234 layanan	Damkar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	Tidak ada	Damkar	dilengkapi data 1 pos damkar
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	Tidak ada	Damkar	Karena kurangnya personil anggota pemadam kebakaran ditingkat kota
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	32 organisasi	Damkar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	<p>Mobil tangki kapasitas 3000-5000 liter = 4 Buah</p> <p>Mobil mesin hisap/semprot = 3 Buah</p> <p>Mesin semprot 2 silinder = 1 Buah</p> <p>Mesin pemadam portable = 4 Buah</p> <p>APAR = 10 Buah</p>	Damkar	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana dimaksud	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	Tidak ada	Damkar	tidak dilaksanakan karena seluruh anggota Damkar Kota Banjarbaru belum



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran				pernah mendapatkan pendidikan Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	32 orang	Damkar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran				
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	Tidak Ada	Damkar	Tidak Ada Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		100%	Bpbd Kota Banjarbaru	Tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan tersebut dialihkan ke kegiatan penanggulangan Covid-19 2021
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan		100%	Bpbd Kota Banjarbaru	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		100%	BPBD Kota Banjarbaru	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		100%	BPBD Kota Banjarbaru	
		Persentase warga Negara yang ikut pelatihan		100%	BPBD Kota Banjarbaru	
		Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	100%	BPBD Kota Banjarbaru	
		Persentase warga Negara yang mendapat	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	100%	BPBD Kota Banjarbaru	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		peralatan perlindungan	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
6.	Urusan Sosial	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	Jumlah pelayanan data dan pengaduan	3 SLRT	Bidang Dayasos	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	941 orang	DTKS Dinas Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		28 buah	Dinas Sosial	
		Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		941 orang	Dinas Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus		1 buah	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		layanan kendaraan yang dimiliki				
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		215 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah rumah singgah/ shelter tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		1 buah	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		7 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang		51 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		memanfaatkan alat bantu				
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shalter		4 buah	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah Paket perbekalan kesehatan yang tersedia		10 paket	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		10 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		4 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan / atau relawan sosial yang disediakan		88	Bidang Pemberdayaan Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial rumah singgah/ shalter dan /atau pusat kesejahteraan sosial		352 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		302 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang di fasilitasi untuk mendapatkan		5 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dokumen kependudukan				
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		55 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		36 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		50 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		35 orang	Bidang Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah Korban bencana yang mendapat makanan		3443 jiwa	Bidang Linjamsos	
		Jumlah Korban bencana yang menerima paket sandang		13	Bidang Linjamsos	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		0	Bidang Linjamsos	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		125	Bidang Linjamsos	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan		0	Bidang Linjamsos	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dukungan psikososial				
		Jumlah pekerja sosial professional / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang tersedia		38 orang	Bidang Pemberdayaan Sosial	

URUSAN WAJIB

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.		Ada		
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		19,74		
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		0		
		Persentase penerapan		0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Program PBK dengan kualifikasi klaster				
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		0		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		176		
		Persentase LPK yang terakreditasi		16,67		
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK Perizinan}}{\text{Jumlah LPK yang terdata}} \times 100\%$	100%		
		Jumlah penganggur yang dilatih		176		
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah penangguran yang dilatih}}{\text{Jumlah lulusan yang bersertifikat}} \times 100\%$	100%		
		Persentase penyerapan lulusan		176		
		Lulusan bersertifikat kompetensi		176		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan		6		
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		0		
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		0		
		Data tingkat produktivitas total		0		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan} \times 100\%}{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP}}$	80,87%		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki		195,45%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Perjanjian Kerja Bersama (PKB)				
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		40		
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		82,2		
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		38,38		
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		0,32		
		Jumlah mogok kerja		0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah penutupan perusahaan		0		
		Jumlah perselisihan kepentingan		0		
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0		
		Jumlah perselisihan PHK		5		
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		97		
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0		
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		1		
		Persentase perselisihan hubungan		60%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial				
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		392		
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		4.525		
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		10		
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		2		
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		2		
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal		1		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dalam satu wilayah kab/kota				
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		0		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		0		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		6		
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan		0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		fasilitasi kepulangan				
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		0		
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		0		
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		0		
2.	Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	-	32	Realisasi Kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
					PPPA, Disdalduk Kb PMP PA	
		Jumlah Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	-	76	Laporan data dari Bappeda Kota Banjarbaru, hasil dari penilaian TIM PUG Kota Banjarbaru dan hasil Kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan, Bidang PPPA, Disdalduk KB PMP PA	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerjasama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan		0	-	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		KIE pencegahan kekerasan terhadap anak				
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		23	Data Seksi Perlindungan Anak, Bidang PPPA, Disdalduk KB PMP PA	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani dari 21 (dua puluh satu) kasus yang dilayani ada 21 dua puluh satu kasus anak jadi dapat dipersentasekan yaitu 21 kasus anak dibagi 21 kasus keseluruhan di kali 100%	33	Data Seksi Perlindungan Anak, Bidang PPPA, Disdalduk KB PMP PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		3	Data Seksi Perlindungan Anak, Bidang PPPA, Disdalduk KB PMP PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD Kab/Kota)		2	Data Seksi Perlindungan Anak, Bidang PPPA, Disdalduk KB PMP PA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		25	Data dari Bidang PPPA dan Bidang PM Disdalduk KB PMP PA	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		5.812 orang	Data Bidang PM Disdalduk KB PMP PA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		2	Data Bidang PM Disdalduk KB PMP PA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		4 lembaga (GOW, TP-PKK, GATRIWARA, DWP)	Data DPA Disdalduk KB PMP PA	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap		3 Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru	Data dari Disdalduk KB PMP PA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah di evaluasi				
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi		0	-	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani dari 8 (delapan) kasus yang dilayani ada (8) delapan kasus kekerasan perempuan jadi dapat dipersentasekan yaitu 8 kasus kekerasan perempuan dibagi 8 kasus keseluruhan dikali 100 %	9	Data Seksi Perlindungan Anak, Bidang PPPA, Disdalduk KB PMP PA	
3.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah Penduduk yang mendapat isi pesan program KKBPK dibagi jumlah penduduk Kota Banjarbaru di kali 100%	78,25%		
		Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan		0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		(GDPK) yang di-Perda kan				
		Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh Wanita 25-49 tahun		17,84		
		Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		26,28		
		Jumlah Stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		70		
		Persentase fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100%		
		Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode		13,05%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
		Pemerintah Daerah Propinsi yang memiliki Kelompok kerja KKBPK yang efektif		31		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		39,49%		
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		0,03%		
		Persentase kesertaan KB Keluarga Penerima bantuan Iuran (PBI)		24,79%		
4.	Urusan Lingkungan Hidup	Hasil Perhitungan Provinsi terhadap a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		a. 55,26 b. 87,64 c. 0		
		Tersedianya data dan Informasi	$\frac{\text{Total sampah yang dapat ditangani (ton)}}{\text{Total vol Timbunan Kabupaten/Kota (ton)}} \times 100\%$	100,16		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		penanganan sampah diwilayah Kabupaten/Kota				
		1. Data ijin PPLH atau PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PPULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten / Kota 4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan		1. 100% 2. 0 3. 0 4. 0 5. 100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 5. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani.				
5.	Urusan Pangan	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		Ada 1, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Maju Makmur di Kelurahan Bangkal	Bidang Ketahanan Pangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
				Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru		
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		17,26	Bidang Ketahanan Pangan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		Tidak ada regulasi harga minimum daerah	Bidang Ketahanan Pangan	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		1	Bidang Ketahanan Pangan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		1	Bidang Ketahanan Pangan	
		Tertanganinya kerawanan pangan		0	Bidang Ketahanan Pangan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		1	Bidang Ketahanan Pangan	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		1	Bidang Ketahanan Pangan	
6.	Urusan Pertanahan	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Tidak ada	DPM DAN PTSP	Izin lokasi diterbitkan langsung melalui OSS dan tidak ada fitur untuk mengetahui data tersebut di sistem
		SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100\%$	0	BPN	Sampai saat ini belum mengeluarkan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absenteex 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0	BPN	Tidak ada kegiatan pensertipikan tanah melalui Redistribusi Tanah di Kota Banjarbaru
		Dokumen izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + Jumlah izin membuka tanah yang ditolak x 100 % Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0	Dinas PUPR	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik..... x 100 % Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	0	DPM dan PTSP	Izin lokasi diterbitkan langsung melalui OSS dan tidak ada fitur untuk mengetahui data tersebut di sistem



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
7.	Urusan Admindukcapil	Penerbitan akta Perkawinan	$\frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan}}{100\%} \times \text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}$	100%	Disdukcapil Kota Banjarbaru	
		Penerbitan akta Perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%	Disdukcapil Kota Banjarbaru	
		Penerbitan akta Kematian	$\frac{\text{Jumlah akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%	Disdukcapil Kota Banjarbaru	
		Penyajian data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun}}{2 \text{ tahun}} \times 100\%$	51%	Disdukcapil Kota Banjarbaru	
8.	Urusan Penanaman Modal	Perda mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		1	Bidang Penanaman Modal	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas		0	Bidang Penanaman Modal	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		insentif penanaman modal				
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		0	Bidang Penanaman Modal	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		2	Bidang Penanaman Modal	
		Kegiatan pameran penanaman modal		0	Bidang Penanaman Modal	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		28	Semua Bidang	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		7146	Bidang Informasi dan Pengaduan	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		9005	Bidang Informasi dan Pengaduan	
		Laporan realisasi penanaman modal		645930580 000	Bidang Penanaman Modal	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		8	Semua Bidang	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		78	Bidang Penanaman Modal	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota		16	Bidang Informasi dan Pengaduan	
9.	Urusan Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	100%	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	76%	UPT Pengujian dan Perbengkelan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
					Kendaraan Bermotor	
		Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$	100 %	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	82,5%	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang		52,11 %		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		52,11%		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintahan yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan		52,11%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		jaringan intra pemerintah				
		Persentase kegiatan(event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan negara sesuai dengan PM Kominfi No. 5/2015		100%		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		100%		
		Persentase perangkat daerah yang		100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		mengimplementasi kan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan				
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		69%		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan		30,7%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		layanan pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik				
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan		0		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		26%		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		100%		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) Persentase data yang dapat berbagi pakai		100%		
		Persentase perangkat daerah yang		100%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		mengimplementasi kan inovasi yang mendukung smart city				
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		11,6%		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		2 (dua) - Masterplan TIK - Perwali no 5 tahun 2018		
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan		0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pemerintah kabupaten/kota				
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM		0		
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		0		
11.	Urusan Koperasi dan UMKM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan		0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dalam daerah kabupaten/kota				
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0		
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		29,72%		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi		14,15%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		98,11%		
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		3,3%		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah		0,94%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		32,55%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		21,7%		
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan		3,3%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dalam daerah kabupaten/kota				
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		14,15%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		4,72%		
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		4,44%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		0		
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		0,91%		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		2,39%		
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		12,16%		
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		24,31%		
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan		2,32%		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
12.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	12 orang	Bidang Pemuda	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	9 Orang		
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0		
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0		
		Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	44 orang	Bidang Olahraga	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah penyelenggara event Olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event Olahraga prestasi tingkat daerah	0	Bidang Olahraga	
13.	Urusan Statistik	Tersedianya buku profil daerah		1	Seksi Statistik Diskominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		1	Seksi Statistik Diskominfo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	Seksi Statistik Diskominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1	Seksi Statistik Diskominfo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		1	Seksi Statistik Diskominfo	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik		100 %	Seksi Statistik Diskominfo	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik		100%	Seksi Statistik Diskominfo	
14.	Urusan Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$	0%		
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI atau diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100$	21,67 %		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian disbanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah				
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah} \times 100\%}{\text{Jumlah SE yang ada}}$	5,97 %		
		Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik diamankan} \times 100\%}{\text{Jumlah titik pada PHKS}}$	79,24%		
15.	Urusan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
						(dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
						pernyataan)
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Pengembangan cagar budaya provinsi	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	0		Tidak dilaksanakan karena



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		(penelitian, revitalisasi, adaptasi)				diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
						anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pengunjung museum	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
						(dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
						pernyataan)
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	0		Tidak dilaksanakan karena diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
		Penyelenggaraan kegiatan museum	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0		Tidak dilaksanakan karena



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		yang melibatkan masyarakat				diluar kewenangan dan anggaran tidak tersedia (dibuktikan dengan surat pernyataan)
16.	Urusan Kearsipan	Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah SKPD yang membuat daftar arsip aktif / Jumlah SKPD x 100% (Belum dilaksanakan)	68,75 %	IKK Urusan Kearsipan	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah SKPD yang membuat daftar arsip inaktif / Jumlah SKPD x 100%	81 %	IKK Urusan Kearsipan	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Daftar Inventaris Arsip Statis SKPD / Jumlah SKPD x 100%	53 %	IKK Urusan Kearsipan	
		Prersentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Arsip Statis yang input SIKN/Jumlah Arsip Statis x 100%	0 %	IKK Urusan Kearsipan	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Jumlah Pemusnahan Arsip / NPSK x 100%	100 %	IKK Urusan Kearsipan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		100 %	IKK Urusan Kearsipan	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten / kota yang sesuai NSPK di provinsi	Jumlah Penyelamatan arsip SKPD Bubar /NSPK x 100%	100 %	IKK Urusan Kearsipan	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK		0 %	IKK Urusan Kearsipan	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar	Jumlah pencarian AS / NSPK x 100%	100 %	IKK Urusan Kearsipan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pencarian arsip yang sesuai NSPK				
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	(Belum Pernah Dilaksanakan)	0 %	IKK Urusan Kearsipan	
17.	Urusan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi bahan pustaka}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	54,97 %	IKK Urusan Perpustakaan	
		Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Persentase ketermanfaatan perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	115,95 %	IKK Urusan Perpustakaan	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Tenaga Perpustakaan Tingkat SD, SMP, dan SMA}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	0,15 %	IKK Urusan Perpustakaan	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar nasional}}{\text{Jumlah perpustakaan di Banjarbaru}} \times 100\%$	4 %	IKK Urusan Perpustakaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	$TGM = (TFM + TDM + TJB) / 3$	6,697	IKK Urusan Perpustakaan	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media digitalisasi/terdaftar yang ada wilayahnya	Tidak tersedianya SDM, tidak tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana untuk kegiatan terkait naskah kuno	0	IKK Urusan Perpustakaan	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak tersedianya SDM, tidak tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana untuk kegiatan terkait naskah kuno	0	IKK Urusan Perpustakaan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak tersedianya SDM, tidak tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana untuk kegiatan terkait naskah kuno	0	IKK Urusan Perpustakaan	



URUSAN PILIHAN

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Tidak ada data untuk Rumah Tangga Nelayan yang melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Bidang Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota}} \times 100\%$	Tidak ada tempat pelelangan ikan di Kota Banjarbaru	Bidang Perikanan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Bidang Perikanan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	59	Bidang Perikanan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	550000	Bidang Perikanan	
2.	Urusan Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan		35	Bidang Pertanian dan bidang Peternakan	
		Prasarana pertanian yang digunakan		22	Bidang Peternakan, UPT BPP, UPT BBTPH	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
					dan UPT BTPKH	
		Penerbitan izin usaha pertanian		7	Bidang Peternakan	
		Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	100%	Bidang Peternakan	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	100%	Bidang Peternakan	
		Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100$ Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	27,75%	Bidang Peternakan	
3.	Urusan Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	14 Pokdarwis		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Th 2017 : 6 Th 2018 : 7 Th 2019 : 10		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		umum, dan fasilitas pariwisata		Th 2020 : 5		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	- Hotel/Guest House : 61 - Karoke : 11 - Café Live Musik : 34 - Rumah makan : 148 - Spa Kecantikan : 73		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2.396 wisatawan		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3 - Launching Calender of Event Kota Banjarbaru - Pemilihan Nanang Galuh 2021 - - Banjarbaru		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
				Murdjani Festival 2021		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	-		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	2 - Amanah Borneo Park - Kampong Purun		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	139 orang		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	-		
		Jumlah lokasi yang	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha	3 lokasi :		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat	masyarakat	Kampung Purun, Kampung Pelangi, Hutan Pinus		
4.	Urusan Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Tidak ada	Bidang Industri	
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) =100% b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)=100% c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)=100% d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh	15	Bidang Industri	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			Gubernur Provinsi (15%)=100% e) Penetapan Perda RPIK (10%)=100% Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK			
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}}$	100 %	Bidang Industri, Data Industri	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}}$	Tidak Ada	-	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten Kota di SIINas Total populasi perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan kawasan industry di Kabupaten/Kota	127,58 %	Bidang Industri, SIINas	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten / Kota				
		Persentase data perusahaan industri Besar dan perusahaan kawasan industri Lintas Kabupaten kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Besar dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten / Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kota SIINas} \times 100\%}{\text{Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kota Banjarbaru}}$	50 %	Bidang Industri, SIINas	
5.	Urusan Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko swalayan	a. Pusat Perbelanjaan $\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ b. Toko swalayan	a. Pusat Perbelanjaan = 0 % b. Toko Swalaya n = 98,93%	Bidang Perdagangan , Data Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			$\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$			
		Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	100 %	Bidang Perdagangan, Data TDG	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di kab/kota}} \times 100\%$	4 %	Bidang Perdagangan, Data TDG	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk yang diterbitkan: a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri : $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	Tidak Ada	-	
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba				



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<p>dalam negeri :</p> <p>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</p> $\frac{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}} \times 100\%$ <p>c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :</p> <p>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</p> $\frac{\text{Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}} \times 100\%$			
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan	<p>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</p> $\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota}}{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota}} \times 100\%$	Tidak Ada	-	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer			
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit} \leq 1 \text{ hari kerja (1 x 24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	Tidak Ada	-	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p> <p>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	100 %	Bidang Pasar, Data Sarana Distribusi Perdagangan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu		Tidak Ada	-	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		0,23 %	Bidang Perdagangan , DKP3, Data PUPUK dan Pestisida	
		Persentase alat-Alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		131,2 %	Bidang Perdagangan , UPT Metrologi, Data UTTP	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		90 %	Bidang Perdagangan , Data Barang Dalam Keadaan Terbungkus	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME)

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME)

No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			URUSAN PELAYANAN DASAR			
1.	Urusan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	$\frac{\text{Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD}}{\text{jumlah penduduk Usia 5 – 6 tahun di Kota Banjarbaru pada tahun 2020}} \times 100\%$	67,013%	Disdik & Disdikcapil	Persentasi melebihi dari 100% karena data siswa yang sudah tamat yang masih berusia 5-6 tahun belum sesuai
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar didapat berdasarkan perhitungan jumlah siswa usia 7 – 12 tahun yang sedang belajar atau sudah tamat di Satuan Sekolah Dasar	87,323%	Disdik & Disdikcapil	Persentasi melebihi dari 100% karena data siswa yang sudah tamat yang



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dalam pendidikan dasar.	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 tahun di Kota Banjarbaru}}{100\%} \times$			masih berusia 7-12 tahun belum sesuai
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama didapat berdasarkan perhitungan jumlah siswa usia 13 – 15 tahun yang sedang belajar atau sudah tamat di Satuan Sekolah Menengah Pertama</p> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun di Kota Banjarbaru}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 tahun di Kota Banjarbaru}} \times 100\%$	81,549%	Disdik & Disdikcapil	Belum termasuk data siswa MTs
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan didapat berdasarkan perhitungan jumlah siswa usia 7 – 18 tahun yang sedang belajar atau sudah tamat di Satuan PAUD</p> $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 tahun di Kota Banjarbaru}}{100\%} \times$	54,683%	Disdik & Disdikcapil	Persentasi masih rendah karena belum ada data siswa MTs dan MA



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
2.	Urusan Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	2,603%	Seksi Pelayanan Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kota}} \times 100\%$	66,667%	Seksi Pelayanan Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/ kota}} \times 100\%$	96,095%	Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$	94,416%	Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/ kota}} \times 100\%$	97,509%	Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kesehatan bayi baru lahir				
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di kabupaten/kota}} \times 100\%$	70,712%	Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100\%$	45,495%	Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$	30,822%	Seksi P2PTM	
		Persentase warga negara	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	34,324%	Seksi Kesehatan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas}} \times 100\%$		Keluarga & Gizi	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/ kota}} \times 100\%$	21,545%	Seksi P2PTM	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota}} \times 100\%$	92,684%	Seksi P2PTM	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/ kota}} \times 100\%$	104,304%	Seksi P2PTM	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kesehatan jiwa sesuai standar				
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota}} \times 100\%$	39,846%	Seksi P2PM	
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota}} \times 100\%$	110,779%	Seksi P2PM	
3.	Urusan Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}} \times 100\%$	59,31 %		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kewenangan Kota				
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		0		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas Irigasi Kewenangan Kab/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi yang Dibangun (Ha), Ditingkatkan (Ha), direhabilitasi (Ha), Dioperasi dan Pelihara (Ha)}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota}} \times 100\%$	35,465 %	Kepmen No. 293/PRT/M/2014 Tentang Penetapan Status daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
					Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Peremen PUPR No.14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Inventaris, Saluran, Bangunan Irigasi T.A 2020	
		Persentase jumlah rumah tangga yang	Jumlah Komulatif Masyarakat yang Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaian dan	98,415 %		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{\text{Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di Dalam Sebuah Kab/Kota}}{\text{Jumlah total Proyeksi Rumah Tangga di Seluruh Kab/Kota Tersebut}} \times 100\%$			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan berupa Cubluk + Jumlah Rumah yang lumpur Tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah Rumah yang Memiliki Sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di IPAL D}}{\text{Jumlah Rumah di Kab/Kota}} \times 100\%$	100%		
		Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan IMB yang Sesuai Peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang Berlaku}} \times 100\%$	100%		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang Jalan Kewenangan Kota Mantap}}{\text{Panjang Jalan Keseluruhan di wilayah Kab/kota}} \times 100\%$	85,805 %		
		Rasio Tenaga Operator/Teknisi /Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kab/Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kab/Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis}} \times 100\%$	13,929 %		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		0		
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{100\%} \times$	0%	Bidang Perumahan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi pemerintah kabupaten/kota.	$\frac{\text{Rumah rangka penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{100\% \times \text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintahan daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}$	100 %	Bidang Perumahan	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani.	$\frac{\text{Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{100\% \times \text{Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}}$	13,382 %	Bidang Permukiman	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$	99,049%	Bidang Permukiman	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum).	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	4,618%	Bidang Permukiman	
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	99,688%	Seksi Tibum dan Tranmas	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	25%	Seksi Lidik Sidik	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	Damkar	



No	Ururan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		evakuasi korban kebakaran				
		Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran		15 menit sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2018	Satpol pp	
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	1.924,017%	BPBD Kota Banjarbaru	
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	0,157%	BPBD Kota Banjarbaru	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	100%	BPBD Kota Banjarbaru	
6.	Urusan Sosial	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas}} \times 100 \%$	100 %	Dinas Sosial	
		Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten / Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota	100%	Dinas Sosial	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kabupaten / Kota				

URUSAN WAJIB

No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Urusan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{100\% \times \text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru}}$	2,734 %		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		0,164 %		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		5023379079.618%	BPS 2020	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	1.99%		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	7.662%		
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	27,12 %	BAPPEDA Kota Banjarbaru	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah anak kasus kekerasan yang masuk laporan}}{\text{jumlah data anak yang kurang dari 18}} \times 100\%$	12,926%	Data Seksi Perlindungan Anak dan Dta	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		instansi terkait kabupaten			BPS Kota Banjarbaru	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{\text{Jumlah Kasus kekerasan perempuan yang masuk laporan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	7241,712%	Data Seksi Perlindungan Anak dan Dta BPS Kota Banjarbaru	
3.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	$\text{MCpr} = \frac{\text{Cu}}{\text{Cu Modern}} \times 100\%$	63,144 %		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	15,36%		
		TFR (Angka Kelahiran Total)		2,63%		
4.	Urusan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLKH) Kab/Kota	$\begin{aligned} \text{IKLH Kab/Kota} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL}) \\ &= \text{IKA } 21,31 + \text{IKU } 35,20 + \text{IKTL } 5,16 \end{aligned}$	61,83%		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total sampah yang dapat ditangani (ton)} \times 100 \%}{\text{Total vol Timbunan Kabupaten/Kota (ton)}}$	75,876 %		
		Ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, oleh pemerintah Daerah Kab/kota	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100$	0,307 %		
5.	Urusan Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	132,657 %	Bidang Ketahanan Pangan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
6.	Urusan Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	0	DPM DAN PTSP	Izin lokasi diterbitkan langsung melalui OSS dan tidak ada fitur untuk mengetahui data tersebut di sistem
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	0	BPN	Tidak ada kegiatan pensertipikatan tanah melalui Redistribusi Tanah di Kota Banjarbaru
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	0	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum atau Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha : $\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	0	BPN	Tidak ada kegiatan pensertipikan tanah melalui Redistribusi Tanah di Kota Banjarbaru
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah $\frac{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	0	Dinas PUPR	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani $\frac{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	0	Bagian Hukum	Tidak ada penanganan sengketa tanah melalui mediasi adanya melalui pengadilan sebanyak 8 perkara
7.	Urusan Admindukcapil	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP $\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}} \times 100\%$	99,643%	Data Pelayanan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		Disdukcapil Banjarbaru	
		Persentase anak usia 0 – 17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIAx 100%	51,057%	Data Pelayanan Disdukcapil Banjarbaru	
		Kepemilikan akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta lahirx 100% Jumlah anak usia 0 – 18 tahun	97,559%	Data Pelayanan Disdukcapil Banjarbaru	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasamax 100%	9,375 %	Data Pelayanan Disdukcapil Banjarbaru	
8.	Urusan Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	$\frac{(\text{Jumlah inventasi tahun } n - \text{Jumlah inventasi tahun } n-1) \text{ di kab/kota} \times 100\%}{\text{Jumlah inventasi tahun } n-1 \text{ di kab/kota}}$	340,14%	Bidang Penanaman Modal	
9.	Urusan Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan	72,7	Bidang Sarana	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			<p>sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kotatersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd Kabupaten/Kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun 		Prasarana Dan Transportasi	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			<p>waktu tertentu.</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah</p>			



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			(<3 dalamseminggu), Bobot = 0.5			
		Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,31	Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi	
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo} \times 100\%}{\text{Jumlah OPD}}$	52,113 %	Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data Diskominfo	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi} \times 100\%}{\text{Jumlah layanan publik}}$	46,667%	website diskominfo.banjarbaru.go.id	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{jumlah masyarakat usia 15 tahun ke atas}}{\text{jumlah keseluruhan penduduk kota banjarbaru.}}$	73,525%	Disdukcapil Kota Banjarbaru	
11.	Urusan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{100\%}$	22,561%		
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{100\%}$	49,394%		
12.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di propinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	0,486 %	HIPMI dan BPS	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$	12,822%	BPS	
		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	384	Bidang Olahraga	
13.	Urusan Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempergunakan data statistik melalui buku yang dibagikan oleh Diskominfo Kota Banjarbaru	86,667%	Seksi Statistik Diskominfo	
		Persentase OPD yang menggunakan	seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempergunakan data statistik melalui buku yang dibagikan oleh Diskominfo Kota Banjarbaru	86,667%	Seksi Statistik Diskominfo	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
14.	Urusan Persandian	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	53,178%		
15.	Urusan Kabudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	100 %		
16.	Urusan Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59	<p>1. $T = (a + i + s + j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Rumus yang digunakan sampai saat ini $T = (i + s) / 2$</p>	50,69 %	IKK Urusan Kearsipan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p> <p>Rumus yang sampai saat ini digunakan</p> $T = (g + c) / 2$	66,67 %	IKK Urusan Kearsipan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
17.	Urusan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	$TGM = (TFM + TDM + TJB) / 3$ TGM = TINGKAT Kegemaran Membaca TFM = Tingkat Frekuensi Membaca (Kali per minggu) $= (Nilai FM / (Nilai Tertinggi FM - 1)) \times 100$ TDM = Tingkat Durasi Membaca (jam perhari) $= (Nilai DM / Nilai Tertinggi DM) \times 100$ TJB = Tingkat Jumlah Buku yang di Baca (Jumlah buku per triwulan) $= (Nilai JB / Nilai Tertinggi JB - 1) \times 100$	65,71 %	Bidang Perpustakaan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		16,26 %	Bidang Perpustakaan	
URUSAN PILIHAN						
1.	Urusan Perikanan	Jumlah Total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten /Kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	209,363	Bidang Perikanan	
2.	Urusan Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	$\frac{(\text{jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	-29%		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		mancanegara per kebangsaan				
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$\frac{(\text{jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$	19,20%		
		Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	63% %		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0 %		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0%		
3.	Urusan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	313	Bidang Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular	-11.282	Bidang Peternakan	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{tahun sebelumnya}}{\text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$			
4.	Urusan Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan) a) Pusat Perbelanjaan b) Pusat Perbelanjaan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	98,936 a.0% b.98,93%	Bidang Perdagangan , data Pusat Perbelanjaan dan swalayan	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	95,413 %	Bidang Perdagangan , DKP3, Data PUPUK dan Pestisida	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	131,176 %	Bidang Industri, Data Industri Kecil dan Menengah	
5.	Urusan Perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$	8,56%	Bidang Industri, Data Industri Kecil dan Menengah	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan Industri dalam	<p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ = $(100/5 \text{ Indikator})=20\%$</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> Capaian Target tahapan penyelesaian RPIK, sampai pada tahap Persetujuan Draf RPIK oleh Gubernur Provinsi (15 %) 	100%	Bidang Industri	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		RIPIN yang ditetapkan RPIK				
		Persentase Jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	93,458%	Bidang Industri, Data Industri Kecil dan Menengah	
		Persentase Jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0	-	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase Jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan (IPKI) yang Lokasi nya di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	0	-	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan	29%		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			dan keterkinian informasi industri (1 + 2)			
			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
1.	Urusan Perencanaan Dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level1/level2/level3) berdasarkan Laporan Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/ level1/level2/level3) berdasarkan Laporan Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3		
		Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	34.983%		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	39.369%		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	100		
		Rasio PAD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD dikurangi satu}} \times 100\%$	25.701%	Catatan Hasil Reviu (CHR) Data/Dokumen Pendukung LPPD (Laporan Tahunan) Atas Laporan Tahunan BPPRD T.A 2022	
2.	Urusan Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	<p>Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n x 100%</p> <p>Jumlah kontrak keseluruhan tahun n</p>	0	Rekap Data Pengadaan Bagian PBJ	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitifx 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	97,563 %	Data pengadaan yang ada pada RUP seluruh OPD di Kota Banjarbaru TA. 2022	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan x 100% Total belanja langsung	51,939 %	Data dari aplikasi Tapera Kota Banjarbaru 2022	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan		101,682		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah				
3.	Urusan Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas}}{\text{seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100 \%$	596,89 %	Subbid Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN	
		Rasio pegawai fungsional (%), (PNS yang tidak termasuk guru	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{}} \times 100 \%$	15,36 %	Subbid Mutasi dan Kepangkatan Aparatur	



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dan tenaga kesehatan)	seluruh jumlah pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$	45,119 %	Subbid Mutasi dan Kepangkatan Aparatur	
4.	Urusan Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right] \times 100 \%$	7.8495%		
		Deviasi realisasi PAD terhadap		16.9683 %		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD APBD}} \times 100\%$			
		Assets Management	1. Apakah ada asset tetap ? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset terancam dalam laporan anggaran ? (Ya/Tidak)	100%		
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahunan sebelumnya}} \times 100\%$	29,318%		



No	Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
5	Transparansi dan partisipasi publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda _____ x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	109,531		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda _____x100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	100 %		



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

2.3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Laporan Kinerja Tahun 2022 ini akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Sesuai ketentuan, pengukuran penilaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pencapaian Sasaran Strategis diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dan selanjutnya diberi pemeringkatan berdasarkan kategori capaian kinerja.

Adapun untuk pemeringkatan berdasarkan kategori capaian kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kategori Capaian Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d. 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

Secara umum Pemerintah Kota Banjarbaru telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka merealisasi target sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang terdiri dari 3 (tiga) Misi, 3 (tiga) Tujuan dan 14 (empat belas) sasaran, dengan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran:

1. Misi I terdiri dari 1 tujuan, 5 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja;
2. Misi II terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja;
3. Misi III terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja.

Dari 14 (empat belas) sasaran, dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru adalah:



Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
Misi 1 (7 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	3	42,86%
2	Baik (B)	3	42,86%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	1	14,28%
	Jumlah	7	100%
Misi 2 (9 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	7	77,78%
2	Baik (B)	2	22,22%
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	-	-
	Jumlah	9	100%
Misi 3 (7 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali (BS)	2	28,57%
2	Baik (B)	4	57,14%
3	Cukup (C)	1	14,29%
4	Kurang (K)	-	-
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 14 sasaran strategis yang mencakup 23 indikator kinerja, diketahui bahwa 12 indikator kinerja atau 52,18% kategori capaian kinerja Baik Sekali, 9 indikator kinerja atau 39,13% kategori capaian kinerja Baik, 1 indikator kinerja atau 4,35% kategori capaian kinerja Cukup dan 1 indikator kinerja atau 4,35% kategori capaian kinerja Kurang.

2.3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Capaian kinerja 14 (empat belas) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja disajikan dalam analisis sebagai berikut:



Tabel 2.6
Realisasi Capaian IKU Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia							
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,97	10,98	100,09
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2.	Angka harapan hidup	Tahun	72,20	72,36	100,22
		3.	Angka prevalensi stunting	Angka	16,50	13,61	117,5
3.	Meningkatnya kesetaraan gender	4.	Indeks pembangunan gender	Indeks	92,65	92,56	99,90
4.	Terjaganya daya beli masyarakat	5.	Angka Inflasi	%	< 3	6,98	130,45
5.	Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat	6.	Persentase pembinaan, keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA dan pelanggaran Perda	%	100	100	100
		7.	Persentase penyelesaian kebencanaan	%	100	100	100
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup							
6.	Meningkatnya kegiatan perekonomian kota	8.	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2,50	49	1.960
		9.	Pertumbuhan pelaku usaha mikro, industri kecil dan ekonomi kreatif	%	4,50	4,65	103,33
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	10.	Peningkatan PAD (Milyar)	Rp.	251,1	293,7	116,97
		11.	Persentase investasi daerah	%	4	340,14	8.503,5



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
8.	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	12.	Angka kemiskinan	%	4,50	4,17	107,33
		13.	Angka pengangguran	%	5,39	5,47	98,51
9.	Meningkatnya stabilitas ketersediaan pangan	14.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk ketersediaan pangan	Skor	80,21	84,76	105,67
10.	Meningkatnya infrastruktur kota yang berkualitas	15.	Indeks infrastruktur wilayah	%	74,28	76,51	103
11.	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	16.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,17	61,83	99,45

Misi 3:
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

12.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah	17.	Nilai SAKIP	Nilai	B (65,01)	B (66,74)	102,66
		18.	Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
		19.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		20.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Indeks	Level 3 (3,01)	Level 2 (2,95)	98,33
		21.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	72	54,68	75,94
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	22.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan	Indeks Nilai	Baik 90,00	Baik 100	111,11
14.	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik pemerintah daerah	23.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,62	2,26	86,25

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru, 2022



MISI	1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
SASARAN STRATEGIS	1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA	1 : Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, meningkatkan peluang akses ke pendidikan yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sumber daya Pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan yang tinggi, dan menyediakan lebih banyak program pendidikan yang berkualitas tinggi.

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Kota Banjarbaru pada usia tertentu di periode RPJMD tahun 2021-2026.

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas Pendidikan masyarakat adalah angka rata-rata lama sekolah. Indikator angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk memberikan informasi kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, proses pendidikannya telah berakhir. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan indikator angka rata-rata lama sekolah adalah:

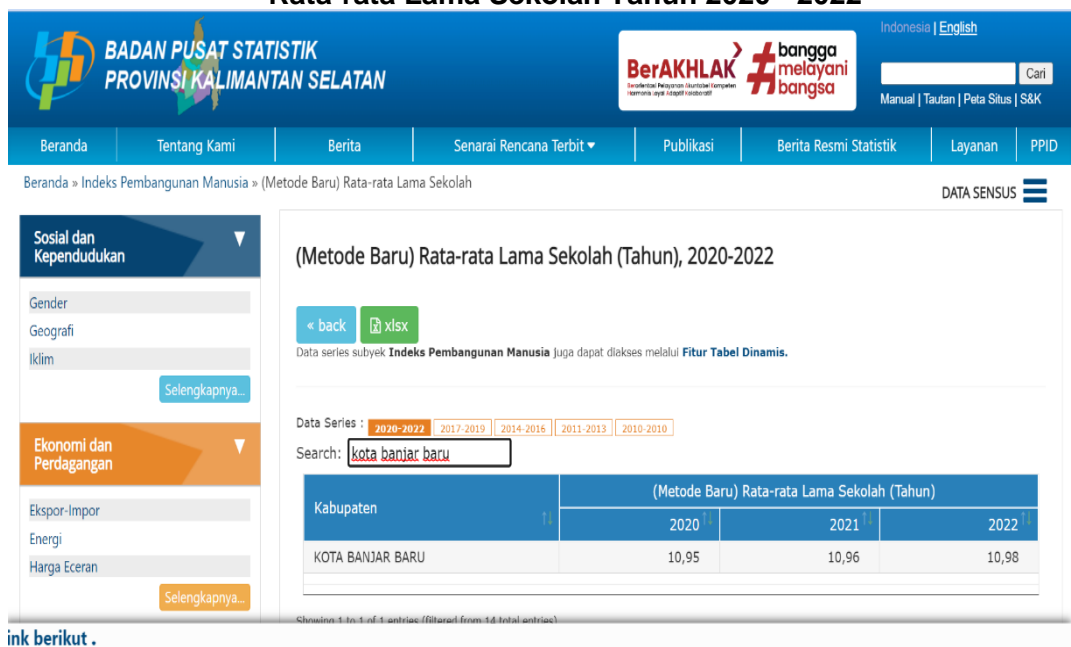
Tabel 2.7.
Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,97	10,98	100,09%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi IKU rata-rata lama sekolah telah melampaui target, dimana target kinerja sebesar **10,97** dan terealisasi **10,98** sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,09%** dengan kategori capaian kinerja **“Baik Sekali”**.

Gambar 2.1.
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 - 2022



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Program Pendukung Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan adalah sebuah program yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan Pendidikan dari jenjang PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan (UU No. 23 tahun 2014, Kewenangan Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Pendidikan, dari jenjang Pengelolaan pendidikan usia dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal). Indikator keberhasilan pengelolaan Pendidikan adalah persentase satuan Pendidikan yang terakreditasi A.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, akreditasi sekolah merupakan proses yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Proses akreditasi diadakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan (BAN-PT) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah BAN-PT, ada berbagai lembaga akreditasi yang dapat ditunjuk untuk mengaudit sekolah atau lembaga pendidikan dan memberikan sertifikat akreditasi untuk sekolah atau lembaga pendidikan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Akreditasi ini akan menunjukkan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan telah memenuhi standar kualitas dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.

Tabel 2.8
Indikator Keberhasilan Pengelolaan Pendidikan

No.	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A	68,80	62,91

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase Pendidikan sekolah dasar yang terakreditasi A, dikarenakan score penilaian akreditasi A yang dulu cakupan nilai 85-100 menjadi 90-100, sehingga ada 8 sekolah dasar yang memiliki nilai 86-89 yang dulu terakreditasi A, turun menjadi B.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru, melalui berbagai kegiatan pelatihan, serta memfasilitasi pengembangan kurikulum. Program ini juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kemampuan profesional guru dan tenaga pendidikan. Indikator keberhasilan peningkatan kemampuan profesional guru dan tenaga Pendidikan diukur dengan persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi.



Tabel 2.9
Indikator Keberhasilan Peningkatan Kemampuan Professional
Guru dan Tenaga Pendidikan

No.	Indikator	2021	2022
1.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi	42,84%	44,24%

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2022 merupakan tahun ke 2 Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama
Sekolah 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka rata-rata lama sekolah	10,95 101,38%	10,96 100%	10,98 100,09%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir), yaitu 2020 dan 2021 bahwa tahun 2020 sebesar 10,95 dan tahun 2021 adalah 10,96 serta tahun 2022 adalah 10,98 sehingga terlihat kenaikan sebesar 0,13. Ini menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk Banjarbaru semakin tahun semakin baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis. Hasil penilaian pada kabupaten/ kota/ provinsi dibandingkan dengan Kota Banjarbaru sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah
dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kal-Sel
1.	Angka rata-rata lama sekolah	10,98	7,71	7,90	10,21	8,46

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru



Angka rata-rata lama sekolah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan kabupaten/ kota/ provinsi sekitar, terlihat Kota Banjarbaru sebesar 10,98 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru berada pada posisi paling tinggi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

Realisasi kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 dan target Nasional tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan Target RPJMD dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional 2024
1.	Angka rata-rata lama sekolah	10,98	11,01	9,18

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Tahun 2022, realisasi kinerja indikator “Rata-rata Lama Sekolah” adalah 10,98 tahun dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2026 adalah 11,01 baru mencapai target 10,98%, masih ada rentan 0,03% untuk mencapai akhir periode RPJMD tahun 2026, sedangkan dibanding target RPJMN tahun 2024 adalah 9,18 Kota Banjarbaru telah melampaui target yaitu 10,98.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Hambatan

- a. Masih terdapat permasalahan pada data pokok pendidikan;
- b. Ketersediaan sekolah yang belum merata.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Melaksanakan penyempurnaan pada data pokok pendidikan;
- b. Melakukan pemetaan dan pembangunan sekolah sesuai kebutuhan yang terlihat pada pemetaan serta melaksanakan revitalisasi bangunan sekolah yang ada sehingga memadai dengan jumlah anak sekolah.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Angka Rata -rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel rincian, sebagai berikut:



Tabel 2.13.
Efisiensi Sumber Daya Angka Rata-Rata Lama Sekolah

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program pengelolaan pendidikan	Persentase satuan Pendidikan dasar yang terakreditasi	91,43	88,85	2,58
2.	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik yang bersertifikasi	103,27	96,71	6,56

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru melaksanakan program pengelolaan Pendidikan dengan dana yang disediakan sebesar Rp. 59.339.619.250 dan program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 19.345.029.000, sehingga total keseluruhan dana yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru adalah Rp. 78.684.648.250 (tidak termasuk program penunjang). Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.14
Realisasi Anggaran Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Pengelolaan Pendidikan	59.339.619.250	52.725.594.788	88,85
a.	Pengelolaan Pendidikan dasar	36.435.840.221	30.429.208.177	83,51
b.	Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama	13.469.078.529	13.036.551.429	96,79
c.	Pengelolaan Pendidikan anak usia dini (Paud)	6.204.794.500	6.155.761.242	99,21
d.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	3.229.906.000	3.104.074.000	99,10
2.	Pendidik dan tenaga kependidikan	19.345.029.000	18.707.890.610	96,71
a.	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	19.345.029.000	18.707.890.610	96,71

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru



MISI	1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
SASARAN STRATEGIS	2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA	2 : Angka Harapan Hidup

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan untuk itu Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat dipilih sebagai sasaran strategis pembangunan kesehatan di Kota Banjarbaru karena kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam Peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Banjarbaru. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” merupakan sasaran yang mendukung Misi ke satu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia”. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sasaran, meningkatnya Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan pembangunan sosial lainnya. Angka Harapan Hidup juga merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu daerah disebut demikian karena angka harapan hidup menunjukkan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Angka Harapan Hidup mempunyai makna perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penilaian terhadap indikator kinerja Angka Harapan Hidup diperhitungkan dengan berdasarkan angka kematian menurut umur (Age Spesifik Death rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari



catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuatkan tabel kematian.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi Angka Harapan Hidup pada tahun 2022 ini berdasarkan data Badan pusat Statistik Kota Banjarbaru adalah mencapai 72,36 Tahun, dengan realisasi ini maka capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Harapan Hidup	tahun	72,20	72,36	100,22%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Banjarbaru masih di atas target yaitu mencapai **72,36** Tahun dari target **72,20** tahun dengan capaian kinerja sebesar **100,22%** atau dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Gambar 2.2.
Umur Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2020 - 2022



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Beberapa Program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai IKU Angka Harapan Hidup sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dalam mendukung pencapaian indikator angka harapan hidup memiliki 2 (dua) sasaran program yaitu sasaran Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan sasaran peningkatan Derajat Keseha`tan Masyarakat. Pada sasaran Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator kinerja yang diukur yaitu: Persentase sarana prasarana Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam keadaan baik. Hasil pencapaian indikator nya sebagai berikut:

Tabel 2.16
Realisasi Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Di Kota Banjarbaru Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Pemenuhan UKP UKM	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,1	4.7	85.40%	3,4	7	-5,88%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	109/100.000 KH	268 /100.000 KH	- 45,87 %	90/100.000	108/100.000 KH)	80%
		Angka Kesakitan	27%	12%	158,6%	25%	24%	111,4%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Berdasarkan tabel diatas menunjukan realisasi capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana UKP UKM di Kota Banjarbaru dalam keadaan baik dapat terealisasi 100%. Indikator ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori capaian kinerja **“Baik”**.

Realisasi persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik dilihat sejak tahun 2021 telah dapat di capai dengan baik. Pelaksanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana UKP dan UKM mencapai target yang ditetapkan.

Pada sasaran ke dua program ini yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat ini indikator kinerja yang diukur yaitu:

- a. Angka Kematian Ibu
- b. Angka Kematian Bayi
- c. Angka Kesakitan

Adapun capaian Kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pencapaian indikator menurunnya angka kematian ibu (AKI) sebagai mana disajikan pada Tabel 1 untuk tahun 2022 adalah 108 per 100.000 kelahiran hidup, dibanding dengan angka kematian ibu di tahun 2021 jauh menurun dan lebih baik.

Berdasarkan data laporan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru diketahui jumlah kematian ibu di Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebanyak 5 orang ibu, dengan rincian 2 orang kematian ibu hamil, 2 orang kematian ibu bersalin dan 1 orang kematian ibu nifas. Berdasarkan penyebab kematian ibu tertinggi sekitar 40 % (2 orang) adalah akibat Hipertensi sisanya adalah penyebab lainnya pada kehamilan dan persalinan, dapat dilihat pada tabel 3.13.

Jumlah kelahiran hidup tahun 2022 terdata sebanyak 4611 orang sehingga dengan jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang maka angka kematian ibu pada tahun 2022 ini menjadi 108/ 100.000 kelahiran hidup.

Capaian kinerja pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 80% atau angka kematian semakin menurun dari 268/100.000 KH



pada tahun 2021 menjadi 108/100.000 KH. Meskipun penurunan angka kematian ibu ini belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 90/100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 12 orang dan tahun 2022 menurun menjadi 5 orang.

Tabel 2.17.
Distribusi Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2022

No.	Kecamatan	Penyebab Kematian				Jumlah Kematian Ibu
		Hipertensi Dalam Kehamilan	Jantung	Asma	Gangguan Kehamilan Ektopik Terganggu	
1.	Cempaka			1		1
2.	Banjarbaru Selatan					0
3.	Banjarbaru Utara					0
4.	Landasan Ulin	1	1			2
5.	Liang Anggang	1			1	2
Total		2	1	1	1	5

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

b. Indikator Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan.

AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Perhitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AKB = \frac{\text{Jumlah Kematian bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$$

Penurunan angka kematian bayi (AKB)/1.000 Kelahiran Hidup diperhitungkan dengan jumlah bayi meninggal saat proses kelahiran sampai dengan 11 bulan dibagi



kelahiran hidup dalam 1 tahun x 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 indikator sasaran angka kematian bayi (AKB) ditargetkan sebesar 3,4/1000 kelahiran hidup.

Capaian kinerja pada tahun 2022 seperti pada tabel 1 jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai -5,88% atau angka kematian meningkat yaitu sebanyak 7 kematian tiap 1000 kelahiran hidup sedangkan target yang ditetapkan untuk tahun 2022 menurunkan angka kematian hingga 3,4/1000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian bayi pada tahun 2022 adalah 32 orang meningkat dari tahun 2021 yaitu sebanyak 21 orang.

Dari data yang diperoleh dari laporan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru jumlah kematian bayi terbanyak di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara yaitu sebanyak 9 orang atau 28,1% dari jumlah kematian dan terendah di Kecamatan Banjarbaru Selatan sebesar 6,2 % atau 2 orang. Distribusi jumlah kematian menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

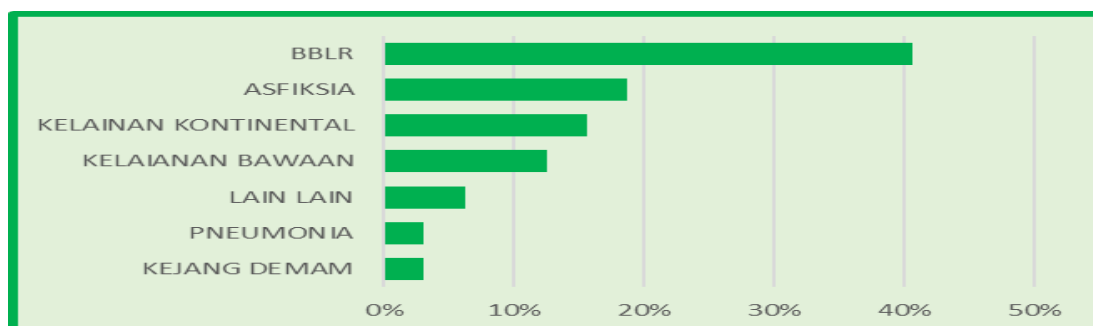
Tabel 2.18
Distribusi Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kelahiran Hidup (Kh)	Jumlah Kematian Bayi
1.	Cempaka	548	8
2.	Banjarbaru Selatan	844	2
3.	Banjarbaru Utara	1.048	9
4.	Landasan Ulin	1.355	8
5.	Liang anggang	816	5
Total		4.611	32
Angka Kematian/1000 KH		7	

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dari jumlah 32 kematian bayi, 40,62% disebabkan oleh BBLR dan Prematuritas sebagai penyebab terbanyak, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.3.
Penyebab Kematian Bayi di Kota Banjarbaru Tahun 2022



Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dilihat dari angka kematian dari tahun 2021 sampai dengan 2022 ini mengindikasikan angka kematian bayi meningkat. Secara absolut juga jumlah kematian di tahun 2022 lebih banyak yaitu 32 orang sedang tahun 2021 sebanyak 21 orang. Untuk itu strategi dan usaha dalam upaya penurunan angka kematian bayi di kota Banjarbaru harus terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan peningkatan upaya kesehatan secara menyeluruh.

c. Indikator Angka Kesakitan

Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Adapun cara perhitungan dengan menghitung jumlah penduduk frngan keluhan Kesehatan du bagi jumlah penduduk di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk dg keluhan Kesehatan (kunjungan Pasien)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Bahwa pencapaian Kinerja indikator penurunan angka kesakitan di Kota Banjarbaru dapat di kategorikan **“Sangat Baik”**, hal ini dapat dilihat capaian tahun 2022 sebesar 111,4% dengan angka kesakitan sebesar 24%. Penurunan angka kesakitan tahun ini dapat melebihi dari angka kesakitan yang ditarget kan yaitu 27%.

Angka kesakitan 2021 sampai dengan 2022 ini mengindikasikan peningkatan angka kesakitan. Namun untuk capaian kinerja nya masih sangat baik. Hal ini dikarenakan kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan rumah sakit telah kembali normal selama masa pandemi Covid-19.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini memiliki sasaran program yaitu sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Pada sasaran Peningkatan Kualitas Sumber



Daya Manusia Kesehatan indikator kinerja yang diukur Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan, hasil pencapaian indikator nya sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Realisasi Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, di Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	90%	100%	110%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dilihat dari tabel diatas, sejak tahun 2021 indikator persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan telah terpenuhi yaitu sebesar 110%. Dan realisasi capaian kinerja di tahun 2022 ini capaian kinerja mencapai 100 %, dari segi persentase sepertinya terjadinya penurunan namun dari segi jumlah absolut sebenarnya adalah tetap yaitu 10 puskesmas. Perbedaan persentase ini hanya dikarenakan perbedaan target indikator, pada tahun 2021 ditargetkan 9 Puskesmas dari 10 puskesmas, sedangkan di tahun 2020 ditargetkan 10 Puskesmas dari 10 puskesmas.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi capaian indikator kinerja persentase sarana prasarana UKP UKM di Kota Banjarbaru di Kota Banjarbaru dalam keadaan baik dapat terealisasi 100%. Indikator ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% atau dengan kategori capaian kinerja **“Baik”**.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini memiliki sasaran program yaitu sasaran Meningkatkan Kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan Dan Makanan Minuman Sesuai Standar, pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu: Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar. Makna indikator ini menunjukkan Tingkat Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM telah memenuhi standar Kesehatan. Tercapainya indikator ini memberikan jaminan keamanan kesehatan bagi penduduk yang menggunakan produk yang dihasilkan. Perhitungan indikator ini dihitung berdasarkan:



$$\frac{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan}}{\text{Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Terdaftar}} \times 100\%$$

Capaian Indikator pada program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20.

Realisasi Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, di Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan Dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar	98%	98%	100%	99	99,37%	100,4%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penyelenggara kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,4 % dari target yang ditetapkan 99%. Dengan pencapaian kinerja sebesar 99,9% atau dengan kategori **"Sangat Baik"**. Indikator kinerja kefarmasian, alat kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar di Kota Banjarbaru yang telah mendukung tercapainya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21

Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang Memenuhi Standar di Kota Banjarbaru Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Yang Terdaftar	Yang memenuhi Standar Kesehatan	% Yang Memenuhi Standar Kesehatan
1.	Penyelenggaraan Kefarmasian	151	151	100%
2.	Penyelenggara Alat Kesehatan	4	4	100%
3.	Penyelenggara TFU	1230	1223	99.4%
4.	Penyelenggara TPM	1392	1371	98,5%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Penyelenggara kefarmasian dan alat kesehatan yang mendapatkan izin penyelenggaraannya di Kota Banjarbaru apabila telah mendapatkan rekomendasi kesesuaian standar kesehatan untuk penyelenggaraan, selanjutnya dilakukan pengawasan berkala sehingga standar kesehatan yang dipersyaratkan tetap



terpenuhi. Demikian juga pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan tempat pengelolaan makanan (TPM) pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berkala dan syarat memenuhi standar kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan layak sehat.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan ini memiliki sasaran program yaitu sasaran Peningkatan Organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan, pada sasaran ini indikator kinerja yang diukur yaitu: Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan.

Indikator ini ditetapkan dengan harapan penerbitan kebijakan dapat memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan pada setiap kebijakan yang diterbitkan. Dengan pencapaian indikator ini mempunyai makna setiap penerbitan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu memperhatikan aspek Kesehatan. Indikator ini dapat dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{Jumlah Kebijakan berwawasan kesehatan yang di implementasikan}}{\text{Jumlah kebijakan berwawasan kesehatan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22.
Realisasi Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Organisasi kemasyarakatan/ Lintas Sektor dan UKBM yang mendukung kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Pencapaian persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan di Kota Banjarbaru, dibanding tahun sebelumnya adalah sama, yaitu 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.23.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka Harapan Hidup	71,99 100%	72,10 100%	72,36 100,22%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan dengan kabupaten/kota disekitar Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Angka Harapan Hidup paling Tinggi yaitu 72,36 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup
dengan Kab/Kota/Provinsi

No.	Indikator kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kalsel
1.	Angka Harapan Hidup	72,36 Th	67,73 Th	69,86 Th	71,59 Th	69,13 Th

Sumber: BPS kota Banjarbaru 2022

Dilihat dari tabel Capaian indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2022 Kota Banjarbaru dibanding dengan kabupaten/kota sekitar **lebih tinggi**, demikian pula dibanding capaian indikator Angka Harapan Hidup tingkat provinsi Kalimantan Selatan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Target Nasional

Tabel 2.25.
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup
dengan RPJMD dan target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD Th 2026	Target Akhir RPJMN Th 2024
1.	Angka Harapan Hidup	72,36 Th	72,6	75,54 th

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru



Realisasi angka harapan hidup Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 tercapai **99,67%** dan target Nasional tahun 2024 tercapai **95,79%**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Upaya Pemenuhan sarana prasarana Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan upaya Kesehatan masyarakat (UKM) agar berkualitas baik dan terpenuhi secara kuantitas yaitu dengan:
 - 1) Perbaikan sarana prasarana puskesmas yang terstandar.
 - 2) Pemenuhan alat Kesehatan sesuai standar dan kebutuhan.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan obat dan fasilitas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan program Kesehatan melalui dana DAK Kesehatan.
 - 4) Perbaikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk menunjang pengelolaan limbah di Puskesmas.
- b. Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) antara lain yaitu:
 - 1) Penguatan Pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk Ibu hamil dan bersalin pada fasyankes.
 - 2) Melakukan Singkronisasi dan Koordinasi Audit Kematian (Audit Maternal Perinatal) pengkajian pada kematian ibu dan bayi untuk mencari penyebab kematian yang terjadi agar tidak terjadi lagi kematian ibu dan bayi dengan penyebab yang sama di kemudian hari.
 - 3) Melaksanakan MPDN dan e-Kohort untuk penertiban pencatatan pelaporan pelayanan KIA di semua fasilitas kesehatan baik pemerintah dan swasta dengan menggunakan aplikasi e-Kohort agar data valid dan berkualitas. Dan penginputan kematian melalui aplikasi MPDN agar data kematian dapat diakses secara cepat dan valid sehingga dapat segera ditindak lanjuti.
 - 4) Adanya transport Jaminan Persalinan dengan maksud dan tujuan agar semua ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan dan ibu hamil atau bayi yang berisiko segera mendapatkan penanganan sehingga membantu akselerasi penurunan AKI.
 - 5) Melaksanakan Pengenalan Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan dan Nifas Maksud dan tujuan untuk meningkatkan peran serta dan



pemberdayaan masyarakat, kader kesehatan merupakan orang yang paling dekat, paling mengerti dan memahami budaya sosial masyarakat di wilayahnya.

- 6) Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi Maternal dan Neonatal maksud dan tujuan kegiatan adalah dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang terdiri dari tata laksana emergensi sampai dengan nifas dan bayi.
 - 7) Melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) dengan maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam perencanaan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga bersalin dengan aman dan melahirkan bayi yang sehat.
- c. Upaya Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) antara lain yaitu:
- 1) Optimalisasi Pelaksanaan MTBS dengan maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bayi dan balita sehingga bisa untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita.
 - 2) Pelaksanaan SDIDTK untuk pemantauan tumbuh kembang anak.
 - 3) Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (P2ASI) yaitu peningkatan pemberian air susu ibu (P2ASI) bagi wanita pekerja tentang pemberian ASI secara eksklusif.
- d. Upaya penurunan angka kesakitan yang telah dilaksanakan diantaranya:
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan dengan akreditasi fasilitas kesehatan.
 - 2) Peningkatan upaya promosi Kesehatan dengan berbagai media.
 - 3) Pelaksanaan Program Juara Homecare memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke masyarakat.
 - 4) Pelaksanaan hygiene sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan pelaksanaan PHB dan STBM.
 - 5) Gencar melaksanakan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular.
 - 6) Upaya promosi kesehatan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan baik itu yang sifatnya pelaksanaan advokasi, sosialisasi atau pun



pemberdayaan, dengan media offline dan online.

- 7) Koordinasi dengan berbagai lintas bidang dan program terutama dalam hal penerapan kebijakan kesehatan agar terimplementasi dengan baik.
- 8) Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan makanan, pelatihan penjamah makanan sampai dengan pemeriksaan laboratorium pada produk industri rumah tangga, pengawasan toko alkes dan obat, serta pemberian laik sehat pada tempat pengelolaan makanan.

Hambatan

- a. Adanya peraturan terkait dengan dicabutnya izin edar beberapa jenis obat sehingga berpengaruh kepada penyediaan obat.
- b. Pencatatan dan pelaporan yg masih kurang maksimal terutama sasaran (Bumil/Bulin dan Balita) yang diperiksa di luar wilayah/daerah tidak diikuti dan tidak tercatat.
- c. Tidak adanya laboratorium daerah untuk menunjang pemeriksaan laboratorium.
- d. Kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, Tidak adanya dukungan keluarga dalam membawa lansia ke pelayanan kesehatan.
- e. Skrining kesehatan untuk anak sekolah pemeriksaan berkala belum dilaksanakan secara maksimal.
- f. Pada saat imunisasi dasar lengkap pada umumnya keluarga tidak membawa untuk di pantau pertumbuhannya.
- g. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko seorang bayi terlahir dengan berat badan yang kurang. Beberapa faktor tersebut meliputi :
 - 1) Terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan selama hamil, misalnya praeklamsia, tekanan darah tinggi, atau kekurangan gizi.
 - 2) Infeksi selama kehamilan.
 - 3) Adanya kelainan genetik atau cacat bawaan lahir pada bayi.
 - 4) Terlahir dari ibu dengan berat badan kurang selama kehamilan.
 - 5) Usia ibu saat hamil kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun.
 - 6) Kehamilan kembar.

Rencana Tindak Lanjut



- a. Peningkatan upaya deteksi dini untuk peningkatan kewaspadaan dini dan respon terhadap masalah Kesehatan yang cepat, sehingga masalah Kesehatan tidak meluas.
- b. Peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan kualitas pelayanan dengan melaksanakan beberapa kegiatan workshop pada tahun 2023
- c. Meningkatkan kunjungan sehat pada fasilitas Kesehatan
- d. Pelaksanan pelayanan Kesehatan terintegrasi sebagaimana program transformasi layanan posyandu prima dengan memulai pembentukan posyandu prima
- e. Penguatan transformasi digital Kesehatan
- f. Untuk meningkatkan efektifitas di sarana pelayanan kefarmasian melalui pengkajian izin sarana kefarmasian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan
- g. Menjaga keakuratan nilai yang dihasilkan suatu alat sehingga tidak menyimpang jauh dari ambang batas yang ditentukan
- h. Melaksanakan kegiatan pendistribusian obat dan vaksin ke puskesmas sesuai jadwal
- i. Melakukan pemantauan kunjungan rumah
- j. Peningkatan kapasitas kunjungan ANC baik kualitas maupun Kuantitas

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dengan efisiensi untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran Program Terkait	Efisiensi
1	Program Pemenuhan	Persentase sarana prasarana	100%	78,17%	21,9%



No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran Program Terkait	Efesiensi
	Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UKP UKM dalam keadaan baik			
		Angka Kematian Ibu (AKI)	80%	88%	-8%
		Angka Kematian Bayi (AKB)	-5,88 %	91,38%	-94,32 %
		Angka Kesakitan	111,4%	88,11%	23,29%.
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100%	91,2%	8,8%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar	100,4%	81,24%,	19,13%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	100%	92,3	7,7%

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 2.27
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU Angka Harapan Hidup Tahun 2022

Alokasi Dana	Terangangkan				%
	Anggaran		Realisasi		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	61.863.496.055	Rp.	59.813.482.391	96,7%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	37.113.184.525	Rp.	31.499.523.012	84,9%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1.930.576.550	Rp.	1.750.901.351	90,7%
4. Program Sediaan Farmasi,	Rp.	363.151.000	Rp.	302.325.343	83,2%



Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	1.023.401.000	Rp.	936.413.565	91,5%
Jumlah Total	Rp.	102.293.809.203	Rp.	94.302.645.662	92,2%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

MISI	1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
SASARAN STRATEGIS	2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA	3 : Angka Prevalensi Stunting

Stunting atau pendek adalah status gizi yang ditandai dengan kondisi gangguan pertumbuhan (pendek) pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang merupakan dampak dari berbagai faktor seperti berat lahir yang rendah, stimulasi dan pengasuhan anak yang kurang tepat, asupan nutrisi kurang, dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan serta berbagai faktor lingkungan lainnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia stunting adalah status gizi yang ditandai dengan gangguan pertumbuhan (pendek) berdasarkan parameter antropometri tinggi badan yaitu Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Hasil pengukuran berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/stunted) dan <-3 SD (sangat pendek/severely stunted). Stunting pada anak sangat berdampak pada kesehatan dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara lain meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal, stunting juga berdampak meningkatkan resiko mengidap penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes dan lain-lain serta dalam jangka panjang pada saat dewasa produktivitas rendah dan kapasitas kerja yang tidak optimal sehingga bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang nantinya bisa meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar angka ketimpangan ekonomi.

Indikator ini bermakna kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi Angka Prevalensi Stunting sehingga anak lebih pendek untuk seusianya (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun). Indikator



ini dipilih karena indikator ini dapat menunjukkan kondisi stunted yang akan memberikan dampak bagi perkembangan tubuh dan otak anak menuju dewasa.

Cara perhitungan indikator angka prevalensi stunting mengacu pada elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-ppgbm) pada setiap puskesmas. **Prevalensi Stunting = Jumlah Balita Stunted dibagi jumlah seluruh balitanyang diukur dikali 100.**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Realisasi Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2022 ini berdasarkan data e-ppgbm Kota Banjarbaru adalah mencapai 102,78%, dengan realisasi ini maka capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Prevalensi Stunting	Tahun	16,50	13,61	117,5%

Sumber: Hasil EPPBGM tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Prevalensi Stunting di Kota Banjarbaru masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar mencapai **13,61%** dari target **16,50%** dengan capaian kinerja sebesar **117,5%** atau dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Beberapa program pendukung untuk IKU Prevalensi Stunting, antara lain:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dalam mendukung pencapaian Angka Prevalensi Stunting memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat. Pada sasaran Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator kinerja yang diukur yaitu: Prevalensi Gizi Kurang.

Berdasarkan tabel di bawah menunjukan realisasi capaian indikator kinerja Prevalensi Gizi Kurang di Kota Banjarbaru pada tahun 2021 adalah **43,44%** dan pada tahun 2022 adalah **86,25%**. Indikator ini menunjukkan peningkatan nilai kinerja dengan kategori capaian kinerja **“Baik”**.



Tabel 2.29
Realisasi Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru Tahun 2021–2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian Program					
			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	9	14,09%	43,44%	8	9.10	86,25%

Sumber: Hasil EPPBGM, 2021 - 2022

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah suatu sistem yang di dalamnya mencakup proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi Instalasi Pengolahan Air/ IPA yang efektif dari segi performance dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke reservoir (offtake), sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan. Hal-hal teknis maupun administrasi yang terkait dengan proses penyediaan air minum dimasukkan dalam sistem pengelolaan SPAM.

Indikator kinerja adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota. Indikator ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan akses air minum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 97,70%, telah terealisasi yaitu 98,42%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100,674%. Sedangkan capaian Tahun 2021 sebesar 100,62%.



a) **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Tabel 2.30
Target dan Realisasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	97,70	98,42	100,74

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 97,70%, telah terealisasi yaitu 98,42%.

b) **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Tabel 2.31
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Indikator Sasaran	2021	2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	97,15 100,62	98,42 100,74

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat sebesar **0,12%**.

c. **Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Secara umum limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan yang tidak memiliki akses terhadap bangunan pengolahan merupakan sumber pencemaran utama bagi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang serius karena dapat dengan mudah masuk ke badan air atau pun meresap ke badan tanah. Fakta dilapangan menunjukkan, air limbah domestik ini merupakan sumber utama pencemar badan air lingkungan terutama di daerah perkotaan.



Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional)

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.32
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu **100%**, telah terealisasi yaitu **100%**.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.33
Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100 100	100 100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap sama yaitu **100%**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Berdasarkan data e-ppbgm per 31 Januari 2022, Angka prevalensi stunting mencapai **13,61%** dan capaian ini lebih rendah dibanding tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.34.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Prevalensi Stunting 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka Prevalensi Stunting	17,34% 100%	17,11% 99,53%	13,61% 102,78

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Capaian indikator kinerja Angka Prevalensi Stunting di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan dengan kabupaten/kota disekitar Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Angka Prevalensi Stunting paling Tinggi yaitu 72,36 tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting dengan Kab/Kota/Provinsi

No.	Indikator kinerja	Kota Banjarbaru	Kab Banjar	Kab Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov Kalsel
1.	Angka Prevalensi Stunting	13,61%	16,95	5,3	2,93	8,87

Sumber : Hasil EPPBGM tahun 2022

Dilihat dari tabel Capaian indikator Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 Kota Banjarbaru dibanding dengan kabupaten/kota sekitar lebih tinggi, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten banjar, demikian pula dibanding capaian indikator Angka Prevalensi Stunting tingkat provinsi Kalimantan Selatan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Target Nasional

Tabel 2.36
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Prevalensi Stunting pada RPJMD dan RPJMN

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD 2026	Target Akhir RPJMN 2024
1.	Angka Prevalensi Stunting	13,61%	13,8%	14%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru



Dari tabel diatas dapat dilihat dengan realisasi Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 berdasarkan eppbgm yaitu **13,61%** maka capaian kinerja dengan target akhir RPJMD tercapai **101,37%**. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir RPJMN capaian kinerja nya mampu mencapai **102, 78%**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Upaya-upaya konseling pelayanan balita termasuk didalamnya masalah gizi dilakukan baik melalui online dan kunjungan rumah oleh petugas Puskesmas, namun untuk pelaksanaan penimbangan Balita tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pencegahan masalah gizi kurang ini harus dilaksanakan secara bersamaan dari semua lintas sektor dan masyarakat, yaitu mulai dari perbaikan sanitasi lingkungan, menstabilkan kondisi ekonomi, upaya-upaya pembinaan masyarakat untuk mampu meningkatkan daya beli, menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas yang mudah didapat oleh masyarakat Banjarbaru. Tentunya juga terus melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga terhadap penanganan gizi terhadap Balita secara khusus dan terhadap keluarga secara umum.
- b. Pemerintah Kota Banjarbaru mempunyai perhatian serius terhadap upaya penurunan stunting di Kota Banjarbaru, untuk itu telah dibentuk Tim KP2S (Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting) tingkat kota Banjarbaru yang mempunyai tugas untuk melaksanakan program-program upaya percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru. Tim KP2S pembagian peran perangkat daerah sesuai dengan strategi penanganan stunting. Dalam strategi kegiatan penanganan stunting mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu kegiatan Intervensi Spesifik dan kegiatan Intervensi Sensitif. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa intervensi spesifik mempunyai kontribusi 30% dalam pencegahan stunting, sedangkan intervensi sensitive berkontribusi 70%. Intervensi spesifik ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK), kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMP dan PA. Masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan buah hati. Intervensi Sensitif



kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. ditujukan melalui kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, sasarannya adalah masyarakat umum. Dengan upaya-upaya intervensi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarbaru indikator angka prevalensi stunting diharapkan dapat dicapai sesuai dengan target pada masa akhir RPJMD tahun 2026, sehingga kualitas kesehatan masyarakat Kota Banjarbaru dapat ditingkatkan.

- c. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota, yaitu dalam rangka meningkatkan persentase air minum yang aman menuju 100% pada tahun 2024 nanti, Bidang Cipta Karya berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum aman melalui pembangunan jaringan distribusi sekunder dan tersier perpipaan air minum diameter 2-8 inch yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru. Selain itu, untuk meng-cover Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mampu membayar biaya berlangganan PTAM Intan Banjar telah direncanakan jaringan perpipaan non PTAM yang rencananya fisik konstruksinya akan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum pada tahun 2023.
- d. Selanjutnya, Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota, yaitu untuk mencapai akses sanitasi aman bagi masyarakat Kota Banjarbaru, Bidang Cipta Karya berupaya membangun infrastruktur sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, sejak 2022 Bidang Cipta Karya juga berupaya untuk ikut berkolaborasi dalam mengintervensi pencegahan *stunting* bagi balita. Hal ini dilakukan melalui pembangunan tangki septik individual yangn didanai melalui Dana Alkasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi dan pembangunan WC melalui APBD Kota Banjarbaru. Kegiatan ini rencananya akan tetap dilaksanakan di tahun-tahun mendatang sampai seluruh rumah Kepala Keluarga (KK) yang memiliki balita yang tersuspek akan mengalami *stunting* telah memiliki akses sanitasi dan air minum yang aman.



Hambatan

- a. Permasalahan gizi kurang masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi saat ini. Faktor Kesehatan serta pemenuhan gizi seimbang menjadi kebutuhan dasar untuk dapat dipenuhi dalam permasalahan gizi kurang, selain juga pemenuhan gizi yang baik dimasa kehamilan agar tidak kekurangan energi, protein, vitamin dan mineral. berdasarkan analisis dalam eppbgm kondisi gizi kurang ini dikarenakan riwayat kehamilan ibu KEK dan Anggota keluarga masih ada yang merokok/ tinggal dalam lingkungan merokok.
- b. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya gizi kurang pada Balita diantaranya dari karakteristik keluarga (seperti pengetahuan, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga) dan Pola asuh (asuh makan, asuh kesehatan) selain itu juga kondisi medis si balita. Pengetahuan dalam hal ini bukan masalah tingkat pendidikan tetapi pengetahuan terhadap asupan gizi terhadap Balita.
- c. Untuk hambatan yang dihadapi dalam Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota, yaitu pada pembangunan jaringan air minum skala distribusi sekunder dan tersier, sebagaimana kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru, sering dihadapkan pada belum terkoneksi secara keseluruhan jaringan pipa PTAM Intan Banjar. Selain itu distribusi air minum melalui jaringan primer, jaringan pipa Banjarbakula seringkali mengalami perbaikan, yang mengakibatkan air minum tidak mengalir dengan lancar atau bahkan mengalami mati total pada hari-hari tertentu ada saat perbaikan dilaksanakan.
- d. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi dalam Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota, yaitu pada akses aman sanitasi, selama ini masih kurangnya kesadaran warga untuk membangun sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Mereka masih berpendapat, bahwa tangki septik yang tidak pernah disedot merupakan tangki septik yang aman. Padahal tangki septik yang tidak pernah disedot merupakan indikator bahwa tangki septik mereka telah mencemari air tanah, karena tinja/black water telah menyebar ke mana-mana di bawah tanah.



Rencana Tindak Lanjut

- a. Pencegahan masalah gizi kurang ini harus dilaksanakan secara bersamaan dari semua lintas sektor dan masyarakat, yaitu mulai dari perbaikan sanitasi lingkungan, menstabilkan kondisi ekonomi, upaya-upaya pembinaan masyarakat untuk mampu meningkatkan daya beli, menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas yang mudah didapat oleh masyarakat Banjarbaru. Tentunya juga terus melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga terhadap penanganan gizi terhadap Balita secara khusus dan terhadap keluarga secara umum.
- b. Rencana tindak lanjut terkait rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM, Bidang Cipta Karya di tahun-tahun mendatang apabila terjadi peristiwa mati total air minum terjadi, berencana akan mendistribusikan air minum gratis bagi warga yang terdampak mati total pada saat perbaikan pipa jaringan primer Banjarbakula maupun ppa jaringan PTAM Intan Banjar sedang berlangsung. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sumur bor, pembelian mobil tangki air untuk mendistribusikan air minum dan pembangunan stasiun pengisian air minum cadangan di beberapa titik yang padat penduduk. Selain itu, di tahun 2023, Bidang Cipta Karya juga akan melakukan inisiasi pendampingan terhadap pasca konstruksi pembangunan sumur bor yang tersebar di Kecamatan Cempaka, agar Kelompok Penggunan dan Pemanfaat (KPP) pada daerah tersebut dapat memiliki daya saing usaha pemanfaatan air baku yang akan dijadikan air minum dan dapat dijual kepada warga sekitar yang membutuhkan. Hal ini dapat menjadi inisiasi awal sirkular ekonomi yang dapat meningkatkan ekonomi warga MBR.
- c. Selanjutnya rencana tindak lanjut terkait rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota, yaitu akan melakukan penuntasan akses sanitasi aman, Bidang Cipta Karya telah membuat beberapa prototipe DED Tangki Septik dan bangunan WC di atasnya agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kondisi tanah eksisting dan pembiayaan yang akan dilaksanakan. Gunanya agar di tahun-tahun mendatang, selain melalui mekanisme pendanaan melalui DAK dan APBD, juga melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR).



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.37
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran Program Terkait	Efisiensi
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Gizi Kurang	86,25%	87,56	-1,31%
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	100,74	85,17	15,57
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100	93,87	6,13

Sumber: Data Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 2.38
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU Prevalensi Stunting Tahun 2022

Alokasi Dana			%
	Anggaran	Realisasi	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 37.113.184.525	Rp. 31.499.523.012	84,9
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 3.394.892.000	Rp. 2.891.412.000	85,17
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 6.353.015.000	Rp. 5.963.275.000	93,87
Jumlah Total	Rp. 46.861.091.525	Rp. 40.354.210.012	86,11

Sumber: Data Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR



MISI	1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
SASARAN STRATEGIS	3 : Meningkatnya Kesenjangan Gender
INDIKATOR KINERJA	4 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender adalah kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, hak, manfaat, dan akses yang sama sebagai manusia, untuk berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sehingga kesenjangan gender merupakan suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. kesenjangan gender mengangkat persamaan akses, peluang partisipasi kontrol, dan manfaat yang sama antara pria dan wanita. Oleh karena itu, kesadaran tentang isu kesenjangan gender merupakan hal yang perlu dicapai.

Indikator kinerja untuk mengukur kesenjangan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia, IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan.



Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan

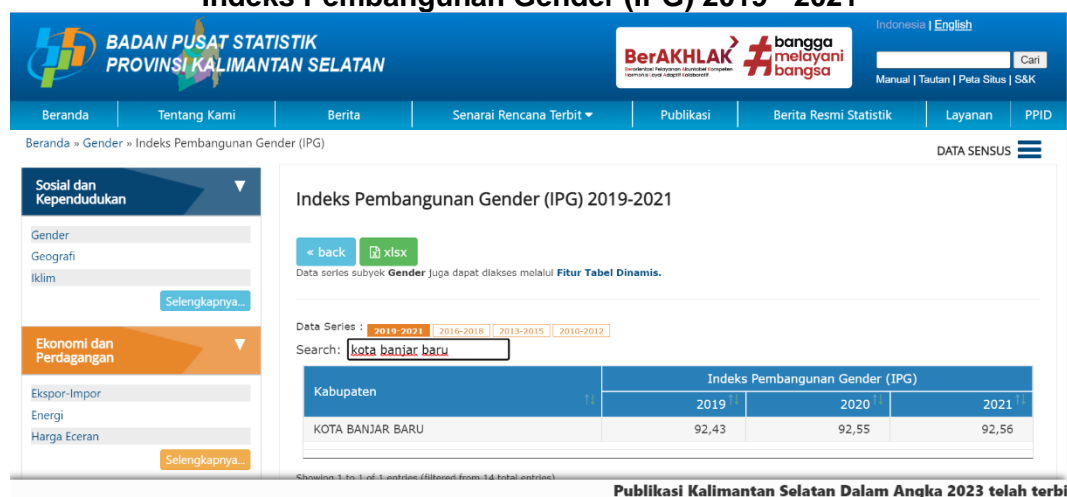
Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kesetaraan gender dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan target 2022 indeks sebesar **92,65%**, telah terealisasi sebesar **92,83%**. Data tersebut merupakan realisasi Tahun 2021 dikarenakan data Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 belum tersedia pada BPS Kota Banjarbaru.

Gambar 2.4.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019 - 2021



Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu

perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah.

Program pendukung indikator Indeks Pembangunan Gender pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru antara lain:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan Implementasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada APBD	30 %	2 %	46 %	153,3 %
		2. Persentase Organisasi Perempuan yang aktif	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

b. Program Perlindungan Perempuan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Sekolah inspirasi perempuan tekun yang aktif	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase kelompok Industri Rumah Tangga Perempuan yang aktif	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru



d. Program Pemenuhan Hak Anak

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang aktif	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

e. Program Perlindungan Khusus Anak

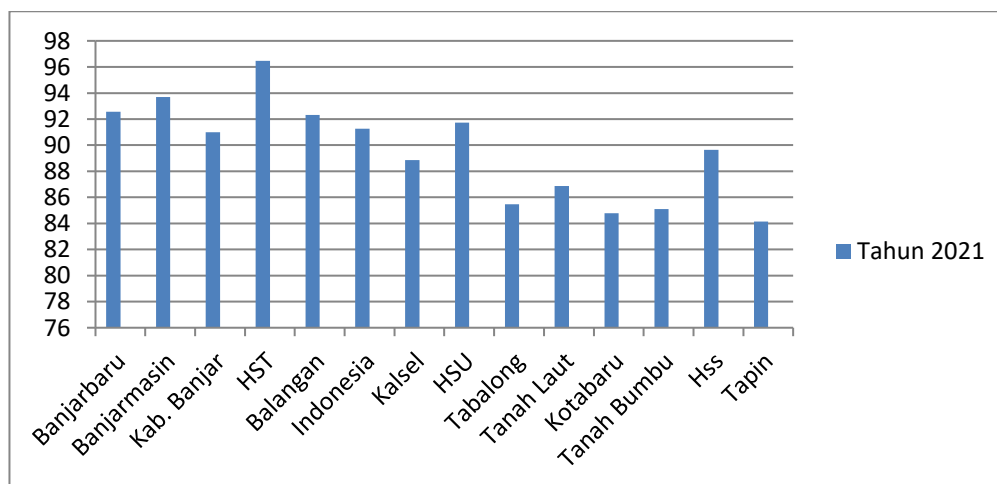
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi		Capaian
				2021	2022	
1.	Peningkatan perlindungan anak terhadap kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi tahun sebelumnya dimana kinerja terus meningkat, pada tahun 2020 adalah **92,55** dan pada tahun 2021 adalah **92,56**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi



4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 yaitu 92,85 % tercapai dan target akhir Nasional Tahun 2024 sebesar 91,39 % tercapai.



Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kota Banjarbaru Telah melebihi Target akhir IPG Nasional Tahun 2024 yang termuat dalam RPJMN.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

Sebagai langkah dan inovasi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu:

- a. Semua Pembangunan gender mempunyai faktor pendukung yang meliputi pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang meliputi gender laki-laki dan perempuan yang melibatkan lintas SKPD sehingga pengukuran dan perhitungan terkait dengan BPS Kota Banjarbaru;
- b. Pelibatan seluruh stakeholder untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga melalui Evaluasi Pengarusutamaan Gender Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021 dan 2022;
- c. Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan;
- d. Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga;
- e. Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sectoral;
- f. Pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi menuju Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- g. Melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan menunjuk Pilot Projek yang menjadi Lokus pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- h. Sosialisasi Ke Sekolah Sekolah terkait Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Kekerasan terhadap Anak dan kasus bullying;
- i. Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan ke Kelurahan;
- j. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Tim penanganan kekerasan dan UPTD. PPA.



Hambatan

- a. Belum Maksimalnya fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG);
- b. Belum maksimalnya Fungsi Focal point di tiap-tiap SKPD;
- c. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah data yang penyajiannya adalah kewenangan BPS dan hanya dapat dikeluarkan pada bulan Maret Tahun berjalan sehingga mengakibatkan terlambatnya dalam pembuatan Laporan dan evaluasi pengukuran capaian Pembangunan Gender per indikator;
- d. Masih adanya pemahaman SKPD yang Bias Gender.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Tim Tekhnis PUG untuk selanjutnya mampu melakukan pendampingan dan asistensi Kepala Focal Point yang ada di tiap tiap SKPD
- b. Memaksimalkan Kinerja Pokja PUG dan Focal Point PU.
- c. Melaksanakan Evaluasi Implementasi PUG di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
- d. Bekerjasama dengan BPS melalui fasilitasi Bappeda dan Diskominfo Kota Banjarbaru untuk dapat menyediakan Data Banjarbaru Dalam Angka yang terpilah dan dikeluarkan maksimal pada bulan Januari pada bulan berjalan berikutnya.
- e. Melakukan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan gender secara massive baik kepada SKPD maupun langsung kepada masyarakat.



8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.39
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender Pada APBD 2. Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	100 %	97.15%	2,85%
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	24%	76%
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Persentase Sekolah Inspirasi Perempuan Tekun yang aktif 2. Persentase Kelompok Industri Rumahan Perempuan yang aktif	100%	100%	- -
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang aktif	100%	73 %	27%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100%	38%	62%

Sumber: Data DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.510.550.000 dengan relisasi anggaran sebesar Rp. 1.139.238.018 atau sebesar 75,42%.



Tabel 2.40
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU IPG
Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	730.300.000	709.543.018	97,15%
2.	Program Perlindungan Perempuan	186.000.000	44.972.500	24%
		166.950.000	166.950.000	100%
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	161.500.000	118.050.000	73%
4.	Program Pemenuhan Hak anak	265.800.000	99.722.500	38%
5.	Program Perlindungan Khusus Anak			
Jumlah		1.510.550.000	1.139.238.018	75,42%

Sumber: Data DPPKBMPMPA Kota Banjarbaru

MISI	1	: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia
SASARAN STRATEGIS	4	: Terjaganya Daya Beli Masyarakat
INDIKATOR KINERJA	5	: Angka Inflasi

Angka Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi. Perhitungan Angka Inflasi diperoleh dari BPS Kota Banjarbaru.

a. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran terjaganya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja angka inflasi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu **< 3** dan telah terealisasi dengan nilai **6,98**. Hasil tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan.



Gambar 2.5.
Inflasi (Persen) 2022



Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran strategis Terjaganya Daya Beli Masyarakat adalah Program Perekonomian dan Pembangunan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru dan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana tahun 2020 angka inflasi sebesar **1,67%**. Di tahun 2021 angka inflasi sedikit naik menjadi **2,53%**. Sedangkan pada tahun 2022 angka inflasi kota Banjarbaru berada pada posisi **6,98%**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/ Provinsi

Di Provinsi Kalimantan Selatan ada 3 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel yaitu, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kotabaru. Kota Banjarbaru sendiri mengikuti perhitungan Kota Banjarmasin. Berikut angka Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan:

Tabel 2.41
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Inflasi
dengan Kab/Kota/ Provinsi

No	Indikator kinerja	Realisasi Kota Banjarbaru	Realisasi Kab. Tabalong	Realisasi Kab. Kotabaru	Realisasi Prov. Kalsel
1.	Angka Inflasi	6,98	5,01	8,65	6,99

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi Angka Inflasi Kota Banjarbaru di posisi **6,98** masih belum sesuai dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 maupun target inflasi nasional tahun 2022 di angka **< 3**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

1. Kebijakan Moneter, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan (moneter). Terdapat tiga wujud kebijakan moneter, yaitu:
 - a) Penetapan persediaan kas;
 - b) Diskonto, Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga sehingga masyarakat jadi tergerak untuk menyimpan uang di Bank dan uang yang beredar di masyarakat bisa berkurang;
 - c) Operasi pasar terbuka, berupa penjualan surat berharga akan menyerap uang masyarakat dan menekan peredaran uang sehingga laju inflasi bisa ditekan.
2. Kebijakan Fiskal, penerapan kebijakan fiska dapat mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat berbentuk dua kegiatan, yaitu:
 - a) Menghemat pengeluaran pemerintah, saat pengeluaran negara ditekan maka jumlah pembelian produk barang dan jasa akan ikut turun. Demand yang turun akan mampu menekan laju inflasi;
 - b) Menaikkan tarif pajak, dengan adanya kenaikan tarif pajak akan turut mengurangi tingkat belanja masyarakat. Sehingga peredaran uang ditengah masyarakat berkurang dan harga barang berangsur-angsur kembali ke kondisi normal;
3. Kebijakan Lainnya, selain fokus dibidang moneter dan fiskal, masih ada cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu:
 - a) Menambah jumlah barang di pasar, dapat diwujudkan dengan dua cara, yaitu dengan pemberian subsidi atau stimulus agar industri meningkatkan produksi hingga level tertentu dan melakukan pelonggaran keran inpor agar stok barang di pasar meningkat secara signifikan.



- b) Menetapkan harga batas atas, laju inflasi bisa ditekan dengan menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu. Tujuannya agar harga tidak semakin naik dan tidak terkendali.

Hambatan

- Kenaikan Harga BBM dan Komoditas lokal seperti Batubara, Sawit
- Gangguan rantai pasok yang selama ini terjadi saat pandemi Covid-19 tidak bisa memenuhi permintaan yang melonjak pasca pandemic
- Perang dagang Amerika Serikat dan RRT
- Perang antara Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan pangan serta memicu krisis energi
- Kenaikan Suku Bunga Acuan *the fed* yang membuat dolar AS menguat.

Rencana Tindak Lanjut

Mengintensifkan setiap upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait Inflasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian) dan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang mendukung indikator kinerja utama Angka Inflasi Tahun 2022, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.42.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	Persentase Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Perekonomian yang selesai ditindaklanjuti	85	79,58	5,42
2.	Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	100	99	1

Sumber: Data Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Banjarbaru



B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Angka Inflasi sesuai target tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 416.779.350** dengan relisasi anggaran sebesar **Rp. 365.777.250** atau **87,76%**.

Tabel 2.43.
Realisasi Anggaran Angka Inflasi Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian)	241.716.850	192.378.750	79,58
2.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	175.062.500	173.398.500	99
Jumlah		416.779.350	365.777.250	87,76

Sumber: Data Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Banjarbaru

MISI	1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
SASARAN STRATEGIS	5	Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat
INDIKATOR KINERJA	6	Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa yang disebut dengan **konflik** adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional di daerah serta menghambat pembangunan.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Konflik yang berupa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.



Untuk mengetahui sejauh mana keamanan dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas daerah dapat dilihat dari formulasi Persentase Penyelesaian Potensi Konflik SARA yang terjadi di Kota Banjarbaru. Semakin tinggi realisasi yang dicapai dalam penyelesaian potensi konflik SARA maka menggambarkan terciptanya situasi atau kondisi di wilayah Kota Banjarbaru **yang semakin kondusif (aman, nyaman dan tertib)**, sesuai dengan misi kesatu Kota Banjarbaru **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak mulia”**.

Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda merupakan proses untuk menciptakan kondisi kehidupan yang aman dan damai sehingga stabilitas daerah dan pembangunan dapat berjalan lancar. Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda diukur berdasarkan permasalahan yang telah diproses/diselesaikan dibagi 3 dengan hasil pengukuran berupa Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat adalah:

Tabel 2.44.
Realisasi Kinerja Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Katagori
1.	Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda dari target yang telah ditentukan yaitu 100% telah terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori capaian kinerja baik). Program yang menunjang capaian kinerja tersebut adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Terkait Pembinaan keagamaan yang dilakukan:



Tabel 2.45
Pengukuran Realisasi Berdasarkan Pembinaan Keagamaan

No	Uraian	Keterangan
1.	Pembinaan Tilawatil Qur'an dan buta aksara Al Qur'an	Terealisasi
2.	Pembinaan rumah ibadah muslim dan non muslim	Terealisasi
3.	Pembinaan PHBI dan ta'mir	Terealisasi

Sumber: Data Bagian Kesra Setda Kota Banjarbaru

Terkait Penyelesaian Potensi Konflik SARA, berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa di wilayah Kota Banjarbaru selama tahun 2022 kondisinya dalam keadaan terjadi 5 kasus SARA yang ditangani dan masalah telah selesai.

Tabel 2.46
Data Potensi Konflik SARA yang terjadi di Kota Banjarbaru
Selama Tahun 2022

No.	Uraian Permasalahan	Tindakan Yang Dilakukan	Keterangan
1.	Penolakan Warga RT.005/RW.III Kel. LAURA atas Kegiatan Kelompok Sholawat Pelangi 7 Warna pimpinan Sdr.Arbain (Guru Sepunggur) di kediaman Sdr. SUPRIYAMBODO yang terindikasi menyimpang.	Telah dilakukan Mediasi antara masyarakat dan Kelompok Sholawat Pelangi 7 Warna Pada rakor Tim Kewaspadaan Dini Kota Banjarbaru dan menghasilkan kesepakatan dengan surat pernyataan bahwa kelompok tsb tidak lagi melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat sekitar.	Telah dibuatkan Surat Pernyataan bahwa Kelompok Solawat Pelangi 7 Warna tidak dibolehkan lgi melakukan kegiatan di Rumah sdr. Supriyambodo maupun di seluruh wilayah Kota Banjarbaru. (Masalah Selesai)
2.	Penolakan Masyarakat atas berdirinya Bangunan yang akan dijadikan Mesjid LDII di RT.19/ RW.08 Jl. Pondok IV dengan memboikot Pengurusan IMB.	Telah dilakukan fasilitasi pertemuan pada Rakor Tim Kewaspadaan Dini Kota Banjarbaru antara Pengurus LDII dengan Perwakilan Masyarakat setempat dengan hasil, masyarakat sekitar tetap menolak untuk menyetujui	Perizinan masih dalam proses. (FKUB dan KEMENAG TELAH Menerbitkan Rekomendasi) (Masalah selesai)



No.	Uraian Permasalahan	Tindakan Yang Dilakukan	Keterangan
		Pemberian Izin Bangunan dimaksud dijadikan Mesjid, dan Masyarakat dapat menyetujui dikeluarkan ijin dalam bentuk Bangunan Mushala.	
3.	Penolakan Warga RT. 024. RW. 05 Kelurahan Kemuning dan Warga RT.04 RW. 05 Kelurahan Loktabat Selatan atas rencana pendirian Gereja HKBP di Wilayah RT.04 RW. 05 dengan alasan Rencana Pendirian Bangunan Gereja tersebut terlalu dekat dengan Pondok Pesantren serta mayoritas Penduduk sekitar Muslim.	Telah dilakukan Fasilitasi dan Koordinasi dengan Ketua RT dan Tokoh Agama serta Pihak HKBP Menyarankan kepada Pengurus HKBP untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap warga sekitar	Pihak Panitia Pembangunan Gereja tidak akan mendirikan bangunan sebelum semua persyaratan terpenuhi sesuai SKB no.8 dan 9. (Masalah selesai)
4	Penerbitan IMB untuk masjid Salman Al Farisy yang berada di wilayah Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Permasalahannya adalah keluarnya IMB sebelum melalui prosesn pemberian rekomendasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarbaru	Telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi dengan panitia pengurus Yayasan Masjid Salman Alfarisy terkait IMB yang telah keluar. Pihak Yayasan mengajukan kembali proses ijin kepada FKUB dengan memenuhi tanda tangan dari pengguna rumah ibadat dan masyarakat sekitar dengan syarat 60/90	IMB telah diterbitkan dan tidak diperlukan lagi rekomendasi dari FKUB (Masalah selesai)
5	Pembangunan masjid Salma bin Muhammed yang berada di Wilayah Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin akan melaksanakan pembangunan masjidnya, tetapi belum mempunyai IMB dan belum mengurus	Telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi dengan berpegang pada Peraturan 2 menteri tentang prosedur pembangunan rumah ibadat. Sebelum rekomendasi dari	Rekomendasi FKUB dan Kementerian Agama telah diterbitkan (Masalah selesai)

No.	Uraian Permasalahan	Tindakan Yang Dilakukan	Keterangan
	proses rekomendasi dari FKUB dan Kamenag yang sesuai dengan peraturan 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.	Kamenag dan FKUB keluar, maka proses pembangunan masjid Salma Bin Mohammad dihentikan	

Sumber: Data Bakesbangpol Kota Banjarbaru

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Capaian kinerja sesuai dengan pengukuran kinerja tahun 202 dengan 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan indikator sasaran sehingga perbandingan realisasi/ capaian dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Tabel 2.47
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	100%	100%	100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.48
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1.	Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	100%	100%	-

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa indikator kinerja Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda realiasi capaian 100% dari target akhir RPJMD tahun 2022. Hal menunjukan pencapaian dalam **kategori baik** dari segi keamanan dan kenyamanan masyarakat serta stabilitas daerah terkait Persentase Pembinaan keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Banjarbaru. Sedangkan untuk **target Nasional tidak ada**.



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk merealisasikan target ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu dengan menindaklanjuti laporan yang diterima terkait konflik SARA dengan Pencapaian sasaran Persentase Penyelesaian Potensi Konflik SARA yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian penanganan kasus potensi rawan konflik SARA agar tidak sampai menjadi kasus konflik di Kota Banjarbaru. Adapun upaya lanjutan yang dilakukan antara lain:

- 1) Melaksanakan dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama serta pemberdayaan forum-forum kemitraan dan kerjasama (FKDM, FKUB dan FPK serta dengan kalangan ormas dan kepemudaan lainnya).
- 2) Memaksimalkan fungsi dan peranan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kota Banjarbaru tahun 2022 dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah melalui deteksi dini dan peringatan dini serta alternatif cara bertindak dan tukar menukar informasi intelijen
- 3) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi politik daerah dan stabilitas politik pemerintahan, yang dilaksanakan secara terpadu dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dengan tujuan agar keberadaan dan aktifitasnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara serta menghindari keberadaan ormas-ormas yang dapat meresahkan masyarakat, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta merongrong NKRI.

Hambatan

Masyarakat Banjarbaru yang Heterogen, baik agama, pekerjaan maupun tingkat pendidikan, ditambah situasi sosial dan politik Nasional yang terjadi sehingga rawan berpotensi konflik, khususnya konflik yang berlatar belakang SARA seperti pendirian rumah ibadah, pendirian warung remang-remang, sengketa lahan, dan Pilkada.



Rencana Tindak Lanjut

- a. Lebih meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik agar potensi konflik yang muncul di daerah tidak berkembang menjadi konflik yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Koordinasi yang intensif dengan jajaran Forkopimda untuk mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Banjarbaru.
- c. Memberdayakan segala potensi yang ada dan/ atau yang dimiliki dengan memprioritaskan membangun komitmen dan dedikasi serta integritas yang tinggi dari semua sumber daya aparatur yang jumlah dan kualitas saat sekarang ini masih kurang memadai untuk peningkatan produktifitas kinerjanya.
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan semua instansi/SKPD terkait, forum-forum, organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta elemen-elemen kemasyarakatan lainnya. Karena tingkat keberhasilan pencapaian kinerja hampir disemua kegiatan/ program sangat/ atau selalu tergantung dari sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait instansi diluar (eksternal) organisasi.

Pendukung Capaian Kinerja.

- a. Pencapaian sasaran Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat di dukung oleh program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
- b. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efesiensi atas penggunaannya sebesar **16%**.



5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.49
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	100	84	16
Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindaklanjuti	100	90,86	9,14
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda/ Perkada	100	96,8	3,2
	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	92,3	7,7

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran, program untuk mendukung terealisasinya kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp. 580.000.000,00 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 488.344.884,00 sebesar atau 84% dengan rincian per program sebagai berikut:



Tabel 2.50.
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Rp. 580.000.000	Rp. 488.344.884	84
2.	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.127.606.700	Rp. 1.933.043.000	90,86
3.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.622.131.000	Rp. 2.437.142.803	92,3

Sumber: Data Bagian Kesra, Bakesbangpol, dan Satpol PP

MISI	1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
SASARAN STRATEGIS	5	Meningkatnya Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat
INDIKATOR KINERJA	7	Persentase Penyelesaian Kebencanaan

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, keuangan harta benda dan dampak psikologis.

Program Penanganan Bencana memberikan bantuan makanan siap saji, kepada warga yang terdampak bencana dan paket sembako kepada korban bencana. Bencana yang terjadi tahun 2022, yaitu bencana alam seperti Banjir, angin puting beliung dan kebakaran.

Indikator Persentase Penyelesaian Kebencanaan dipilih dengan maksud untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial.

Pelaksanaan penanganan bencana dilaksanakan bekerjasama dengan SKPD terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan UPT Pemadam Kebakaran apabila terjadi musibah kebakaran. Capaian indikator kinerja diukur berdasarkan perhitungan



Persentase penanggulangan bencana + persentase penanganan pasca bencana dibagi 2.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51
Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Indikator Persentase Penyelesaian Kebencanaan pada tahun 2022 target 100% terealisasi 100%, dikarenakan dalam penanganan korban pasca bencana Dinas Sosial Kota Banjarbaru bekerjasama dengan anggota Tagana, relawan sosial dan elemen masyarakat.

Adapun bencana alam dan sosial yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.52
Bencana Alam Yang Ditangani Pada Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1	Banjir	1.639	Kelurahan Sungai Tiung 152 KK, 577 jiwa (4 Juli 2022); Kelurahan Cempaka 446 KK, 1.348 jiwa (7 September 2022); Kelurahan Sungai Tiung 160 KK, 614 jiwa (7 September 2022); Kelurahan Loktabat Selatan 50 jiwa (24 September 2022); Kelurahan Kemuning 50 jiwa (24 September 2022)
2	Puting Beliung	8	Kelurahan Loktabat Selatan 3 buah rumah, 3 KK, 8 jiwa (27 Desember 2022)
3	Kebakaran	45	Kelurahan Guntung Manggis 1 rumah, 1 KK 2 jiwa (23 Januari 2022) Kelurahan Sungai Tiung 6 rumah, 7 KK 20 Jiwa (03 Pebruari 2022) Kelurahan Loktabat Selatan 1 rumah, 1 KK, 2 jiwa (28 Maret 2022)



			Kelurahan Kemuning 5 rumah, 5 KK, 21 jiwa (21 Agustus 2022)
4	Isoman Covid 19	751	17 s/d 28 Pebruari 2022 Kelurahan Landasan Ulin Barat 23 jiwa Kelurahan Cempaka 16 jiwa Kelurahan Sungai Ulin 107 jiwa Kelurahan Landasan Ulin Timur 50 jiwa Kelurahan Guntung Manggis 84 jiwa Kelurahan Guntung Payung 48 jiwa Kelurahan Sungai Tiung 15 jiwa Kelurahan Bangkal 16 jiwa Kelurahan Palam 23 jiwa Kelurahan Loktabat Utara 17 jiwa Kelurahan Mentaos 30 jiwa Kelurahan Kemuning 37 jiwa Kelurahan Sungai Besar 60 jiwa Kelurahan Guntung Paikat 70 jiwa Kelurahan Loktabat Selatan 80 jiwa Relawan 75 jiwa

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Indikator Persentase Penanganan Pasca Bencana yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru didukung dengan program kegiatan yaitu:

1. Program Penanganan Bencana

Program ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam penanganan akibat terjadi bencana alam dan sosial yang bertujuan agar kehidupan masyarakat yang mengalami bencana dapat pulih (trauma healing) sehingga diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

Pada program Penanganan Bencana, terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru, yaitu:

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan.
- b. Kegiatan ini melaksanakan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial. Dan apabila terjadi musibah banjir maka akan didirikan tenda penampungan di kelurahan setempat dan membuka dapur umum lapangan yang ada pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota.
- d. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau relawan sosial yang dibentuk Dinas Sosial Kota Banjarbaru yaitu Taruna Siaga



Bencana (TAGANA) berjumlah 28 orang. Apabila terjadi bencana alam dan sosial mereka akan turun langsung ke lokasi bencana bersama dengan BPBD dan relawan lainnya seperti TNI, Babinsa dan elemen masyarakat.

Program Penanganan Bencana melaksanakan kegiatan memberikan bantuan kepada korban pasca bencana yaitu memberikan makanan siap saji kepada korban yang terdampak bencana banjir dan paket sembako, makanan anak velbet, matras, kasur, selimut kepada korban kebakaran.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.53
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan 2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

Tabel 2.54.
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan pada Target RPJMD dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Target RPJMD tahun 2022	Target Nasional
1.	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	100%	100%	100%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya–Upaya yang dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target penanganan penyelesaian kebencanaan dengan cara:

- Mendirikan tenda di pos-pos pengungsi bekerja sama dengan BPBD dan kelurahan setempat.
- Membuka dapur umum lapangan dibantu Anggota oleh Tagana, relawan sosial seperti PMI, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pramuka dan aparat.
- Membuka layanan pengaduan bagi korban yang terdampak bencana.

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan dapat terlaksana didukung dengan:



- 1) Adanya Komitmen Kepala Dinas Sosial dan aparatnya dalam penanganan korban pasca bencana
- 2) Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait bantuan kebencanaan seperti BPBD Kota Banjarbaru dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Bekerjasama dengan aparat masing-masing Kelurahan, Kecamatan dan Babinsa.
- 4) Dibentuknya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Banjarbaru
- 5) Dibentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Sungai Tiung
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana operasional lapangan
- 7) Tersedianya buffer stok bantuan dari Kemensos RI
- 8) Tersedianya bahan makanan.

Hambatan

- a. Terbatasnya persediaan buffer stock seperti bahan makanan, matras, valbet, selimut, kasur, makanan anak, tenda pengungsi handy talk).
- b. Terbatasnya relawan sosial penanganan bencana pada tiap kelurahan.
- c. Kurangnya keahlian/skill anggota Tagana dalam penanganan bencana.
- d. Kurangnya sarana prasarana yang memadai.
- e. Minimnya Anggaran penanggulangan bencana.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanganan kebencanaan seperti Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan BPBD Kota Banjarbaru.
- b. Bekerjasama dengan aparat Kelurahan, Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas.
- c. Penambahan Pengadaan Sarana dan Prasarana operasional lapangan terkait kebencanaan seperti tenda, matras dan valbet, kasur, selimut, sepatu boot dan Handy Talky.
- d. Penyediaan posko-posko penampungan korban pasca bencana
- e. Membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di tiap-tiap kecamatan.
- f. Penambahan buffer stock kebencanaan dari APBD Kota Banjarbaru.
- g. Penambahan anggaran penanggulangan bencana.



5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan pagu anggaran Program Penanganan Bencana yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan Tahun 2022 sebesar **Rp. 509.813.000** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 455.314.000** atau persentase **89,31%** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.55.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	Persentase Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	100	89,31	10,69
	Jumlah		100	89.31	10.69

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia pada Program Penanganan Bencana dengan pagu Rp. 509.813.000 terealisasi Rp. 455.314.000 dengan persentase 89,31%. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Realisasi Anggaran Program Penanganan Kebencanaan Tahun 2022

No.	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penanganan Bencana	509.813.000	455.314.000	89,31
	Jumlah	509.813.000	455.314.000	89,31

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

MISI	2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	6 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota
INDIKATOR KINERJA	8 : Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata



Meningkatnya kegiatan perekonomian kota berdampak langsung terhadap pertumbuhan perkonoman di berbagai bidang, tak terkecuali bidang pariwisata. Meningkatnya kegiatan perekonomian Kota Banjarbaru berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang terekam pada usaha penyedia jasa akomodasi pariwisata yang ada di Kota Banjarbaru, serta tingginya mobilitas wisatawan yang masuk ke Kota Banjarbaru. Tentunya akan berdampak langsung menghidupkan ekosistem perekonomian masyarakat khususnya golongan masyarakat sadar wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Hal ini tentu saja membuat sektor pariwisata berkontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru secara aktif.

Pengukuran capaian kinerja indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata adalah nilai absolut realisasi penerimaan PAD sektor pariwisata.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota dengan indikator kinerja pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata berdasarkan target 2,50% telah terealisasi sebesar 49%. Pada Tahun 2021, PAD Sektor Pariwisata Kota Banjarbaru sebesar Rp. 31.179.311.653,94 meningkat menjadi Rp. 46.531.287.690. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja sebesar 1.960% dengan kategori sangat baik. Peningkatan pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata yang sangat signifikan ini disebabkan oleh kembalinya aktifitas pariwisata yang sempat menurun pertumbuhannya di masa pandemi covid-19.

Tabel 2.57
Realisasi Kinerja Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata
Tahun 2022

No	Rincian Kinerja Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Bina Wisata	%	Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-	100 %
2.	Pajak Restoran	%	Rp.28.587.491.764,-	Rp.31.466.209.530,-	110 %
3.	Pajak Hotel	%	Rp. 6.733.094.411,-	Rp. 8.540.185.691,-	127 %
4.	Pajak Hiburan Umum	%	Rp. 5.500.000.000,-	Rp. 6.507.392.469,-	118 %
TOTAL			Rp. 40.838.086.175,-	Rp. 46.531.287.690,-	114 %



Program yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja tersebut adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kebudayaan, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana pertumbuhan PAD sektor pariwisata meningkat, tahun 2020 adalah **-7,22%** dan tahun 2021 meningkat menjadi **16%** dan tahun 2022 meningkat menjadi **49%**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

Realisasi pertumbuhan PAD sektor pariwisata Pemerintah Kota Banjarbaru, terdata realisasi PAD pariwisata meningkat dari target RPJMD 2026 dengan persentase **49%** dan untuk **target nasional tidak ada**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Hambatan

Secara umum target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Namun pada perjalanannya ada beberapa hambatan yang dihadapi kinerja yang dicapai tidak lebih tinggi lagi antara lain:

- a. Sarana/Prasarana yang masih kurang memadai.
- b. Belum tersebar luasnya informasi tentang pariwisata di Kota Banjarbaru.
- c. Kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata terkait perizinan.

Rencana Tindak Lanjut

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan PAD sektor pariwisata:

1. Melakukan peningkatan sarana prasarana terhadap Objek PAD Kota Banjarbaru Sektor Pariwisata dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dengan mempertimbangkan prinsip tepat guna sehingga akan berdampak langsung terhadap kenaikan nilai pakai/sewa.
2. Melakukan promosi objek PAD sektor pariwisata dengan melakukan kegiatan promosi objek PAD sektor pariwisata dengan merangkul para duta



wisata dalam skala dan pangsa pasar yang beragam dengan tujuan meningkatkan daya tarik objek PAD sektor pariwisata.

3. Dengan mengadakan pelatihan untuk pelaku usaha jasa pariwisata dan kelompok sadar wisata serta melakukan pembinaan terhadap usaha jasa pariwisata untuk mengenal kelengkapan perizinan online (OSS-RBA).

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Berdasarkan pagu anggaran Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Program pemasaran pariwisata, Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kebencanaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.58.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
			(%)	(%)	
1.	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata unggulan	24%	99,18 %	-75,18
2.	Program pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	106%	92,26 %	13,74
3.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	87,5%	70 %	23,75
		Persentase usaha ekonomi kreatif yang dibina	100%		
4.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	100%	88,25%	11,75
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kegiatan ekonomi mandiri (wirausaha)	100%		

Sumber: Data Disporabudpar Kota Banjarbaru



B. REALISASI ANGGARAN

Total pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya pertumbuhan PAD sektor pariwisata tahun 2022 adalah sebesar **Rp.4.223.033.700** dengan total realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.802.743.904** atau capaian **90,04%**.

Tabel 2.59
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pertumbuhan PAD
Sektor Pariwisata Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp. 302.400.000	Rp. 299.912.000	99,18%
2	Program pemasaran pariwisata	Rp. 855.374.000	Rp. 789.151.500	92,26%
3	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp. 179.552.000	Rp. 125.632.000	70 %
4	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rp. 1.426.154.200	Rp. 1.258.601.235	88,25%
5	Program pengembangan kebudayaan	Rp. 984.733.500	Rp. 910.761.700	92,5 %
6	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp. 474.820.000	Rp. 418.685.469	88,18%
Jumlah		Rp. 4.223.033.700	Rp.3.802.743.904	90,04%

Sumber: Data Disporabudpar Kota Banjarbaru

MISI	2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	6 : Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota
INDIKATOR KINERJA	9 : Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif

Sasaran Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Kota dengan indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro dipilih dengan maksud untuk menggambarkan peningkatan Kegiatan Perekonomian Kota oleh pemerintah Kota Banjarbaru, dengan indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro. Indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha



Mikro menunjukkan kemampuan pembinaan Pemerintah Kota kepada masyarakat untuk berwirausaha dan terdaftar.

Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Kota diukur berdasarkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro hasil penilaian (jumlah usaha mikro tahun n dikurang jumlah usaha mikro -n dibagi dengan jumlah usaha mikro -n dikalikan 100.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.60
Realisasi Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian / Kategori
1.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif	%	4,50	4,65	103,33% (Baik Sekali)

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

Pada Tahun 2021 jumlah Usaha Mikro yang ada di Kota Banjarbaru sebanyak **11.124 UMKM**, sedangkan Data Usaha Mikro Tahun 2022 sebanyak **11.641 UMKM**.

Adapun Usaha Mikro yang terdata dan menjadi binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebanyak 3.899 (berdasarkan data pada aplikasi <http://siapkk.banjarbarukota.go.id>.)

Rumus dari indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yaitu: (jumlah Usaha Mikro tahun 2022 dikurang jumlah Usaha Mikro 2021 dibagi dengan jumlah Usaha Mikro 2021 dikalikan 100 Jadi capaian indikator persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro adalah $(11.641 - 11.124) / 11.124 \times 100\% = 4,65\%$.

Tabel 2.61
Rekapitulasi Data UMKM Perbidang Usaha Tahun 2022

NO	KECAMATAN	BIDANG								
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	T. Internet	Jasa	Bidang Lainnya	UMKM
1	Banjarbaru Selatan	1719	523	70	432	59	32	77	1324	4.236
2	Banjarbaru Utara	994	471	44	212	67	28	63	839	2.718
3	Cempaka	319	298	17	322	114	9	29	309	1.417
4	Landasan Ulin	485	338	1	296	312	19	43	278	1.772
5	Liang Anggang	263	329	1	332	246	9	42	276	1.498
Total Keseluruhan		3.780	1.959	133	1.594	798	97	254	3.026	11.641



Tabel 2.62
Rekapitulasi Data UMKM Perbidang Usaha Tahun 2022

NO	KECAMATAN	BIDANG								
		Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	T. Internet	Jasa	Bidang Lainnya	UMKM
1	Banjarbaru Selatan	1625	513	70	421	51	32	63	1289	4.064
2	Banjarbaru Utara	928	460	44	212	67	28	39	839	2.617
3	Cempaka	298	298	17	322	104	9	26	305	1.379
4	Landasan Ulin	401	338	1	296	289	19	36	266	1.646
5	Liang Anggang	232	325	1	332	225	9	36	258	1.418
Total Keseluruhan		3.484	1.934	133	1.583	736	97	200	2.957	11.124

Program pendukung indikator Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif antara lain:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Capaian program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan Tahun 2022 adalah 33,44% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 25,78%.

2. Program Pengembangan UMKM

Capaian program pengembangan UMKM dengan indikator persentase usaha mikro menjadi usaha kecil Tahun 2022 adalah 0,08% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 0,17%

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Capaian program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas Tahun 2022 adalah 22,64% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 19,11%.

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Capaian program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dengan indikator persentase koperasi yang sehat Tahun 2022 adalah 3,66% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 1,9%.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Capaian program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya Tahun 2022 adalah 24,06% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 19,60%.



6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Capaian program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n Tahun 2022 adalah 233,54% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 273%.

2. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir**

Tabel 2.63
Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
		Realisasi /Capaian	Realisasi /Capaian	Realisasi /Capaian
1.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif	-0,67% 100%	10,68% 356%	4,65% 103,33%

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD**

Realisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.64
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026
1.	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif	4,65%	6,50%

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

Realisasi kinerja indikator “Pertumbuhan UMKM” tahun 2022 adalah **4,65%** sedangkan target RPJMD yang berakhir tahun 2026 adalah **6,5%**, kondisi ini masih memperlihatkan bahwa realisasi kinerja belum mencapai target RPJMD. Dan untuk **target nasional tidak ada**.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Selama tahun 2022, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, praktik, dan pendampingan meliputi aspek legalitas, perizinan, inovasi produk melalui praktik pengolahan



produk, packaging/kemasan, foto produk, pemasaran digital serta pembukuan sederhana.

2) Pendampingan dari hulu ke hilir ini merupakan solusi dari permasalahan yang sering dialami oleh UMKM di Kota Banjarbaru.

a. Melaksanakan sosialisasi perizinan

Perizinan berusaha merupakan salah satu aspek penting dalam memulai usaha. Dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan seperti penertiban maupun pembongkaran. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melaksanakan Sosialisasi Perizinan berusaha dan Pendataan berkolaborasi dengan DPM PTS Kota Banjarbaru.

b. Melaksanakan praktik/pelatihan kemasan

Dengan Ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor UMKM. Persaingan dalam Dunia Bisnis yang semakin Ketat, membuat para pelaku usaha mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya, salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah minimnya pengetahuan mengenai kemasan yang merupakan salah satu hal penting dalam menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan juga pengendalian inflasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melaksanakan kegiatan Praktik Pengemasan Produk untuk memberikan pengetahuan tentang cara yang baik dan benar dalam pengemasan dan pelabelan suatu produk.

c. Melaksanakan praktik/pelatihan foto produk

UMKM telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar UMKM tidak hanya tumbuh dari aspek jumlah semata, tetapi juga dalam aspek kualitas dan daya saing produk beserta brandnya. Salah satu pembentuk daya saing dari sebuah brand UMKM



adalah bagaimana brand tersebut terekam dalam foto produk, yang biasanya dipajang dalam etalase digital di media sosial berupa Instagram atau *marketplace* lainnya.

Di era digital saat ini, UMKM dituntut untuk berperan aktif dalam memasarkan hasil produk secara *online*. Para UMKM membutuhkan kemampuan untuk dapat menampilkan produknya agar lebih menarik untuk itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melaksanakan pelatihan Foto Produk.

d. Pembukuan sederhana

Pembukuan sederhana merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha baik dalam skala kecil maupun besar. Pembukuan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan bisnis sekaligus mengukur apakah bisnis yang dijalankan berkembang atau tidak.

Menjalankan sebuah bisnis memang diperlukan ketelitian bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Dengan membuat pembukuan usaha seperti ini, akan memudahkan pemilik usaha untuk mengontrol arus keuangan sehingga bisa meminimalisir risiko akan adanya masalah keuangan di masa mendatang.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mengupayakan para UMKM memiliki kemampuan dalam Menyusun pembukuan sederhana melalui pelatihan Pembukuan Sederhana.

e. Pemasaran digital

Seiring kemajuan teknologi, kebutuhan dan cara manusia dalam melakukan suatu hal berubah, termasuk pada teknik pemasaran. Jika dahulu cara pemasaran dilakukan dengan konvensional seperti menyebar selebaran, memasang iklan di televisi atau radio dan sejenisnya, sekarang proses pemasaran sudah memasuki fase baru yang memanfaatkan teknologi melalui pemasaran digital atau digital marketing.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mendukung Digitalisasi para UMKM agar dapat bersaing pada kemajuan digital saat ini. Hal ini didukung dengan dilaksanakannya pelatihan Pemasaran Digital.



f. Pemberian Fasilitas Halal dan HAKI

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan adalah kegiatan yang terdapat dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya pengembangan produktivitas dan daya saing UMKM melalui pemberian berbagai kemudahan untuk pengembangan usahanya, Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengamatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, kemudahan perizinan berusaha, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan. Dengan harapan bahwa semua kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru telah mengambil langkah dengan memberikan berbagai kegiatan yang bertujuan dalam rangka pengembangan UMKM serta pemberian Fasilitas Pengurusan Sertifikat Halal Produk UMKM dan Fasilitas Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

g. Kemitraan

Menjalin kerjasama bisnis atau kemitraan sudah lama menjadi program terobosan untuk memperluas jaringan usaha guna mendapatkan berbagai manfaat yang saling mendukung untuk kepentingan usahanya



masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bisnis, baik kerjasama manajemen, pembiayaan, pemasaran maupun kerjasama merger usaha yang saling memberi penguatan dari berbagai sektor usaha tentunya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memfasilitasi para UMKM agar dapat bermitra dengan dilaksanakannya sosialisasi kemitraan bersama swalayan lokal Pinus dan pasar modern *Alfamart*.

h. Pemberian stimulus Ekonomi

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa stimulus Perekonomian Daerah untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah (KUMKM) di Daerah, dalam hal ini KUMKM di Kota Banjarbaru. Bahwa program stimulus tersebut diberikan sebagai salah satu dukungan dalam rangka mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Banjarbaru.

Bahwa sesuai Peraturan Walikota Banjarbaru nomor 35 tahun 2021 Tentang Pemberian Stimulus Perekonomian Daerah Sebagai Langkah Kebijakan Mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Untuk Koperasi Dan Usaha Mikro, disebutkan dalam perwali, bentuk stimulus yang diberikan berupa pemberian Subsidi Bunga dan Gratis Ongkos Kirim Produk KUMKM.

i. Melaksanakan promosi

Salah satu strategi promosi yang sering digunakan untuk mengenalkan produk yaitu dengan mengikuti pameran. Pameran merupakan ajang untuk mengenalkan produk dan meningkatkan penjualan dengan menjaring konsumen sebanyak-banyaknya.

Berkembangnya Event pameran yang diadakan pemerintah maupun berbagai perusahaan, memberikan keuntungan besar bagi para UMKM. Sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya, selain itu ketatnya persaingan bisnis juga memaksa mereka untuk mempromosikan bisnisnya ke pasar. Dengan adanya pameran, para UMKM dapat mempromosikan produk mereka langsung dengan terjun langsung melihat peluang pasar bagi produk mereka.



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memberikan kesempatan kepada para UMKM untuk mempromosikan produk mereka pada pameran yang diikuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru diantaranya Pameran Kementerian Kelautan Bangsa Produk Buatan Indonesia Di Siring Banjarmasin, Pameran Apeksi di Kota Padang, Gelar Produk Di Area *Car Free Day* Gubernur, MTQ Nasional di Alun-Alun Martapura dengan menjadi juara 2 stand terbaik.

Hambatan

- a. Pemberian Subsidi bunga;
- b. Adanya kebijakan perbankan yang tidak mengizinkan UMKM/ pelaku usaha untuk mengajukan KUR jika telah menggunakan fasilitas serupa di Bank lain.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan pemasaran produk secara online dan stimulus ekonomi melalui program gratis ongkir untuk semua produk UMKM.
- b. Pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan potensi dan peluang usaha mikro.
- c. Memberikan stimulus ekonomi melalui pinjaman tanpa bunga dan jaminan bekerjasama dengan Bank Kalsel.
- d. Mengikutkan event promosi dalam dan luar provinsi.
- e. Fasilitasi sertifikasi halal produk makanan minuman dan hak kekayaan intelektual untuk merk produk UMKM.



5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.65
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	117,17	87,33	12,67
2.	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	27,59	33,62	-
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	115,45	99,59	0,41
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	140,77	99,32	0,68
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya	123,38	77,56	22,44
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n	3892,33	92,85	7,15

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota tahun 2022 sebesar Rp.2.369.431.000,00 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 1.750.780.641,00 sebesar atau 73,89% dengan rincian per program sebagai berikut:



Tabel 2.66
Realisasi Anggaran Program Pendukung Kegiatan Perekonomian Kota
Tahun 2022

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 1.166.401.000	Rp. 1.018.627.795	87,33
2.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 560.850.000	Rp. 188.536.146	33,62
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 85.000.000	Rp. 84.650.000	99,59
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 52.980.000	Rp. 52.620.500	99,32
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 404.200.000	Rp. 31.3493.000	77,56
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 100.000.000	Rp. 92.853.200	92,85
Jumlah		Rp. 2.369.431.000	Rp. 1.750.780.641	73,89

Sumber: Data Diskop, UKM, & Naker Kota Banjarbaru

MISI	2	: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	7	: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah
INDIKATOR KINERJA	10	: Persentase Peningkatan PAD

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan penerimaan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Indikator sasaran adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh berdasarkan akumulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja indikator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah nilai absolut realisasi penerimaan PAD.



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan target yaitu **Rp. 251.128.912.750** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 293.750.948.335,36**. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja sebesar **116,97%**. Keseluruhan realisasi penerimaan PAD melebihi target dari yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya PAD Kota Banjarbaru menurun sebesar 9%.

Program yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja di atas adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi tahun sebelumnya dimana capaian kinerja selalu melebihi target, capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **125,08%**, tahun 2021 sebesar **122,86%** dan tahun 2022 sebesar **116,97%**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

Realisasi Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 167 dan tercapai 170,7% sedangkan untuk **target Nasional tidak ada**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melakukan pemuthakiran data dan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- b. Melakukan pemasangan alat perekam transaksi.
- c. Pengembangan pelayanan pajak online.
- d. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
- e. Meningkatkan manajemen pengelolaan pajak daerah.
- f. Meningkatkan Sumber daya manusia pada aparaturnya pajak daerah dan Wajib Pajak.
- g. Melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan monitoring terhadap wajib pajak dan calon wajib Pajak.



Hambatan

- a. Kurang optimalnya penagihan/koordinasi dengan Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah;
- b. Pemungutan pajak belum mencerminkan nilai riil sesungguhnya karena transaksi pembayaran tidak semua transaksi menggunakan bukti bayar;
- c. Kurang jujurnya Wajib Pajak melaporkan hasil usahanya;
- d. Kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak yang dipasang alat perekam transaksi online (tapping box, cro, tapping printer)
- e. Kegiatan sosialisasi penyuluhan belum maksimal dan tepat sasaran terhadap Wajib Pajak khususnya calon Wajib Pajak baru yang baru membuka usaha.
- f. Penegakan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak masih belum tegas karena aturan yang mengatur pemberian sanksi belum bisa mengakomodir BPPRD melakukan tindakan penutupan kepada Wajib Pajak yg melanggar.
- g. Objek pajak reklame banyak yang terpasang dahulu dan baru dibayarkan setelah di tagihkan;
- h. Kurangnya kolaborasi serta kerjasama dengan aparaturnya kecamatan dan kelurahan dalam hal penyampaian SPPT PBB-P2 dan pemutakhiran data.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah
Ekstensifikasi pendapatan pajak daerah pajak dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah baru. Untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.
- b. Intensifikasi Pendapatan Pajak Daerah
Intensifikasi pendapatan pajak daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan



perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada.

Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, untuk piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.

c. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

Kendala yang dihadapi saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya penilai pajak dan juru sita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap Diklat, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan forum-forum lainnya.

Modernisasi sistem aplikasi serta administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.



5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.67.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	109,94	92,10	17,84
		Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	113,04	92,10	20,94
		Rasio PAD terhadap APBD Deviasi	30,59	92,10	-61,51
		Realisasi PAD terhadap APBD	89,02	92,10	-3,08

Sumber: Data DPPRD Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya IKU
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68
Realisasi Anggaran Program Peningkatan PAD Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.277.967.250	3.939.999.214	92,1
Jumlah		4.277.967.250	3.939.999.214	92,1

Sumber: Data DPPRD Kota Banjarbaru

MISI	2	: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	7	: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah
INDIKATOR KINERJA	11	: Peningkatan Investasi Daerah (Milyar)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-



permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Tantangan pembangunan penanaman modal/investasi yang nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan sektor ekonomi atau investasi yang harus diikuti dengan pelayanan yang semakin baik. Sementara ketersediaan lahan peruntukan investasi sektor riil terutama perdagangan dan jasa, industri dan perumahan/properti akan yang semakin terbatas, bersaing dengan upaya mempertahankan kemampuan kecukupan dan ketahanan pangan yang juga membutuhkan lahan yang cukup. Sedangkan tantangan pelayanan terpadu yang nyata adalah semakin meningkatnya keinginan dunia usaha atas pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah, praktis, pasti dan transparan sedangkan regulasi dan kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan yang masih sangat terbatas. Tantangan tersebut tentu tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan peradaban yang semakin maju, yang saat ini dikuasai oleh teknologi informasi yang serba digital.

Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan penanaman modal/ investasi dan pelayanan terpadu satu pintu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu ditetapkan indikator sasaran. Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi yaitu meningkatnya nilai investasi daerah.

Tabel 2.69
Data Realisasi Peningkatan Investasi Daerah 2021 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	% Peningkatan Investasi Daerah
1	Nilai Investasi Daerah	146.755.600.000	645.930.580.000	340,14%

Jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1:

$$\text{Peningkatan Investasi Daerah} = n - (n - 1)$$

$$\text{Peningkatan Investasi Daerah} = \text{Rp. } 645.930.580.000 - \text{Rp. } 146.755.600.000$$

$$\text{Peningkatan Investasi Daerah} = \text{Rp. } 499.174.980.000$$



Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa jumlah peningkatan investasi daerah sebesar Rp. 499.174.980.000 dengan persentase sebesar 340.14%.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.70

Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah Tahun 2022

No	Program	Uraian	2022
1	Program Pengembangan Iklim Pengembangan Modal	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 645.930.580.000
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	33 Investor
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal Yang Melaksanakan Kegiatan Investasi Sesuai Ketentuan	60,98%
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Terbaru (<i>up to date</i>)	100%

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Gambar 2.6

Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2022

PMA

	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	4	8.540,9
Industri Kimia Dan Farmasi	2	2.053,2
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	1.834,7
Perdagangan dan Reparasi	3	21,9
Hotel dan Restoran	1	0,0
Jasa Lainnya	3	0,0
Industri Makanan	3	0,0
Pertambangan	1	0,0
Total	18	12.450,7

PMDN

	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Pertambangan	10	210.649,4
Perdagangan dan Reparasi	103	112.369,2
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	11	100.263,7
Jasa Lainnya	21	27.923,4
Hotel dan Restoran	11	5.971,1
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	4.614,5
Konstruksi	3	1.635,1
Industri Makanan	5	1.486,6
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	1.120,0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1	818,8
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	411,2
Kehutanan	1	0,0
Industri Kayu	1	0,0
Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0
Industri Karet dan Plastik	2	0,0
Industri Mineral Non Logam	1	0,0
Total	180	467.263,0

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru



Tabel. 2.71
Realisasi Nilai Investasi Daerah Kota Banjarbaru

	Nilai Realisasi Investasi (US\$)	Nilai Realisasi Investasi (Rupiah)
PMA	US\$ 12.450.700 *	Rp. 178.667.580.000
PMDN		Rp. 467.263.000.000
TOTAL		Rp. 645.930.580.000

*Kurs: Rp. 14.350

Realisasi Nilai Investasi Daerah Kota Banjarbaru berhasil melampaui target yang telah ditentukan di RPJMD sebesar 4%, dimana nilai tersebut meningkat dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp. 146.755.600.000 menjadi Rp. 645.930.580.000 pada tahun 2022 atau sebesar 340,14%.

Peningkatan pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata yang sangat signifikan ini disebabkan oleh kembalinya aktifitas pariwisata yang sempat menurun pertumbuhannya di masa pandemi covid-19.

Berkenaan sasaran strategis Pemerintah Kota Banjarbaru untuk peningkatan investasi daerah ada beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Capaian program pengembangan iklim penanaman modal yaitu meningkatnya nilai realisasi investasi dengan indikator keluaran jumlah kebijakan daerah tentang pemberian insentif yang ditetapkan, jumlah kajian peta potensi investasi dan peluang usaha dan jumlah rencana umum penanaman modal yang tersusun. Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota merupakan pelaksanaan tupoksi Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Pelaksanaan kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota merupakan cara yang efektif untuk menarik minat investor agar mau melakukan investasi di Kota Banjarbaru sehingga menyebabkan peningkatan Nilai Realisasi investasi yang merupakan indikator dari tercapainya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.



Tabel 2.72
Data Nilai Realisasi Investasi Tahun 2020 - 2022

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Rp. 88.715.880.000	Rp. 146.755.600.000	Rp. 645.930.580.000

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Untuk tahun 2022 Nilai Realisasi Investasi ditargetkan sebesar Rp. 130.000.000.000 (Seratus tiga puluh milyar rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 645.930.580.000 (Enam ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdapat peningkatan Nilai Realisasi Investasi yaitu sebesar 496,86 % dari target tahun 2022, hal tersebut diakibatkan oleh Adanya perubahan sistem OSS RBA yang mengintegrasikan system pelaporan dengan system perizinan sehingga memudahkan investor untuk melaporkan realisasi investasi, Adanya Peningkatan pengawasan DPMPTSP Kota Banjarbaru kepada perusahaan yang belum pernah melaporkan realisasi investasinya dan Semakin membaiknya iklim investasi setelah pandemi covid 19, sehingga para investor asing (PMA) meningkatkan penanaman modalnya di Kota Banjarbaru.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Capaian program promosi penanaman modal yaitu meningkatnya investor baru dengan indikator keluaran jumlah dokumentasi hasil kegiatan promosi penanaman modal kab/kota dan hasil peningkatan penyelenggaraan promosi penanaman modal. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan TUPOKSI Bidang Perencanaan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan bagian dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal merupakan salah satu cara mempromosikan daerah untuk meningkatkan daya jual suatu daerah kepada calon investor agar tertarik untuk berinvestasi.

Tabel 2.73
Data Realisasi Investor Tahun 2020, 2021 dan 2022

No.	2020	2021	2022
1	18 Investor	22 Investor	33 Investor

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru



Untuk tahun 2022 target investor sebanyak 22 investor dan realisasi sebanyak 33 investor. Terdapat peningkatan jumlah investor dari tahun ke tahun yaitu persentase kenaikan jumlah investor tahun 2022 sebanyak 50% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Letak strategis posisi Kota Banjarbaru yang berada di tengah jalur lintasan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Infrastruktur dan Kawasan di Kota Banjarbaru sudah tertata dengan baik.
- c. Memiliki Kawasan/lahan yang bisa dikembangkan.
- d. Banjarbaru telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IKM) tertinggi Se Kalimantan Selatan.
- f. Keberadaan Bandara Syamsudin Noor yang ada di Banjarbaru dan dekat dengan Pelabuhan peti kemas dan penumpang trisakti.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator persentase penanaman modal yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan. Keluaran dari program ini adalah berupa jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dengan hasil yaitu peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal merupakan pelaksanaan TUPOKSI Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal ditujukan agar penanam modal melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.74
Data Pencapaian Penanam Modal yang Melaksanakan
Kegiatan Investasi Sesuai Ketentuan Tahun 2022

Tahun 2022	Target	Realisasi
	77,00%	60,98%

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Dari tabel di atas, dari target yang ada sebanyak 77,00%, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan dalam artian



melaporkan LKPM setiap semester maupun triwulan hanya sebanyak 60,98%.

Hal ini disebabkan karena:

- 1) Belum optimalnya penyampaian informasi kepada pelaku usaha.
- 2) Sebagian besar perusahaan cabang tidak diberikan akses oleh perusahaan pusat dalam akun perizinan berusaha.

d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota yang terwujud dalam program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal juga terdiri dari salah satunya sub kegiatan pengelolaan, penyajian, pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Kegiatan ini menghasilkan tersedianya dokumen data perizinan terbaru (*up to date*) untuk diolah, dikaji, dan dimanfaatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarbaru. Adapun hasil dari kegiatan diharapkan:

- 1) Dokumen data perizinan.
- 2) Sasaran dari terlaksananya kegiatan ini adalah meningkatnya mutu pelayanan dan terpenuhinya harapan masyarakat dalam rangka pengurusan perizinan di Kota Banjarbaru.
- 3) Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermutu dan berkarakter dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan target Banjarbaru berkarakter, Banjarbaru melayani, Banjarbaru bisa bisa sesuai visi dan misi Wali Kota Banjarbaru.

Metode yang digunakan dalam memperoleh data tersebut dengan mengambil secara langsung melalui aplikasi perizinan Intan bjb serta dari sistem Online Single Submission (OSS) dan SIMBG.

Tabel 2.75
Persentase Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Tahun 2022	Target	Realisasi
	100%	100%

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru



Berdasarkan tabel di atas, proses pengolahan data dan sistem informasi dapat dilaksanakan sesuai target dan telah tercapai 100% sampai akhir tahun 2022.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.76
Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah
2 Tahun Terakhir

No	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 146.755.600.000	Rp. 645.930.580.000
2	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Investor Baru	Jumlah Investor Baru	22 Investor	33 Investor
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal Yang Melaksanakan Kegiatan Investasi Sesuai Ketentuan	-	60,98%
4	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	100%

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020 tidak ada datanya karena IKU Nilai Investasi Daerah belum dipergunakan untuk IKU Kota. Pada pelaksanaannya, pada tahun 2019 dan 2020 perhitungan investasi masih menggunakan **Rencana Investasi**, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 telah menggunakan **Realisasi Investasi**.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

Tabel 2.77
Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Investasi Daerah
dengan Target RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional (Provinsi)
1.	Peningkatan Investasi Daerah	Rp. 645.930.580.000	Rp. 112.254.649.398	Rp. 216.600.000.000

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Membuat kajian mengenai peta potensi investasi di wilayah kota banjarbaru, sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi kepada investor mengenai potensi investasi yang ada di kota banjarbaru dan juga mengakomodasi potensi unggulan daerah yang dapat dijadikan peluang daerah nya dalam menarik minat investasi.
- b. Melakukan pembuatan video promosi investasi, mengadakan dan mengikuti pameran promosi investasi, menyusun bahan promosi, mengadakan sosialisasi promosi investasi, mendorong terjalinnya kemitraan investasi, dan melakukan promosi lewat website sipelangi yang di dalamnya terdapat sarana informasi yang dapat dengan mudah di akses oleh investor.
- c. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dengan mengutamakan materi seputar pelaporan lkpm. Selain itu dilakukan juga kegiatan pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM.
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola data & memastikan penarikan data dilakukan setiap bulan dengan akurat.

Hambatan

- a. Masih ditemukan banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh pada capaian nilai realisasi investasi.
- b. Adanya pandemi covid serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (ppkm) mengakibatkan tidak terealisasinya kegiatan promosi seperti FGD, sosialisasi serta pameran.



- c. Alamat kantor dari pelaku usaha yang kadang tidak sesuai dengan data perizinannya, kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya, tidak hadirnya pelaku usaha dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan, dan kurangnya sdm dalam melaksanakan kegiatan.
- d. Gangguan pada sistem pusat (OSS dan SIMBG) sehingga penarikan data dapat tertunda hingga sistem dapat diakses kembali.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Melakukan sosialisasi/bimtek mengenai tata cara pengisian LKPM melalui sistem OSS sehingga para pelaku usaha mengerti dan paham mengenai hal tersebut.
- b. Melakukan kegiatan promosi dengan media digital.
- c. Melakukan penyusunan potensi investasi sebagai bahan untuk promosi
- d. Membuat jadwal kegiatan yang lebih terorganisir, membuat draft informasi yang lebih lengkap serta mudah dipahami.
- e. Melaporkan ke Help Desk masing-masing sistem pusat tersebut (OSS dan SIMBG).

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah berhubungan erat dengan produktifitas, pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efesiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang minimal.

Tabel 2.78
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efesiensi
1	Program Pengembangan Iklim Pengembangan Modal	Nilai realisasi investasi	496,86	93,58	403,28
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor baru	137,5	93	44,5
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang melaksanakan kegiatan	60,98	66,8	-5,82



No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
		investasi sesuai ketentuan			
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	100	99,6	0,4

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 2.79
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU
Peningkatan Investasi Daerah Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Iklim Pengembangan Modal	185.000.000	173.118.900	93.58
2	Program Promosi Penanaman Modal	354.040.000	329.840.160	93.2
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	369.695.000	246.883.496	66.8
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	235.400.000	234.400.000	99.6

Sumber: Data DPMPTSP Kota Banjarbaru

MISI	2	: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
SASARAN STRATEGIS	8	: Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran
INDIKATOR KINERJA	12	: Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Angka Kemiskinan

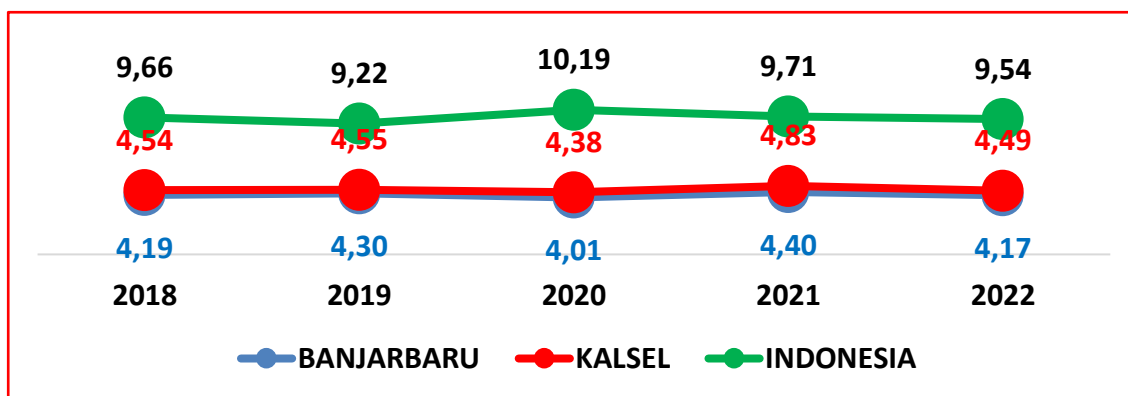


adalah jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan harga barang makanan dan non makanan. Indikator kinerja angka kemiskinan dipilih dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang masih memiliki kesejahteraan yang rendah. Capaian indikator kinerja angka kemiskinan diukur berdasarkan perhitungan Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%.

Persentase Angka Kemiskinan

Persentase kemiskinan adalah ukuran persentase penduduk miskin terhadap total penduduk suatu wilayah. Perkembangan presentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru adalah sebesar 4,19%, meningkat 0,11 poin menjadi 4,30% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sempat turun signifikan sebesar 0,29 poin menjadi sebesar 4,01%, namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,39 poin menjadi 4,40%. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar **0,23** poin menjadi sebesar **4,17%**. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia. Secara lengkap perbandingannya dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.7. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2018-2022

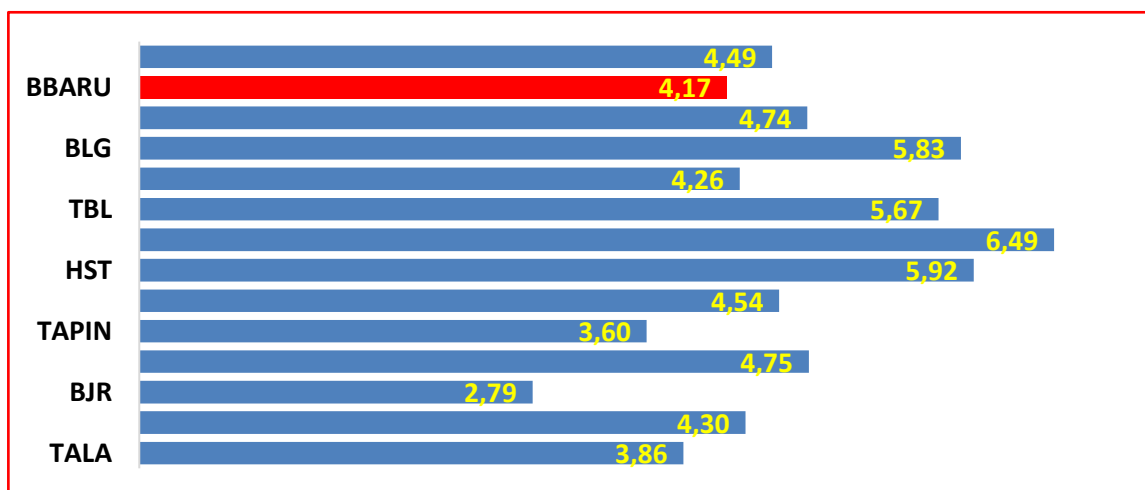


Berdasarkan data BPS (per September 2022), Kota Banjarbaru merupakan daerah dengan **peringkat ke-4** dengan persentase penduduk miskin terendah diantara Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Banjar (2,79%), Kabupaten Tapin (3,60%), dan Kabupaten Tanah Laut (3,86%).



Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

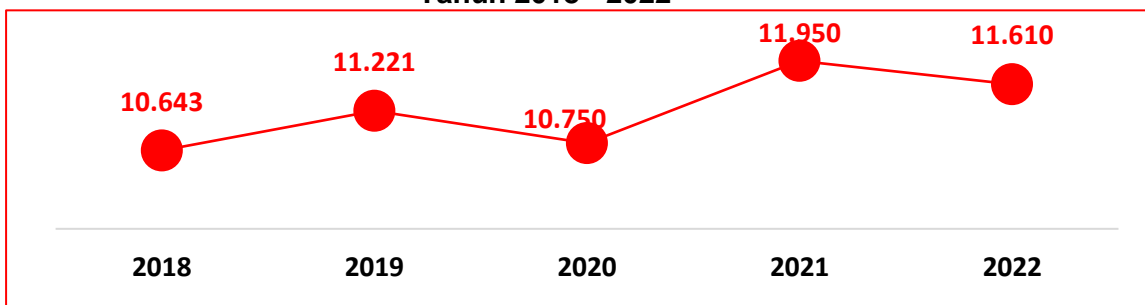
Gambar 2.8.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022



Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu berfluktuasi. Secara kumulatif, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru meningkat sebanyak 967 jiwa dari sebanyak 10.643 jiwa pada tahun 2018 menjadi sebanyak 11.610 jiwa pada tahun 2022 yang berarti terjadi peningkatan rata-rata sebanyak 193,4 jiwa setiap tahun. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini.

Gambar 2.9.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Banjarbaru
Tahun 2018 - 2022

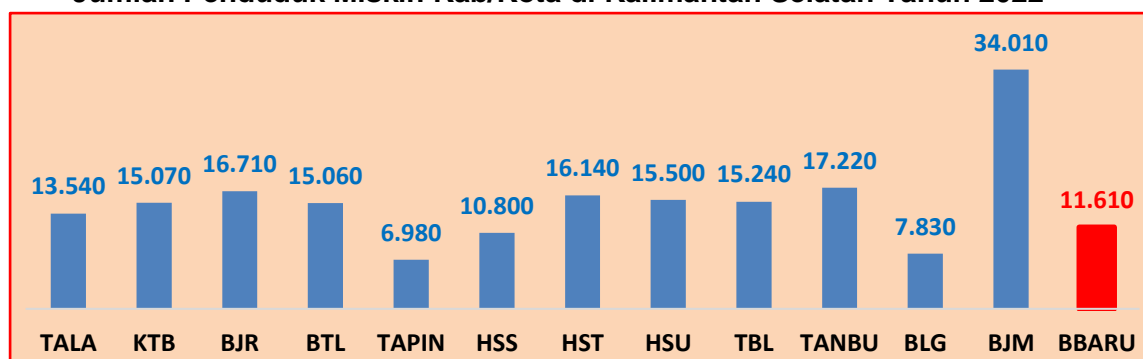


sebanyak 11.610 jiwa, menurun sebanyak 340 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 yang mencapai sebanyak 11.950 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Kota Banjarbaru menempati urutan ketiga daerah



dengan penduduk miskin terendah setelah Kabupaten Tapin (6.980 jiwa) dan Kabupaten Balangan (7.830 jiwa). Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.10.
Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2022



Pendukung Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Menurunnya Kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2022 didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. (LK3) dapat berperan aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

- PSM dan TKSK perpanjangan tangan dalam hal mendata/menjaring keluarga.
- Karang Taruna berperan dalam hal pengembangan kegiatan untuk dapat usaha ekonomi produktif dengan melibatkan anggota Karang Taruna dan masyarakat tidak mampu.
- LK3 berperan dalam hal penanganan kemiskinan lebih banyak memberikan saran, pendapat serta solusi atas permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi misalnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT, anak terlantar dll).

2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini melaksanakan kegiatan memberikan pendampingan dan pelayanan dan kepada orang terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),



lansia terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Banjarbaru dan ditampung sementara di rumah singgah serta pemulangan orang terlantar ke tempat tinggal asalnya.

Program Rehabilitasi Sosial ini juga melaksanakan Program JUARA Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu Program HOMECARE bidang sosial yaitu:

- a. Penyediaan permakanan (sembako) kepada lansia dan penyandang disabilitas.
- b. Memberikan bantuan makanan siap saji kepada penyandang disabilitas dan lansia terlantar.
- c. Pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas berupa kursi roda dan tongkat.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Program ini juga untuk menjamin fakir miskin, anak terlantar dan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial ekonomi agar terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Program Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial RI yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Bantuan Program Sembako dari APBD Kota Banjarbaru.

Dalam hal Penanganan kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarbaru bersama SKPD terkait yaitu:

- Bappeda
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Disdalduk, KBPMPPA
- Dinas Koperasi UKM dan Naker
- Dinas Perdagangan
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Dinas Perumahan dan Pemukiman
- Dinas PUPR



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja Angka Kemiskinan diukur berdasarkan perhitungan **Jumlah Penduduk miskin dibagi Jumlah seluruh penduduk (proyeksi BPS) dikalikan 100%** (dengan perincian jumlah penduduk miskin 11.610 jiwa dibagi jumlah seluruh penduduk 278.417 jiwa dikali 100% = 4,17%).

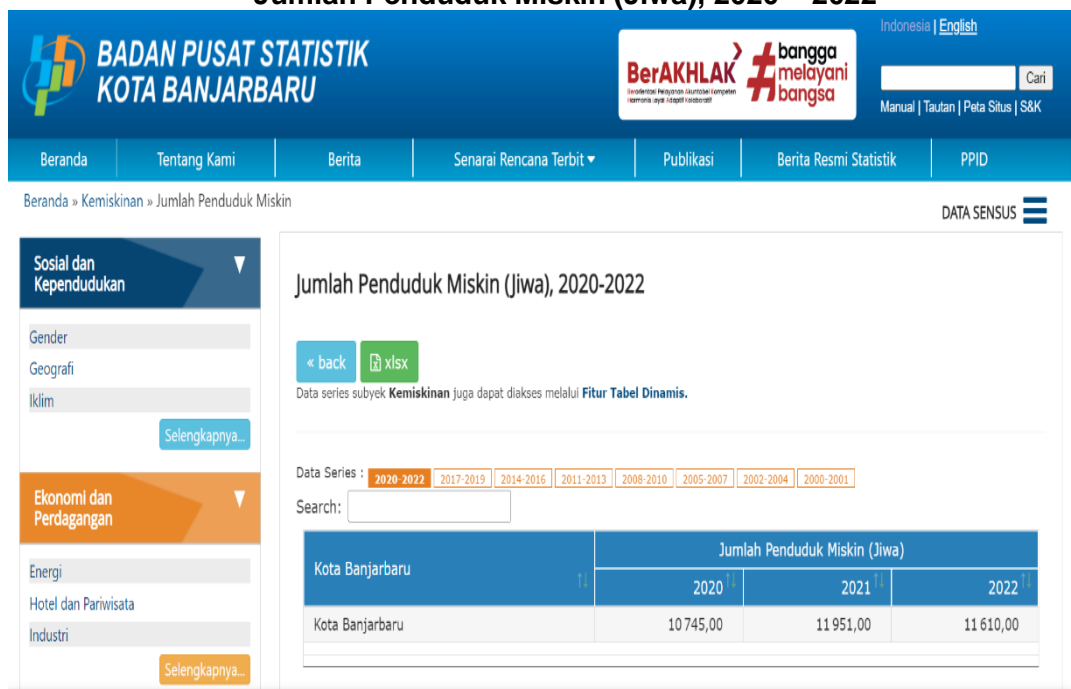
Tabel 2.80
Realisasi Capaian Kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	%	4,50	4,17	107,33%

Sumber: BPS Kota Banjarbaru 2022

Capaian Angka kemiskinan (persentase penduduk miskin) Kota Banjarbaru pada tahun 2022 adalah sebesar **4,17%**, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar **4,40%**. Capaian keberhasilan menurunkan angka kemiskinan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah sebesar **105%**.

Gambar 2.11.
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2020 – 2022



tang di Website Resmi BPS Kota Banjarbaru. Publikasi yang sudah rilis dapat di download pada menu publikasi. Untuk informasi lebih lanjut

Sumber: BPS Kota Banjarbaru

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.81
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Kemiskinan
2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka Kemiskinan	4,01% 100%	4,40% 102,22%	4,17% 105%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Banjarbaru mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 0,23 poin dari capaian tahun 2020 sebesar **4,01%** menjadi **4,40%** pada tahun 2021 dan **4,17%** pada tahun 2022. Dari sisi realisasi kinerja capaian ini mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 realisasi kinerja adalah sebesar **102,22%** meningkat menjadi **105%** pada tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Nasional

Tabel 2.82
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Kemiskinan dengan
Target Jangka Menengah dalam RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Target RPJMD tahun 2022	Target Nasional
1	Angka Kemiskinan	4,17	4,40	9,71

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Jika dibandingkan dengan target dan capaian persentase penduduk miskin (angka kemiskinan), maka angka kemiskinan Kota Banjarbaru sangat jauh berada di bawah angka kemiskinan target dan realisasi angka kemiskinan nasional. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kota Banjarbaru sebesar **4,17%**, 2 (dua) kali lipat lebih rendah dari target nasional yakni **9,71%** dan capaian nasional sebesar **9,54%**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya–Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya–upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah:



- a. Melaksanakan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
- b. Melaksanakan Program Jaminan Sosial baik berupa Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sembako.
- c. Memberikan bantuan Makanan Siap Saji bagi Lansia dan Disabilitas

1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data Induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 251/HUK/2022 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tanggal 16 Desember 2022 tersaji di bawah ini:

Tabel 2.83
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2022

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Individu
1.	Kecamatan Banjarbaru Utara	9.244
	Kelurahan Komet	690
	Kelurahan Loktabat Utara	4.025
	Kelurahan Mentaos	1.740
	Kelurahan Sungai Ulin	2.789
2.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	11.350
	Kelurahan Guntung Paikat	2.216
	Kelurahan Kemuning	3.180
	Kelurahan Sungai Besar	3.700
	Kelurahan Loktabat Selatan	2.254
3.	Kecamatan Landasan Ulin	18.034
	Kelurahan Guntung Payung	3.054
	Kelurahan Guntung Manggis	7.408
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	2.865
	Kelurahan Syamsudin Noor	4.707
4.	Kecamatan Liang Anggang	13.359
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	2.273
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	2.500
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	3.300
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	5.286



No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Individu
5.	Kecamatan Cempaka	18.641
	Kelurahan Cempaka	8.610
	Kelurahan Bangkal	4.286
	Kelurahan Sungai Tiung	2.702
	Kelurahan Palam	3.043
	Null	8.351
	Total	78.979

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2022.

2) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan PKH diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Keluarga Penerima Manfaat PKH didorong untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial serta didampingi untuk mendapatkan bantuan komplementer secara berkelanjutan. Sinergi antara Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

a. Tujuan PKH

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.



b. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:

1. Komponen Kesehatan

a. Ibu hamil/nifas/menyusui

b. Anak Usia Dini

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

a. Lanjut Usia diatas usia 60 tahun.

b. Penyandang Disabilitas Berat.

Tabel 2.84
Indeks Bantuan Sosial PKH

No.	Faktor Penimbang	Indeks/ Tahun (Rp)	Indeks/ 3 bulan (Rp)
1.	Kategori Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Kategori Anak Usia 0 s.d 6 Tahun	3.000.000	750.000
3.	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	900.000	225.000
4.	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	1.500.000	375.000
5.	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	2.000.000	500.000
6.	Kategori Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
7.	Kategori Lanjut Usia	2.400.000	600.000

Sumber: Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 9/3/Bs.02.01/2/2022 tanggal 16 Februari 2022

a. Jumlah KPM PKH Kota Banjarbaru Tahun 2022

Tabel 2.85
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Kota Banjarbaru
Tahun 2022 (Tahap 4)

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah KPM
1.	Kecamatan Banjarbaru Utara	580
	Kelurahan Komet	41
	Kelurahan Loktabat Utara	250
	Kelurahan Mentaos	114
	Kelurahan Sungai Ulin	175
2.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	776



No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah KPM
	Kelurahan Guntung Paikat	155
	Kelurahan Kemuning	206
	Kelurahan Sungai Besar	267
	Kelurahan Loktabat Selatan	148
3.	Kecamatan Landasan Ulin	1.322
	Kelurahan Guntung Payung	174
	Kelurahan Guntung Manggis	450
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	386
	Kelurahan Syamsudin Noor	311
	Null	1
4.	Kecamatan Liang Anggang	830
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	176
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	222
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	166
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	266
5.	Kecamatan Cempaka	1.954
	Kelurahan Cempaka	612
	Kelurahan Bangkal	310
	Kelurahan Sungai Tiung	769
	Kelurahan Palam	263
	Total	5.462

Sumber: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Tahun 2022

b. Bantuan Program Sembako / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

c. Nilai Bantuan

Nilai Bantuan Program Sembako sebesar Rp.200.000-/ bulan/Keluarga Penerima Manfaat.

d. Bahan Pangan

Bantuan yang diberikan berupa beberapa jenis bahan pangan yang terdiri dari:

- 1) Karbohidrat (beras, jagung pipilan, sagu)
- 2) Protein Hewani (telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar)



- 3) Protein Nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe)
- 4) Sumber Vitamin & Mineral (Sayur Mayur, Buah-buahan)

e. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2022

Tabel 2.86
Jumlah KPM Program Sembako di Kota Banjarbaru Tahun 2022

No.	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah KPM
1.	Kecamatan Banjarbaru Utara	502
	Kelurahan Komet	47
	Kelurahan Loktabat Utara	264
	Kelurahan Mentaos	139
	Kelurahan Sungai Ulin	152
2.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	765
	Kelurahan Guntung Paikat	159
	Kelurahan Kemuning	196
	Kelurahan Sungai Besar	259
	Kelurahan Loktabat Selatan	151
3.	Kecamatan Landasan Ulin	1.849
	Kelurahan Guntung Payung	213
	Kelurahan Guntung Manggis	630
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	571
	Kelurahan Syamsudin Noor	435
4.	Kecamatan Liang Anggang	1.133
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	199
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	290
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	319
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	457
5.	Kecamatan Cempaka	2.177
	Kelurahan Cempaka	775
	Kelurahan Bangkal	373
	Kelurahan Sungai Tiung	919
	Kelurahan Palam	360
	Total	6.908

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Banjarbaru Tahun 2022



Hambatan

- Penduduk miskin dan tidak mampu masih ada yang belum memiliki NIK yang valid.
- Penduduk miskin dan tidak mampu tinggal berpindah-pindah (tidak memiliki tanah sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah).

Rencana Tindak Lanjut

- Membantu penduduk miskin dan tidak mampu agar memiliki KTP-EI dan NIK yang valid
- Mengusulkan penduduk miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan bantuan, baik itu berupa program jaminan sosial atau program pemberdayaan sosial.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.87 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	100	90,57	9,43
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	87,04	12,96
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100	88,73	11,27
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat			



B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Angka Kemiskinan tahun 2022 sebesar **Rp. 2.637.991.000** terealisasi sebesar **Rp. 2.316.774.356** atau **87,82%** dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel 2.88
Realisasi Anggaran Program Penunjang Angka Kemiskinan
Tahun 2022

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	147.600.250	133.688.750	90,57
2	Program Rehabilitasi Sosial	1.573.032.750	1.369.131.450	87,04
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	917.358.000	813.954.156	88,73
	Total	2.637.991.000	2.316.774.356	87,82

MISI	2	: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	8	: Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran
INDIKATOR KINERJA	13	: Angka Pengangguran

Sasaran Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran dengan indikator kinerja Angka Pengangguran dipilih dengan maksud untuk menggambarkan perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja ditingkat Pemerintah Kota Banjarbaru pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Indikator ini menunjukan suatu nilai persentase perbandingan jumlah Penganggur dengan jumlah Angkatan Kerja, penurunan persentase dapat diindikasikan penyerapan tenaga kerja meningkat, tetapi jika persentase meningkat kemungkinan faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya peningkatan jumlah Angkatan Kerja sebagai akibat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.

Menurunnya pengangguran diukur berdasarkan diukur berdasarkan Angka Pengangguran hasil penilaian dari jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikalikan 100.



Capaian kinerja menurunnya kemiskinan dan pengangguran dengan indikator **Angka Pengangguran** adalah **5,47%** dengan capaian kinerja **95,61%** dengan kategori **Baik**.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

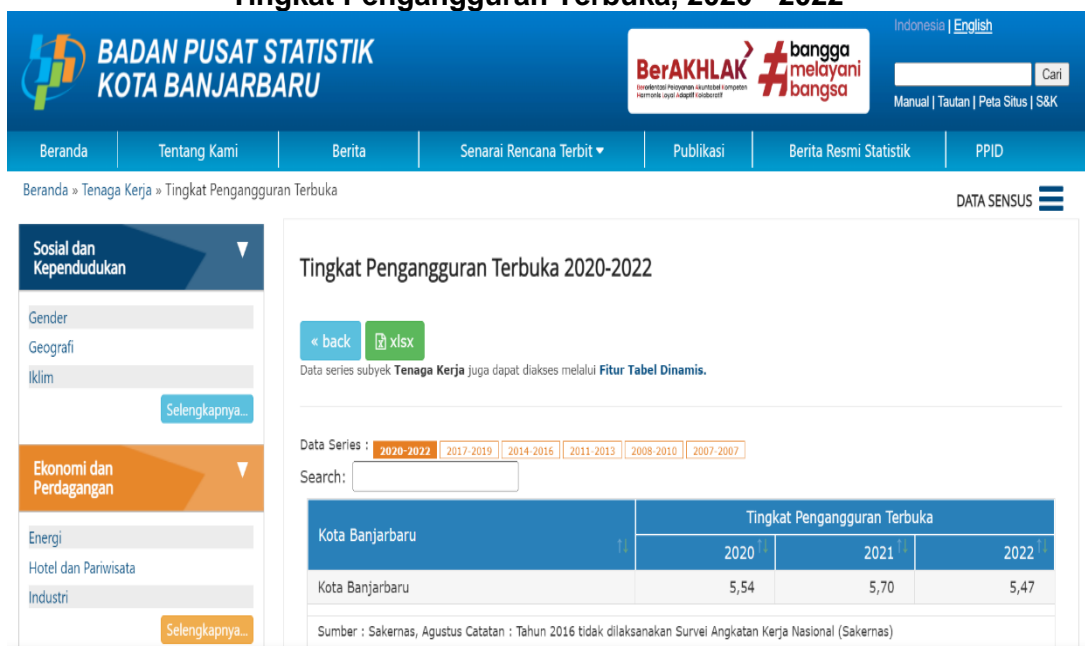
Tabel 2.89
Realisasi Kinerja Angka Pengangguran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Pengangguran	%	5,39	5,47	95,61%

Sumber: Data BPS Kota Banjarbaru

Indikator Angka Pengangguran berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 5,39% telah teralisasi sebesar **5,47%** dengan capaian kinerja sebesar **95,61%** kategori **Baik**.

Gambar 2.12.
Tingkat Pengangguran Terbuka, 2020 - 2022



Sumber: BPS Kota Banjarbaru

Program Pendukung Indikator Angka Pengangguran antara lain:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Capaian program perencanaan tenaga kerja dengan indikator Persentase informasi kebijakan strategis rencana tenaga kerja 5 tahunan Tahun 2022 adalah 100% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 100%.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Capaian program penempatan tenaga kerja dengan indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan Tahun 2022 adalah 7,66% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 5,02%.

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi Tahun 2022 adalah 0,71% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 0,57%.

4. Program Hubungan Industrial

Capaian program hubungan industrial dengan indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan Tahun 2022 adalah 1,54% sedangkan capaian Tahun 2021 adalah 4,09%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.90
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Angka Pengangguran 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Angka Pengangguran	5,54% 100%	5,70% 94,25%	5,47% 95,61%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kab/Kota/Provinsi

Tabel 2.91.
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Pengangguran dengan Kab/Kota/Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab Banjar	Kab Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov Kalsel
1.	Angka Pengangguran	5,47%	2,72%	4,17%	6,96%	4,47%

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Angka pengangguran di Kota Banjarbaru dibandingkan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi sekitar. Angka pengangguran Kota Banjarbaru lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan namun masih rendah dibandingkan dengan Kota Banjarmasin.



4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

Tabel 2.92
Perbandingan Kinerja Angka Pengangguran dengan RPJMD
dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional 2024
1.	Angka Pengangguran	5,47%	4,64%	3,4%

Realisasi angka pengangguran Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah 5,47% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 4,64% dan target nasional untuk wilayah Kalimantan sebesar 3,4%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melaksanakan *Job Fair* atau Bursa Kerja di Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 yang diikuti 20 perusahaan dengan jumlah 392 lowongan pekerjaan.
- b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan berdasarkan link dan match yang berbasis kompetensi untuk pencari kerja di Kota Banjarbaru yang diselenggarakan di kelurahan Palam, Landasan Ulin, Bangkal dan yang diselenggarakan SeKota Banjarbaru.
- c. Melaksanakan sistem online informasi lowongan pasar kerja melalui Karirhub dari Kementerian Ketenagakerjaan dan menginformasikan lowongan melalui media sosial resmi kantor.
- d. Melaksanakan kunjungan perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Banjarbaru untuk kegiatan cek lowongan dan monitoring penempatan.
- e. Melaksanakan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Tahun 2022-2027, dimana setelah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja tersebut Wali Kota Banjarbaru menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

Hambatan

- a. Kesadaran untuk wajib lapor penempatan dari pencari kerja dan perusahaan masih rendah.
- b. Adanya kendala tidak adanya sarana dan prasarana pendukung petugas cek lowongan kerja secara berkala ke perusahaan.



Rencana Tindak Lanjut

Perbaikan kedepan yang akan dilaksanakan:

- Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja di Kota Banjarbaru.
- Memberikan fasilitasi dukungan pelatihan kerja sebagai modal keterampilan kerja.
- Melaksanakan pelayanan AK/I dan informasi lowongan kerja secara online kepada pencari kerja dan pemberi kerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.93
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase informasi kebijakan strategis rencana tenaga kerja 5 tahunan	100	97,96	2,04
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi	118,33	97,71	2,29
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	238,63	95,55	4,45
4.	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan	36,67	73,00	-

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran menurunnya angka pengangguran tahun 2022 sebesar **Rp. 1.215.982.500,00** sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.138.487.080,00** sebesar atau **93,63%** dengan rincian per program sebagai berikut:



Tabel 2.94
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU Angka Pengangguran Tahun 2022

No	Program	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp.51.500.000	Rp.50.447.330	97,96
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.840.883.000	Rp.821.613.000	97,71
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.133.900.000	Rp.127.939.000	95,55
4.	Program Hubungan Industrial	Rp.189.699.500	Rp.138.487.750	73,00
Jumlah		Rp. 1.215.982.500	Rp. 1.138.487.080	93,63

MISI	2	: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	9	: Meningkatnya Stabilitas Ketersediaan Pangan
INDIKATOR KINERJA	14	: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya stabilitas pangan masyarakat dengan Indikator skor PPH ketersediaan Pangan berdasarkan target yang ditentukan yaitu 80,45 telah terealisasi 84,76. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerjanya sebesar 105,35% dengan kategori Sangat Baik.

PPH diukur berdasarkan kelompok pangan yang tersedia di kota Banjarbaru dengan hasil pengukuran skor PPH ketersediaan Pangan, dapat di pada sajian tabel laporan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.95
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	1.278	53,3	0,5	26,6	25,0	25,0	+
2.	Umbi-umbian	100	4,2	0,5	2,1	2,1	2,5	-
3.	Pangan Hewani	274	11,4	2,0	22,8	22,8	24,0	-
4.	Minyak dan Lemak	397	16,5	0,5	8,3	5,0	5,0	+
5.	Buah/biji berminyak	39	1,6	0,5	0,8	0,8	1,0	-
6.	Kacang-kacangan	81	3,4	2,0	6,7	6,7	10,0	-
7.	Gula	140	5,8	0,5	2,9	2,5	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	95	4,0	5,0	19,9	19,9	30,0	-
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	2.403	100,1		90,1	84,76	100,0	

Program yang mendukung IKU Kota pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya makanan setiap hari diharapkan masyarakat tidak hanya beras atau nasi saja yang harus dikonsumsi tetapi ada jenis makanan yang sumber energinya sama dengan nasi. Setiap daerah mempunyai produk makanan lokal masing-masing, yang umum diketahui adalah jenis ubi-ubian yang mengandung nilai karbohidrat yang cukup bagi manusia. Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun relatif dari suatu pola dari ketersediaan atau konsumsi pangan. FAO-RAFA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Dengan pendekatan PPH, mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari score pangan (dietary score) yang dikenal dengan skor PPH. Semakin tinggi score PPH konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Skor PPH Konsumsi Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah 91,70 lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 92,2, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.96.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (kali)	Realisasi (kali)	Capaian (%)
PPH Konsumsi	90,25	91,70	101,60

Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan target 90,25 dan realisasi 91,70 ini menunjukkan bahwa warga Kota Banjarbaru sudah melaksanakan pola makan “Beragam Bergizi Seimbang dan Aman” (B2SA).

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Keamanan pangan (*food safety*) tidak terpisahkan dari ketahanan pangan yang tertuang dalam Deklarasi Roma tahun 1992 disampaikan Badan PBB yang menangani masalah pangan dan kesehatan (FAO/WHO). Pangan yang aman harus diperoleh dengan memenuhi kriteria cukup bergizi dan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar dimasyarakat merupakan tugas pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) baik sebelum beredar di pasaran (pre market) maupun yang sudah beredar di pasaran (post market).

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan adalah:

- Meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan segar
- Tersedianya data keamanan pangan segar terkait residu pestisida, cemaran mikroba dan cemaran bahan berbahaya lainnya.
- Tersedianya informasi keamanan pangan segar.



Tabel 2.97
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (kali)	Realisasi (kali)	Capaian (%)
Jumlah Uji Sampel	70	91,44	130,62

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi protein hewani masyarakat Kota Banjarbaru. Indikator kinerja adalah jumlah produksi perikanan budidaya (ton) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah produksi	399,55	449,95	112,61

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi yang dicapai pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan capaian 112,61%, hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan produksi perikanan budidaya meningkat adalah:

1. Tingginya permintaan ikan;
2. Dukungan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupa bantuan benih maupun bantuan teknologi budidaya, puga peningkatan SDM penyuluh perikanan;
3. Banyaknya tempat usaha dengan produksi olahan ikan;
4. Hubungan baik yang terjalin antara stakeholder.

d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Untuk meningkatkan sumber daya kelautan dan perikanan di Kota Banjarbaru upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat bekerja sama



dengan pemerintah Kota Banjarbaru adalah menambah volume penebaran bibit ikan di danau, kolam, sungai yang ada di wilayah Banjarbaru, dengan harapan meningkatkan produksi perikanan tangkap. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menambah pendapatan masyarakat khususnya pembudidaya ikan air tawar, target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah produksi	35,05	101,20	288,70

Dari tabel tersebut terlihat jumlah realisasi 101,20ton jauh lebih tinggi dari target yang hanya 35,05 ton, ini menunjukkan perikanan tangkap di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang signifikan.

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi dari hasil produksi pertanian dan perikanan adalah pengolahan hasil yang tidak hanya bisa dikonsumsi segar tapi juga dikonsumsi dalam bentuk olahan dengan merubah rasa dan bentuknya. Sehingga dapat merubah selera /keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi produk pertanian olahan. Produk olahan pertanian dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak.

f. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peternakan

Salah satu faktor yang berperan penting dalam upaya meningkatkan produksi baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, juga produksi peternakan, yang mencakup tersedianya bibit unggul, pupuk tanaman dan pakan ternak, serta alat-alat mesin pertanian (alsintan) adalah sarana pertanian yang biasa disebut saprodi (sarana produksi pertanian). Untuk mengukur indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produksi tanaman pangan (ton) khususnya tanaman padi, dengan rumus:



Produksi = luas panen x Produktivitas.

Tabel 2.100
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022		
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Jumlah Produksi Tanaman Pangan	6.943,81	4.525,98	65,88

Tabel tersebut menunjukkan indikator kinerja jumlah produksi tanaman pangan khususnya padi pada tahun 2022 dengan target 6.943,81ton, realisasinya 4.525,98ton dengan capaian 65,88%.

g. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian, salah satu yang perlu disiapkan adalah menyediakan prasarana pertanian.

h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Sektor peternakan merupakan unggulan di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarbaru terus didorong dan dikembangkan sehingga mampu menjadi daerah penyedia ternak bagi daerah lain. Berbagai upaya dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan produksi ternak diantaranya dengan menambah sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan diantaranya dengan membangun klinik kesehatan hewan ternak, unit pelaksana teknis balai pembibitan ternak. Untuk mengukur sasaran indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah populasi ternak (ekor).

Tabel 2.101
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Uraian Kinerja		
	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
Jumlah Populasi	2.851.000	2.854.153	99,88



Realisasi kinerja tahun 2022 dengan jumlah populasi 2.854.153 ekor mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2021 dengan jumlah populasi 2.832.443 ekor.

Tabel 2.102
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
Jumlah Populasi Ternak	2.820.347	101,93	2.832.443	100,32	2.854.153	99,88

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun jumlah produksi ternak mengalami peningkatan dari 2020 sampai tahun 2022 walaupun secara persentase mengalami penurunan karena target tiap tahun angkanya juga dinaikkan. Sejak munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) distribusi/pengiriman hewan ternak khususnya ternak besar mengalami penurunan.

i. Persentase Jumlah Poktan yang Naik Kelas /Score.

Peningkatan kelembagaan penyuluh dan petani menjadi sangat penting dan dipilih karena sumber day apenyuluh dan petani merupakan salah satu ujung tombak agar produktifitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat disektor pertanian juga akan meningkat. Untuk mengukur sasaran ini digunakan satu indikator utama yaitu persentase jumlah poktan yang naik kelas/score dengan rumus:

$$\% \Sigma \text{ Poktan yang Naik Kelas} = \frac{\Sigma \text{ Kel.yang Naik Kelas}}{\Sigma \text{ Kel. Tani}} \times 100\%$$

Penilaian kelas kelompok tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memberikan motivasi agar kelompok lebih berprestasi untuk naik ke kelompok yang lebih tinggi, disamping itu untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki sehingga mudah dalam melakukan pembinaan. Indikator yang dinilai terdiri dari aspek merencanakan, kemampuan mengorganisasikan, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan serta kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani.



Tabel 2.103
Jumlah Kelompok Tani dan Jumlah Kelompok Tani
yang naik kelas/score

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas
	Liang Anggang	67	47
	Landasan Ulin	77	37
	Cempaka	88	46
	Banjarbaru Utara	53	54
	Banjarbaru Selatan	32	32
	Jumlah	317	216

Sumber: Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Sismlihtan).

Dari 317 jumlah kelompok tani yang ada di Kota Banjarbaru jumlah yang meningkat kapasitasnya atau naik kelas/score berjumlah 216 atau 68, 13 % pada tahun 2022.

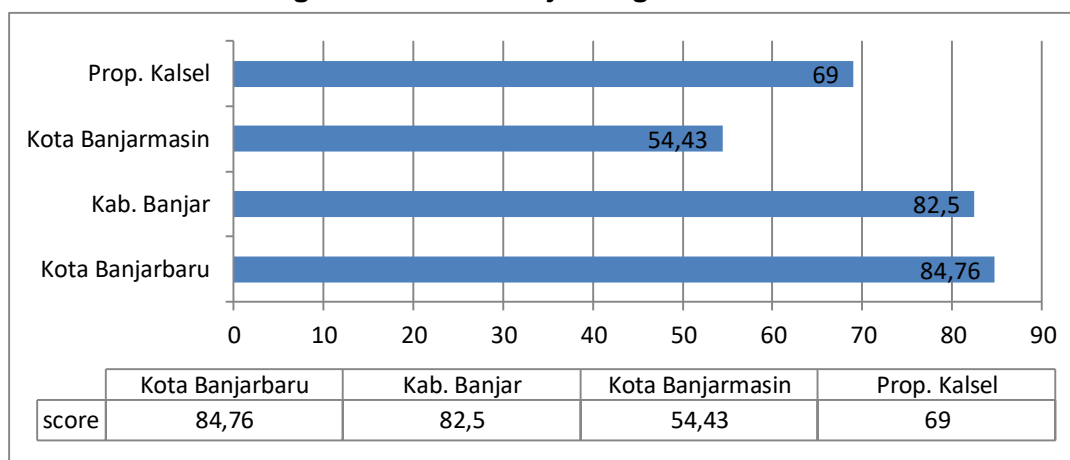
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya, dimana tahun 2022 adalah 84,76 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah 80,79 ada kenaikan score sebesar 3,97 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 80,11 ke tahun 2021, ada kenaikan sebesar 0,68 poin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai score PPH Ketersediaan terjadi peningkatan atau kenaikan artinya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan strategis secara kuantitatif cukup tersedia untuk konsumsi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Gambar 2.13.

Perbandingan Realiasi Kinerja dengan Kab/Kota/Provinsi



Dari perbandingan nilai score PPH dengan daerah lain terlihat bahwa Kota Banjarbaru masih lebih tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan kebutuhan pangan strategis merata di semua wilayah atau kecamatan/kelurahan sehingga untuk memperoleh bahan pangan tidak terkendala dengan akses. Dibanding dengan daerah lain untuk memperoleh bahan pangan akan terkendala dengan akses jalan yang rusak atau jarak yang jauh.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi PPH Ketahanan Pemerintah Kota Banjarbaru sebesar **84,76** dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar **88** dengan capaian **105,67%** dan untuk target PPH nasional **tidak ada**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Memasayarkan diversifikasi pangan.
- b. Mendorong peningkatan produksi hasil pertanian secara umum.
- c. Melaksanakan pengawasan mutu pangan yang beredar.

Hambatan

- a. Alih fungsi lahan pertanian;
- b. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Berkoordinasi dengan stake holder terkait untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian.
- b. Memberikan sosialisasi kepada generasi muda terkait teknik pertanian modern serta membuka jalur pemasarannya.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya program yang mendukung PPH untuk ketersediaan pangan, realisasi anggaran sudah rata-rata diatas 90 % dan capaian kinerja lebih juga lebih besar dari realisasi anggaran, namun program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan program Penyediaan



dan Pengembangan Prasarana Pertanian lebih kecil dari realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.100.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Scor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	100	98,27	1,73
2.	Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT (pangan segar asal tumbuhan) yang aman (%)	100	99,78	0,22
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	112,61	99,71	12,9
4.	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	288,70	99,67	189,03
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	105	97,41	7,59
6.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	65,1	99,46	-34,36
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang diaplikasikan	65,1	96,64	-31,54
8.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah hewan yang tertangani (ekor)	200	94,45	105,55
9.	Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah poktan yang naik kelas/score	101,68	98,56	3,12

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru



B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Program Penunjang IKU Skor Pola Pangan Harapan
untuk Ketersediaan Pangan Tahun 2022

No.	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.225.546.750	1.204.401.750	98,27
2.	Pengawasan Keamanan Pangan	100.955.500	100.738.600	99,78
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	493.707.000	492.292.730	99,71
4.	Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	31.040.000	30.940.000	99,67
5.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	418.769.000	407.927.000	97,41
6.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.627.502.500	2.613.324.500	99,46
7.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	368.880.000	356.512.700	96,64
8.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	130.039.000	122.824.000	94,45
9.	Penyuluhan Pertanian	802.781.750	791.230.180	98,56

Sumber: Data DKP3 Kota Banjarbaru

Peningkatan kebutuhan produksi dan pengadaan ternak baik ternak besar maupun ternak jenis unggas dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Kota Banjarbaru, namun dengan munculnya Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang hewan ternak besar sehingga distribusi/pengiriman dari luar sangat ketat. Hal ini tentunya mengurangi kuantitas kebutuhan akan hewan tersebut, sehingga perlu kebijakan prioritas anggaran untuk mengatasi masalah tersebut.

MISI	2	: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	10	: Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas
INDIKATOR KINERJA	15	: Indeks Infrastruktur Wilayah



Indeks Infrastruktur Wilayah merupakan hasil perhitungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur secara lebih menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek yang bertujuan membantu pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur kota yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Wilayah berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 75,99, telah terealisasi dengan nilai 76,51. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerjanya sebesar 100,68% dengan kategori Baik Sekali.

Program pendukung indikator Indeks Infrastruktur Wilayah, antara lain:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Persentase peningkatan perlindungan banjir.
- b. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

2. Program Penyelenggaraan Jalan

Tingkat kemantapan jalan kota menggambarkan kondisi jalan dan jembatan yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2026 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tingkat kemantapan jalan kota diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2022) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan kota dikali 100.

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Persentase saluran drainase yang berfungsi baik diukur berdasarkan hasil dari panjang drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang berfungsi baik dibagi total target panjang drainase.



4. Program Pengembangan Permukiman

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan menggambarkan kondisi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan lingkungan dikali 100%.

5. Program Penataan Bangunan Gedung

Meningkatnya Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik melalui Program Penataan Bangunan Gedung diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjarbaru dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Indikator Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada Program Penataan Bangunan Gedung dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Meningkatnya Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya diharapkan dapat meningkatkan prasarana fasilitas umum berupa Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh pengguna.

Indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.



a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Tabel 2.102
Realisasi Program SDA Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	35,24	39,11	110,98	70,07
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,35	69,35	100	90,40
Rata-rata Capaian Kinerja					105,49	

Program 1 Indikator 1 : “Persentase peningkatan perlindungan banjir”

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan tindakan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air termasuk didalamnya mengurangi kawasan rawan banjir yang setiap tahunnya terjadi dengan pemeliharaan sungai, embung/kolam retensi dan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur perlindungan banjir seperti tanggul, perkuatan tebing sungai dan embung. banjir di beberapa tahun sebelumnya, yang mana penanganan banjir melainkan harus menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dari hulu ke hilir.

Indikator kinerja adalah persentase peningkatan perlindungan banjir. Indikator ini menunjukan kawasan rawan banjir yang lingkungannya akan diperbaiki dengan infrastruktur pengendali banjir, diharapkan dengan infrastruktur yang dipelihara dan dibangun tersebut banjir dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi lagi.

Pengukuran indikator persentase peningkatan perlindungan banjir dihitung berdasarkan panjang sungai yang ditangani dengan infrastruktur pengendali banjir pada tahun ke-n dibagi dengan total panjang sungai yang akan ditangani sampai akhir 2026, kemudian dikali 100.



Tabel 2.103
Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	35,24	39,11	110,98

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 35,24%, telah terealisasi yaitu 39,11%.

Program 1 Indikator 2 : “Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi”

Indikator kinerja adalah persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Indikator ini menunjukkan luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi, diharapkan dengan infrastruktur yang dibangun tersebut dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian.

Tabel 2.104
Realisasi dan Capaian Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota
yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	69,35	69,35	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 69,35%, telah terealisasi yaitu 69,35%.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Tabel 2.105
Realisasi dan Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Kota Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kemantapan jalan kota	%	81,32	81,33	101,64

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Penyelenggaraan Jalan Kota dengan indikator Tingkat kemantapan jalan kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 81,32%, telah terealisasi yaitu 81,33%.



c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Tabel 2.106
Realisasi dan Capaian Persentase Saluran Drainase
yang Berfungsi Baik Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	59,85	60,45	101

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 59,85%, telah terealisasi yaitu 60,45%.

d. Program Pengembangan Permukiman

Tabel 2.107
Realisasi dan Capaian Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan
Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Kota
dalam Kondisi Baik Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	87,06	87,06	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Pengembangan Permukiman dengan indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 87,06%, telah terealisasi yaitu 87,06%.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Tabel 2.108
Realisasi dan Capaian Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah
Daerah dalam Kondisi Baik Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%.



f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Tabel 2.109
Realisasi dan Capaian Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	100	100	100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Capaian Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Tabel 2.110
Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 - 2022

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24,65 101,27	39,11 110,98

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat sebesar 14,46 %.

Tabel 2.111
Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 - 2022

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,05 99,94	69,35 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu sebesar 100%.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Tabel 2.112 Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 - 2022

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Tingkat kemantapan jalan kota	81,27 100,07	82,66 101,64

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru



Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat sebesar 1,39%.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Tabel 2.113
Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 - 2022

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	58,56 101,20	60,45 101

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 meningkat 1,89%.

d. Program Pengembangan Permukiman

Tabel 2.114
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85,56 100	87,06 100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu 100%.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Tabel 2.115
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 100	100 100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu 100%.



f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Tabel 2.116
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / Capaian	Realisasi / Capaian
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	100 100	100 100

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 tetap yaitu 100%.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan 2 Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi tahun 2022 dengan 2 tahun sebelumnya dimana tahun 2020 tercapai 78,69, untuk tahun 2021 indeks nya 75,00 dan tahun 2022 naik menjadi 76,51.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

Realisasi Indeks Infrastruktur Wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 tercapai 92,88% dan target Nasional tidak ada.

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Tabel 2.117 Perbandingan RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	39,11	70,07	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun 2022 sebesar 39,11% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 53,19% dan tidak ada target nasional.

Tabel 2.118 Perbandingan RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69,35	90,40	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru



Realisasi indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2022 sebesar 69,35% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 79,88% dan tidak ada target nasional.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Tabel 2.119
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Tingkat kemantapan jalan kota	82,66	81,87	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi indikator Tingkat kemantapan jalan kota tahun 2022 sebesar 82,66% melebihi mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,87% dan tidak ada target nasional.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Tabel 2.120 Perbandingan RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik irigasi	60,45	67,94	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun 2022 sebesar 60,45% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 67,94% dan tidak ada target nasional.

d. Program Pengembangan Permukiman

Tabel 2.121 Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	87,06	93,06	-



Realisasi indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 87,06% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 93,06% dan tidak ada target nasional.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Tabel 2.122
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun 2022 sebesar 100% dan mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Tabel 2.123
Perbandingan RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	100	100	-

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

Realisasi Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik tahun 2022 sebesar 100% dan mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya yang Telah Dilakukan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase peningkatan perlindungan banjir yaitu :



- 1) Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- 2) Mensosialisasikan kepada masyarakat PP No 38 tahun 2011 tentang sungai dan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau agar masyarakat tidak mendirikan bangunan permanen di atas sempadan sungai.
- 3) Melakukan Kajian Sempadan Sungai sebagai dasar rencana pembuatan PERDA tentang sempadan sungai.
- 4) Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Sungai Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran Sungai diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yaitu:

- 1) Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- 2) Mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat setempat dan yang terkena dampak langsung terhadap kegiatan.
- 3) Melakukan pengawasan dari pihak pengawas lapangan didampingi konsultan pengawas secara berkala kepada pihak pelaksana berkaitan dengan proses pekerjaan.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Tingkat kemantapan jalan kota yaitu:

- 1) Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- 2) Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran jalan diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan untuk pembebasan jalan.



- 3) Melakukan pemantauan secara berkala kepada pihak penyedia/suplier material berkaitan dengan proses pengolahan dan material yang diperlukan.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase saluran drainase yang berfungsi baik yaitu :

- 1) Melakukan updating atau menginventarisasi saluran-saluran drainase yang kondisinya rusak ringan atau berat dengan melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan melalui sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- 2) Mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan mereka dengan melakukan pembersihan dari tanah endapan dan sampah-sampah agar aliran airnya bisa lancar sehingga saluran drainase bisa berfungsi baik.
- 3) Membuat sumur-sumur resapan di beberapa titik yang ditengarai memiliki andil dalam menciptakan volume debit air hujan yang relatif cukup besar. Air yang masuk ke dalam sumur resapan diharapkan dapat mengurangi genangan yang terjadi di sekitar daerah tersebut dan dapat menjadi cadangan air tanah bagi lingkungan sekitar.
- 4) Selain itu, Bidang Cipta Karya sebagai pelaksana kewenangan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan di perumahan, berupaya mengkoneksikan baik drainase yang sudah terbangun maupun yang akan terbangun, dengan drainase sekunder ataupun drainase primer dengan tetap mengacu kepada pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan (*eco-drainage*), yaitu drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan ataupun kolam detensi/retensi mini.

d. Program Pengembangan Permukiman

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik adalah meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis, berupaya melalui peningkatan jalan lingkungan di kompleks perumahan. Sebagaimana arahan Komisi



Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, peningkatan jalan lingkungan dilaksanakan pada aset-aset fasilitas PSU perumahan yang keberadaan asetnya telah melalui proses serah terima aset dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Banjarbaru. Bidang Cipta Karya berupaya agar seluruh jalan lingkungan yang telah dilaksanakan peningkatannya, dimasukkan dalam database rencana inventarisasi jalan lingkungan yang akan diperbarui melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru di tahun 2023 nanti.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah berupaya membangun dan merencanakan pembangunan kantor-kantor pemerintah Pemerintah Kota Banjarbaru yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta aturan turunannya. Sejak kuartal kedua 2022, Bidang Cipta Karya tidak lagi melaksanakan rehabilitasi atau pemeliharaan kantor-kantor di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini merupakan hasil dari saran tindak/temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap hal ini. Menurut BPK, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan kantor merupakan tanggung jawab dari SKPD masing-masing, karena terkait dengan aset kepemilikan dari gedung tersebut yang tidak dapat dicatitkan pada Dinas PUPR terhadap belanja modal yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPR dari kegiatan tersebut.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik yaitu :

- 1) Dalam upaya mencapai Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi, Bidang Cipta Karya berupaya melakukan rehabilitasi pada fasilitas - fasilitas umum berupa rehabilitasi gedung mess L dan gedung PKK yang ada di Kota Banjarbaru yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.



- 2) Dan juga melakukan perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi selesai tepat waktu.

Hambatan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase peningkatan perlindungan banjir yaitu:

- 1) Kondisi akses mobilisasi material pekerjaan peningkatan sungai yang jauh dan sempit
- 2) Kondisi iklim dan Cuaca di musim penghujan yang mengakibatkan naiknya muka air sungai yang mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yaitu:

- 1) Mobilisasi material yang tidak bisa langsung ke lokasi kegiatan.
- 2) Iklim dan cuaca di musim penghujan yang mengakibatkan naiknya muka air.
- 3) Pada saat musim panen kegiatan mengalami hambatan dikarenakan mobilisasi hasil panen.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Hambatan yang dihadapi dalam Tingkat kemantapan jalan kota yaitu:

- 1) Pekerjaan yang menggunakan precast memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena harus menunggu produksi pabrik, sehingga harus dipastikan dulu ketersediaan precast tersebut sebelum melaksanakan galian saluran drainase.
- 2) Pekerjaan konstruksi jembatan memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena urutan pekerjaan harus dikerjakan secara berurutan.
- 3) Keterbatasan anggaran untuk pekerjaan pembangunan jalan sehingga untuk pencapaian target panjang jalan yang dibangun belum optimal.
- 4) Kurangnya dukungan masyarakat terhadap pekerjaan bidang Bina Marga.
- 5) Pekerjaan yang menggunakan material dari penyedia/supplier memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama karena harus menunggu produksi pabrik tersedia.



c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase saluran drainase yang berfungsi baik yaitu :

- 1) Masih banyaknya saluran-saluran drainase yang kondisinya rusak ringan atau berat yang belum maksimal ditangani karena keterbatasan anggaran.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran drainase karena sebagian besar kondisi saluran yang tidak lancar disebabkan banyaknya endapan yang tidak dibersihkan.
- 3) Adanya saluran-saluran yang masih belum tuntas penanganannya karena masih adanya penolakan warga terhadap penanganan drainase ke pembuangan akhir yang mengalir ke tanah warga.
- 4) Kurangnya tanggung jawab pengembang perumahan terhadap pembangunan jalan dan drainase lingkungan pada PSU yang diserahkan mereka pada Pemerintah Kota Banjarbaru, menyebabkan porsi pembangunan infrastruktur yang seharusnya dikerjakan mereka menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Sehingga akibatnya wilayah-wilayah genangan air bertambah, karena beberapa perumahan membangun di daerah tangkapan maupun resapan air.

d. Program Pengembangan Permukiman

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik adalah ada saat pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan, masih dijumpai tantangan berupa variasi ketebalan Lapis Pondasi Bawah (LPB) dan Lapis Pondasi Atas (LPA) yang tidak konsisten di lapangan. Selain itu, karena peningkatan pembangunan perumahan yang masif oleh pengembang perumahan yang tidak dibarengi dengan pembangunan jalan lingkungan yang langsung dibangun oleh mereka mengakibatkan banyaknya jalan lingkungan yang masih dalam kondisi hanya memiliki LPB dan LPA saja tanpa lapisan aspal, mengakibatkan kondisi jalan-jalan ini banyak yang sudah tergerus lapisan atasnya akibat air hujan. Sehingga tidak tercapai kondisi pemadatan yang ideal pada saat rencana pekerjaan pengaspalan



jalan, setelah beberapa tahun menunggu pendanaan mencukupi untuk pekerjaan aspal di wilayah tersebut.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah Banyaknya bangunan gedung baik milik Pemerintah Kota Banjarbaru maupun instansi pusat/vertikal dan milik perseorangan yang sudah berusia tua, dan ditengarai dapat dicanangkan sebagai bangunan cagar budaya, selama ini sedikit sekali informasi teknis mengenai keberadaan dan struktur bangunan tersebut. Sehingga kadang dijumpai kekhawatiran akan kekokohan bangunan tersebut, mengingat pada saat sekarang ini meskipun terjadi pada daerah lain di luar wilayah Kota Banjarbaru semakin kerap terjadinya kegagalan bangunan berupa kolaps/ambruknya bangunan.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Hambatan yang dihadapi dalam Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah banyaknya bangunan gedung atau pun fasilitas umum milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang harus dilakukan rehabilitasi, selama ini sedikit sekali informasi teknis mengenai keberadaan dan struktur bangunan tersebut. Sehingga kadang dijumpai kekhawatiran akan kekokohan bangunan tersebut, mengingat pada saat sekarang ini meskipun terjadi pada daerah lain di luar wilayah Kota Banjarbaru semakin kerap terjadinya kegagalan bangunan berupa kolaps/ambruknya bangunan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pada program pendukung IKU Indeks Infrastruktur Wilayah:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu:

- 1) Mempercepat pelaksanaan lelang sehingga proses pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai target waktu pelaksanaan.



- 2) Menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan sesuai keperluan berdasarkan dokumen perencanaan.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan peningkatan sungai Kota Banjarbaru.
- 4) Berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kelompok tani dan tokoh setempat untuk kegiatan selanjutnya.
- 5) Lelang dipercepat untuk menghindari musim hujan yang tidak menentu.

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu:

- 1) Mempercepat pelaksanaan lelang sehingga proses pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai target waktu pelaksanaan.
- 2) Menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan sesuai keperluan berdasarkan dokumen perencanaan.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru.
- 4) Membuat perjanjian yang mengikat antara kontraktor dan penyedia/supplier dalam hal penyediaan material.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu:

- 1) Melakukan inventaris data usulan masyarakat terkait permasalahan dan penanganan drainase baik melalui usulan musrenbang atau laporan masyarakat agar bisa ditangani setiap tahunnya melalui sub kegiatan pembangan sistem drainase perkotaan, sub kegiatan peningkatan saluran drainase perkotaan dan sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- 2) Memberikan penjelasan dan pendekatan kepada warga yang terdampak sebagian tanahnya untuk dihibahkan untuk penanganan saluran drainase supaya bisa tuntas ke saluran pembuangan akhirnya agar hasilnya saluran drainase bisa berfungsi baik.



- 3) Untuk tindak lanjut masalah banjir dan genangan, perlu adanya komitmen bersama yang dituangkan melalui rapat/sosialisasi/pendekatan, Focus Group Discussion (FGD) bersama pengembang ataupun penandatanganan Pakta Integritas agar pihak swasta/pengembang turut bertanggung jawab membangun dari awal jalan maupun drainase lingkungan di area yang akan dikembangkan mereka.
- 4) Selain itu, perlu adanya pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan secara masif, tuntas dan komprehensif pada tahun yang bersamaan, melalui kolaborasi dan integrasi pembangunan bersama/develop bundling pada bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya berdasarkan kewenangan masing-masing bidang. Pembangunan /pemeliharaan/rehabilitasi dilakukan dengan membagi beberapa area berdasarkan catchment area dan berdasarkan studi/kajian/masterplan yang telah dilakukan. Sehingga penanganan dapat tuntas tanpa meninggalkan masalah dikemudian hari.

d. Program Pengembangan Permukiman

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan yaitu :

- 1) Perlunya pengawasan berkala secara detail oleh Konsultan Pengawas bersama-sama Bidang Cipta Karya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Peningkatan Jalan Lingkungan, sehingga potensi temuan kurangnya ketebalan LPA dan LPB oleh BPK dapat diminimalisir. Serta perlunya perencanaan teknis yang lebih berkualitas dan terperinci sehingga tantangan-tantangan teknis di lapangan dapat diantisipasi sedini mungkin.
- 2) Bidang Cipta Karya pada tahun 2023 akan melaksanakan *updating* inventarisasi jalan lingkungan. Untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, di tahun 2023 direncanakan akan disinergikan aplikasi jalan dan drainase lingkungan, agar kondisi eksisting kedua jenis infratraktur yang tersebar di Kota Banjarbaru ini dapat terpantau secara berkala.



e. Program Penataan Bangunan Gedung

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan adalah pada tahun 2023, Bidang Cipta Karya akan mulai menginventarisasi bangunan-bangunan yang akan dicanangkan menjadi bangunan cagar budaya. Selain itu di tahun 2023 akan dibuat aplikasi informasi bangunan gedung negara yang berisi informasi mengenai teknis bangunan dan tahun pembangunannya, agar kedepannya dapat dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung negara yang lebih baik dan tetap mematuhi aturan bangunan yang berlaku serta kaidah estetika/arsitektural bertema tertentu.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Rencana tindak lanjut kedepan yang akan dijadikan langkah perbaikan dari hambatan-hambatan yang terjadi di tahun berjalan adalah pada tahun 2023, Bidang Cipta Karya akan mulai menginventarisasi bangunan-bangunan dan fasilitas – fasilitas umum yang akan dipergunakan untuk masyarakat banyak. Selain itu di tahun 2023 akan dibuat aplikasi informasi bangunan gedung negara yang berisi informasi mengenai teknis bangunan dan tahun pembangunannya, agar kedepannya dapat dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung negara yang lebih baik dan tetap mematuhi aturan bangunan yang berlaku serta kaidah estetika/arsitektural bertema tertentu.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.124
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	110,98	70,72	40,26
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100	95,45	4,55



3.	Program penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	101,64	95,42	6,22
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	101	93,43	7,57
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	85,07	14,93
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	100	89,88	10,12

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya IKU Indeks Infrastruktur Wilayah tahun 2022 sebesar **Rp. 148.020.501.164** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 134.049.227.963** atau sebesar **90,56%** dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel 2.125
Realisasi Anggaran Program Pendukung Indeks Infrastruktur
Wilayah Tahun 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.375.460.500	17.946.200.866	70,72
2.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.783.577.100	4.566.052.100	95,45
3.	Program Penyelenggaraan Jalan	57.964.068.314	55.310.759.997	95,42
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	29.697.430.500	27.747.262.500	93,43



5.	Program Pengembangan Permukiman	24.293.402.00 0	23.441.239.50 0	96,49
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	5.631.282.750	4.790.302.000	85,07
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	275.280.000	247.411.000	89,88
Jumlah		148.020.501.1 64	134.049.227.9 63	90,56

Sumber: Data Dinas PUPR Kota Banjarbaru

MISI	2	: Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
SASARAN STRATEGIS	11	: Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
INDIKATOR KINERJA	16	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan Konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH adalah Metode Untuk menyimpulkan dengan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.

Penyusunan indeks kualitas lingkungan ini terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD yang memuat sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan. Kerangka indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan



menggunakan kualitas sungai, kualitas udara, tutupan lahan sebagai indikator Cara menentukan realisasi indikator menggunakan hasil perhitungan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien).

Rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH berdasarkan surat dirjen pencemaran dan kerusakan lingkungan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

Kategori	Rentang Nilai
Sangat Baik	$IKLH > 80$
Baik	$70 < IKLH \leq 80$
Cukup Baik	$60 < IKLH \leq 70$
Kurang Baik	$50 \leq IKLH \leq 60$
Sangat Kurang Baik	$40 \leq IKLH < 50$
Waspada	$30 \leq IKLH < 40$

- Perhitungan indeks kualitas air (IKA) dilakukan sebagai berikut

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	<p>IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$



2. Indeks kualitas udara (IKU) model EV dikonversikan menjadi indeks kualitas udara melalui persamaan :

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ $Ieu = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

3. Skema Indeks kualitas Lahan (IKL) melalui persamaan:

$$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$$

$$DKK = \sum_{\square} \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$$

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal

Rumus di Tutupan Hutan di Lahan Gambut;

$$\begin{aligned} W_{\text{kanal di Lindung}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG} \\ W_{\text{kanal di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG} \\ W_{\text{terbakar di Lindung}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG} \\ W_{\text{terbakar di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG} \end{aligned}$$

Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung di Lahan Gambut;

$$\begin{aligned} W_{\text{kanal di Lindung}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal + BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG} \\ W_{\text{kanal di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal + BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG} \\ W_{\text{terbakar di Lindung}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar + BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG} \\ W_{\text{terbakar di Budidaya}} &: 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Bakar + BL_FBG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FBEG} \end{aligned}$$

Program pendukung yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain:

- Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Program Pengelolaan Keaneka ragaman hayati (KEHATI).



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

IKLH adalah Metode Untuk menyimpulkan dengan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.

Penyusunan indeks kualitas lingkungan ini terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD yang memuat sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan. Kerangka indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas sungai, kualitas udara, tutupan lahan sebagai indikator. Cara menentukan realisasi indikator menggunakan hasil perhitungan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien).

Pada tahun 2020 mengacu pada surat dirjen pencemaran dan kerusakan lingkungan kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 bahwa perhitungan untuk IKLH 2020 untuk kabupaten kota adalah sebagai berikut:

Lampiran Surat

Nomor : S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020
Tanggal : 4 Desember 2020

RUMUS PERHITUNGAN IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$



Untuk kota Banjarbaru, sebagaimana disebutkan pada keterangan dimuka bahwa nilai indeks kualitas air dan udara serta indeks tutupan lahan yang menjadi indicator penghitungan IKLH, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.126
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2022 Kota Banjarbaru

IKA	55.26	IKLH Kota Banjarbaru Tahun 2022 61.83
IKU	87.64	
IKTL	25.37	

IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan hidup tingkat Kab/Kota

IKLH Kab/Kota = (IKA x 37,6%) + (IKU x 40.5%) + (IKTLx 21.9%)

IKLH Kab/Kota = (55.26 x 37,6%) + (87.64 x 40.5%) + (23.70 x 21.9%)

IKA 20,78 + IKU 35,49 + IKTL 5,56 = IKLH 61,83

Tabel 2.127
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	indeks	62.67	61.83	98.66%

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Tabel 2.128 Capaian Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air memenuhi baku mutu	57.67	55.26	92.82
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	87.91	87.64	99.69

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Banjarbaru masih dalam kategori Sedang (61,83) semoga ditahun mendatang akan terjadi peningkatan indeks di ikuti dengan peningkatan indeks bawaannya seperti Indeks kualitas air (IKA) yang sekarang masih ada sungai yang cemar sedang, dan lebih meningkatkan Indeks Kualitas udara (IKU).



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2,129

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kualitas Lingkungan Hidup 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	61.67 110.44%	61.67 110.44%	61.83 98.66%

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2 tahun terakhir) terlihat turun naik hal ini disebabkan berubahnya rumus perhitungan IKLH yang ditetapkan oleh kementerian LHK sejak tahun 2020.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/ Kota/Provinsi

Tabel 2.130

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/ Kota/Provinsi

No.	Indikator kinerja	Kota Banjarbaru	Kabupaten Banjar	Kabupaten Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Prov. Kal-Sel
1.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	61.83	61.93	68.37	57.98	71.97

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dibandingkan dengan kabupaten / kota / provinsi sekitar. Kota Banjarbaru lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut serta Provinsi Kalimantan Selatan hal ini dikarenakan Kota Banjarbaru tidak memiliki Hutan yang menjadi salah satu dasar untuk perhitungan indeks tutupan Lahan namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Banjarmasin.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Dengan Target RPJMD Dan Nasional

Tabel 2.131

Realisasi Kinerja IKLH dengan Target RPJMD dan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2024	Target Nasional
1.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	61.83	66.67	69.22

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru



Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tahun 2022 sebesar 61,83 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 63,67 dan target nasional sebesar 69,22.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya yang Telah Dilakukan

Komitmen Walikota Banjarbaru untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Kota Banjarbaru sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patrol sungai, dan lain-lain.
- b. Peningkatan koordinasi antar pusat, provinsi, dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- c. Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL domestik dan USK.

Hambatan

- a. Beralih fungsinya kawasan hutan menjadi perumahan dan adanya proyek pemanfaatan material pematangan Lahan
- b. Adanya Kotoran ternak (sapi. ayam.kambing) yang dibuang ke sungai
- c. Masih adanya sampah organik dan an organik yang dibuang ke sungai
- d. Industri kecil (pabrik tahu) dan Rumah Makan yang tidak memiliki IPAL

Rencana Tindak Lanjut

- a. Menerapkan Perda IMB bagi pengembang menyediakan RTH seluas 30% di perumahan dan membuat sumur resapan dengan memperketat izin SPPL.
- b. Melaksanakan penanaman dan penghijauan di hulu sungai.
- c. Konservasi pada bagian hulu sungai (sumber air) dengan menjadikan RTH dan membebaskan daerah hulu.
- d. Memperhatikan dampak Lingkungan dalam pelaksanaan proyek.
- e. Menanam pohon satu rumah satu pohon.
- f. Memasyarakatkan Pembuatan Biogas dan pupuk kandang.
- g. Membentuk Bank sampah dan Pembangunan TPS 3R.



- h. Meningkatkan Pengawasan terhadap Industri kecil dan rumah makan terhadap pembuangan limbah cairnya.
- i. Meningkatkan penegakan hukum pabrik dan rumah makan tidak ada IPAL.
- j. Melaksanakan penanaman pohon di jalan raya terutama di jalan yang masih gersang seperti trikora dan pelaksanaan penanaman pohon pada setiap rumah minimal 1 pohon sehingga meningkatkan nilai ITL serta mengurangi polusi.
- k. Menindak tegas oknum penebangan pohon ilegal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.132
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indek kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	161	92,42	68,58
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	65,22	93,39	-28,17
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota	115	98,24	16,76
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata/berwawasan lingkungan	100	100	0
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	98,78	1,22



Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	200	99,22	100,78
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota	100.08	97,65	2,43
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman kehati lainnya yang terpelihara dengan baik	100	97,55	2,45

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya sasaran Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup tahun 2022 sebesar **Rp. 2.673.153.500** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 2.555.919.982** sebesar atau **95,61%** dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel 2.133
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Tahun 2022

Program / Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Serapan anggaran (%)
Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
1	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota Sub kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	834.486.000	757.288.000	90,75



2.	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah kaca, mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim	65.000.000	64.989.900	99,98
Program Pengelolaan Keaneka ragaman hayati (KEHATI)				
3.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati diluar Kawasan hutan	228.510.000	224.046.400	98,04
4.	Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	1.445.157.500	1.412.208.659	96,44
5.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneka ragaman hayati	100.000.000	97.387.023	97,39
Jumlah		2.673.153.500	2.555.919.982	95,61

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

MISI	3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah
SASARAN STRATEGIS	12	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA	17	: Nilai SAKIP

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menggambarkan penilaian kinerja berkenaan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dapat dipertanggung-jawabkan baik keberhasilan atau kegagalan, atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan guna mencapai visi misi secara terukur dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) serta dilaksanakan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah diukur berdasarkan Nilai SAKIP, hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan Indikator nilai SAKIP berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu kategori tingkat BB dengan nilai



70,01, telah terealisasi yaitu katagori tingkat B dengan nilai 66,74. Capaian kerjanya/kategori indikator ini sebesar 95,32% (Baik).

Pengukuran realisasi indikator Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementerian PANRB dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.134
Pengukuran realisasi indikator Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi dari Kementerian PAN & RB

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	21,56
2	Pengukuran Kinerja	30	19,65
3	Pelaporan Kinerja	15	11,03
4	Evaluasi Internal	25	14,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Adapun program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU nilai SAKIP, antara lain: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana IKU nilai SAKIP mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar **64,43** tahun 2021 sebesar **65,76** dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai sebesar **66,74**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Nilai SAKIP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai berikut:

Tabel 2.135
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Kab/Kota/Provinsi

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Kab. Tapin	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kota Banjarmasin	Realisasi Prov. Kalsel
1.	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	A

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru



4. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi nilai SAKIP Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah **66,74** dan target akhir nilai SAKIP pada RPJMD tahun 2026 adalah **80,01** sedangkan **target Nasional tidak ada**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-upaya yang telah dilakukan

- a. Menindaklanjuti rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP
- b. Melakukan pembinaan pengelolaan SAKIP SKPD.

Hambatan

- a. Belum melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
- b. Kualitas pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala belum dilaksanakan
- c. Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi belum dilaksanakan.
- d. Pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD masih kurang.
- e. Pemberian Reward and Punishment belum dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran;
- b. Melakukan pengukuran terhadap outcome dan output secara berkala;
- c. Melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi;
- d. Memberikan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD;
- e. Memberikan Pemberian Reward and Punishment.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung indikator kinerja utama Nilai SAKIP Tahun 2022, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.136
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP/RB yang selesai ditindak lanjuti	100	93,12	6,88
		Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindak lanjuti	98	96,87	1,13
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	96,30	3,7
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD	100	93,10	6,9
4.	Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kajian/penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100	93,24	6,76

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru



B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya IKU Nilai SAKIP tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 4.033.040.435** dengan relisasi anggaran sebesar **Rp. 3.811.057.667** atau **94,49%**.

Tabel 2.137
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU Nilai SAKIP Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota	908.514.000	868.159.000	95,56
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.034.821.500	996.483.232	96,30
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.463.222.685	1.362.300.685	93,10
4.	Program Penelitian dan pengembangan daerah	626.482.250	584.114.750	93,24
Jumlah		4.033.040.435	3.811.057.667	94,49

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

MISI	3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah
SASARAN STRATEGIS	12	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA	18	: Nilai LPPD

LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan atas kewenangan urusan yang dilaksanakan oleh daerah. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Pengukuran capaian kinerja indikator nilai LPPD diperoleh dari hasil pelaksanaan penilaian LPPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya sering kali terhambat pada kurangnya pemahaman dalam mengartikan Indikator Kinerja Kunci sehingga data



indikator tidak sesuai dengan yang dimaksud. Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target nilai LPPD adalah dengan:

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci LPPD dan melakukan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan kepada seluruh SKPD
- b. Lebih intensif berkoordinasi dengan SKPD terkait progress pelaksanaan indikator yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD Kota Banjarbaru.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan Indikator nilai LPPD berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu nilai sangat tinggi (3,05) telah terealisasi yaitu dengan nilai sangat tinggi (3,2921). Capaian kinerjanya/kategori indikator ini sebesar 107,9% dengan kategori sangat baik. (Realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun 2020).

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan terus berkomitmen untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Nilai LPPD, antara lain:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Sub Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah);
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan 2 Tahun Terakhir

Penilaian LPPD terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 dengan nilai 3,2921. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, nilai yang menjadi acuan pada indikator ini adalah nilai yang dihasilkan pada tahun 2019.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi nilai LPPD Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 telah terealisasi sebesar 3,05% dengan capaian 107,9% dan **target Nasional tidak ada.**

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan



Upaya yang Telah Dilakukan

Menyusun dan mengirimkan hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum batas akhir pengiriman pada tanggal 31 Maret 2022.

Hambatan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah selesai dilaksanakan dan laporan telah dikirimkan tepat waktu namun, dalam proses pengumpulan data dukung terdapat sedikit kendala karena beberapa data dukung IKK yang tidak sesuai dalam hasil review Inspektorat sehingga memerlukan waktu untuk mengumpulkan kembali data yang sesuai.

Rencana Tindak Lanjut

Langkah yang akan dilakukan dalam rangka menanggulangi hambatan yang dijabarkan sebelumnya adalah melaksanakan peningkatan koordinasi dengan Tim Reviu, Tim APIP dan seluruh SKPD terkait keakuratan data dukung IKK.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 5,5% melalui program administrasi tata pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya nilai LPPD tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 132.513.200,00** dengan relisasi anggaran sebesar **Rp. 125.313.200,00** atau **94,5%**.

Tabel 2.138
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU Nilai LPPD Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program administrasi tata pemerintahan (Sub Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah)	132.513.200	125.313.200	94,5
Jumlah		132.513.200	125.313.200	94,5

Sumber: Data Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjarbaru



MISI	3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah
SASARAN STRATEGIS	12	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA	19	: Opini BPK

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menggambarkan penilaian kinerjanya dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang dapat dipertanggung-jawabkan baik keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan guna menpcaipai visi misi secara terukur, terselenggaranya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) dan dilaksanakan secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Indikator Kinerja adalah opini BPK . indikator ini dipilih dengan maksud sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan tranparansi dan akuntabelitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efesien dan bertanggungjawab dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarbaru pada periode RPJMD Tahun 2016-2021.

Pengukuran capaian kinerja indikator ini berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan sistem pengendalian internal pemerintah dengan indikator Opini BPK adalah:

Tabel 2.139
Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, menunjukan bahwa realisasi kinerja indikator Opini BPK pada tahun 2022 ditargetkan WTP dan terealisasi WTP dengan capaian kinerja 100% (kategori capaian kinerja Baik).

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pemerintah terus berkomitmen untuk mendapatkan opini BPK dengan terbaik. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan Standart Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kota Banjarbaru berarti laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Opini BPK, antara lain:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.140
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Opini BPK
2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Opini BPK	WTP 100%	WTP 100%	WTP 100%

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya, pada indikator sasaran opini BPK yaitu tahun 2022 dilihat dari realisasi adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini WTP ini merupakan tingkatan paling tinggi yang menggambarkan konsistensi kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru yang baik.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/ Kota/ Provinsi

Opini BPK merupakan indikator yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis. Hasil penilaian pada kabupaten/ kota/ provinsi dibandingkan dengan Kota Banjarbaru sebagai berikut:

Tabel 2.141
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK
dengan Kab/Kota/Provinsi

No	Indikator kinerja	Realisasi 2021	Realisasi Kab. Banjar	Realisasi Kab. Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin	Realisasi Prov. Kal-Sel
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru

Perbandingan dengan Kabupaten/ Kota/ Propinsi adalah WTP. Semua pemerintah daerah Se-Kalimantan Selatan sudah membuat laporan keuangan daerahnya dengan baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

Realisasi kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 target Nasional tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.142
Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional I
1.	Opini BPK	WTP	WTP	-

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru, 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu WTP jika dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) tahun 2026 yaitu WTP maka sejak tahun 2018 target RPJMD sudah mencapai target, namun kinerja ini tetap harus dipertahankan ditahun berikutnya karena penilaiannya dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan untuk **target Nasional tidak ada**.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah dilakukan

- a. Berkoordinasi dengan pihak Kemendagri selaku penyedia aplikasi
- b. Pembuatan BKU secara manual
- c. Penggunaan Aplikasi pendamping yaitu FMIS
- d. Rekonsiliasi per triwulan
- e. Penundaan TPP

Hambatan

- a. Penatausahaan pada SKPD dengan KPA terdapat banyak error.
- b. Koreksi atas kesalahan tidak dapat di akomodasi pada SIPD.
- c. Data pendapatan tidak tersinkronisasi pada SIPD.
- d. Pembuatan BKU BUD tidak dapat otomatis.
- e. Keterlambatan dalam menyampaikan data.
- f. Data yang diinput tidak/kurang didukung data pendukung.
- g. SDM kurang memahami aset tetap dan asset lancar.
- h. SDM kurang memahami aplikasi.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Pembimbingan teknis kepada SKPD
- b. Memaksimalkan pembimbingan saat inputan per triwulan
- c. Melakukan pendekatan kepada SKPD terkait data pendukung aset tetap dan aset lancar

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 22,85% melalui program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Banjarbaru.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya Opini BPK tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.539.422.505,00 dengan relisasi anggaran sebesar Rp. 10.710.832.791,00 atau 69%.



Tabel 2.143
Realisasi Anggaran Opini BPK Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program pengelolaan keuangan daerah	10.689.967.505	7.114.082.640	67
2.	Program pengelolaan barang milik daerah	4.849.455.000	3.596.750.151	74
Jumlah		15.539.422.505	10.710.832.791	69

Sumber: Data BPKAD Kota Banjarbaru

MISI	3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah
SASARAN STRATEGIS	12	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA	20	: Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart government, dimana pelayanan dilaksanakan memanfaatkan TIK dan Pelayanan publik yang partisipatif dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media serta pelayanan publik yang inovatif melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional.

Sebagai tindaklanjut RPJMN 2020-2024 melalui Perpres No.18 th 2020 yg menetapkan Manajemen Risiko Indeks level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah di ukur berdasarkan Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) yang hasil penilaian tersebut Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.144

Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Penerapan Manajemen Resiko Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level	3 (3.00)	2 (2.95)	98.33 (Baik)

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu level 3 dengan nilai 3.00 telah terealisasi yaitu level 2 dengan nilai 2.95. capaian kinerjanya / katagori indicator ini sebesar 98.33 (baik).

Program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Indeks Penerapan Manajemen Resiko, antara lain:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pengukuran realisasi indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) diperoleh berdasarkan hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor: PE.09.03/LHP-446/PW16/3/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.145

Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi Tahun 2022

Komponen Penilaian	Bobot	Skor
Penetapan Tujuan	40%	1,400
Struktur dan Proses	30%	0,812
Pencapaian Tujuan	30%	0,795
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,007
Nilai MRI		2,95
Nilai IEPK		2,87



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.146
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks MRI
2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 1 (1,91)	Level 2 (2,77)	Level 2 (2,95)

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebelumnya mengalami peningkatan walaupun peningkatannya belum mencapai target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Target Nasional

Tabel 2.147
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD
dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1.	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

Realisasi nilai Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 sebesar 2.95 yaitu berada di level 2 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD dan target Nasional yaitu level 3.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya – Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022. Adapun hasil rekomendasikan, yaitu:

- Proses manajemen risiko (identifikasi, analisis, kegiatan pengendalian, dan pemantauan RTP dan kejadian risiko) belum dilakukan dengan baik pada seluruh OPD.
- Pengawasan/reviu terhadap proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa sampel pada OPD.



- c. Terkait dengan contoh implementasi manajemen risiko, terdapat risiko kemitraan yaitu tidak ada usaha perseorangan yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) dengan rencana tindak pengendalian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi yang tidak selaras dengan sasaran peningkatan infrastruktur kota yang berkualitas;
- d. Rendahnya skor sub unsur yang terkait dengan pencapaian tujuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (1.1, 1.3, 2.2, dan 4.1), disebabkan hasil veto yang dilakukan pada tahap evaluasi karena terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat eselon dua.

Kegagalan yang terjadi dalam proses Penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

- a. Proses manajemen risiko (identifikasi, analisis, kegiatan pengendalian, dan pemantauan RTP dan kejadian risiko) belum dilakukan dengan baik pada seluruh OPD;
- b. Pengawasan/reviu terhadap proses manajemen risiko belum dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa sampel pada OPD;
- c. Terkait dengan contoh implementasi manajemen risiko, terdapat risiko kemitraan yaitu tidak ada usaha perseorangan yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Perseorangan) dengan rencana tindak pengendalian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi yang tidak selaras dengan sasaran peningkatan infrastruktur kota yang berkualitas;
- d. Rendahnya skor sub unsur yang terkait dengan pencapaian tujuan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (1.1, 1.3, 2.2, dan 4.1), disebabkan hasil veto yang dilakukan pada tahap evaluasi karena terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat eselon dua.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan level Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan implementasi manajemen risiko dengan:



- a) Penyediaan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan penggunaan dokumen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan;
 - b) Peningkatan kompetensi pegawai pengelola risiko baik pada tingkat pemda maupun OPD;
 - c) Pemutakhiran daftar risiko secara berkala mulai dari risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD sampai dengan risiko operasional OPD;
 - d) Penyusunan register risiko *fraud* untuk meminimalisir terjadinya risiko korupsi;
 - e) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RTP.
2. Melakukan evaluasi dan menyempurnakan penjenjangan kinerja (*cascading*) serta atribut kinerja/sasaran (target dan indikator) tingkat Pemda dan OPD:
- a) Melakukan pembinaan manajemen risiko, termasuk manajemen risiko *fraud*;
 - b) Mensosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko secara menyeluruh;
 - c) Melakukan pengawasan dan reviu proses manajemen risiko secara menyeluruh dan
 - d) Mensosialisasikan dan mengoptimalkan penerapan WBS.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Program penyelenggaraan pengawasan dan Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang mendukung indikator kinerja utama Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Tahun 2022, diperoleh tingkat efisiensi penggunaan sumber daya, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.148
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program	Indikator	% Capaian Kinerja 2022	% Realisasi Anggaran 2022	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	83,56	16,44
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	94,39	5,61
Jumlah			100	88,97	11,02

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang tersedia pada Program penunjang IKU Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) dengan pagu **Rp. 3,633,682,750** terealisasi **Rp. 3,174,794,202** dengan persentase **87,37%**. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.149
Realisasi Anggaran Program Penunjang IKU Indeks MRI Tahun 2022

No.	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,355,164,750	1,967,946,500	8,56%
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,278,518,000	1,206,847,702	94,39%
Jumlah		3,633,682,750	3,174,794,202	87,37%

Sumber: Data Inspektorat Kota Banjarbaru

MISI	3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah
SASARAN STRATEGIS	12	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA	21	: Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya



digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Serta untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi sesuai Peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang tentang manajemen ASN, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran IP ASN serta Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengukuran IP ASN menyebutkan bahwa profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan selain itu Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) juga merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu IP-ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme, sehingga Instansi Pemerintah baik Pusat/Daerah diwajibkan untuk melakukan pengukuran IP ASN secara berkala pada setiap tahunnya.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup:

- a. Dimensi kualifikasi.
Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi :
 - 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)/sederajat;
 - 6) Di bawah SLTA.Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - 1) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3(Strata Tiga);



- 2) Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (StrataDua);
 - 3) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (StrataSatu) /D-IV (Diploma Empat);
 - 4) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (DiplomaTiga);
 - 5) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat;
 - 6) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah.
- b. Dimensi kompetensi.
- Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:
- 1) Diklat Kepemimpinan
Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut :
 - a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 - b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
 - 2) Diklat Fungsional.
Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut :
 - a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 - b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
 - 3) Diklat Teknis.



Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut :

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
 - b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
 - c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan



pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus/ magang/ sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/ surat tugas dan sejenisnya.

c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 2) Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut :

- a) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1(satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin



yang pernah diterima yang mencakup:

- 1) Hukuman disiplin ringan;
- 2) Hukuman disiplin sedang;
- 3) Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- c) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplintingkat sedang;
- d) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplintingkat berat.

Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- e. Kategori tingkat Profesionalitas ASN.
Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- 1) 91 – 100;
- 2) 81 – 90;
- 3) 71 – 80;
- 4) 61 – 70; dan
- 5) 60 ke bawah.

Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah :

- 1) Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
- 2) Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;
- 3) Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;
- 4) Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70;
- 5) Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.



FORMULA PERHITUNGAN IP ASN

Jumlah Total Hasil Perkalian :

(Bobot Dimensi/Indikator) x Skor (masing-masing jawaban Dimensi/Indikator)

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$\begin{aligned} IP_1 &= W_{1j} * R_{1j} \\ IP_2 &= W_{2k} * R_{2k} \\ IP_3 &= W_{3l} * R_{3l} \\ IP_4 &= W_{4m} * R_{4m} \end{aligned}$$

Dimana:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

W_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j, Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} = Bobot Indikator Kompetensi ke-k, Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W_{3l} = Bobot Indikator Kinerja ke-l, Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W_{4m} = Bobot Indikator Disiplin ke-m, Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan Indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah:

Tabel 2.150
Realisasi dan Capaian Kinerja IP ASN Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	73	54,68 (Rendah/Nilai Sementara)	74,90%

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Indikator Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu kategori tingkat penilaian *SEDANG* dengan Indeks 73, dan telah terealisasi dengan kategori tingkat penilaian *SANGAT RENDAH* dengan Indeks



54,68. Capaian Kinerjanya / Kategori Indikator ini adalah sebesar 74,90% (sedang). Pengukuran indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) diperoleh berdasarkan hasil penilaian sementara IP ASN Pemerintah Kota Banjarbaru yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN Pusat) per Januari 2023 yang dapat dilihat pada *aplikasi DJASN* yang terintegrasi dengan *aplikasi SAPK* (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang data nya bersumber pada hasil inputan yang dilaksanakan BKPP Kota Banjarbaru melalui Aplikasi SAPK dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.151
Realisasi IP ASN per Dimensi

No	Komponen Yang Di Nilai	BOBOT	Nilai Tahun 2021
1	Dimensi Kualifikasi	25	13,67
2	Dimensi Kompetensi	40	11,94
3	Dimensi Kinerja	30	24,11
4	Dimensi Disiplin	5	4,96
	Nilai Hasil Evaluasi	100	54,68
	Indeks Profesionalitas ASN		Sangat Rendah

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian sementara dapat dilihat bahwa nilai/Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pemerintah Kota Banjarbaru ada pada Kategori ***Sangat Rendah dengan nilai 54,68***. Pemerintah Kota Banjarbaru masih dapat meningkatkan realisasi nilai / indeks tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu akhir bulan maret tahun 2023, penilaian atas IP ASN secara final akan dilaksanakan pada bulan April 2023 dan nilai sesungguhnya akan di dapatkan.

Adapun program penunjang yang mendukung dalam pencapaian IKU Indeks Profesional ASN, antara lain:

- Program Kepegawaian Daerah;
- Program Pengembangan SDM;
- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota.



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.152

perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IP ASN 2 Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Target/ Realisasi/ Capaian	Target/ Realisasi/ Capaian	Target/ Realisasi/ Capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN	71,67 38,59 53,8	72 39,23 54,49%	73 54,68 74,90%

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan dalam realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN, dimana pada tahun 2021 target 72 realisasi 39,23 dengan capaian sebesar 54,49%, sedangkan tahun 2022 dengan target 73 realisasi adanya 54,68 dengan capaian sebesar 74,90%. Dapat diihat terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 20,41.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Tabel 2.153

Perbandingan Realisasi Kinerja IP ASN dengan Kab/Kota/Provinsi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar	Kota Bjm	Kab. Tanah Laut	Provinsi Kalsel
1	Indeks Profesionalitas ASN	54,68	38,37	30,21	56,80	30,54

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

Tabel 2.154

Realisasi Kinerja IP ASN dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kota Banjarbaru	RPJMD Tahun 2026
1	Indeks Profesionalitas ASN	54,68 (Nilai Sementara)	77

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

Dengan melihat hasil penilaian sementara Indeks Profesionalitas ASN sebesar 54,68 belum dapat mencapai target yang diinginkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 RPJMD sebesar 77. Sedangkan untuk **target nasional tidak ada.**



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya Yang Telah Dilaksanakan

- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru pada tahun 2022 telah melaksanakan update data pegawai secara keseluruhan pada *aplikasi SAPK*, terkait Pengembangan Kompetensi, Capaian Kinerja.
- Membuat surat edaran berupa pemberitahuan bagi SKPD yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis/Fungsional/Bimtek/Workshop) agar membuat sertifikat tanda mengikuti dan diserahkan kepada BKPP.
- Membuat surat edaran terkait penyusunan penilaian Dokumen Prestasi Kerja.
- Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi yang berisi tentang daftar diklat yang diperlukan SKPD.

Hambatan

- BKPP Kota Banjarbaru masih belum dapat merealisasikan setiap PNS harus mengikuti pengembangan kompetensi/Diklat 20 JPL setiap tahunnya, dikarenakan keterbatasan anggaran.
- Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan tidak satu pintu di BKPP, masih terdapat beberapa SKPD yang menyelenggarakan pengembangan kompetensi/Diklat sendiri tetapi tidak melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BKPP.
- Kualitas SDM masih rendah, menurut data PNS berdasarkan kualitas Pendidikan secara terperinci sebagai berikut:

SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3
6	14	335	23	42	640	77	2129	402	4

Dari data tersebut masih banyak PNS Kota Banjarbaru yang belum sarjana (S1), berdasarkan rumus perhitungan Indeks Profesionalisme ASN makin tinggi tingkat pendidikan akan mempengaruhi capaian Indeks Profesionalisme ASN.

- Partisipan atau jumlah pegawai yang aktif memberikan data terkait Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) masih sangat sedikit, dikarenakan masih banyak PNS yang tidak mengetahui serta memahami tentang IP ASN.
- Terbatasnya admin pengukuran Indeks Profesionalitas (IP ASN) untuk



melakukan update data secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

- c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman PNS dalam melaksanakan penyusunan Dokumen Penilaian Kinerja masing-masing.
- d. Masih terdapat PNS yang mendapatkan hukuman disiplin.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Merencanakan setiap PNS dapat mengikuti pengembangan kompetensi/Diklat 20 JPL selama setahun dengan dukungan anggaran yang sesuai.
- b. Melaksanakan Update data secara menyeluruh salah satu nya dengan cara jemput bola secara langsung ke SKPD - SKPD terkait pemenuhan data dukung Indeks Profesionalitas ASN pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Memberikan peluang dan informasi bagi ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional
 - 3) Percepatan Pemrosesan pemberian rekomendasi Ijin belajar bagi ASN sesuai persyaratanyang berlaku
- d. Melaksanakan Sosialisasi tentang penyusunan Dokumen Sasaran dan Penilaian Kinerja dengandatang langsung ke SKPD.
- e. Melaksanakan pembinaan disiplin secara berkala dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke SKPD agar dapat meminimalisir pelanggaran - pelanggaran disiplin.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar (77) yang didapat dari hasil tingkat capaian kinerja IKU IP ASN sebesar 74,90% dikurangi tingkat capaian serapan anggaran sebesar 82,67% sebagai berikut:

Tabel 2.155
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Indeks Profesionalitas ASN	82,67%	74,90%	(7,77)

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru



B. REALISASI ANGGARAN

Indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 tentu saja tidak lepas dari dukungan anggaran dari APBD Kota Banjarbaru yang termuat dalam 2 Program yaitu Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 6.455.869.500,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.980.995.419,- tingkat capaian sebesar 77,15%. Program selanjutnya adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.002.211.000,- realisasi sebesar Rp. 2.838.054.194,- dan tingkat capaian sebesar 94,53%, jika digabungkan untuk tingkat capaian dari serapan anggaran 2 (dua) Program tersebut adalah 83%.

Tabel 2.156
Realisasi Anggaran Program Pendukung IKU IP ASN
Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
	9.458.080.500	7.819.049.613	1.639.030.887	82,67
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.455.869.500	4.980.995.419	1.474.874.081	77,15
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.704.078.250	1.447.273.250	256.805.000	84,93
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	87.744.250	87.744.250	-	100
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	508.870.000	459.495.000	49.375.000	90,30
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	732.820.500	539.630.500	193.190.000	73,64
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	122.253.500	122.253.500	-	100,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	252.390.000	238.150.000	14.240.000	94,36
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	1.019.562.750	995.904.250	23.658.500	97,68
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	151.200.000	150.200.000	1.000.000	99,34
Pengelolaan Promosi ASN	868.362.750	845.704.250	22.658.500	97,39
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1.670.270.000	740.378.000	929.892.000	44,33
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	60.600.000	53.200.000	7.400.000	87,79
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	44.700.000	44.215.000	485.000	98,91
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.360.070.000	468.150.000	891.920.000	34,42
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan	204.900.000	174.813.000	30.087.000	85,32



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
Fungsional ASN				
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.061.958.500	1.797.439.919	264.518.581	87,17
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	344.164.000	308.372.000	35.792.000	89,60
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1.506.014.500	1.278.237.919	227.776.581	84,88
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	12.880.000	12.880.000	-	100,00
Pembinaan Disiplin ASN	90.480.000	90.480.000	-	100,00
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	60.000.000	59.800.000	200.000	99,67
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	48.420.000	47.670.000	750.000	98,45
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.002.211.000	2.838.054.194	164.156.806	94,53
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.251.749.000	1.132.592.194	119.156.806	90,48
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.251.749.000	1.132.592.194	119.156.806	90,48
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.750.462.000	1.705.462.000	45.000.000	97,43
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.750.462.000	1.705.462.000	45.000.000	97,43

Sumber: Data BKPP Kota Banjarbaru

MISI	3	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah
SASARAN STRATEGIS	13	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR KINERJA	22	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan



Meningkatnya kualitas pelayanan publik menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat dimana hasilnya nanti sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan mutu pelayanan serta pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan

Indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja indikator dihitung berdasarkan nilai indeks komposit kepuasan masyarakat yang didapat melalui survei kepuasan masyarakat.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 90,00 kategori baik dan telah terealisasi sebesar 100,00 kategori baik. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerjanya sebesar 94,64%.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan pelayanan publik terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk mendapatkan masukan atau persepsi terhadap pelayanan yang diberikan maka perlu survei langsung berkenaan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pendapat masyarakat ketika atau setelah memperoleh pelayanan dari unit penyelenggara pelayanan publik. Persepsi ini dapat menginterpretasikan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh *stakeholder* pengguna layanan dalam pemenuhan kebutuhan informasi mereka. Harapannya adalah agar seluruh unit penyelenggara pelayanan dapat lebih maju dalam melayani dan lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat digunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan adalah:

Tabel 2.157

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Banjarbaru

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi 2 tahun sebelumnya dimana realisasi tahun 2019 berada pada indeks 84,47 dan ditahun 2020 realisasi indeks tersebut naik sedikit menjadi 85,18 Selanjutnya di tahun 2021 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah dan indeks kepatuhan mengalami kenaikan signifikan yaitu berada pada indeks 100.

3. Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indeks Kepatuhan Pemerintah Kota Banjarbaru dibandingkan dengan realisasi IKM Kota Banjarbaru sebesar 100% dan target RPJMD sebesar 76,61 dengan capaian 130,53%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Memberikan konsultasi terkait pelaksanaan pelayanan publik.



SASARAN STRATEGIS	14 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
INDIKATOR KINERJA	23 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Meningkatnya kualitas layanan informasi publik dengan teknologi informasi dan komunikasi menggambarkan penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, guna mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi dan menjadi alternatif solusi sebagai upaya pembenahan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2022, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan



kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Program Diskominfo Kota Banjarbaru yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:

- a. Program Aplikasi Informatika;
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator kinerja indeks SPBE adalah:

Tabel 2.159
Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian/ Kategori
1.	Indeks SPBE	Indeks	2,63	2,26	85,93%

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan pencapaian indikator Indeks SPBE dari target indeks SPBE sebesar 2,63 dan telah terealisasi yaitu sebesar 2,26 dengan predikat Cukup, sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah 80,53%.

Pengukuran capaian kinerja indikator Indeks SPBE diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan SPBE Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.160
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan SPBE Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Tingkat Kematangan
1	Domain Kebijakan Internal SPBE - Kebijakan Internal terkait - Tata Kelola SPBE	2,6
2	Domain Tata Kelola SPBE - Perencanaan Strategis SPBE	1,9



	- Teknologi Informasi dan Komunikasi - Penyelenggaraan SPBE	
3	Domain Manajemen SPBE - Penerapan Manajemen SPBE - Audit TIK	1,0
4	Domain Layanan SPBE - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik - Layanan Publik Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,82
	Indek SPBE	2,26
	Predikat SPBE	(Cukup)

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 2.161
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks SPBE
2 Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
1.	Indek SPBE	2,62 104,8%	2,11 80,53%	2,26

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru, 2022

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Tabel 2.162
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE dengan Kab/Kota/Provinsi

No	Indikator Sasaran	Kota Banjarbaru	Kabupaten Banjar	Kabupaten Tanah Laut	Kota Banjarmasin
1.	Indek SPBE	2,26	2,56	3.11	3.31

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 2.163
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE
dengan Target RPJMD dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Pemko Banjarbaru Tahun 2022	Target RPJMD Tahun 2022	Target Nasional
1.	Indeks SPBE	2,26 (Cukup)	2,63 (Baik)	2,6 (Baik)

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru, 2022



Indeks SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022 adalah 2,26 dengan predikat Cukup dan target RPJMD yang berakhir tahun 2022 adalah 2,63, kondisi ini memperlihatkan bahwa realisasi kinerja tahun ini belum mencapai target RPJMD.

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

Pemerintah Kota Banjarbaru terus berkomitmen untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan berkenaan tata kelola, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Keberhasilan penyelenggaraan itu dapat dilihat dari evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian PAN dan RB RI. Hal yang mendorong keberhasilan capaian kinerja adalah:

1. Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah mengatur referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE yang terdiri dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE. Isi dari kebijakan ini disesuaikan dan berpedoman kepada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti SIPD, SPSE, Simpeg, SIMAYA, aplikasi banjarbaru bagawi.
3. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan publik berbasis elektronik seperti LAPOR, PPID, JDIH, aplikasi satu pintu INTAN BJB, aplikasi RSD Idaman, aplikasi Dukcapil Banjarbaru.



Hambatan

Kegagalan penyelenggaraan itu dapat dilihat dari evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian PAN dan RB RI adalah:

1. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE masih belum dapat dipenuhi dengan baik dikarenakan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE masih dalam proses penyusunan pada saat pelaksanaan evaluasi mandiri.
2. Pelaksana penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sebatas pada surat keputusan tentang pembentukan tim koordinasi SPBE dan pembentukan tim asesor internal SPBE
3. Penerapan manajemen SPBE belum dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Belum dilaksanakannya Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE.
5. Pedoman Manajemen SPBE pemerintah Kota Banjarbaru belum dibuat dan ditetapkan sehingga manajemen SPBE belum dilaksanakan sesuai dengan delapan manajemen yang terdapat pada peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya, sebagai berikut:

- a. Memproses penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
- b. Melakukan peningkatan dalam Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Pada penerapan manajemen SPBE akan dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan secara maksimal;
- d. Melaksanakan Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE;
- e. Memproses dan menetapkan penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.
- f.



6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 2.164
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator Sasaran Program	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Aplikasi Informatika	Nilai Aspek SPBE	147,62	89,65	57,97
Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah	113,98	96,92	17,06
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	123,82	98,79	25,03
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah	177,33	98,80	78,53

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, akses dan kualitas layanan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2022 sebesar Rp. 6.999.260.100 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 6.543.042.115 atau 93,48% dengan rincian perprogram sebagai berikut:

Tabel 2.165
Realisasi Anggaran Program Penunjang Indeks SPBE Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.049.086.000	2.955.282.164	96,92
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.442.077.300	3.048.784.151	89,65
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	308.593.300	304.862.300	98,79
4	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	199.503.500	197.113.500	98,80
Jumlah		6.999.260.100	6.543.042.115	93,48

Sumber: Data Diskominfo Kota Banjarbaru





BAB III

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Banjarbaru tidak memberikan Tugas Pembantuan dan tidak menerima dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat ataupun dari Pemerintah Daerah Provinsi.





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah, adapun untuk jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Kab/kota yaitu :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar; dan
3. Pendidikan kesetaraan;

2. Target

Tabel 4.1.1 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan Rp.
			%	Tahun	
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	2022	43.557.284.209,00
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2022	3.189.403.500,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2022	6.767.377.000,00



3. Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 4.1.2 Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Kota. %	Capaian SPM 2022 %
I.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100	91.45%
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	93,22%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	77,28%

Keterangan :

Capaian Pendidikan Dasar

1. Jumlah siswa SD usia 7-12 Tahun = 23.941 Orang
2. Jumlah siswa MI usia 7-12 Tahun = 3.585 Orang
3. Jumlah siswa SMP usia 13-15 Tahun = 6.618 Orang
4. Jumlah siswa MTs usia 13-15 Tahun = 3.888 Orang
5. Jumlah keseluruhan siswa (SD/MI dan SMP/MTs) 7-15 Tahun = **38.032** Orang
6. Jumlah penduduk usia 7-15 Tahun = **41.590** Jiwa
7. Perhitungan ($38.032 : 41.590 \times 100\%$) = **91,45%**

Capaian Pendidikan Kesetaraan

1. Jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan usia 7-18 = **1.541** Orang
2. Jumlah negara usia 7 – 18 adalah 50.260 orang dikurangi warga belajar yang bersekolah di jenjang SD/MI (27.526 orang), SMP/MTs (10.506 orang) dan SMA/SMK (10.575 orang) adalah **1.653** orang.
Perhitungan ($1.541 : 1.653 \times 100\%$) = **93,22%**

Capaian Pendidikan Anak Usia Dini

1. Jumlah siswa PAUD usia 5-6 tahun = 6.131 orang



2. Jumlah siswa RA = 904 Orang
3. Jumlah siswa PAUD dan RA = **7.035** Orang
4. Jumlah penduduk usia 5-6 tahun = 9.103 Jiwa
5. Perhitungan ($7.035 : 9.103 \times 100\%$) = **77,28%**

4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.1.3 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5
1.01	PENDIDIKAN			
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	73.043.167.959,00	60.555.413.815,00	82,90%

5. Dukungan Personil

Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan, terdiri dari :

a. Status Kepegawaian

-	Pegawai negeri sipil (PNS)	:	92	orang
-	Tenaga kontrak dan PTT	:	44	Orang

b. Latar belakang pendidikan PNS

-	Doktor (S3)	:	1	Orang
-	Magister (S2)	:	18	orang
-	Sarjana (S1)	:	57	orang
-	Sarjana muda/Diploma III (D3)	:	5	orang
-	Sarjana muda/Diploma II (D2)	:	1	orang
-	Sarjana muda/Diploma I (D1)	:	-	orang
-	SLTA	:	10	orang

c. Pangkat dan golongan

-	Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:	13	orang



-	Pembina (IV/a)	:	13	orang
-	Penata Tingkat I (III/d)	:	24	orang
-	Penata Tingkat I (III/c)	:	12	orang
-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	7	orang
-	Penata Muda (III/a)	:	7	orang
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	7	orang
-	Pengatur (II/c)	:	2	orang
-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	5	orang
-	Pengatur Muda (II/a)	:	0	orang
-	Non Golongan	:	44	orang

d. Pejabat struktural dan fungsional				
-	Struktural (Eselon II, III dan IV)	:	18	orang
-	Fungsional Pengawas	:	33	orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Banyaknya data suspect Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peserta Didik Miskin (PDM) yang harus diverifikasi.
2. Banyaknya tahapan-tahapan dilalui yang memerlukan waktu yang lama serta tenaga yang memadai untuk melaksanakannya.

Solusi

Dari keseluruhan permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), solusi yang didapat agar tercapai secara maksimal, adalah sebagai berikut :

- ✓ Koordinasi dengan instansi terkait (Kemenag, Dinas Pengendalian Penduduk, dan Dinas Sosial serta Bappeda)

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dinas Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam indikator Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Rencana Strategis dan Indikator RPJM- Daerah Kota Banjarbaru.



Sedangkan untuk melihat capaian indikator kinerja adalah dengan melihat perbandingan antara rencana, realisasi, capaian indikator kinerja dan nilai capaian indikator kinerja.

Persentase pencapaian target SPM bidang kesehatan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 100%
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100%
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%
4. Pelayanan kesehatan balita 100%
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100%
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100%
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100%
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat 100%
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 100%
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) 100%

2. Realisasi

Adapun hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 kami sampaikan dalam matrik berikut :

Tabel 4.2.1 Indikator SPM Kota Banjarbaru Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET		REALISASI	
		ABSOLUT	%	ABSOLUT	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5.122	100 %	4.922	96,10%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	4.889	100 %	4.616	94,42%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4.656	100 %	4.540	97,51%
4	Pelayanan kesehatan Balita	23.392	100 %	16.541	70,71%



5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	42.950	100 %	19.540	45,49%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	184.693	100 %	56.926	30,82%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	24.671	100 %	8.468	34,32%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	68.794	100 %	14.822	21,55%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	4.784	100 %	4.434	92,68%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	395	100 %	412.	104,30%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	5.712	100 %	2.276	39,85%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.392	100 %	7.081	110,78%

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan yang mendukung dan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Sub Kegiatan	Pagu Dinkes (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Kab/ Kota	1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	432.178.750
		2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	102.479.250



	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	66.605.250
	4	Pelayanan kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita	288.847.750
	5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	276.273.750
	6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	117.522.000
	7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	163.733.250
	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.054.000
	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.329.000
	10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	22.850.000
	11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	119.180.000
	12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	111.550.000

			Virus)		
	TOTAL				1.740.603.000

3. Dukungan Personil

Personil/ sumber daya manusia kesehatan yang dapat mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1.	Keperawatan	:	117	Orang
2.	Kesehatan Masyarakat	:	62	Orang
3.	Gizi	:	33	Orang
4.	Teknik Biomedika	:	37	Orang
5.	Medis	:	58	Orang
6.	Kebidanan	:	151	Orang
7.	Kefarmasian	:	45	Orang
8.	Kesehatan Lingkungan	:	35	Orang
9.	Keteknisian Medis	:	50	Orang
10.	Keteknisian Medis (Asisten tenaga kesehatan)	:	1	Orang
11.	Gizi (Asisten tenaga kesehatan)	:	1	Orang
12.	Kefarmasian (Asisten tenaga kesehatan)	:	3	Orang
13.	Tenaga Penunjang (Dukungan Manajemen)	:	195	Orang
14.	Tenaga Penunjang (Struktural)	:	7	Orang

4. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan secara spesifik menurut indikator SPM bidang kesehatan nya adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2.3.
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Di Kota Banjarbaru Tahun 2022

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Permasalahan Penerapan SPM	Solusi Penerapan SPM
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian ibu hamil melakukan pemeriksaan pada triwulan akhir di luar wilayah Kota Banjarbaru sehingga pencatatan dan pelaporan ibu hamil tidak tercover. - Beberapa pencatatan pelaporan pelayanan ibu hamil di praktik swasta tidak tercover saat pemeriksaan kehamilan terakhir ibu hamilnya melahirkan di luar wilayah dan periksa ke dokter spesialis kandungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada pelayanan dalam ANC bagi ibu hamil yang belum saatnya dilaporkan sebagai kunjungan K4. - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam antenatal Care (ANC) - Meningkatkan pencatatan dan pelaporan dengan jejaringnya.
		2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian ibu hamil melakukan persalinan di luar wilayah Kota Banjarbaru sehingga pencatatan dan pelaporan ibu bersalin tidak tercover. - Beberapa pencatatan pelaporan pelayanan ibu bersalin di praktik swasta ada yang belum melaporkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam Postnatal Care (PNC). - Pencatatan dan pelaporan lebih ditingkatkan lagi - Menekankan agar Puskesmas dalam pemantauan untuk memastikan

					semua fasilitas kesehatan swasta/ pemerintah dan PMB/ dokter praktik swasta untuk melaporkan hasil pelayanan KIA ke Puskesmas wilayahnya.
		3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> - Pencacatan dan pelaporan pelayanan bayi baru lahir pada persalinan di luar wilayah Kota Banjarbaru tidak tercover. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelusuran data layanan dengan mempunyai kontak bagi ibu hamil, bayi baru lahir untuk memastikan sudah mendapat pelayanan dan dimasukkan dalam pencacatan dan pelaporan - Optimalkan sistem rujukan - Kunjungan neonatal sesuai standar dapat dilakukan dengan kunjungan rumah.
		4	Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi kunjungan ibu membawa balita ke fasyankes. Pada saat setelah - drop out imunisasi dasar pada umumnya tidak membawa lagi untuk ditimbang. Balita yang datang - ke dokter praktik swasta tidak terekap dalam pencatatannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan kunjungan rumah atau media daring Operasi Timbang dilaksanakan setiap bulan Februari dan Agustus. Pelayanan - kesehatan optimalkan di PAUD/TK/RA.

		5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakannya hanya terbatas kegiatan skrining penjangkauan pada kelas 1, 7 dan 10. - Kegiatan pemeriksaan berkala belum terjadwalkan. - Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan antar lintas program. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dalam skrining kesehatan anak sekolah maksimalkan dengan lintas program. - Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala akan dijadwalkan.
		6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang tersedia tidak memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan anggaran.
		7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas program belum optimal. - Kurangnya kesadaran lansia dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan - Tidak adanya dukungan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Kerjasama dengan Tim Homecare Puskesmas dan kader posyandu lansia sehingga jika ada keluhan dari lansia cepat diberi layanan. - Integrasi dengan Posbindu PTM dan Posyandu lansia di maksimalkan. - Kunjungan rumah tetap dilaksanakan.
		8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang tersedia tidak memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan anggaran.
		9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran yang tersedia tidak memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan anggaran.

		10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran tersedia yang tidak memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan anggaran.
		11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<ul style="list-style-type: none"> - Investigasi kontak belum maksimal di laksanakan. - Peran kader TB di masyarakat belum sesuai harapan. - Pengelola TB rangkap tugas. - Terbatasnya anggaran TB untuk penerapan kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimalkan kegiatan Investigasi Kontak (IK) - Pembinaan kader atau pemberdayaan - Pengelola TB tidak rangkap tugas Penambahan - anggaran TB 100%
		12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	<ul style="list-style-type: none"> - Populasi kunci sulit di akses dan sulit diajak rutin berobat terutama WPS, Penasun, Kelompok LSV & Waria Pengobatan ARV untuk para pengidap HIV hanya orang-orangnya saja yang mau, banyak kesulitan membuat mereka rutin pengobatan ARV - Terbatasnya anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan untuk populasi kunci Perlu adanya pendampingan kursus untuk mereka yang melakukan pengobatan ARV - Penambahan anggaran untuk pelaksanaan HIV menuju 3 zero.

4.3 BIDANG URUSAN PUPR

1. JENIS PELAYANAN DASAR

Pada Tahun 2019, mengalami perubahan regulasi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan



Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan dasar untuk Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada tabelberikut ini :

Tabel. 4.3 1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional Tahun 2022
I.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

2. Target dan Realisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 ada dua Indikator dari target Nasional, yaitu :

Tabel. 4.3.2 Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Indikator		Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2022	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2022	Target Nasional s/d Tahun 2022
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	97,70 %	98,42 %	100,00%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100,00 %	100,00%



3. ALOKASI ANGGARAN

Adapun rencana anggaran untuk tahun 2022 dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 8.460.170.000** ,-. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.3.3 Alokasi Rencana Anggaran
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Indikator	Program	Perhitungan Rencana Biaya Tahun 2022
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.394.892.000,-
2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.065.278.000,-

4. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai Tahun 2022 sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 6 Orang
 Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak : 1 Orang

Dengan Posisi / Jabatan sebagai berikut

Kepala Dinas (ess. II b) : 1 Orang
 Sekretaris (ess. III a) : 1 Orang
 Kepala Bidang (ess. III b) : 1 Orang
 Kasubag/Kasi (ess. IV a) : 1 Orang
 Staf PNS/PTT/Tenaga Kontrak : 3 Orang

5. PERMASALAHAN SOLUSI

SPM Bidang Air Minum belum mencapai target karena dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru hanya 78.66% (50.881 KK) yang memperoleh akses air minum aman, atau dalam hal ini mereka adalah masyarakat yang terlayani oleh



jaringan pipa PDAM. Akses air minum aman (*safely managed*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan amanat *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di luar rumah (*on-premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan data BPS, 19,76% (12.788 KK) dari total jumlah KK yang tersebar di 5 kecamatan dilayani oleh akses air minum berupa akses layak terbatas dan akses layak dasar.

Akses layak terbatas (*limited access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah > atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Sedangkan akses layak dasar adalah (*basic access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah < atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Total capaian SPM Bidang Air Minum sampai dengan semester II Tahun 2022 adalah sebesar 98,42%, yang artinya terdapat 1,58% jumlah KK se Kota Banjarbaru (1.022 KK) yang belum memiliki akses layak. Berdasarkan data BPS, masyarakat ini menggunakan mata air tak terlindung dan air permukaan seperti sungai, kolam, danau/waduk dan irigasi.

Adapun total persentase jumlah KK yang harus terlayani akses air minum aman sampai tahun 2024 adalah sebesar 21,34% dari 5 kecamatan, dengan target prosentase terbesar berada di Kecamatan Cempaka sebesar 48,87%.

Target SPM Bidang Air Minum dengan akses aman 100% dan akses layak 0% merupakan target yang harus dicapai oleh Kota Banjarbaru, berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pencapaian Target SPM yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Ketua Kelompok Kerja



Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Salah satu kendala dalam pencapaian target akses air minum 100% adalah tidak semua masyarakat Kota Banjarbaru bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum. Beberapa penyebabnya antara lain masih kurang tercemarnya air sumur dangkal yang digunakan sebagai air minum, selain itu air tanah cenderung lebih mudah didapatkan melalui sumur gali dan pada saat musim kering, tidak semua sumur gali mengalami kekeringan, sehingga jaringan PDAM hanya dijadikan opsi cadangan dalam memperoleh air minum.

Di beberapa tempat seperti di Kecamatan Cempaka, sebagaimana berdasarkan data sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) banyak terdapat di 4 kelurahan pada Kecamatan dimaksud yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sumur gali sebagai sumber air minum utama dan kegiatan sehari-hari adalah lebih kepada faktor ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya berlangganan PDAM setiap bulannya, ini Padahal air sumur yang digunakan cukup tercemar, dalam hal ini pada musim kering, air cukup keruh dan berbau.

Oleh karenanya, agar akses air minum aman dapat tercapai 100% pada tahun 2024 mendatang, salah satu solusinya adalah melalui pencapaian akses air minum aman baik dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat maupun penyediaan akses air minum aman berupa sumur bor dalam atau sumur dangkal tertutup yang dialirkan dari sumur bor berspesifikasi khusus dan sesuai dengan Permenkes No.49/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Aliran air sumur-sumur ini diharapkan dapat kurang dari 30 menit sampai ke Sambungan Rumah (SR) warga pemanfaat, sehingga *eligibility* akses air minum aman dapat tercapai di lokasi tersebut.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sesuai yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:



- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

Tabel 4.4.1 realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

Untuk pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota dan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota telah dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan bidang perumahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:



Tabel 4.4.2 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp.)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	211.830.000,-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM perumahan rakyat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yaitu:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) : 8 Orang
- b. Tenaga Kontrak : 1 Orang
- c. Pekerja Harian Lepas : 4 Orang
- d. Pengawas Bangunan : 5 Orang

5. Permasalahan dan Solusi

Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kota yang tertangani pada tahun 2022 sebesar 100% walaupun kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota tidak terealisasi di karenakan hingga triwulan IV tidak ada bencana yang memerlukan relokasi rumah, namun tetap tidak bisa prediksi, Presentase rumah korban bencana atau relokasi kota yang ditangani berdasarkan target ada 10 rumah pada anggaran murni Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2022.



Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilaksanakan sesuai SK Wali Kota Banjarbaru, pada kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota merupakan kegiatan SPM dan wajib di anggarkan menurut Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 sehingga akan dibuatkan surat pernyataan tidak terjadi bencana.

4.5 BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan untuk urusan kesejahteraan sosial, adalah sebagai berikut :

Tabel . 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti



5	Perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
---	---	---

2. Realisasi

Ada 15 indikator pencapaian mutu pelayanan dasar bidang sosial yang harus dipenuhi yaitu :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti
3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru
4. Penyediaan permakanan
5. Penyediaan sandang
6. Penyediaan alat bantu
7. Penyediaan perbekalan kesehatan
8. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual
9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak
11. Akses layanan pendidikan
12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
14. Layanan rujukan
15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal terealisasi yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai berikut :



Tabel . 4.5.2 Jenis Pelayanan Dasar SPM oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	89,33%	terrealisasi 10 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran.
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	92,%	terrealisasi 9 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran.
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	90,67%	terrealisasi 8 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran.
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	92%	terrealisasi 10 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran.
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	92%	terrealisasi 3 indikator pencapaian mutu pelayanan saja karena terbatasnya anggaran.

3. Alokasi Anggaran

Anggaran yang digunakan dalam Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bersumber dari dana APBD Kota Banjarbaru dan APBN dengan besaran sebagai berikut :

Tabel 4.5.3 Alokasi Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2022

No	SPM	Anggaran (Rp.)			
		APBD	APBD Prov.	APBN	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	948.664.750	-	-	-
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar diluar panti	62.075.000	-	-	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti	-	-	-	-
4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	42.233.000	-	-	-
5	Perlindungan Sosial dan Jaminan sosial pada tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	509.813.000	-	-	-
	Jumlah	1.562.785.750	-	-	-

4. Dukungan Personil

Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak : 21 orang
- b. Tenaga Kontrak sebanyak : 29 orang
- c. Tenaga PTT sebanyak : 1 orang



5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Belum adanya Penentuan target penyandang disabilitas, lansia setiap tahunnya
3. Belum tersedianya Baffer Stock Kota Banjarbaru
4. Kurangnya sarana dan prasarana operasional lapangan
5. Kurangnya Pelatihan bagi anggota Tagana
6. Terbatasnya Anggaran

b. Solusi

1. Mengusulkan SDM Profesional yang bisa menangani Disabilitas Intelektual di Dinas Sosial Kota Banjarbaru melalui pengadaan CPNS.
2. Mengusulkan Diklat, workshop, bimbingan teknis bagi petugas yang menangani Disabilitas dan Lansia.
3. Mengusulkan Dana untuk kegiatan Penanganan Pelayanan Disabilitas Intelektual, dalam bentuk Dana Pelatihan, Alat Peraga dan Alat Bantu lainnya.
4. Melakukan koordinasi/konsultasi ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan penentuan target SPM
5. Perlu adanya penambahan Buffer Stock seperti Perbekalan makanan untuk dapur umum lapangan (Dapur Umum TAGANA)
6. Peningkatan pelatihan bagi anggota Tagana dalam penanganan kebencanaan.
7. Penambahan Anggaran Program yang menyangkut Urusan Wajib (SPM) Bidang Sosial

4.6 BIDANG URUSAN TRANTIBUM LINMAS

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Banjarbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut :



- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
- b. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- c. Pelayanan informasi rawan bencana;
- d. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

2. Target

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kota Banjarbaru dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.1 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %
3.	Jenis pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan terhadap bencana	100 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

3. Realisasi

Realisasi Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang di realisasikan oleh Pemerintahan Kota Banjarbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan badan penanggulangan bencana daerah, adalah sebagai berikut :



Tabel 4.6.2 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	100 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %
3.	Jenis pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100%
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan terhadap bencana	100 %	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100%

4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang digunakan dalam Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan ketentraman ketertiban umum dan linmas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.3 Alokasi anggaran pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 2.622.131.000
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Rp. 489.085.500,-
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Rp.2.574.932.822,-
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp.1.261.901.144,-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rp. 3.453.954.500,-



5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.4 Personil pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibum Linmas

Perangkat daerah	Jumlah personel	
Satuan Polisi Pamong Praja	PNS	28 orang
	Tenaga Kontrak	49 orang
Badan Penanggulangan Bencana daerah	PNS	16 orang
	Tenaga Kontrak	42 Orang

6. Permasalahan dan Solusi

1. SATPOL PP

Permasalahan :

- minimnya informasi pementeknis.
- perencanaan SPM dengan indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara hanya bisa dilakukan secara estimasi atau prediktif, yang tidak familier dengan pelaksanaan tugas pemeliharaan tibum dan penegakan perda.
- Kendala pada tingkat koordinasi dengan PD yang membidangi SPM adalah belum ada arahan untuk mengintegrasikan SPM kedalam Renstra dan Renja mengingat pengintergrasian harus dilakukan secara menyeluruh pada tingkat pemda.
- Pada bagian pendanaan penerapan SPM dengan indicator Jumlah warga.

Solusi :

- sub bag perencana Satpol PP akan lebih aktif meng update peraturan yang mengatur tentang SPM.
- perencanaan dilakukan secara estimasi.
- Membuat konsep perencanaan renstra dan renja dan yang terintegrasi dengan SPM untuk disampaikan kepada PD terkait pada rapat-rapat pembahasan SPM.
- Membuat konsep penganggaran (RKA) yang terintegrasi dengan SPM.

2. BPBD

Permasalahan

- Masih kurangnya digitalisasi dalam penyebaran informasi rawan bencana.



2. Kualitas SDM yang kurang memenuhi karna tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanggulangan bencana.
4. Belum adanya rambu-rambu informasi rawan bencana di wilayah rawan bencana.
5. Masih Kurangnya edukasi informasi digital mengenai bencana terhadap masyarakat.
6. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di wilayah rawan bencana.
7. Belum adanya prasarana sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.
8. Kurangnya sarana K3 dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
9. Belum meratanya bimbingan teknis kepada sumber daya manusia di BPBD dalam menghadapi bencana.
10. Kapasitas ukuran gudang logistik dan gudang peralatan masih kurang
11. Masih kurangnya sarana dan transportasi.

Solusi

1. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digitalisasi (website).
2. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai penanggulangan bencana.
3. Perlu adanya perencanaan pengadaan dan penentuan titik pemasangan rambu di wilayah rawan bencana.
4. Perlu adanya peningkatan informasi bencana melalui website dan media social.
5. Perlu ditingkatkannya edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana.
6. Perlu adanya perencanaan pengadaan dan penentuan titik pemasangan prasarana sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.
7. Perlu adanya perencanaan pengadaan sarana K3 dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
8. Perlu dilaksanakannya bimbingan teknis kepada sumber daya manusia di BPBD dengan agenda yang lebih rutin.
9. Mengganti SDM yang ada disesuaikan dengan kualitas kebutuhan.
10. Perlu tambahan ruang untuk sarana dan prasarana dan lain sebagainya.





BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019, yang memuat mengenai capaian pelaksanaan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan, keberhasilan, dan permasalahan yang dihadapi beserta solusinya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Pemerintah melalui Gubernur sebagaimana diamanatkan undang-undang. Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarbaru yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Adapun keberhasilan-keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru selama Tahun Anggaran 2022 adalah memperoleh beberapa penghargaan yang diterima pada tingkat Nasional maupun pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Banjarbaru adalah bentuk apresiasi dari pihak lain, baik Kementerian ataupun Organisasi Non pemerintah (NGO) level nasional atas kinerja, perubahan dan kemajuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, didukung oleh seluruh jajaran birokrasi bersama berbagai unsur seperti DPRD, Komunitas Masyarakat dan tentu seluruh warga. Berbagai penghargaan yang telah diperoleh antara lain :



1. DIRJEN Pendidikan Islam Kementerian Agama RI - Kategori Pemberi Kebijakan Positif Pendidikan Agama Di Sekolah 2022.
2. BKN Award 2022 - Pemerintah Kota Terbaik Manajemen & Mutasi Kepegawaian 2022.
3. Penghargaan WTP Wajar Tanpa Pengecualian – Dari BPK Provinsi Kal-Sel.
4. Kinerja Terbaik Realisasi Dana Kota 2022.
5. Penghargaan Dari Gubernur Kal-Sel – Perencanaan Tenaga Kerja Banjarbaru 2022.
6. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya – Kementrian RI Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
7. Prestasi Kesetaraan Gender Piala Peringkat Madya 2022.
8. Penghargaan Dari Ombudsman RI– Pelayanan Publik Terbaik Dengan Nilai 84,74 Tahun 2022.
9. Penghargaan Hak Asasi Manusia Dari Kemenkumham RI – Kategori Wali Kota Peduli HAM 2022.
10. Indonesia The Best One Award 2022 – Kategori The Best One Inspiring Leaders – Pemimpin Inspirasi Terbaik Prestasi Mengatasi Pandemi Covid-19.
11. Penghargaan Dari Kemendagri 2022 – Banjarbaru Peringkat Pertama Nasional Realisasi Investasi Dana APBD 2022.
12. RSDI Banjarbaru Akreditasi Bintang Lima – RSDI Memenuhi Standar Fasilitas Kesehatan Dan Pelayanan Tingkat Paripurna 2022.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil proses kerjasama seluruh pihak yang ada di Kota Banjarbaru. Dimana partisipasi semua komponen Pemerintah Daerah baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas yang ada saling bekerjasama, saling pengertian, saling memberi dukungan dan rasa memiliki atas Kota Banjarbaru untuk bersama-sama mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang berkarakter.

hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping



berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Selanjutnya kami mengharapkan program-program yang telah berjalan dengan baik agar dapat dilanjutkan dan ditingkatkan kembali pencapaiannya di tahun yang akan datang, sedangkan beberapa program yang mendapat kendala dalam pelaksanaannya agar bisa dievaluasi dan dicari solusinya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

LPPD Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD tahun berikutnya. Akhirnya Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua.



WALI KOTA BANJARBARU

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH., MH

